

WAJIDI



Nasionalisme *Indonesia*

DI KALIMANTAN SELATAN
1901-1942



GRAHA
CENDEKIA

**NASIONALISME INDONESIA
DI KALIMANTAN SELATAN
1901-1942**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta:

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Gambar Cover Depan:

Leesgezelschap (Taman Bacaan) Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) berdiri 1 Maret 1929. Duduk di tengah M. Ruslan (Ketua PPM) diapit Umar Juned (sebelah kiri) dan Mawardi (sebelah kanan) di depan Rumah Bulat (Rumah Joglo), Marabahan.

Sumber:

Foto dok. Mawardi

WAJIDI

**NASIONALISME INDONESIA
DI KALIMANTAN SELATAN
1901-1942**

Penerbit Graha Cendekia

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wajidi

Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942/
Wajidi. — Cet.3.— Yogyakarta: Graha Cendekia, 2020.
xxix, 224 hlm., 20 cm.
ISBN 978-602-1285-00-8

1. Kalimantan Selatan – Sejarah I. Judul

959.844

**Nasionalisme Indonesia
di Kalimantan Selatan 1901-1942**

Penulis: Wajidi

Hak cipta © 2007, pada penulis dilindungi undang-undang
All rights reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan
penulisan artikel atau karangan ilmiah

Penyunting: Bambang Subiyakto

Desain cover: Kevin Embis

Cetakan I, 2007, Pustaka Banua
Cetakan II, 2013, Graha Cendekia
Cetakan III dengan beberapa revisi, 2020, Graha Cendekia

Penerbit Graha Cendekia
Perumahan Gowasari Gg. Abiyasa 7 No. 187A
Yogyakarta
e-mail: graha.cendekia@yahoo.com

Diterbitkan bekerjasama dengan Dewan Harian Cabang Badan
Penerus Pembudayaan Keuangan 45 (DHC 45) Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

*Kupersembahkan karya ini kepada:
orang tuaku; H. Amberi dan Hj. Nuriah,
isteriku, dan putera-puteriku; Luthfi dan Salma*



SAMBUTAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

MERDEKA !!!



Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah terbitnya buku yang berjudul “Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942”.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Penulis dan semua pihak yang telah membantu dan turut berpartisipasi dalam penerbitannya, sehingga keberadaan buku ini akan menjadi sumber ilmu sejarah yang mendiskripsikan gelora perjuangan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan di bumi Kalimantan Selatan ini.

Keberadaan buku ini tentunya menambah koleksi bahan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi salah satu materi muatan lokal Pendidikan sejarah di Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tentunya kami sangat mendukung dan menyambut baik kepada DHC 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bermaksud menambah dan membagikan buku ini untuk kepentingan pengetahuan dan pendidikan, sehingga materi pada buku ini diharapkan dapat meninspirasi kita semua untuk terus melestarikan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Ke-

juangan Bangsa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan terus membangun untuk kemajuan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing perjalanan langkah dan upaya kita menuju ke arah yang benar, arah yang menjadi pilihan bijak kita semua untuk kemajuan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

TETAP MERDEKA !!!

Bupati Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP



DEWAN HARIAN CABANG
BADAN PENERUS PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Sekretariat : Jl. Jend. A. Yani No.03 RT.18 LK.IX Kandangan Kode Pos 71211

SAMBUTAN KETUA UMUM DHC 45
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Assalamu'alaikum Wr. Wb
MERDEKA !!!

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah terbitnya buku berjudul “Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901 - 1942”.

Suatu kebanggaan luar biasa dari kami, karena dengan adanya buku ini tentunya akan menambah referensi sebagai bahan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi materi muatan lokal di Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Buku ini memuat kisah nyata sejarah pergerakan perjuangan semangat luar biasa oleh para pahlawan di tanah Kalimantan Selatan dalam merebut kemerdekaan.

Tentunya peran serta penambahan dan penyebaran buku ini, oleh DHC 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sasaran baik pada generasi penerus dan lembaga-lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menginvestasikan pewarisan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan Bangsa, sehingga dapat menanamkan rasa Nasionalisme, Patriotisme dan Tanggungjawab yang tinggi guna menjaga dan mengisi Kemerdekaan melalui pembangunan bangsa Indonesia di segala bidang.

Tidak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan atas arahan, bimbingan serta dukungan yang diberikan sehingga dapat terialisasinya program DHC 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, salah satunya untuk penyebaran buku sejarah perjuangan Kalimantan Selatan ini.

Semoga Allah SWT meridhoi langkah dan upaya kita, serta senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan inayyah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

TETAP MERDEKA !!!



Ketua Umum,

Syamsuri Arsyad, S.AP, MA

Pengantar Penulis

Buku ini merupakan hasil dari sebuah kajian tentang peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia di Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari “*fenomena historis*” yang terjadi di sebagian besar kepulauan Nusantara pada dasawarsa pertama abad ke-20, di saat mana terjadi kebangkitan nasionalisme sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah sekarang) merupakan bagian dari konstelasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu. Di daerah ini berkembang berbagai organisasi yang berlingkup lokal, regional, maupun nasional. Atau dari yang semula bersifat kedaerahan dan bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan, terus berkembang ke arah kebangsaan melalui pergerakan politik praktis dengan tujuan meraih kemerdekaan.

Perasaan kebangsaan yang sebenarnya lahir dari kondisi masyarakat itu sendiri sebagai dampak dari penjajahan, semakin menguat ketika masuknya pengaruh pergerakan kebangsaan yang tumbuh di Jawa dan menyebar luas hingga sampai ke daerah ini.

Penyemaian benih semangat nasionalisme dan patriotisme untuk meraih kemerdekaan yang dilakukan melalui jalur pendidikan dan organisasi pergerakan terus mengkristal dan kemudian menjadi modal utama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Seyogyanya, semangat itu diaplikasikan pada masa sekarang ini sebagai modal dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan.

Penulisan buku ini dimulai sejak tahun 2003, ketika saya terlibat dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah Banjar yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Lembaga Budaya Banjar Kalimantan Selatan (LBB-KS), khususnya sebagai anggota tim

yang ditunjuk untuk melaksanakan penelitian dan penulisan Zaman Perintis Kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, buku ini merupakan refleksi dari naskah yang telah saya susun sebelumnya dengan fokus kajian pada Organisasi-organisasi Pergerakan Kebangsaan di Kalimantan Selatan pada rentang waktu 1901 sampai dengan 1942.

Sebagai sebuah hasil penelitian sejarah (metode sejarah), maka berbagai sumber digunakan dalam menyusun buku ini diantaranya dengan penambahan beberapa sumber primer, seperti manuskrip (arsip), memoar, foto-foto, atau sumber sejarah lainnya.

Pada mulanya judul buku ini adalah "*Organisasi Organisasi Pergerakan Kebangsaan di Kalimantan Selatan 1901-1942*", dan judul itu tetap dipertahankan menjelang penyelesaian konsep akhir. Akan tetapi, ketika dilakukan telaahan terhadap naskah yang telah diselesaikan, saya merasa perlu mengganti judulnya menjadi "*Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*" dengan pertimbangan bahwa kata kunci utama yang menjadi bahan studi adalah nasionalisme, yakni Nasionalisme Indonesia dengan segala manifestasinya di berbagai aktivitas pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan yang terjadi pada kurun waktu 1901-1942.

Penyusunan buku ini sebenarnya dilandasi oleh keinginan untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi daerah Kalimantan Selatan, khususnya untuk kalangan guru dan siswa di sekolah atau pembaca pada umumnya, namun keinginan itu ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Minimnya dana yang saya miliki dan tiadanya bantuan keuangan untuk penyelidikan lebih lanjut, memang menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya.

Meski demikian, berbagai bantuan, minimal berupa informasi maupun bahan-bahan yang diperlukan telah saya terima dalam proses penyelesaian buku ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah kalau saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, meski dalam pengantar ini tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memberikan kata sambutan atau dukungan pada penyelesaian buku ini.

Saya merasa berhutang budi dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada putera alm. H. Achmad Darmawie (pejuang Perintis Kemerdekaan) yakni Bapak Darwis, Mujahidin, dan M. Riduan yang dengan senang hati telah memberikan kesempatan kepada penulis menggunakan kumpulan arsip, memoar, atau foto-foto masa pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan yang dimiliki orang tua mereka.

Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada Ibu Yurliani Johansyah yang telah memberikan informasi berharga dan meminjamkan foto-foto yang berkaitan dengan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan Partai Indonesia Raya (Parindra) di Kalimantan Selatan.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak H. Machlan Sahari, Mukeri Didit, K.H. Birhasani, Guru Haji Mawardi Abdullah Yasin, M. Suriansyah Ideham, B.A. di Banjarmasin, juga Mawardi dan Imansyah (keduanya kini almarhum) serta Ibu Hj. Rohanah di Marabahan yang pada tahun 1997 silam telah memberikan informasi dan bantuan berharga kepada penulis.

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Abdul Muis (Ketua LVRI Kabupaten Hulu Sungai Tengah) beserta keluarga yang telah dengan senang hati meminjamkan beberapa foto kepada penulis, dan Guru Haji Anang Ahmad Nawier yang telah banyak membantu penulis di samping petuah berharga dari Beliau yang tidak akan penulis lupakan.

Hal sepadan juga disampaikan kepada keluarga alm. Artum Artha dan keluarga alm. Muhammad Zein di Banjarmasin yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan tertulis dan foto-foto yang diperlukan untuk penulisan buku ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Rusmayadi di Dinas Sosial dan Bapak A. Surya Alamsyah, B.Sc di Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan yang telah

berkenan memberikan bahan dan informasi yang berkaitan dengan keluarga para pejuang perintis kemerdekaan.

Terima kasih juga kepada Bapak Drs. H. Sjamsuddin, Drs. H. Sjarifuddin, Drs. Mohammad Yusran, Drs. Sahriansyah, M.Si dan pihak Museum Negeri Lambung Mangkurat di Banjarbaru yang telah meminjamkan kepada penulis beberapa sumber sekunder berupa skripsi-skripsi yang berkenaan dengan organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

Bantuan juga telah penulis terima dari Bapak Drs. [kini Dr.] M.Z. Arifin Anis, M.Hum yang telah memberikan Kata Pengantar, dan Bapak Drs. [kini Dr.] Bambang Subiyakto M.Hum, yang telah memberikan saran-saran yang berharga.

Selanjutnya rasa terima kasih saya haturkan kepada keluarga saya sendiri yang telah memberikan dorongan yakni ayahanda H. Amberi dan ibunda Hj. Nuriah ---semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat kepada mereka berdua--- juga kepada isteri tercinta Risdiani yang dengan pengertiannya telah menjaga anak kami Luthfi Pasha Ardani dan Salma Aulia Azizah, di saat waktu dan perhatian saya lebih banyak tercurah untuk menyelesaikan buku ini, siang maupun malam. Kepada orang tua, isteri, dan anak kami itulah buku ini didedikasikan.

Terima kasih juga kepada para pakar atau sejarawan yang buah penanya telah saya kutip secara langsung maupun tidak langsung, dan sebagai bentuk penghargaan saya cantumkan karya tulis mereka dalam Daftar Sumber.

Sebagaimana sering diutarakan bahwa sebuah karya sejarah merupakan suatu diskusi tanpa akhir yang selalu terbuka bagi peneliti sejarah lainnya. Adanya buku berjudul "Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942", bukan berarti menutup peluang bagi peneliti lainnya untuk membahas topik yang sama dan kemungkinan dalam perspektif yang berbeda. Apalagi didasari bahwa masih ada beberapa organisasi pergerakan yang namanya belum ditulis atau aktivitasnya belum terpapar dalam buku ini seperti organisasi Serikat Harta, Fathal Islam, Pakat Dayak, Assiratal Mustaqim, dan lain sebagainya. Sementara itu, ada beberapa organisasi yang namanya sudah ditulis, namun karena

keberadaannya tidak begitu lama atau karena datanya tidak banyak diperoleh, hanya sedikit saja aktivitasnya yang dapat dipaparkan.

Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan masukan yang konstruktif dari para pembaca, terutama sekali kepada para keluarga/ahli waris tokoh perintis pergerakan kebangsaan yang mungkin saja memiliki dokumen yang berkaitan dengan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan yang dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan isi buku ini.

Saya meyakini bahwa segala bantuan dan selesainya buku ini tentunya tidak terlepas dari karunia Allah Swt, Tuhan semesta alam. Akhir kata, saya mengucapkan puji dan syukur atas limpahan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, dan semoga apa yang saya kerjakan ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Amin.

Banjarmasin, Oktober 2006

Wajidi

Kata Pengantar

Dr. M.Z. Arifin Anis, M.Hum

Mewacanakan persoalan kebangsaan yang pada saat ini oleh banyak orang dianggap sedang mengalami keterkikisan akibat globalisasi dan *ethnicity*, mengingatkan kita pada tahun 20-an tentang pergumulan ide di Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda. Pergumulan itu akhirnya memperoleh momentum sejarah yang oleh pemerintah Indonesia dipahatkan ke dalam benak rakyatnya dan setiap tanggal 20 Mei diritualkan sebagai hari kebangkitan nasional.

Besar kemungkinan aktor-aktor yang terlibat dalam pergumulan ide di atas terinspirasi oleh filsafat sejarah dari Hegel yang menyebutkan, bahwa sejarah bukan hanya peristiwa empirik belaka, tetapi memahami kausalitas mengapa hakikat itu berlaku. Buah karya GNP Hegel, *Philosophy of History* (1822-1823) ini diilhami oleh tulisan Herder, *Ideen zur Philosophie de Menschengeschihte* (1784-1791). Pandangan Herder yang berpengaruh terhadap Hegel adalah sejarah yang filosofis merupakan sejarah umat manusia yang *sarwajagat* dan akan menunjukkan perkembangan dari zaman primitif hingga ke peradaban masa kini (Collingwood, 1985: 133). Pandangan Hegel pada zamannya dapat dikatakan revolusioner. Bagi Hegel, sejarah umat manusia merupakan proses sebuah ide yang universal yang sedang mengaktualisasikan dirinya.

Menelusuri nasionalisme di Indonesia kita harus mengembalikan pada masa kolonial. Pada masa itu, kita dipasung oleh belenggu tradisi dan diskriminasi ras dengan label *inlander* yang tentunya membatasi ruang gerak bangsa Indonesia. Resistensi primordial dengan aksi kekerasan sampai di desa-desa terhadap kolonial dilancarkan, hasilnya kita mengetahui semuanya. Awal abad ke-20 resistensi kemudian berpindah dari desa ke kota sebagai pusat

peradaban. Resistensi ini diwujudkan dalam bentuk resistensi pemikiran yang diwadahi oleh organisasi-organisasi dari kaum terpelajar yang mengecap pendidikan yang dibangun oleh Belanda. Tidak sedikit juga kaum pemuda itu menuntut ilmu langsung ke negeri induk yakni Belanda. Menurut catatan Akira Nagazumi (1986:136), pada tahun 1900 ada 5 orang pribumi menuntut pendidikan tinggi di Belanda dan pada 1908 bertambah menjadi 23 orang.

Van Niel (1984:89) menuliskan, para kaum pelajar ini bertemu dengan banyak perbedaan, terutama perbedaan sikap yaitu sikap ilmiah rasional dan sikap mistis animistik sehingga mengalami kegagalan kultural. Dalam pengembaraan intelektual mereka memamah ide-ide universal yang berhembus dari Barat yaitu nasionalisme dan komunisme, sedangkan dari luar Barat adalah Islam. Nasionalisme dalam konteks ini diartikan sebagai bangsa yang dibangun dari kemajemukan dan secara diikat politis.

Ketika ide nasionalisme menjadi *telos* bagi kaum terpelajar maka terbangun pergumulan pemikiran yang sangat beradab. Pemikiran tentang nasionalisme oleh kaum pribumi tidak saja dipikirkan oleh kaum terpelajar di Hindia Belanda, tetapi juga para pelajar yang sedang menuntut ilmu di negeri induk. Para pelajar di negeri induk pada tahun 1908 mendirikan organisasi yang bernama "*Indische Vereniging*" yang pada tahun 1922 menjadi "*Indonesische Vereniging*" atau "Perhimpunan Indonesia". Anggota perhimpunan ini terdiri dari kaum terpelajar yang beragam suku dari Hindia Belanda. Dapat dikatakan, perhimpunan ini mampu mengatasi persoalan keprimordialan.

Konsep nasionalisme di Hindia Belanda menjadi pergumulan penafsiran intelektual yang dialogis. Misalnya, nasionalisme Hindia versus nasionalisme Jawa. Pergumulan pemikiran dimulai dengan munculnya organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Betapa tidak, di dalam Budi Utomo sendiri sudah terjadi perdebatan ide antara Cipto Mangunkusomo yang mengusung nasionalisme Hindia versus Rajiman dengan nasionalisme Jawa. Cipto membayangkan bahwa nasionalisme Hindia (yang sekarang menjadi wilayah Indonesia) adalah persatuan rakyat Hindia

yang perlu memanfaatkan kebudayaan Barat dengan unsur-unsur kultural lainnya, sedangkan Rajiman membayangkan bahwa nasionalisme Jawa adalah mempertahankan kebudayaan Jawa, sebab kebudayaan Barat tidak sesuai dengan nasionalisme Jawa. Perdebatan ini oleh Sartono Kartodirjo diandaikan sebagai antagonis antara progresivisme (Cipto Mangunkusumo) versus konservatisme (Rajiman). Dalam perseteruan pemikiran itu, pemikiran Cipto sebagai gambaran orang yang progresif tidak diterima, kemudian ia meninggalkan Budi Utomo.

Dalam tahun 1918 pengumpulan pemikiran antara nasionalisme Hindia (Cipto) versus Jawa (Sutatmo) berlanjut. Sutatmo berpendapat, bahwa pendidikan Barat hanya mampu menajamkan kerasionalan dan bukan persoalan budi pekerti yang terdapat dalam kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa oleh Sutatmo dianggap sebagai kunci untuk membimbing pergerakan ke masa kejayaan. Cipto kemudian mengkritiknya, bahwa tradisi Jawa identik dengan Hinduisme dengan sistem kastanya yang dianggapnya sebagai penopang pemerintah kolonial dan mempurukkan kreativitas yang diempui oleh orang Jawa. Cipto menandakan bahwa melakukan resistensi pemikiran merupakan awal dari lembaran untuk menggapai zaman keemasan. Dalam kesempatan ini, kritik Cipto tidak digubris. Akhirnya Cipto menjadi aktivis radikal dengan memimpin Sarekat Hindia (*Nationaal Indische Partij*) di Solo, dan pada tahun 1927 ia oleh pemerintah kolonial dibuang ke Pulau Banda. Sedangkan Sutatmo bergabung dengan Suwardi Suryaningrat mendirikan Taman Siswa.

Keberhasilan nasionalisme Jawa dalam merekrut anggota dari kaum pelajar untuk berpolitik memperoleh reaksi dari kalangan kaum pelajar dari Sumatera yang sedang menuntut ilmu di Jawa. Pada tahun 1917 para pelajar dari Sumatera yang sedang studi di STOVIA mendirikan Jong Sumatera Bond dengan tujuan mempersatukan semua pelajar dan menyebarkan bahasa Melayu dan kebudayaannya, serta membangun kesadaran sebagai orang Sumatera. Dalam konteks ini, identitas kebudayaan merupakan yang utama dalam membangun pergerakan nasional.

Kemunculan Jong Sumatera kemudian diikuti oleh organisasi semisal Jong Ambon, Jong Minahasa, Paguyuban Pasundan, dan lain sebagainya.

Keberadaan Islam dalam membangun nasionalisme tidak dapat ditampilkan begitu saja. Apabila berkeinginan jujur justru Islam identik dengan kebangsaan. Katakan saja, penduduk Hindia Belanda yang beragama Islam dijadikan label sebagai penduduk pribumi. Bahkan untuk melindungi kepentingan penduduk pribumi dan reaksi terhadap kekuatan kolonial maka para agen sejarah dari aktivis Islam pada tahun 1912 membangun persenjataan dalam bentuk organisasi kebangsaan yaitu Sarekat Islam (SI). Berbeda dengan organisasi-organisasi di atas, keanggotaan SI lebih majemuk. Dalam artian, pemimpin intinya seperti HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim memiliki latar belakang pendidikan Barat dan keduanya merupakan elite tradisional berasal dari Jawa dan Sumatera. Anggotanya terdiri dari semua kelas baik dari kota maupun di pedesaan. Mereka terdiri dari para pedagang, buruh, kiai, dan ulama dan beberapa priyayi. Kiprah SI sebagai organisasi nasionalis Indonesia yang berdasarkan politik sangat mencengangkan Belanda karena memperoleh gebrakan yang tidak mereka duga. Kiprah SI, oleh Benda (1980:64) dicermati dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut ideologi, SI mendahului suatu nasionalisme yang programatik seperti yang terungkap dalam istilah kebangsaan yang merdeka. Kedua, secara religius, SI telah mendahului formulasi program pembaharuan Islam.

Faham Marxis juga mewarnai pergumulan ide di Hindia Belanda. Sebut saja Tan Malaka yang rajin menghadiri diskusi-diskusi komunis ketika ia masih berada di negeri Belanda. Ajaran Marx diperkenalkan di Hindia Belanda oleh H.J.M Sneevliet pada tahun 1913. Pada tahun 1914 di Surabaya Sneevliet mendirikan *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV; Perserikatan Sosial Demokrat Hindia). Sneevliet menyadari, bahwa ISDV tidak mungkin memperoleh dukungan massa tanpa berkolaborasi dengan pemimpin SI yang cenderung sosialis, yakni Samaun dan Darsono pemimpin buruh kereta api. ISDV kemudian

berkembang pesat dengan dukungan rakyat karena membonceng aktivitas SI. Ketika Samaun bergabung dengan ISDV, maka organisasi itu mengambil jalan anti kapitalis. ISDV pada bulan Mei 1920 berubah nama menjadi Persekutuan Komunis di Hindia dan pada tahun 1924 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1926-1927 PKI melancarkan revolusi yang gagal.

Munculnya pergumulan ide tentang nasionalisme dalam wadah-wadah organisasi merupakan suatu proses pertama dari kesadaran identitas untuk menggapai integrasi. Secara kultural pergumulan ide ini mengerucut dan memperoleh momentum pada tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda yang merupakan simbol dari kesadaran kolektif. Dalam konteks ini sejarah dapat ditafsirkan sebagai hubungan kait mengkait antara ide universal dengan realitas sehari-hari.

Pendek kata, keterangan di atas mewacanakan, bahwa nasionalisme merupakan adonan ide-ide dari Barat yang berbaur dengan ide lokal yang majemuk untuk mencairkan batas-batas keprimordialan. Dalam arti lain, adanya dialog ide dan aktivitas sosial lokal dalam dimensi waktu merupakan tonggak terbangunnya nasionalisme Indonesia. Dalam konteks ini, Wajidi dalam bukunya, "*Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*" mewartakan, bahwa terbangunnya nasionalisme bukan sesuatu yang dipaksakan oleh pusat, melainkan adanya kesadaran dari daerah untuk bersatu. Meminjam kalimat dari Schoemaker, bahwa kecil itu indah merupakan kata yang cocok untuk menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak akan terwujud tanpa mengedepankan juga dinamika di daerah.

Paparan atas dapat juga dikatakan sebagai pembenaran apa yang dikatakan oleh Hobsbawn, bahwa cita-cita yang sangat populis tentang patriotisme, lebih bersandar kepada terbangunnya suatu negara ketimbang cita-cita suatu kebangsaan. Katakan saja pergumulan ide, pembentukan organisasi baik di Jawa maupun di luar Jawa dilanjutkan oleh perang kemerdekaan merupakan suatu gambaran tentang keinginan mempertahankan negara yang

dianggap sebagai perwujudan kekuasaan yang berasal dari rakyat, begitulah kata Taufik Abdullah.

Dr. M.Z. Arifin Anis, M.Hum

Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan Program
Pascasarjana Pendidikan IPS FKIP
Universitas Lambung Mangkurat

Daftar Isi

Sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan ~	vii
Sambutan Ketua DHC 45 ~	ix
Pengantar Penulis ~	xi
Kata Pengantar ~	xvii
Daftar Isi ~	xxiii
Daftar Ilustrasi ~	xxv
Daftar Singkatan ~	xxviii
Bab I	Pendahuluan ~1
	A. Latar Belakang ~1
	B. Konseptual ~ 6
	C. Tinjauan Bibliografi ~10
Bab II	Latar Belakang Tumbuhnya Pergerakan Kebangsaan ~ 16
	A. Pengaruh Penetrasi Politik dan Kebudayaan Eropa ~ 17
	B. Politik Garis Warna ~ 23
	C. Pengurusan Ekonomi ~ 29
	D. Pengaruh Pendidikan ~ 34
	1. Sekolah Pemerintah ~ 36
	2. Sekolah Kaum Pergerakan ~ 45
	a. Sekolah Persatuan Perguruan Islam ~ 47
	b. Sekolah Sarekat Islam ~ 49
	c. Sekolah Musyawatutthalibin ~ 51
	d. Sekolah Muhammadiyah ~ 55
	e. Perguruan Taman Siswa ~ 58
	f. Sekolah Rakyat Parindra ~ 63
	3. Kepanduan ~ 69
	E. Pengaruh Pergerakan Rakyat yang Tumbuh di Jawa ~ 74

	F. Pengaruh Pers Politik Kebangsaan ~ 76
Bab III	Pelopop Pergerakan Kebangsaan ~ 83
	A. Elite Agama ~ 84
	B. Cendekiawan ~ 88
	C. Pedagang ~ 89
Bab IV	Perkembangan Organisasi Pergerakan ~ 94
	A. Seri Budiman, Budi Sempurna, dan Indra Buana ~ 96
	B. Persatuan Pemuda Marabahan dan Sarekat Kalimantan ~ 101
	C. Barisan Indonesia dan Bond Indonesische Chauffeur ~ 104
	D. Partai Ekonomi Kalimantan ~ 112
	E. Sarekat Islam ~ 115
	F. Muhammadiyah ~ 125
	G. Nahdlatul Ulama ~ 135
	H. Musyawaratutthalibin ~ 144
	I. Partai Nasional Indonesia dan PNI Pendidikan ~ 158
	J. PBI dan Parindra ~ 162
	K. Gerindo dan GAPI ~ 188
Bab V	Penutup ~ 193
	Daftar Sumber ~ 199
	Lampiran ~ 210
	Biodata Penulis ~221

Daftar Ilustrasi

1. Bangsawan Banjar di Amuntai ~ 20
2. Pejabat Pemerintah Hindia Belanda dan Pamongpraja Bumiputera di Barabai ~ 25
3. Sekolah Agama Islam di Pulang Pisau ~ 37
4. Openbare Vervolgschool Banoea Koepang 1923 ~ 39
5. Meisjesvolkschool Banoea Koepang 1932 ~ 43
6. Landbouwklasse Barabai Cursus 1940-1941 ~ 47
7. Tentoonstelling Keradjinan Tangan Boemi Poetera – Kalimantan ~ 48
8. Pengurus Musyawaratutthalibin di Banjarmasin ~ 53
9. Pengurus dan Anggota Jam'iiyatun Nisa Cabang Tembilahan ~ 55
10. Mantan Pengurus Musyawaratutthalibin Cabang Tembilahan ~ 56
11. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa di Rumah Bulat, Marabahan ~ 62
12. Sekolah Medan Antara Parindra Kandangan, 15 Juli 1937 ~ 65
13. Sekolah Ra'jat Parindra Aloeian Soemoer ~ 68
14. Kepanduan Bangsa Indonesia di Marabahan ~ 72
15. Pemuda Surya Wirawan Cabang Banjarmasin ~ 73
16. Leesgezelschap (Taman Bacaan) Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) ~ 79
17. Amir Hasan Bondan ~ 81
18. Balai Pendidikan dan Pengajaran Rakyat di Samarinda ~ 85
19. M. Ruslan, salah seorang Tokoh Pergerakan di Marabahan ~ 94
20. Een jarig bestaan (setahun berdiri) Persatuan Pemuda Marabahan 1 Maret 1930 ~ 106
21. Surat Keterangan Anggota Perkumpulan Sarekat Kalimantan ~ 108
22. Kongres I Bindo (Barisan Indonesia) di Banjarmasin, 27 s.d. 29 April 1934 ~ 111

23. Tanda Anggota Bindo ~ 112
24. Pengurus Besar BIC (Bond Indonesische Chauffeur) di Banjarmasin ~ 99
25. Kongres BIC ke-3 di Barabai ~ 114
26. Hoofd Bestuur (Pengurus Besar) Sarekat Islam Cabang Banjarmasin tahun 1920
27. H. Japeri bin H. Umar, Ketua Muhammadiyah Cabang Alabio ~ 134
28. Lambang Organisasi Muhammadiyah ~ 134
29. Zamzam Aidit, Consul Hoofd Bestuur Muhammadiyah daerah Kalimantan ((1932-1936) ~ 134
30. H. Abdul Karim Corong, Consul Hoofd Bestuur Muhammadiyah (1936-1940) ~ 134
31. H.M. Hasan Corong, Consul Hoofd Bestuur Muhammadiyah Daerah Kalselteng dan Timur (1940-1957) ~ 134
32. Hj. Bulkis Ketua Cabang Aisyiah Muhammadiyah di Banjarmasin ~ 134
33. Tokoh Pendiri Musyawaratutthalibin ~ 151
34. Pimpinan Musyawaratutthalibin di Banjarmasin ~ 152
35. Kongres Musyawaratutthalibin ke-4 di Balikpapan ~ 155
36. Tanda Anggota Musyawaratutthalibin ~ 158
37. Tanda Anggota Da'watutthalibin ~ 161
38. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) Cabang Kandangan ~ 170
39. Pembukaan Taman Pustaka dan Gedung PBI Cabang Kandangan tahun 1934 ~ 172
40. Suasana Rapat Parindra di Barabai ~ 176
41. Mohammad Husni Thamrin saat berada di Pesanggrahan Kandangan ~ 178
42. Rukun Keputrian Parindra di Banjarmasin ~ 180
43. Parindra Cabang Banjarmasin dan Pemuda Surya Wirawan, 3 April 1938 ~ 182
44. Tanda pembayaran uang pangkal dan tanda anggota dari Pengurus Besar Parindra ~ 184
45. Parindra Cabang Barabai, 23 April 1939 ~ 188

46. Komite dan Subkomite Kongres Parindra ke-3 di Banjarmasin, 4-5 Februari 1940 ~ 192
47. Markas Sekretariat Indonesia Berparlemen di Kotabaru ~ 198

Daftar Singkatan

AMS	: Algemene Middelbare School
ANO	: Ansor Nahdlatol Ulama
BINDO	: Barisan Indonesia
BPO	: Borneo Padvindar Organisatie
CSI	: Centraal Sarekat Islam
ELS	: Europese Lagere School
GAPI	: Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia
GERINDO	: Gerakan Rakyat Indonesia
GG	: Gouverneur Generaal
HCS	: Hollands Chinese School
HIS	: Hollands Inlandse School
HPB	: Hoofd van Plaatselijk Bestuur
IHS	: Inheemse Hollandse School
IS	: Indische Staatsregeling
ISDV	: Indische Social Democratische Vereniging
KBI	: Kepanduan Bangsa Indonesia
KPM	: Koninklijk Paketvaart Maatschappij
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
M.Th	: Musyawaratutthalibin
MP	: Militair Politie
MULO	: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NBC	: National Borneo Conferentie
NIAS	: Nederlands Indische Artsen School
NIC	: National Indische Congres
NMM	: Nederlands Militaire Missie
NO	: Nahdlatol Ulama
NU	: Nahdlatul Ulama
OSVIA	: Opleidingschool voor Inlandse Ambtenaren

PARINDRA	: Partai Indonesia Raya
PARTINDO	: Partai Indonesia
PBI	: Persatuan Bangsa Indonesia
PHIS	: Particuliere Hollands Inlandse School
PID	: Politieke Inlichtingen Dienst
PII	: Partai Islam Indonesia
PMM	: Pemuda Muslimin MULO
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNI	: Pendidikan Nasional Indonesia
POC	: Pengawas Onderwijs Commissie
PPI	: Persatuan Perguruan Islam
PPI	: Pelajar Islam Indonesia
PPM	: Persatuan Pemuda Marabahan
PSI	: Partij Sarekat Islam
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
SERI	: Serikat Rakyat Indonesia
SORAK	: Soeara Rakyat Kalimantan
SRI	: Serikat Rakyat Islam

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pertengahan pertama abad ke-20 merupakan puncak dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada saat bersamaan, awal abad ke-20 juga dikenang sebagai masa tumbuh dan berkembangnya nasionalisme. Kolonialisme dan imperialisme maupun tumbuhnya nasionalisme Indonesia, sesungguhnya berakar pada dinamika abad ke-19.

Abad ke-19 bukan saja dikenal sebagai masa jayanya kolonialisme yang merupakan suatu gejala umum sejarah dunia maupun kepulauan Indonesia waktu itu, ketika penetrasi, eksploitasi, intensifikasi, dan ekspansi kolonial berjalan dengan sangat intens. Akan tetapi, pada saat bersamaan terjadi pula berbagai corak perlawanan terhadap kolonial. Hampir tak ada satu daerah pun yang terbebas dari konfrontasi kolonial itu, termasuk di Kalimantan Selatan berupa Perang Banjar (1859-1906).¹

Perang Banjar yang mulai meletus tahun 1859 pada hakikatnya merupakan perlawanan rakyat di Kalimantan Selatan terhadap usaha-usaha Belanda yang meluaskan

1 Berakhirnya Perang Banjar tahun 1906 ditandai dengan penyerahan diri Gusti Berakit kepada sebuah patroli Belanda tanggal 6 Agustus 1906, lihat Helius Sjamsuddin, *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 460. Kesimpulan itu berbeda dengan W.A. van Rees, *De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863*, Thieme, Arnhem, 1865 yang menyatakan bahwa Perang Banjar berakhir tahun 1863 menyusul wafatnya pemimpin perlawanan, Pangeran Antasari.

hegemoninya menjadi dominasi.² Bermula dari campur tangannya dalam suksesi keraton, maka Pemerintah Hindia Belanda mulai berusaha memperluas kekuasaannya di Kalimantan. Ekspedisi-ekspedisi dikirimkan ke daerah, bukan hanya untuk menumpas para pejuang Banjar, namun juga untuk memperluas kekuasaan, baik secara teritorial maupun secara administratif. Ekspedisi itu juga bertujuan untuk menentukan batas kawasan yang dihaki oleh Belanda, sebagai antisipasi kemungkinan perluasan hegemoni Inggris yang ketika itu telah mempunyai pengaruh kuat di Kerajaan Brunei dan Kerajaan Sarawak di Kalimantan Utara,³ serta dalam rangka politik pembulatan wilayah (*afrondings-politiek*) sehingga terbentuk *Pax Neerlandica*.⁴

Dalam menghadapi perlawanan, selain dengan kekuatan senjata, secara sepihak Belanda juga menghapuskan Kerajaan Banjar pada 11 Juni 1860. Secara administratif, bekas wilayah kerajaan Banjar yang dihapuskan, sejak 1865 dijadikan Belanda Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo (*Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*).

Seiring dengan semakin dikuasainya wilayah Kerajaan Banjar sampai perlawanan benar-benar berakhir pada tahun 1906, maka dengan leluasa Belanda menerapkan semua kebijakan kolonialnya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kebijakan yang dikeluarkan itu seringkali membawa perubahan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Di saat situasi dan kondisi rakyat terjajah sangat menderita karena penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial, maka tampillah kaum elite baru yang memiliki kesadaran dan merasakan ketidakadilan terhadap pribumi.

2 Lihat Kata Pengantar Prof. Dr. Taufik Abdullah, dalam Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. vii-xvi.

3 Arsip Nasional Republik Indonesia, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*, Jakarta, 1973, hlm. XC.

4 *Pax Neerlandica: Wilayah aman tertib di bawah naungan Belanda*.

Mereka berjuang menuntut perbaikan-perbaikan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsanya. Mereka juga menyadari bahwa penjajahan yang dilakukan secara sistematis dan organisatoris harus dilawan dengan cara-cara yang sistematis dan organisatoris pula yang mereka wujudkan dalam organisasi pergerakan kebangsaan dalam berbagai watak atau tujuan baik yang berlingkup lokal, regional maupun nasional.

Buku ini akan merekonstruksi seputar Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan. Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab adalah: Pertama, latar belakang apakah yang menyebabkan munculnya pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan? Kedua, siapakah yang menjadi pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan? Ketiga, bagaimanakah proses pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan?

Mengingat bahwa munculnya pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan tidak semata-mata bersifat lokal, maka untuk memahaminya, selain diperlukan kajian terhadap kondisi daerah dan aktivitas kaum pergerakan saat itu, juga harus memperhitungkan jalinan kondisi antara Kalimantan Selatan dengan Jawa sebagai tempat pusat pemerintahan Hindia Belanda berada, dan awal bermulanya pergerakan kebangsaan di Indonesia.

Lingkup analisis studi yang terdapat dalam buku ini adalah kiprah dari organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan, dengan turut memperhatikan latar belakang, usaha para pelopor pergerakan kebangsaan, dan aktivitas para tokoh dalam organisasi di masa pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan pada rentang waktu 1901 sampai dengan 1942.

Penetapan tahun 1901 diambil, karena pada tahun itulah berdiri organisasi pergerakan di Banjarmasin, yaitu Seri Budiman, sebuah organisasi lokal beranggotakan para pangreh praja dan pedagang yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya,

mempromogandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian.⁵

Perkumpulan Seri Budiman-lah yang mula-mula sebagai pelopor mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan baru dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan yang berbeda dengan perhimpunan sebelumnya yang bersifat sinoman.⁶

Meski pada mulanya bersifat lokal dan menonjolkan watak sosial, para anggota Seri Budiman yang mendapat pengaruh dari kebudayaan atau pendidikan secara Barat telah memelopori tumbuhnya organisasi dan kebiasaan yang bersifat modern yang diikuti oleh organisasi-organisasi yang berkembang di kemudian hari.

Pada proses perkembangannya, organisasi pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga tumbuh organisasi yang berlingkup regional maupun nasional yang bergerak di bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Perkembangan organisasi pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan dapat dikatakan berakhir dengan masuknya tentara pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan pada tahun 1942.

Berkuasanya tentara pendudukan Jepang bukan saja menjadi akhir dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan, tetapi juga dimaknai sebagai “awan gelap” bagi pergerakan kebangsaan. Pada masa itu tidak ada satu pun organisasi pergerakan yang beraktivitas secara terang-terangan, karena adanya larangan dan kekuatiran akan mendapat siksaan tentara Jepang yang terkenal kejam jika ketahuan melanggar larangan itu.

Lingkup spasial (baca: geografi) studi ini adalah daerah Kalimantan Selatan yang menurut *Staatsblaad* 1945 Nomor 64 dikenal sebagai Keresidenan Borneo Selatan

5 Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Fadjar, Banjarmasin, 1953, hlm. 83.

6 Organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional dan lokal.

(*Residentie Zuider Afdeling van Borneo*) dengan ibukotanya Banjarmasin yang wilayahnya sekarang meliputi dua provinsi yakni Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.⁷

Jauh sebelumnya, wilayah Keresidenan Borneo Selatan di masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan bagian dari wilayah Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo (*Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*)⁸ beribukota di Banjarmasin yang luas wilayahnya meliputi gabungan tiga wilayah provinsi di pulau Kalimantan sekarang, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Dengan demikian, luas geografi Kalimantan Selatan yang sekarang tidak sama atau lebih kecil dibanding dengan luas wilayah Kalimantan Selatan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Untuk memudahkan pembahasan, maka buku ini hanya berisi tentang pergerakan kebangsaan yang berlangsung di wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan sekarang.

B. Konseptual

Agar pembahasan tidak keluar dari sasaran, maka perlu dijelaskan beberapa konsep dari pergerakan kebangsaan. Konsep kebangsaan perlu dijelaskan terlebih dahulu. Pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional adalah arti harfiah dari bahasa Belanda: *Nationalistische Beweging* atau dalam bahasa Inggris disebut *National*

7 Pemda Tk. I Kalsel, *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, Banjarmasin, 1990, hlm. 4.

8 Di pulau Kalimantan yang dihaki Belanda terdiri dari dua keresidenan yakni Keresidenan “Westerafdeling van Borneo” dengan ibukota Pontianak, dan Keresidenan “Zuider en Oosterafdeling van Borneo” dengan ibukota Banjarmasin, sebelumnya kedua Keresidenan ini bernama “Borneo Westkust dan Borneo Zuid-Ooskust”, lihat Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip Borneo*, Jakarta, 1986, hlm. iv.

Movement. Belanda juga menyebut gerakan itu dengan istilah *Inlandsche Beweging*.

Istilah nasionalisme yang diterjemahkan sebagai aliran/ajaran paham kebangsaan⁹ berasal dari kata 'nasional' atau kebangsaan atau kata "*nation*" yang diterjemahkan sebagai bangsa. Banyak definisi nasionalisme, diantaranya dari Hans Kohn. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (*nation state*).¹⁰

Manai Sophian mengartikan nasionalisme sebagai suatu *state of mind*, suatu prinsip rohani ketika kesetiaan dari individu diabdikan kepada negara; lahirlah cinta tanah air. Oleh sebab itulah, maka suatu bangsa itu adalah suatu solidaritas yang besar; diciptakan oleh pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan dan yang akan diberikan karena cinta tanah air itu.¹¹

Ada beberapa teori tentang nation, national, dan nasionalisme serta perkembangannya, seperti Teori Ernest Renan, Teori Otto Bauer, dan Teori Geopolitik.¹²

Menurut Renan yang teorinya digolongkan sebagai "Teori Perasaan atau Kehendak", yang namanya bangsa adalah suatu kesadaran moral (*conscience morale*) yang timbul oleh adanya keinginan hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu sekarang, meskipun ada perbedaan rasial, agama, dan sebagainya, karena adanya kemuliaan

9 Rukmana Amanwinata dkk., *Kamus Istilah Tata Negara*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Jakarta, 1985, hlm. 35.

10 Hans Kohn dalam Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 15.

11 Manai Sophian, "Nasionalisme dan Sumpah Pemuda", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1974, hlm. 266.

12 Suhartoyo Harjosatoto, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Suatu Analisa Ilmiah*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 42-47.

bersama di waktu lampau seperti sejarah nasib bersama dalam suka dan duka, lebih-lebih dalam duka.¹³

Sedangkan Otto Bauer mengartikan bangsa sebagai sebagai suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat senasib. Pendapat keduanya itu berlawanan dengan Teori Geopolitik yakni teori yang bersangkutan dengan *Blut-und-Boden Theorie* (Teori Persatuan Darah-dan-Tanah). Teori ini semula berasal dari Kar Haushofer yang diuraikannya dalam bukunya *Geopolitik des pazifischen Ozeans* (1924) maupun buku yang ditulisnya bersama März: *Zur Geopolitik der Selbstbestimmung* (1923).

Jika dikaitkan dengan nasionalisme Indonesia, maka yang dinamakan bangsa itu bukanlah sekedar sekelompok manusia yang berkeinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) karena memiliki kemuliaan yang sama, seperti yang diungkapkan Ernest Renan; bukan sekedar suatu tertib masyarakat manusia manusia yang timbul karena kesamaan nasib, seperti pendapat Otto Bauer; dan bukan pula sekedar kelompok manusia yang sama-sama menempati wilayah yang secara geografis merupakan satu kesatuan antara darah-dan-tanah seperti pandangan teori geopolitik. Tetapi bangsa itu menurut Panitia Lima¹⁴ adalah keseluruhan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu yang secara geografis merupakan satu kesatuan yang karena ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang

13 Sunario, "Arti Sumpah Pemuda, Nasional dan Internasional", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op.cit.*, hlm. 281.

14 Panitia Lima adalah sebuah panitia yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru yang bertugas untuk memberikan pengertian mengenai Pancasila sesuai dengan alam pikiran dan semangat kejiwaan para penyusun UUD 1945 dengan Pancasilanya. Sebanyak tiga orang dari keanggotaan panitia ini adalah mantan anggota Panitia Sembilan yang masih hidup yakni Drs. Mohammad Hatta, Prof. Mr. Ahmad Subardjo Djojoadisurjo dan Mr. Alex Andries Maramis, dilengkapi dengan Prof. Mr. Sunario dan Prof. Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo.

tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang sama diderita, mujur sama dinikmati, karena mengalami sejarah yang sama, kemudian berkehendak untuk hidup bersama dalam satu tertib masyarakat untuk mewujudkan cita-cita yang sama di bawah tanggung jawab sendiri.

Bangsa Indonesia lahir karena adanya persamaan “nasib” dan “sejarah”, yakni sama-sama dijajah dan menderita oleh penjajah yang sama, terutama oleh penjajahan Belanda. Wadah persatuan, wilayah tempat bangsa Indonesia berada adalah wilayah Hindia Belanda sebagai hasil politik kolonial yang dipaksakan kepada daerah/pulau-pulau yang dikuasainya. Pemaksaan itu, di satu sisi telah menimbulkan penderitaan, tetapi akibat dari itu telah menimbulkan kesadaran senasib dan sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.

Dengan demikian jelaslah bahwa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada pertengahan pertama abad ke-20 merupakan sebuah proses perlawanan (*antitesa*) dari kolonialisme dan imperialisme¹⁵ di Indonesia dengan tujuan untuk meraih kemerdekaan nasional.

15 Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas negara atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu, sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar, lihat Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 582 dan hlm. 427. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara kolonialisme dengan imperialisme. Imperialisme dapat bermula dari usaha pemerintah kolonial yang mempunyai koloni-koloni di lain-lain daerah dan berusaha menyatukan koloninya menjadi satu sistem penguasaan, lihat C.S.T Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 7.

Istilah “pergerakan” mengandung pengertian yang khas, berlainan dengan pengertian “perjuangan”. Yang dimaksud pergerakan di sini adalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan organisasi yang teratur,¹⁶ walaupun yang bergerak itu sebagian saja, asal menentukan nasib bangsa itu sebagai keseluruhan menuju kemerdekaan.¹⁷

Tahapan pergerakan rakyat yang terorganisasi di Indonesia mula-mula memang bersifat kedaerahan sesuai dengan pertumbuhan nasionalisme dunia. Dasarnya adalah keturunan yang sama (*common descent*), adat istiadat sama (*common tradition*), bahasa sama (*common language*), dan agama sama (*common religion*), baru kemudian meningkat ke fase berikutnya dari pertumbuhan itu yakni a *common effort in a fight for political rights, for individual liberty and tolerance* (suatu usaha bersama dalam perjuangan untuk hak-hak politik, untuk kemerdekaan pribadi dan menghormati orang lain) perjuangan itu kemudian diikat oleh suatu cita-cita dan suatu kemauan bersama untuk mencapai kemerdekaan.¹⁸

Kaitannya dengan istilah “kebangsaan” maka yang dimaksud dengan pergerakan kebangsaan adalah pergerakan-pergerakan yang bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan bangsa yakni bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto Tirtoprodjo¹⁹ bahwa perjuangan yang bersifat “pergerakan” mengandung arti perjuangan yang berbentuk ‘organisasi’ yang teratur. Begitupula dengan L.M. Sitorus, bahwa yang dimaksud dengan Pergerakan Kebangsaan Indonesia adalah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan, terutama perjuangan

16 C.S.T. Kansil dan Julianto, *ibid.*, hlm. 15.

17 I. Nyoman Dekker, *Sejarah Indonesia Baru 1900-1945 (Pergerakan Nasional)*, Lembaga Penerbit IKIP Malang, 1971, hlm. 1.

18 Manai Sophian, *op.cit.*, hlm. 265-266.

19 Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1961, hlm. 5

bangsa Indonesia yang mempergunakan organisasi modern yang berupa gerakan-gerakan dan partai-partai politik sejak akhir abad kesembilan belas.²⁰

C. Tinjauan Bibliografi

Di antara para penulis tentang pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan yang tidak banyak jumlahnya adalah M. Idwar Saleh dkk dengan bukunya berjudul: *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan* yang diterbitkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud tahun 1978/1979.

Menurut M. Idwar Saleh, agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Kalimantan Selatan sangatlah mewarnai pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, M. Idwar Saleh menempatkan Islam sebagai pra nasionalisme, terutama sebelum tahun 1930. Sesudah tahun 1930-an, muncullah nasionalisme Indonesia dimana PNI Pendidikan dan Taman Siswa banyak mempengaruhinya.

Buku tersebut dapat dikatakan sebagai yang pertama yang secara khusus memuat tentang sejarah pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan, dan secara umum banyak memuat tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan kebangsaan di daerah ini periode 1900-1942.

Sjarifuddin dalam skripsinya, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 Sampai Dengan 17 Agustus 1950" menyimpulkan bahwa berdasarkan pertumbuhan, perkembangan dan perjuangan pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan, sejak mulai pertumbuhannya sampai tahun 1942 dapat dibuat beberapa periodisasi, yakni: (1) Sejak runtuhnya Kerajaan Banjar 1860 sampai dengan 1901 adalah Periode Pra Pergerakan Rakyat; (2) Dari tahun 1901 sampai 1912 dinamakan Periode Proto Pergerakan Rakyat;

20 L.M. Sitorus, *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Pustaka Rakjat N.V, Jakarta, 1951, hlm.5.

(3) Tahun 1912 sampai dengan 1927 Periode Pertumbuhan Pergerakan Rakyat Lokal dan Regional; (4) Tahun 1927 sampai dengan 1942 Periode Perpaduan antara Pergerakan Rakyat Lokal, Regional, dan Nasional.

Menurut Sjarifuddin, pergerakan rakyat sampai dengan 1942 di Kalimantan Selatan didukung oleh kaum terpelajar, pedagang, petani, pegawai negeri, ulama dan guru agama, dimana kaum terpelajarlh yang memegang peranan aktif dalam pergerakan tersebut dan Islamlah yang menjadi motor penggeraknya. Islam dan Nasionalisme di Kalimantan Selatan merupakan kesatuan yang erat sekali dan sukar dipisahkan, karena satu sama lain saling mengisi.

Tulisan lainnya berasal dari Alex A. Koroh dengan judul “Mengenal Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912– 1942”. Tulisan itu merupakan laporan penelitian dari FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 1994, dan belum diterbitkan.

Seperti halnya M. Idwar Saleh dan Sjarifuddin, dalam laporan tersebut Alex A. Koroh juga berpendapat bahwa Islam berperan penting dalam kebangkitan nasional di Kalimantan Selatan, dan dapat dikatakan bahwa sesungguhnya nasionalisme yang berkembang di Kalimantan Selatan sebelum tahun 1930 adalah nasionalisme Islam, dan setelah itu baru berkembang menjadi nasionalisme Indonesia.

Tulisan lainnya terdapat di beberapa laporan penelitian Puslit IAIN Antasari, Universitas Lambung Mangkurat, dan skripsi Jurusan Sejarah FKG Unlam yang dalam perkembangannya menjadi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam. Laporan penelitian dan skripsi itu pada umumnya bertema salah satu organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan. Oleh karena itulah, penulis beranggapan bahwa penting untuk menjadikannya sebagai bahan rujukan atau pembandingan bagi sumber-sumber sekunder atau primer lainnya.

D. Sumber Data

Buku ini pada mulanya adalah hasil Penelitian Sejarah, oleh karena itu persoalan yang menyangkut sumber-sumber data perlu untuk dikemukakan. Dalam Tinjauan Bibliografi telah diutarakan bahwa sumber sekunder seperti buku, skripsi, maupun laporan penelitian telah digunakan dalam penyusunan buku ini namun dalam jumlah terbatas.

Begitupula halnya dengan sumber primer, diantaranya berupa memoar para pejuang perintis kemerdekaan, baik pejuang yang mendapat pengakuan/pengesahan dari pemerintah sebagai perintis kemerdekaan maupun yang tidak mendapatkan pengakuan/pengesahan.²¹

Di antara memoar yang ada, penulis berpendapat bahwa memoar pejuang yang tidak mendapat pengakuan/pengesahan dari pemerintah perlu dipergunakan sebagai sumber data, karena status pelaku sejarah sebagai perintis kemerdekaan atau bukan sebenarnya tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan berupa Surat Keputusan Menteri Sosial Republik

21 Di Kalimantan Selatan terdapat banyak pejuang perintis kemerdekaan dengan intensitas peranan yang besar maupun kecil, namun yang mendapat pengakuan atau disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai perintis kemerdekaan hanya berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang, yakni H. Abdul Murad bin H. Anang, H. Iskandar bin H. Achmad, H. A. Barmawi bin Thalib, Machlan Sahari, H. Djahrani bin H. Husin, Indut H. Karim, H. Mursidi bin H. Asnawi, Saberi bin Marthina, Sutera Ali Dulah, Abdullah bin Djaga, Bahtiar bin Usman, H. Busra bin H. Andin Ahmad, Kari bin H. Husin, Maslan Karim, Asad bin Abang, Idit bin Adil, H. Maserah bin H. Sahir, Hamzah bin Tuganal, Mukeri Didit, Akis M, G. Obus, H. Mohamad Zaini, H. Achmad Darmawie, Gusti Djateran bin Gusti Rusmansyah, H. Moh. Tarjali, Darman bin Berahim, Darman bin Tambal, Ideham bin H. Nafiah, Kaseri bin Dulasan, H. Irham bin H. Mathalib, Masrawan bin Moh. Syafii, Ny. Fatimah, M. Nawawie Arif. Lihat Depsos RI, *Data Perintis Kemerdekaan Seluruh Indonesia*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Keuangan, Jakarta, 2004, hlm. 287-288.

Indonesia. Surat Keputusan itu lebih menyangkut kepada pemberian penghargaan/tunjangan. Tidak adanya pengakuan dari pemerintah tidaklah mengurangi jasa-jasa mereka terhadap Negara.

Pengakuan dari pemerintah boleh jadi bersifat relatif. Adakalanya seseorang tokoh yang mempunyai peranan lumayan besar pada masa pergerakan, dan karena tidak pandai menuangkan kembali riwayat perjuangannya dalam bentuk tulisan padahal telah diketahui oleh saksi teman seperjuangan, maka boleh jadi kontribusinya sebagai aktivis pergerakan tidak mendapat apresiasi yang layak dari Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan (BPPK) di Jakarta, atau karena alasan lain seperti ia tidak mau mengajukan permohonan karena terikat akan sumpah, bersikap *tawadhu*, atau karena apa yang diperjuangkannya dahulu merupakan perjuangan tanpa pamrih, dan adakalanya juga karena merasa ekonomi keluarga sudah mencukupi, atau karena telah mendapat penghasilan sebagai pensiunan PNS atau Pejabat, atau karena hal-hal lainnya, maka jadilah ia seorang pejuang perintis kemerdekaan tanpa pengakuan/pengesahan dari Pemerintah.

Beberapa alasan itulah yang mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa dalam peristiwa tertentu pada masa pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan, beberapa tokoh tampak begitu menonjol dan sampai mendekam begitu lamanya dalam penjara kolonial karena aktivitasnya yang dianggap membahayakan, namun ia tidak terdaftar sebagai perintis kemerdekaan yang diakui/disahkan oleh Pemerintah atau bahkan permohonannya sebagai perintis ditolak²² padahal kegiatan

22 Diantaranya yang ditolak adalah H. Amir, H. Morhan, dan Abdulhamidhan, ketiganya tokoh Parindra cabang Amuntai yang dijatuhi hukuman penjara dan kerja paksa di Penjara Ampah dan Sukamiskin, Jawa Barat, serta H. Ali Baderun ketua Parindra cabang Barabai yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, disertai pencabutan jabatan dan pemberhentian dirinya sebagai pegawai negeri sipil, lihat catatan Artum Artha, "Permohonan Calon Perintis Kemerdekaan (Ditolak)".

pengusulan perintis kemerdekaan yang dilakukan Pemerintah sudah berlangsung sejak 1950-an.²³

Sebagian besar memoar yang dipergunakan memang sengaja disusun pelaku sejarah sebagai bahan kelengkapan permohonan atau usulan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Usulan itu disertai dengan pernyataan dari 2 (dua) orang teman seperjuangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar aktif berjuang atau pernah menjadi anggota organisasi tertentu pada masa pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan, diketahui oleh Ketua Cabang Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setempat, dan pernyataan si pemohon bahwa apa yang ia kemukakan adalah yang sebenarnya dan ia bersedia dituntut di pengadilan jika memberikan keterangan palsu.

Sumber lisan tidak banyak diperoleh, karena hampir semua pelaku sejarah pada masa pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan telah meninggal dunia. Sampai buku ini diselesaikan, terdapat dua orang perintis kemerdekaan --- yang diakui Pemerintah--- yang masih hidup dalam kondisi uzur, yakni Machlan Sahari dan Mukeri Didit. Meski demikian, wawancara dengan pelaku atau informan sezaman pernah penulis lakukan tahun 1997 silam, diantaranya dengan Mawardi (aktivis Persatuan Pemuda Marabahan dan Sarekat Kalimantan) dan Imansyah (alumni Perguruan Taman Siswa) di Marabahan.

Penulis juga pernah mendapatkan beberapa informasi langsung dari Artum Artha yang pernah beraktivitas dalam Parindra dan Partai Ekonomi Kalimantan (PEK), M. Suriansyah Ideham (alumni sekolah MULO di Banjarmasin), K.H. Birhasani (85 tahun) tokoh Nahdlatul Ulama/Pemuda Ansor, dan H. Anang Ahmad Nawier (88 tahun) salah seorang aktivis Muhammadiyah/Pandu Hizbul Wathon di Kalimantan Selatan.

Sumber primer lainnya adalah foto para aktivis pergerakan, berupa foto asli dan sebagian fotokopi tanpa diketahui di mana foto aslinya berada. Di antara foto asli itu,

23 Lihat Depsos RI, *ibid.*, bagian Pengantar.

terdapat foto yang rusak berat dimakan usia, sehingga harus direstorasi atau tidak dapat dimasukkan dalam buku ini. Begitupula dengan dokumen tertulis yang umumnya berbentuk salinan (meski bukan asli, salinan dapat digolongkan sebagai sumber primer) dan fotokopi naskah asli namun kabur tak terbaca. Dokumen itu antara lain surat yang berkaitan dengan Sarekat Islam, sebagaimana terdapat dalam skripsi Sjamsuddin (1970), diantaranya salinan surat menyurat OS Cokroaminoto selaku Voorzitter C.S.I dan PSI di Surabaya dengan Mohammad Horman Presiden Perhimpunan Sarekat Islam di Banjarmasin, Motie Congres Sarekat Islam, Harian Indonesia Merdeka, Motie Congres Moesjawaratoetthalibin IV, Ma'loemat National Borneo Conferentie, bertanggal Bandjermasin, 17 Februari 1924, Soeara Parindra, edisi Maret/November (?) 1940, dan beberapa memoar para pelaku pergerakan kebangsaan yang merupakan koleksi keluarga almarhum Achmad Darmawie di Banjarmasin.

Bab II

Latar Belakang Tumbuhnya Pergerakan Kebangsaan

Latar belakang tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan sesungguhnya mempunyai akar yang kompleks, tidak semata didorong oleh satu atau dua faktor melainkan oleh banyak jalinan yang saling mengkait yang dikondisikan oleh faktor yang bersifat intern maupun ekstern.

Ada yang mengatakan bahwa sifat pergerakan kebangsaan adalah multidimensional, karena berkaitan dengan pergerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan dipengaruhi oleh faktor intern (dalam negeri) maupun faktor ekstern (luar negeri).²⁴

Seperti halnya pergerakan kebangsaan yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia, maka tumbuhnya pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan pada awal abad ke-20 merupakan suatu fenomena historis yang lahir dari akumulasi proses berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan agama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebab utama tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan nasional Indonesia berasal dari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri

24 Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 13. Faktor ekstern dimaksud antara lain kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia; gerakan Turki Muda di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha; pemberontakan di Cina di bawah pimpinan Sun Yat Sen; gerakan cita-cita kemerdekaan di India yang dipelopori Mahatma Gandhi.

sebagai dampak dari penjajahan.²⁵ Sedangkan faktor-faktor dari luar negeri, seperti paham liberalisme, pendidikan Barat, Pan Islamisme lebih bersifat mempercepat pergerakan tersebut.

Di antara faktor-faktor dalam negeri dan bersifat nasional itu adalah:

1. Adanya tekanan dan penderitaan terus menerus, sehingga menjadikan bangsa Indonesia bangkit untuk bebas dari penderitaan tersebut;
2. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang menimbulkan semangat bersatu antar suku bangsa;
3. Adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri berupa kehendak memiliki tanah air dan menentukan nasib sendiri.²⁶

Bagi para aktivis pergerakan kebangsaan, sudah barang tentu mereka mempunyai motivasi atau latar belakang yang beragam. Boleh jadi, keterlibatan mereka dalam pergerakan didorong oleh adanya kesadaran tentang beratnya kehidupan rakyat yang terjajah, adanya diskriminasi, dan rendahnya emansipasi masyarakat pribumi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum.

Kesadaran itu bisa pula muncul dari berbagai pengalaman, seperti pendidikan, pergaulan dengan kalangan terdidik, dan informasi tentang pergerakan kebangsaan yang timbul di berbagai pelosok tanah air yang menuntut emansipasi di berbagai hal melalui organisasi atau kepertaian.

A. Pengaruh Penetrasi Politik dan Kebudayaan Eropa

Perkembangan pemerintahan kolonial dengan segala kebijakannya di Kalimantan Selatan, telah menimbulkan perubahan yang signifikan berupa penetrasi kebudayaan

25 Lihat Departemen Sosial, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digul*, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Jakarta, 1977, hlm. 22.

26 Sudiyo, *op.cit.*, hlm. 14.

Barat di segala bidang. Walaupun dibanding di Jawa, perkembangannya jauh terbelakang, namun kebijakan itu berperan sebagai *agent of modernization*²⁷ dan turut mempengaruhi pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

Penetrasi kebudayaan Barat itu antara lain terjadi dalam bidang pemerintahan, hukum, agama Kristen, ekonomi, teknik, mode pakaian, cara berpikir, dan terutama penetrasi di bidang pendidikan.²⁸

Penetrasi kebudayaan terlihat dalam berbagai bentuk, seperti masuknya sistem pemerintahan modern menggantikan sistem feodal, sistem perkotaan, pemakaian undang-undang yang dibuat pemerintah kolonial sebagai pengganti Undang-undang Sultan Adam 1835, masuknya *missie* dan *zending* ke daerah ini, masuknya ekonomi kapitalis menggantikan sistem ekonomi tradisional, meningkatnya modernisasi alat angkutan darat dan laut, berkembangnya mode pakaian Barat, meningkatnya cara berpikir yang bersifat praktis, logis, dan pragmatis yang kesemuanya berlawanan dan bahkan semakin melunturkan kebiasaan yang bersifat tradisional yang sebelumnya berlaku di masyarakat.

Penetrasi kebudayaan Barat yang sangat kuat pengaruhnya terhadap tumbuhnya pergerakan kebangsaan di daerah ini adalah di bidang pendidikan, dengan sistem persekolahannya, baik melalui sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah *missie* dan *zending* di pedalaman.

27 Alex A. Koroh dkk., "Mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912 – 1942", Laporan Penelitian FKIP Unlam, Banjarmasin, 1994, hlm. 6.

28 Sjarifuddin, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950", Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1974, hlm. 26-28.



Bangsawan Banjar di Amuntai.
(Foto dok. Artum Artha)

Sesuai dengan keperluan Pemerintah Hindia Belanda berupa pegawai rendahan untuk dapat menjalankan pemerintahannya di segala bidang, maka didirikanlah Sekolah Pemerintah atau Sekolah Negeri ketika itu yang kemudian menghasilkan sumber daya manusia terdidik sebagai elite baru yang berpikiran modern.

Adanya sekolah dan surat kabar termasuk berkembangnya pemakaian huruf latin telah mendorong perkembangan-perkembangan kebudayaan selanjutnya, karena melalui media itulah masyarakat mendapatkan ide-ide tentang kemerdekaan, liberalisme, parlementarisme dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Selain itu, relatif lancarnya hubungan komunikasi dan transportasi antara Kalimantan Selatan dengan pulau Jawa, mengakibatkan informasi perkembangan pergerakan

kebangsaan di Pulau Jawa dengan cepat dapat diterima dan mempengaruhi perkembangan kebangsaan di daerah ini.

Meski terjadi perubahan ke arah modernisasi, akan tetapi perubahan itu tidak serta merta berdampak positif kepada kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah kolonial menerapkan otonomi di beberapa daerah²⁹ dengan perangkatnya seperti *Gementeraad*, *Stadsgementeraad*, *Plaatselijke raad*, atau *Desaraad* tidak memberikan pengaruh terhadap perbaikan kehidupan masyarakat bumiputera, karena hak otonomi yang diberikan penguasa kolonial melalui lembaga itu hanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat kulit putih sebagai golongan penguasa, di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Ciri pemerintahan kolonial adalah adanya pemisahan antara penjajah dengan yang dijajah. Pemisahan itu dilakukan dengan menerapkan kebijakan diskriminasi di berbagai segi kehidupan seperti di bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Karena politik diskriminasi itulah, maka sebagian besar kehidupan masyarakat menjadi semakin merosot.

Di bidang politik, tindakan pemerintah kolonial untuk menghapus kedudukan penguasa pribumi menurut adat dan menjadikan mereka pegawai pemerintah telah meruntuhkan kewibawaan tradisional mereka. Secara administratif, sebagian *kiai*³⁰ atau penguasa pribumi lainnya dijadikan

29 Lihat Arsip Nasional Republik Indonesia, *Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940*, Jakarta, 1998.

30 Menurut Amir Hasan Bondan, *op.cit.*, hlm. 87-88, asal ada nama “*kiai*” --- (Amir Hasan Bondan menulisnya “*kiai*” bukan “*kyai*”, atau “*kiayi*”, pen.)--- di Kalimantan Selatan bermula sejak abad ke-16 setelah Pangeran Samudera diislamkan oleh Khatib Dayan dan setelah itu diresmikanlah nama *kiai* oleh pemerintah Kesultanan Banjar sebagai nama pangkat dari para pembesar yang diserahkan menjalankan pemerintahan di lingkungan kerajaan. Ketika itu, syarat menjadi *kiai* adalah berpengetahuan hukum agama Islam, cakap dan bijaksana menjalankan pemerintahan. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, gelar *kiai* tetap dipakai Belanda sebagai gelar jabatan

pegawai Pemerintah Hindia Belanda yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Hubungan rakyat dengan para kiai hanya terbatas pada soal administratif dan pemungutan pajak, sedangkan hak-hak yang diberikan oleh adat kepada mereka telah dikurangi. Pemilikan tanah jabatan dikurangi dan diganti dengan gaji, begitupun upacara dan tata cara yang berlaku di pemerintahan disederhanakan.³¹

Begitulah yang terjadi di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo. Di keresidenan ini sebagian besar jalannya pemerintahan dijalankan oleh pegawai-pegawai pamongpraja bumiputera, hanya pimpinan puncak dari struktur pemerintahannya seperti Residen (*Resident*) yang mengepalai *Residentie*, Asisten Residen (*Assistent Resident*) untuk *afdeling*, dan sebagian Kontrolir (*Controleur*)³² dan Aspiran Kontrolir (*Adspirant Controleur*) untuk sebuah *onderafdeling* dipegang oleh pegawai Belanda. Sedangkan jabatan selebihnya seperti Kiai Kepala (*Hoofdkiai*), *kiai*, dan Asisten Kiai (*Assistent Kiai*) dipegang oleh pamongpraja bumiputera.³³

dalam struktur pemerintahan di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo, namun tidak lagi diharuskan berpengetahuan hukum agama Islam, cukup kalau pandai menjalankan pemerintahan. Di masa pendudukan NICA di Kalimantan Selatan, pangkat kiai tertinggi disebut sebagai “Kiai Besar” yang kedudukannya dalam pemerintahan sejajar dengan Asisten Residen, misalnya Kiai Besar Merah Nadalsyah di Afdeling Hulu Sungai.

- 31 Sartono Kartodirdjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, Jakarta, 1975, hlm. 248.
- 32 *Controleur* dilafalkan kontrolir, namun adakalanya dilafalkan menjadi kontelir, kontlir, atau kontolor.
- 33 Menurut Artum Artha, ketentuan Pemerintah Hindia Belanda mengangkat pegawai baru bukanlah sebagai pegawai bulanan tetap, melainkan sebagai tenaga honorer. Misalnya gaji seorang pegawai menurut ijazah dan pengalaman kerjanya diatur: Golongan I : f. 25,00. (Dua puluh lima rupiah/gulden); Golongan II : f. 17,50. (Tujuh belas rupiah 50 sen); Golongan III : f. 12,00. (Dua belas rupiah 50 sen), lihat Artum Artha, “Cita-cita

Penempatan pegawai-pegawai pamongpraja bumiputera dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh adanya kendala bahwa penempatan pegawai orang Eropa di tingkat lokal tidak mungkin dilakukan, karena harus berhadapan dengan penduduk pribumi dengan segala risikonya. Oleh karena itu, di setiap distrik ditempatkan seorang pimpinan yang berasal dari masyarakat setempat yang menjabat sebagai kiai yang mempunyai kedudukan sama dengan wedana di Jawa dan untuk mengepalai kiai-kiai itu diangkat seorang Kiai Kepala (*Hoofdkiai*), mereka memperoleh gaji dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1918, jabatan kiai diperluas dengan menempatkan seorang asisten kiai yang memimpin *onderdistrict*. Para pamongpraja bumiputera itu mempunyai tugas sebagai perantara penduduk pribumi dengan penguasa kolonial. Begitulah, pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem "*indirect rule*" dengan tujuan memanfaatkan struktur yang ada seefektif mungkin.³⁴

Di bidang ekonomi, masuknya sistem ekonomi uang di Kalimantan Selatan, telah menjadikan beban rakyat bertambah berat, karena melalui sistem ekonomi uang pemerintah kolonial selain memberikan upah buruh, juga melaksanakan pemungutan pajak kepada masyarakat pribumi.

Sistem penyewaan tanah dan praktik kerja paksa (*erakan*) juga memperberat kehidupan masyarakat di pedesaan. Sementara kehidupan merosot sehingga terjadi kemiskinan. Praktik pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial melalui perantaraan pamongpraja bumiputera dalam pemungutan pajak, *erakan*, dan penyelewengan lainnya, telah menjadikan rakyat merasa terhina sebagai bangsa jajahan, dan hal itu turut

mencapai Indonesia Mulia Merdeka dan Berdaulat", naskah ketikan, Banjarmasin, 1984, hlm. 16.

34 Lihat Anak Agung Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

mendorong tumbuhnya kesadaran akan rasa harga diri untuk bebas dari penjajahan.

B. Politik Garis Warna

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa ciri dari pemerintahan kolonial adalah adanya pemisahan antara penjajah dengan yang dijajah, antara penduduk pribumi dengan non pribumi. Beberapa kelompok etnis yang berbeda kebudayaannya, ditempatkan dalam suatu sistem kewarganegaraan yang pluralistik namun berbeda dalam status karena adanya politik diskriminasi atau pengkotakan-pengkotakan status sosial.

Ketika pemerintahan kolonial Belanda secara sepihak menghapuskan Kerajaan Banjar 11 Juni 1860 yang kemudian disertai dengan keberhasilannya menumpas sisa-sisa perlawanan pemerintahan Pegustian³⁵ di tahun 1906, maka status bekas kerajaan ini turun sangat drastis. Kalau sebelumnya Kerajaan Banjar adalah sebuah negara dengan bangsa Banjar yang merdeka, maka setelah dikuasai Belanda keadaan mereka berubah menjadi bangsa kelas tiga atau terbawah.

35 Nama pemerintahan kelanjutan Kesultanan Banjar di Hulu Sungai Barito yang dipimpin Sultan Muhammad Seman, putera Pangeran Antasari.



Pejabat Pemerintah Hindia Belanda dengan Pamongpraja Bumiputera di Pasanggrahan Onderafdeling Barabai.³⁶
(Foto dok. H. Abdul Muis).

Status sosial itu muncul karena adanya kebijakan Garis Warna (*Color Line*) yang memisahkan antara penguasa dengan yang dikuasai. Kebijakan itu lahir setelah adanya *Nederlands Indische Onderdanschap* tahun 1911 yang membedakan masyarakat Hindia Belanda kepada tiga golongan,³⁷ yakni: (1) Orang Eropa, termasuk Belanda dan orang Jepang yang dipersamakan dengan status orang Eropa; (2) Timur Asing, yakni yang bukan Eropa. Kelompok ini termasuk orang Cina, India, dan sebagainya yang bukan

36 Di bekas lokasi bangunan Pasanggrahan Barabai, kini berdiri rumah dinas Bupati Hulu Sungai Tengah.

37 Lihat Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 32-35.

Bumiputera dan Eropa; (3) Bumiputera, masyarakat Banjar termasuk dalam kelompok ini.

Selain termasuk dalam kelompok bumiputera, masyarakat pribumi di Kalimantan Selatan juga terdiri atas: (a) Golongan atas yang terdiri dari: pegawai pangrehpraja (*ambtenaren*) yang secara khusus bagi daerah ini disebut kiai, dan kaum bangsawan yang bagi daerah ini kehilangan statusnya sehingga hanya tinggal gelar saja; (b) Golongan menengah, yang terdiri atas: pegawai Pemerintah Hindia Belanda (selain pegawai pangrehpraja yang tersebut di atas), ulama, kaum cendekiawan, pedagang; (c) Golongan bawah, yang terdiri atas: pedagang kecil, petani, dan nelayan yang pada umumnya nelayan sungai, tukang dan pengrajin serta buruh kecil.³⁸

Dengan demikian, selain adanya sistem status yang diberikan pemerintah kolonial, pada kenyataannya masyarakat bumiputera juga terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang lahir dari adanya status sosial yang beragam.

Selain golongan tersebut di atas, ada suatu golongan khusus yang disebut '*gelijkgestelden*' terutama di kalangan pribumi, yakni orang-orang yang dipersamakan statusnya dengan orang Eropa, sehingga hak dan kewajibannya juga sederajat dengan golongan orang Eropa. Status itu bermula dari adanya permohonan 'rekes' (dari kata "*request*") dari pribumi bersangkutan, maka Gubernur Jenderal dengan persetujuan Dewan Hindia mengabulkan rekes tersebut. Kerap kali perilaku '*gelijkgestelden*' ini ke-be-belanda-an.

Golongan ini oleh masyarakat Banjar diberi julukan "Belanda Tiga Suku".³⁹ Julukan tersebut didasarkan kepada

38 Sjarifuddin, *ibid.*, hlm. 33; Pemda Tk.I Kalsel, *op.cit.*, hlm.35-36; dan Sjarifuddin dkk., *Pola Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Depdikbud, Banjarmasin, 1989-1990, hlm. 40.

39 M. Suriansyah Ideham, "Tata Pemerintahan Hindia Belanda", naskah ketikan, Banjarmasin, tanpa tahun, hlm. 4.

nilai kertas segel berharga 1,50 gulden (satu setengah gulden atau tiga suku)⁴⁰ yang terdapat pada petikan surat keputusan atau besluit Gubernur Jenderal untuk yang bersangkutan.

Sebagai bentuk dari politik garis warna adalah eksklusivisme, dimana tiap golongan dibikin hidup terpisah sendiri-sendiri dan merasa golongannya lebih istimewa dibanding golongan lainnya, seperti golongan Eropa merasa lebih unggul dari orang Timur Asing dan Inlander⁴¹ (bumiputera) atau golongan Cina merasa lebih istimewa dibanding bumiputera.

Untuk kepentingan kolonial, politik garis warna itu senantiasa ditampilkan dalam bentuk diskriminasi dimana perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial terhadap orang Eropa, maupun Timur Asing berbeda jauh dengan perlakuan yang diberikan terhadap golongan bumiputera.

Pada umumnya orang asing, tinggal di kota-kota dan membentuk komunitas sendiri atas dasar rasnya, sebagaimana terlihat dari adanya perkampungan Arab, Pacinan atau kampung orang Cina. Kedua golongan ini mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, karena adanya beberapa prioritas yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap mereka.

Orang Eropa sebagai kelas tertinggi, memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Dengan status itu, tentunya dalam bidang-bidang pembangunan yang diutamakan adalah kepentingan-kepentingan Pemerintah Hindia Belanda

40 Satu suku ialah uang logam coin perak senilai setengah gulden atau lima puluh sen.

41 *Inlander* yang artinya pribumi merupakan sebutan yang bernada penghinaan terhadap bangsa Indonesia, atau bahkan lebih hina lagi *inheemse*. Seperti dikatakan Prof. J. van Gelderen dalam bukunya *Voorlezingen over koloniale Staatshuishoudkunde* bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa dari kuli-kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa (*Een Natie van Koelies en Koelies onder de Naties*), lihat Departemen Sosial, *op.cit.*, hlm 21.

dan orang-orang Eropa, seperti pendidikan, tempat rekreasi, perumahan, bioskop, dan fasilitas penting lainnya yang hanya diperuntukkan untuk orang kulit putih. Bumiputera adakalanya dilarang masuk karena ada tanda-tanda tertentu bertulisan larangan, seperti: "*Verboden toegang voor Inlanders en Honden*" (dilarang masuk untuk orang bumiputera dan anjing".⁴²

Perlakuan diskriminasi sebenarnya tidak hanya dikenakan antara golongan pribumi dengan orang Eropa atau Timur Asing, melainkan juga antara golongan pribumi muslim dengan pribumi penganut agama Kristen. Pada tahun 1920-an, guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum masjid dikenakan kewajiban oleh pemerintah kolonial untuk menjalankan *Ordonnantie Heeren Dienst* yang menyangkut *erakan* atau kerja rodi, sedangkan guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending justru dibebaskan dari kewajiban itu.⁴³

Diskriminasi atau pengkotakan status sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengundang pertentangan sosial dan ini menyebabkan seringnya terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Penindasan itu pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan yang tidak kepalang.⁴⁴

Artum Artha yang pada tahun 1930-an berkiprah sebagai guru bantu pada Sekolah Rakyat Parindra dan sekaligus sebagai anggota Parindra di Kandangan, menceritakan bahwa ayahnya pernah mengalami perlakuan yang sangat diskriminatif dari aparat Pemerintah Hindia Belanda. Artum Artha menceritakannya sebagai berikut:

42 M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*, Museum Negeri Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 1981-1982, hlm. 37.

43 Lihat isi Motie Congres Sarekat Islam, pada Lampiran 1.

44 Aban Duraup, "Riwayat Singkat Perjuangan Aban Duraup Dalam Rangka Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan", naskah ketikan, Ulin-Banjarbaru, 1983.

Saya pernah mendengar, bapak saya pernah bertengkar dengan tuan Kontlir. Bapak “tukang kebun”. Masih bujangan sekitar usia 17 tahun. Soalnya terlambat menyiram kebun di halaman dan sekitar rumahnya. Dan anjing Belanda punya belanja daging, telur dan roti. Ongkosnya sehari 10 sen.

Bapak saya banding-banding antara nasib manusia dan hewan binatang anjing serigala yang galak itu. Suatu hari Bapak kecewa, lalu tanya: “Gajih saya cuma f. 2, 74 (Dua rupiah tujuh puluh empat sen) sebulan. Belanja anjing serigala sebulan (30 hari) 300 sen. Bagaimana perhitungan tuan?”

Tuan Kontlir marah. Bapak minta berhenti. “Kamu orang kampung yang dungu. Pergi saja. Kamu saya pecat. Besok tidak masuk lagi kerja di sini. Mengerti?” Tuan Kontlir marah, marah.

Bapak bercerita kepada Opas Kontlir. Opas Kontlir turut memarahi Bapak. Bapak bikin kaduan kepada tuan Kiai. Tuan Kiai pun turut bentak, marah. Lebih marah dari ucapan Opas Kontlir. Nah, kemana lagi harus lapor?⁴⁵

Hadhariyah M, selaku Ketua Parindra Cabang Banjarmasin merasakan betul adanya diskriminasi, sebagaimana yang diucapkannya saat berbicara dalam suatu rapat umum Parindra di Barabai. Hadhariyah M mengatakan bahwa belanja hidup seekor anjing yang ditangkap dan dikurung oleh polisi Belanda di Surabaya karena tanpa penning adalah sebesar f. 50 sehari yang kelak harus dibayar oleh sang punya anjing itu. Sedangkan belanja hidup seorang rakyat Indonesia, cukup seenggol atau 2,5 sen sehari. Bayangkan kata Hadhariyah M, betapa ambruk

45 Artum Artha, *op.cit.*, hlm.26.

martabat hidup dan betapa miskinnya rakyat Indonesia di Hindia Belanda. Di tanah airnya sendiri.⁴⁶

C. Pengurusan Ekonomi

Selain adanya adanya politik garis warna yang diwujudkan dalam bentuk diskriminasi terhadap golongan bumiputera, Pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan sistem ekonomi uang. Dalam sistem ekonomi uang ini, disatu sisi rakyat mengenal mata uang sebagai alat pembayaran, namun di sisi lain beban rakyat menjadi bertambah berat, karena melalui sistem itu justru memudahkan bagi pengurusan ekonomi.

Pengurusan ekonomi itu dilakukan antara lain berupa pengenalan Pajak Pencaharian (*Inkomsten Belasting*), Pajak Tanah (*Landrente*), Pajak Kepala, Pajak Erakan, Bea Masuk (*Bea Invoerrecht*), Pajak Penyembelihan (*Slachbelasting*) dan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi yang memberatkan rakyat yang dipungut berlapis-lapis mulai dari Gemeente Raad di Banjarmasin, Desa Raad di bagian Afdeling Hulu Sungai, dan pungutan Kas Negeri di pasar-pasar yang kesemuanya untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Mulai tahun 1937-an Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan baru dimana setiap orang laki-laki kecuali golongan pangrehpraja, yang berumur antara 18 sampai 45 tahun wajib membayar pajak "*Heeren Dienst*" sebesar f. 1.75 setahunnya. Bagi yang tidak membayar dapat dikenakan kerja paksa (*rodi*) yang di daerah Kalimantan Selatan saat itu disebut "*erakan*". Bagi yang terkena kerja *erakan*, harus tidur di gardu atau tidak boleh pulang ke rumah. Gardu dibangun di tengah jalan raya, hanya bagian pinggir kiri dan kanan yang diberi lantai. Di tengahnya tetap terbuka, sehingga kendaraan bisa lalu lalang. Dengan demikian, bangunan itu penuh debu, dan bau karena terkadang terdapat kotoran sapi. Keadaan yang jorok,

46 Hadhariyah M, "Periode-periode Perjuangan di Indonesia yang Saya Alami", naskah ketikan, Banjarmasin, 1981, hlm. 9.

tengik, dan kotor itulah, yang dalam istilah daerah kala itu disebut “*Bau Gardu*”.⁴⁷

Kerja rodi bisa dilakukan di kampung sendiri maupun di luar kampung. Mereka dipaksa membersihkan jalanan, saluran air atau got, jembatan, *tabat*, *antasan*, dan sebagainya. Di luar kampung ia mungkin bekerja sejauh 15 s.d. 30 km dari kampungnya, membuat jalan, memecah batu pengeras jalan dan sebagainya. Bagi yang berada, ia dapat menebus kewajiban kerja rodi ini dengan membayar “*uang erakan*” yang diserahkan kepada pangerak-pangerak.

Dalam hal ini pemerintah kolonial langsung menguasai tata laksana desa dengan kiai di atasnya sebagai penguasa didampingi Kontrolir. Kepala kampung biasa disebut pembakal, didampingi oleh beberapa pangerak sebagai wakil kepala kampung, kepala padang, kepala sungai, kepala hutan dan panakawan-panakawan. Pembakal biasanya dibantu pula oleh seorang wakil dan seorang juru tulis.

Pangerak-pangerak diangkat sesuai luas wilayah anak-anak kampung yang dikuasai pembakal. Pangerak adalah pembantu dan tangan kanan pembakal untuk mengepalai wilayah-wilayah kampung; maerak (merodi) orang-orang kampung; mengumpulkan orang-orang; menagih pajak tanah; menagih pajak kepala; menagih pajak *erakan*.⁴⁸

Untuk memberi tahu penduduk kampung, pangerak menugaskan tukang bendi (dokar) yang dengan membawa sebuah gong kecil berkeliling kampung memberitahukan agar halaman dan selokan dibersihkan, *tabat* air diperbaiki bersama, pajak-pajak segera dibayar, penduduk kampung segera berkumpul dan sebagainya.

47 Aam Niu, “Perjoangan Tempoe Doeloe: Sopir Taksi Diinstruksikan Pakai Piyama”, dalam *Banjarmasin Post*, 7 Desember 1978.

48 M. Idwar Saleh dkk., *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, Banjarmasin, 1978/1979, hlm. 47.

Administrasi umum dan keuangan dikelola oleh juru tulis. Persyaratan untuk menjadi kepala kampung amat sederhana, tidak selamanya berasal dari orang baik-baik. Paling tidak ia harus berani, jagoan, taat kepada atasan, boleh buta huruf asal kepemimpinannya jalan. Atasannya mungkin seorang asisten kiai, kiai maupun hoofdkiai.

Kepala padang bertugas membagi tanah hutan yang akan dibuka oleh peminat baru atau mengklasifikasikan tanah untuk menilai iuran pajak tanah yang harus dibayarkan. Kepala hutan lain lagi, tiap kepala hutan mengepalai sebuah hutan. Ia bertugas mengukur batas-batas hutan yang masuk hutan garapan, mengawasi hutan, rimba, kebun dan sebagainya.

Kepala Sungai tugasnya mengawasi kebersihan sungai supaya dapat dilalui, membuat *tabat-tabat* baru untuk menaikkan air ke sawah, memungut hasil pedalaman yang keluar melalui sungai tersebut.

Pangerak dan para kepala padang, kepala hutan, dan kepala sungai adalah pembantu dan tangan kanan pembakal, dan pembakal adalah pimpinan unit terkecil sebagai perpanjangan penguasa kolonial. Tugas mereka lebih dititikberatkan kepada kepentingan pemerintah kolonial. Mereka hanyalah pembantu pemerintah dalam memungut pajak, menyediakan tenaga kerja untuk rodi atau *erakan*, di samping menjaga ketertiban daerah masing-masing.

Karena berhadapan langsung dengan rakyat pada saat pemungutan pajak, maka pembakal dan pangerak seolah-olah lebih berkuasa dibanding Kontrolir. Hal ini sangat berbeda dengan kiai yang kadangkala tidak mau berbuat yang demikian.

Sistem pemungutan pajak pada waktu itu dikenal dengan nama *Collecteloon*⁴⁹ yakni pembakal melaksanakan

49 Sjamsuddin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah Fkg Unlam, Banjarmasin, 1970, hlm. 11-12.

pemungutan pajak yang besar kecilnya sudah ditentukan oleh pemerintah melalui *Commissie Aanslog*.⁵⁰

Setiap orang yang wajib pajak, selain harus menyerahkan uang pajaknya kepada pembakal juga harus ditambah 0,75 gulden sebagai penghasilan kepada pembakal. Pajak yang terkumpul ini kemudian oleh kepala desa diserahkan kepada kiai, dan selanjutnya oleh kiai diserahkan ke kas negara.

Dari kenyataan tersebut, kiranya tidak begitu aneh apabila pembakal berusaha dengan tekun memungut pajak kepada rakyat, karena semakin banyak pajak terkumpul semakin besar pula penghasilan yang akan diperoleh. Kadangkala tidak terpikir oleh mereka, apakah rakyat mampu membayar pajak yang dibebankan itu.

Beban pajak yang memberatkan itu menjadi perhatian utama organisasi-organisasi pergerakan di daerah ini, seperti yang diperjuangkan oleh Sarekat Islam untuk dapat dihapuskan, seperti yang tertuang dalam Mosi Kongres sebagai hasil dari Kongres Sarekat Islam di Banjarmasin pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 1923.

Penghapusan pajak juga diperjuangkan oleh Partai Ekonomi Kalimantan (PEK) yang dipimpin oleh Anang Acil Kesuma Wira Negara tahun 1930-an. Partai ini berjuang mengusahakan pembebasan pajak bagi penduduk yang berusia lebih dari 50 tahun, atau yang usianya kurang dari 18 tahun, terutama yang belum kawin.

Berbagai bentuk pengurusan ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial itu, mengakibatkan rakyat yang umumnya golongan petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap, selalu diliputi oleh rasa ketakutan akan denda dan hukuman yang dikenakan kepada mereka apabila terlambat membayar pajak atau melalaikan kerja *erakan*. Sebab bagi rakyat yang melalaikan membayar pajak, sehingga terlambat, maka dikenakan hukuman denda lima gulden atau hukuman badan selama dua hari.

50 Komisi yang menetapkan besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

Adanya beban pajak, pungutan, rodi atau *erakan* dan ditambah dengan keadaan depresi ekonomi saat itu, merupakan salah satu pemicu keresahan yang bermuara kepada munculnya pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh Guru Nanang Sanusi 1914-1918 dan pemberontakan Gusti Darmawi tahun 1927.

Guru Nanang Sanusi selain sebagai guru tasawuf juga merupakan keturunan "*Anak Cucu Urang Sepuluh*" yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda menuntut pembebasan dari *erakan* dan pajak, sebagaimana hak istimewa yang telah diterima orang tua mereka pada masa Kerajaan Banjar. Pemberontakan Guru Sanusi bersumber pada persoalan *erakan* ini, empat tahun ia diburu Belanda, lari dari Amuntai ke Margasari, Bakumpai dan bersembunyi di daerah Tangkas di Sungai Batang Martapura. Belanda mendatangkan pasukan marsose yang akhirnya berhasil menembak mati Guru Sanusi.⁵¹

Sesungguhnya keadaan sosial berkaitan dengan pajak, rodi, *erakan*, dan pungutan ditambah dengan pendidikan yang kurang maju menjadi dominan sifatnya antara tahun 1900 –1928 di Kalimantan Selatan. Keadaan itu pula yang mengakibatkan banyak penduduk khususnya dari Hulu Sungai yang melakukan eksodus ke pesisir Timur Sumatera seperti Sapat dan Tembilahan. Sampai tahun 1950 jumlah penduduk suku Banjar di daerah Sapat dan Tembilahan mencapai 250.000 orang.⁵² Selain ke pesisir Sumatera, mereka juga menuju Semenanjung Tanah Melayu untuk mencari penghidupan yang lebih baik.⁵³

51 M. Idwar Saleh dkk., *op.cit.*, hlm. 48-49.

52 M. Idwar Saleh dkk., *ibid.*, hlm. 51.

53 Pada tahun 1920-an, kakek penulis, yakni Itit dengan isteri dan anaknya Suri, serta Kumbih pergi madam dari desa Awang Barabai ke Batu Pahat Johor di Semenanjung Tanah Melayu untuk mencari penghidupan yang lebih baik sebagai buruh perkebunan. Lihat pula Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 9 yang menyebutkan awal abad ke-20 puluhan ribu penduduk Hulu Sungai pergi untuk menetap di Melaka.

D. Pengaruh Pendidikan

Meski tertinggal jauh dibanding dengan Jawa maupun Sumatera, pendidikan di Kalimantan Selatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan golongan cendekiawan atau warga terpelajar yang nantinya menjadi pimpinan pergerakan kebangsaan di daerah ini.

Pada dasarnya warga terpelajar itu dihasilkan oleh dua bentuk pendidikan yang masing-masing penyelenggaranya berbeda, yakni: (1) Sekolah Pemerintah, yakni sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda; (2) Sekolah Kaum Pergerakan, yakni Sekolah Partikelir⁵⁴ maupun Sekolah Agama,⁵⁵ yang umumnya diselenggarakan oleh kaum pergerakan.⁵⁶

Selain itu ada pula sekolah yang didirikan oleh missie dan zending Kristen, dengan daerah operasinya di pedalaman Kalimantan. Sekolah ini bukan sekolah negeri, tetapi digunakan sebagai alat oleh Pemerintah Hindia Belanda agar rakyat di daerah ini menjadi patuh dan penurut terhadap pemerintah, di samping misi sekolah itu sendiri sebagai alat kristenisasi. Oleh karena itu, sekolah ini diberi

54 Sekolah partikelir adalah sekolah swasta. Pemerintah Hindia Belanda seringkali menekan, mengawasi sekolah-sekolah partikelir dengan "*Wilde Scholen Ordonnantie 1932*" yang bertujuan untuk mengendalikan perasaan kebangsaan di kalangan pelajar. Berdasarkan ordonansi itu, sekolah partikelir dan guru-gurunya harus minta izin dahulu kepada pemerintah, dan isi pelajarannya tidak boleh melanggar peraturan pemerintah, lihat Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 284-285.

55 Sekolah Agama dapat dikatakan sebagai bagian Sekolah Kaum Pergerakan, karena selain mengajarkan agama Islam, juga menanamkan kesadaran berbangsa kepada anak didiknya, dan terbukti penyelenggara pendidikan ini yakni *tuan guru* maupun alumninya banyak menjadi pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

56 Menurut Sjarifuddin, pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada tiga bentuk pendidikan yakni: (1) Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda; (2) Sekolah-sekolah Partikelir; (3) Sekolah-sekolah Agama, lihat Sjarifuddin, *ibid.*, hlm. 280-285.

subsidi dan kebebasan bergerak oleh Pemerintah Hindia Belanda.⁵⁷

Pada kenyataannya kesempatan untuk menuntut pengetahuan dari tingkat rendah sampai yang tinggi dalam sekolah-sekolah pemerintah, bagi rakyat biasa sangat dibatasi. Yang diberi kesempatan menuntut pelajaran secara luas di sekolah-sekolah pemerintah, ialah: anak pegawai negeri, orang kaya, keluarga bangsawan, orang asing utamanya Cina, sedang rakyat biasa hanya diizinkan setelah melalui *School Commissie* yang keanggotaannya terdiri dari Kontrolir, Kiai, dan *School-Opziener*.⁵⁸ Memang ada di antara orang bumiputera yang karena status orang tuanya diberi kesempatan untuk memasuki sekolah yang khusus diperuntukkan bagi orang kulit putih seperti ELS, akan tetapi di sana pun mereka masih dibedakan dengan orang-orang peranakan (Indo) dan Eropa.⁵⁹

57 Sjarifuddin, *ibid.*, hlm. 282.

58 Sjarifuddin, *loc.cit.*

59 Savitri Prastiti Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hlm. 115-116.



Meski jauh di pedalaman Kalimantan, di Pulang Pisau terdapat Sekolah Agama Islam untuk memajukan pendidikan masyarakat.

(Repro. Kempen "Kalimantan").

Pengaruh pendidikan pada sekolah pemerintah dapat dilihat dari dua hal, yakni: (1) Adanya diskriminasi dalam sekolah pemerintah, misalnya untuk orang Eropa disediakan ELS (*Europese Lagere School*), untuk orang Cina HCS (*Hollands Chinese School*), dan untuk bumiputera HIS (*Hollands Inlandse School*). Diskriminasi itu sudah barang tentu telah menimbulkan sikap kebencian terhadap Pemerintah Hindia Belanda; (2) Munculnya elite cendekiawan sebagai hasil dari pendidikan secara Barat di sekolah pemerintah. Banyak di antara elite cendekiawan itu yang menjadi pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

1. Sekolah Pemerintah

Sebagai dampak dari keuntungan luar biasa yang diperoleh Belanda melalui penerapan Sistem Tanam Paksa dan eksploitasi kaum kapitalis Eropa, maka di penghujung

abad ke-19 telah timbul pandangan baru bahwa pemerintah Belanda sebetulnya berutang budi kepada tanah jajahan. Hutang budi diantaranya harus dibayar dengan memberikan pendidikan kepada bangsa bumiputera. Terkenal slogan trilogi dari Politik Etis, "Irigasi, Edukasi dan Emigrasi"⁶⁰ yang dimaksudkan untuk memajukan bumiputera.

Semboyan memajukan irigasi, edukasi dan emigrasi didukung oleh para penanam modal di Hindia Belanda. Karena perkebunan-perkebunan memerlukan irigasi yang intensif, tenaga kerja murah sehingga emigrasi ke luar Jawa sangat diharapkan. Persekolahan dibuka namun pada dasarnya bukan bertujuan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi untuk kepentingan mencetak pegawai-pegawai rendahan yang berpendidikan Barat, yang diperlukan Pemerintah Hindia Belanda maupun kaum pengusaha partikelir.

Bagi beberapa kalangan Belanda, mengembangkan pendidikan gaya Barat, bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah kolonial, tetapi juga seperti dikatakan oleh van der Pijls – untuk membentengi Belanda dari "volcano Islam".⁶¹

60 Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, Depdikbud, Jakarta, 1985, hlm. 21.

61 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hlm 122.



Peserta “Pentjerahan V.V.S – J.V.S 17-7-‘41” saat berfoto bersama di halaman depan “Openbare Vervolgschool Banoea Koepang 1923”, Barabai.
(Foto dok. H. Abdul Muis).

Tetapi selaras dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang membagi status sosial ke dalam tiga golongan, maka sekolah pun juga berjenis-jenis sesuai dengan golongan masyarakatnya, meski lembaga pendidikannya setingkat. Misalnya sekolah yang setingkat dengan sekolah dasar adalah ELS (*Europese Lagere School*) untuk orang Belanda atau orang yang haknya dipersamakan, HCS (*Hollands Chinese School*) untuk orang Cina, dan HIS (*Hollands Inlandse School*) untuk masyarakat bumiputera. Oleh Pemerintah Hindia Belanda, status HCS disamakan dengan ELS, namun dibedakan dengan HIS dalam hak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Bukan hanya itu, untuk kalangan bumiputera, Pemerintah Hindia Belanda juga melakukan diskriminasi, karena status masyarakat “inlander” terbagi atas tiga kategori, yaitu kategori A adalah kaum bangsawan, pejabat tinggi berpangkat minimal Asisten Kiai (Asisten Wedana) serta pengusaha kaya yang berpenghasilan bersih di atas 75 gulden sebulan. Kategori B adalah orang tua yang memperoleh pendidikan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan *Kweekschool* ke atas, sedangkan kategori C adalah pegawai kecil, pengusaha kecil, militer atau orang tua yang memperoleh pendidikan HIS. Oleh karena itu seorang bumiputera dapat mengikuti pendidikan setelah melewati seleksi yang ketat, bukan seleksi kecerdasan melainkan seleksi ras dan status bahkan pangkat kepegawaian.⁶²

Sebagai contoh, yang berhak mendapat pendidikan HIS (*Hollands Inlandse School*) yakni sekolah pemerintah untuk pribumi yang berbahasa pengantar bahasa Belanda dengan lama pendidikan tujuh tahun adalah masyarakat kategori A dan B.⁶³ Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS, murid yang pintar dan mempunyai orang tua mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO, sekolah lanjutan pertama, dan dari sini terus ke AMS (*Algemene Middelbare School*). Jika ia mampu atau nasibnya sedemikian baik, ia dapat melanjutkan ke sekolah tinggi, di Pulau Jawa atau Eropa.

Sampai dengan 1942 di Kalimantan Selatan terdapat dua buah ELS yakni di Banjarmasin, dan di Sebelimbingan Kotabaru. Sedangkan HCS selain terdapat di Pacinan dan di jalan Kolonel Sugiono sekarang, juga terdapat di Kotabaru yang kemudian tutup. Selain itu terdapat pula dua buah HIS di Banjarmasin, sebuah *Neutrale Hollands Inlandse School*, sebuah HIS di Kandangan dan sebuah HIS di Amuntai.

Di Kalimantan Selatan antara 1875-1889 telah ada sekolah untuk mengadakan tenaga guru dan pamong yang

62 Ramli Nawawi ed., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1992, hlm. 30-31.

63 Ramli Nawawi ed., *ibid.*, hlm. 33.

disebut sekolah Raja atau *Kweekschool voor Inlandse Onderwijzers*, yang bertempat di Banjarmasin. Setelah sekolah ini ditutup putera-putera daerah Kalimantan Selatan baru bisa belajar di sekolah guru lagi pada tahun 1919 ke Makassar. Yang diterima adalah lulusan Sekolah Kelas Dua, yang dikenal dengan sebutan Sekolah Melayu.

Sekolah Melayu ada dua jenis yakni Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua, kedua sekolah itu berbahasa pengantar Melayu. Pada tahun 1913 Sekolah Kelas Satu dijadikan *Hollands Inlandse School* (HIS) yakni sekolah dasar bumiputera yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah Kelas Dua, pertama kali didirikan di Banjarmasin pada tahun 1906 dengan lama pendidikan lima tahun. Pada tahun 1934 Sekolah Kelas Dua dipecah menjadi *Volksschool* (sekolah desa) tiga tahun dan setelah menyelesaikannya dapat melanjutkan ke *Vervolgschool* (sekolah sambungan) yang lamanya dua tahun. Murid-murid lulusan Sekolah Kelas Dua ini meneruskan pelajarannya sejak 1910 ke Makassar memasuki *Kweekschool* untuk jadi guru, dan sesudah 1919 beralih ke *Normaalschool* Makassar karena *Kweekschool*nya tutup.⁶⁴

Untuk menampung para murid yang tidak bisa melanjutkan ke *Vervolgschool*, pemerintah menyediakan sekolah umum yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat dengan nama *Openbare Vervolgschool*, misalnya yang terdapat di desa Banua Kupang, Barabai yang didirikan tahun 1925.

Untuk jadi guru bantu, tamatan Sekolah Kelas Dua ini bisa memasuki *Normaal Cursus* guru bantu di Banjarmasin dan Kandangan yang dibuka antara 1911-1914 selama dua tahun mengajar. Untuk guru-guru wanita pada *Meisjes Cursus* (Sekolah Puteri), dibuka kesempatan pada *Normaalschool* Blitar dengan lama pendidikan 4 tahun.

64 Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banjarmasin, 1977/1978, hlm. 85.

Pada tahun 1930 sebanyak 15 orang puteri Banjar berumur rata-rata 14-15 tahun diberi kesempatan berangkat menuju Blitar untuk bersekolah di *Meisjes Noormaalschool*, dari Kandangan delapan orang yaitu: Malati, Atung, Nursehan, Itai, Jawiah, Aluh, Nursiah, dan Maserah. Dari Rantau, Barlian dan Masriah. Dari Barabai Siti Aisyah. Dari Amuntai Syamsyiah. Dari Alabio, Johar Manikam. Dari Kotabaru, Nursaniah dan dari Muarateweh Aisyiah.⁶⁵

Murid-murid sekolah desa (*Volksschool*) dan sambungannya (*Vervolgschool*) yang tak bisa melanjutkan ke HIS bisa mengecap pendidikan setingkat atau menyeberang ke lingkungan sekolah “Belanda”, dengan memasuki *Schakelschool* yang pertama didirikan di Barabai tahun 1933.

Belanda mendirikan bukan hanya *Vervolgschool* (dua tahun) dengan murid campuran, tapi ada pula yang melulu untuk puteri disebut *Meisjes Vervolgschool*, didirikan pada tahun 1935 di Banjarmasin dan Barabai, diantaranya di desa Banua Kupang pada tahun 1932.

Untuk guru-guru desa dibuka *Leergang voor Volksonderwijzers* (dua tahun), kursus untuk memajukan pertanian, *Landbouw Cursus* tahun 1937, dan Sekolah Dagang Rendah di Banjarmasin.

65 Catatan Hamlan Arpan, Banjarmasin.



Sekolah Puteri di Banua Kupang, Barabai
 “MEISJESVOLKSSCHOOL -1932- BANOEA KOEPANG”
 (Foto dok. H. Abdul Muis).

Untuk kelanjutan HIS, di Banjarmasin terdapat MULO yang pertamakali dibuka tahun 1928 dan merupakan satu-satunya sekolah ‘tertinggi’ untuk seluruh Kalimantan berlokasi di jalan Loji.⁶⁶ Karena satu-satunya inilah, maka tamatan sekolah rendah (ELS, HCS dan HIS) terkumpul di MULO Banjarmasin, dan tidak ada perlakuan diskriminasi. Anak-anak Bumiputera, anak-anak Cina totok dan peranakan,

66 Sekarang jalan Loji dikenal dengan nama jalan Mayjen R. Soeprapto. Di bekas lokasi sekolahnya kini berdiri gedung Mahligai Pancasila dan rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan.

serta anak-anak Beland totok dan Indo, belajar bersama di satu kelas dan bergaul dengan baik.⁶⁷

Untuk dapat masuk MULO di Banjarmasin, siswa kelas tujuh sekolah rendah, oleh kepala sekolahnya diberi surat rekomendasi untuk langsung ---tanpa ujian--- diterima di kelas persiapan (*voorklas*) atau di kelas satu. Rekomendasi diberikan hanya untuk "*voorklas*" dan siswa yang berkeinginan dapat mengikuti ujian masuk ke kelas satu.

Di kelas dua siswa diarahkan ke jurusan yang oleh rapat guru-guru dianggap tepat dan sesuai dengan kemampuan si siswa. Ada tiga jurusan atau '*afdeling*' yang disediakan oleh MULO Banjarmasin, yakni jurusan Bahasa dan Sastra, jurusan Ilmu Pasti dan Alam dan jurusan Niaga yang masing-masing disebut *afdeling* A, B dan C.

Bahasa Belanda adalah bahasa pengantar di samping bahasa Inggris dan Jerman yang wajib diajarkan di semua kelas dan jurusan. Pelajaran bahasa Melayu bersifat fakultatif antara lain diajarkan oleh Ki Agus Muhi dan Fajar Siddik gelar Sutan Endar Bongsu. Pelajaran agama Islam berhasil dimasukkan di sekitar penghujung 1939 berkat usulan Pemuda Muslimin MULO (PMM).⁶⁸ Pembimbing yang pertama adalah Marwan Ali, BA.⁶⁹

Sejak MULO yang didirikan untuk sekolah golongan atas, di tahun 1939 didirikan pula Inheemse MULO atau MULO bumiputera sebagai sambungan dari *Vervolgsschool*, tujuannya hanya untuk mendidik tenaga administrasi atau bukan untuk mempersiapkannya bagi sekolah selanjutnya.

Pandangan hidup Barat dan pengetahuan Barat relatif berkembang pada kelompok tamatan *Hollands Inlandse School* (HIS) dan MULO. Sebagai kelompok semi intelek mereka (di samping lulusan-lulusan *Kweekschool* dan HIK

67 Hasil wawancara dengan M. Suriansyah Ideham, Banjarmasin.

68 Pendiri/pengurus Pemuda Muslimin MULO antara lain M. Suriansyah Ideham, Huzaimah, Yusuf Jaya, Mas Ripaie, Sri Mulyani, dan Ishak Effendi.

69 M. Suriansyah Ideham, "Sistem Pendidikan di Zaman Hindia Belanda", naskah ketikan, Banjarmasin, tanpa tahun, hlm. 4.

dan *Normaalshool*), merupakan mayoritas kehidupan intelektual di Kalimantan Selatan yang dipengaruhi oleh perkembangan dan pusat pendidikan yang terdapat di Jawa.⁷⁰ Lulusan HIS dan MULO ini banyak yang menjadi pamongpraja atau pegawai perkantoran pemerintah sebelum Perang Dunia II, ditambah dari mereka yang lulusan OSVIA Makassar, yang jadi pemegang jabatan pucuk pamongpraja dari kiai kepala ke bawah.⁷¹

Melalui sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pada umumnya Pemerintah Kolonial berupaya menerapkan politik Pem-Belanda-an, namun dalam pelaksanaannya tidak seluruhnya berhasil sebagaimana apa yang mereka harapkan. Sebagian adakalanya memang selalu menurut kepada kemauan kaum penjajah dan memandang rendah kepada orang-orang sebangsanya. Akan tetapi, ada pula di antara mereka yang jiwanya belum mati dan menentang perlakuan dan penghinaan terhadap bangsanya. Sebagai contoh, Merah Johansyah, anak Kiai Besar Merah Nadalsyah (Kiai Besar Hulu Sungai), setelah menamatkan pelajaran di OSVIA⁷² di Makassar serta telah pula diangkat sebagai pamongpraja di daerah ini, malah

70 Depdikbud, *op.cit.*, hlm. 89.

71 Lulusan OSVIA Makassar diantaranya Syarkawi bin Achmad Dahlan lahir di Amuntai 15 Desember 1907, Kiai Kepala Klas I terhitung 1 Maret 1951 sebagai pejabat Bupati Hulu Sungai di Kandangan; Basuni bin H. Mohammad Arsyad lahir di Barabai 31 Agustus 1904, Kiai Kepala Klas I, Acting "Bupati Banjarmasin" diperbantukan pada Gubernur Kalimantan; Achmad Ruslan lahir di Banjarmasin 31 Januari 1902, Kiai Kepala Banjarmasin, "Bupati Banjarmasin" berkedudukan di Banjarmasin, lihat "Pengangkatan Bupati2" dalam *Harian Indonesia Merdeka*, Senin 30 April 1951.

72 Selama belajar di OSVIA Makassar, Merah Johansyah mendirikan organisasi "Pemuda OSVIA Kalimantan" antara lain dengan M. Yusran dan M. Jahri pada tahun 1925-1926, lihat Anggraini Antemas, *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan*, Mega Sapura, Amuntai, 1988, hlm. 26.

menjadi pelopor pergerakan kebangsaan dengan mendirikan cabang PBI/Parindra di Kalimantan Selatan.⁷³

2. Sekolah Kaum Pergerakan

Pada tahun-tahun pertama abad ke-20, di Kalimantan Selatan berdiri berbagai usaha pendidikan. Ada yang didirikan oleh partai politik, organisasi masyarakat, dan juga oleh persatuan umat Islam. Usaha pendidikan ini lahir, karena sekolah-sekolah yang tersedia tidak dapat menampung hasrat masyarakat, terutama masyarakat kebangsaan (nasional) dan keagamaan (Islam) dan agama lainnya.

Sekolah kaum pergerakan adalah sekolah yang dilihat dari segi motivasinya didirikan dengan motivasi nasionalisme yakni selain bertujuan agar anak didik memiliki rasa kebebasan dan tanggung jawab juga agar menjadi putera tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian tinggi bagi nusa dan bangsa.⁷⁴

Sekolah ini pada umumnya adalah sekolah swasta yang nasionalistis dan anti kolonial, didirikan oleh perkumpulan dan tokoh pergerakan yang mengutamakan jalan pendidikan dalam pergerakan mereka dan sebagian tidak bersubsidi. Sebab itu banyak pula didirikan kursus bebas seperti kursus memberantas buta huruf, mengetik sampai dengan kursus politik. Sekolah dimaksud, di Kalimantan Selatan antara lain sekolah-sekolah Perguruan Taman Siswa dan sekolah Perguruan Rakyat Parindra.

73 Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 298.

74 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 251.



Kursus Bagian Pertanian di Barabai
 “Landbouwklassse Barabai Cursus 1940-1941”
 (Foto dok. H. Abdul Muis).

Di samping itu, ada pula sekolah swasta yang bercorak Islam yang selain mengajarkan mata pelajaran agama Islam untuk anak didik juga memberikan pelajaran umum seperti yang dilaksanakan oleh Sekolah Persatuan Perguruan Islam, Sekolah Sarekat Islam, Sekolah Muhammadiyah, dan Sekolah Musyawaratutthalibin.

Melalui sekolah-sekolah agama, para alim ulama yakni “tuan guru” sangat berperan dalam mengembangkan anak didik atau santrinya, bukan hanya dalam bentuk pendidikan agama namun juga dalam bentuk penanaman kesadaran berbangsa. Pada umumnya, tuan guru juga mempunyai massa yang fanatik di pedesaan. Pemikiran atau fatwanya juga sangat berpengaruh di masyarakat.

Dahulu ada juga dikenal semacam kursus keterampilan yang bertujuan mendidik masyarakat agar mempunyai

keterampilan sebagai usaha penopang ekonomi keluarganya kelak. Kursus keterampilan itu umumnya bersifat kerajinan tangan seperti kursus pertanian, menyulam, pertukangan, dan anyaman rotan. Kursus seperti itu merupakan bagian dari perjuangan untuk meningkatkan keterampilan dan mengangkat ekonomi rakyat.



Pameran Kerajinan Tangan di Barabai
 “Tentoonsstelling Keradjinan Tangan Boemi Poetera – Kalimantan-“. Berdiri paling kanan, Pembakal Aman Pelajau
 (Foto dok. H. Abdul Muis).

a. Sekolah Persatuan Perguruan Islam

Pada mulanya, sekolah yang diselenggarakan dengan sistem klasikal merupakan peningkatan dari sistem pengajian yang telah berkembang sebelumnya. Sekolah-sekolah yang berkembang tersebut tidak memiliki hubungan

antar yang satu dengan lainnya, baik dari seri administratif maupun pengelolaannya. Tidak hanya itu, meski sama-sama sekolah agama, sekolah tersebut tidak memiliki keseragaman bentuk dan isi kurikulum.

Perjuangan melalui lembaga pendidikan merupakan sarana yang ampuh untuk mencetak dan menumbuhkan kader-kader bangsa. Hal itulah yang dimanfaatkan guru-guru yang ada di Barabai dengan mendirikan Sekolah *Persatuan Perguruan Islam* (PPI) yang berpusat di Pantai Hambawang.⁷⁵ Pendirinya adalah alumni Universitas Al Azhar Kairo, diantaranya H. Mansur Ismail, H.M. As'ad, H.A. Hamid Abdulkarim, H. Muhammad Rafi'i, H. Mugeni Marwan, serta alumnus *Madrasah Ash-Sholatiyah* Makkah H.M. Mukri.⁷⁶

PPI dibentuk dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sekolah-sekolah Islam dan menyeragamkan bentuk serta isi kurikulumnya. Dari Barabai sekolah PPI berkembang di Pantai Hambawang, Haruyan, Jatuh, Birayang, Kandangan, Amuntai, Banjarmasin dan lain-lain. Semuanya berjumlah 36 cabang se Kalimantan Selatan, namun yang terbanyak berlokasi di daerah Barabai.⁷⁷

Sekolah PPI mempunyai tingkatan pendidikan, yaitu tingkat Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan tingkat Aliyah. Mata pelajaran yang diajarkan selain pengetahuan agama juga ilmu pengetahuan umum. Cara mengajar yang dipergunakan adalah sistem guru vak (guru

75 Di antara alumni PPI itu antara lain H. Abdul Gani (Pensiunan ABRI, mantan Bupati Hulu Sungai Tengah) dan Idjus Saidi (Komisaris pada staf Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan), lihat Sjarifuddin, *op.cit.*, 304.

76 Muderis Zaini dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai Tengah*, Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Tingkat II Hulu Sungai Tengah, Barabai, 1998, hlm. 17.

77 Ahmad Basuni, "Mengenal Perjuangan Ummat Islam di Kalimantan, Menuju Kesatuan Tenaga Islam di Dalam RIS", dalam *Almanak Indonesia 1950*, Pustaka Djaja, Bandung, 1950, hlm. 212.

pemegang pelajaran). Untuk itu, PPI banyak melibatkan tokoh agama untuk bersama-sama membina madrasah PPI, dan setiap guru diberi wewenang untuk memegang mata pelajaran yang disenangi.⁷⁸

PPI sangat berperan penting dalam menanamkan semangat persatuan, karena dalam proses belajar dan mengajar ditanamkan semangat kesadaran berbangsa dan usaha menghapus penjajahan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika guru-guru PPI banyak yang ditangkap seperti yang terjadi pada sekolah Islam yang diselenggarakan oleh PPI di Birayang.⁷⁹

b. Sekolah Sarekat Islam

Pada tahun 1914 Sarekat Islam⁸⁰ disingkat SI berdiri di Banjarmasin dan mendapat pengakuan badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *besluit* Gubernur Jenderal Nomor 33 tanggal 30 September 1914. Organisasi ini dibawa oleh H.M. Arip (H. Matarip atau H. Muhammad Arip Bakumpai)⁸¹ seorang pedagang asal Marabahan yang berdagang pulang pergi antara Jawa dengan Kalimantan.

Dari Banjarmasin, SI berkembang di beberapa kota di Kalimantan Selatan. Di kota-kota yang ada cabang SI terdapat gedung kegiatannya yang dikenal dengan sebutan gedung *kalap* (club). Biasanya gedung ini dimanfaatkan pula sebagai tempat kegiatan madrasah yang dikelola oleh SI.

Di Barabai, SI berdiri pada tahun 1921 dengan ketuanya yang pertama dipegang oleh Gusti Muhammad Arif dan Sekretarisnya Habib Alwy. Pada waktu peresmiannya di Barabai langsung dihadiri oleh pendiri Centraal Sarekat

78 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 50-52.

79 Muderis Zaini, dkk., *op.cit.*, hlm. 17.

80 Sesuai dengan arsip-arsip yang ada organisasi ini ditulis Sarekat Islam, bukan Syarikat Islam atau Sarikat Islam.

81 Pada keterangan foto koleksi Kamaludin (anak H.M. Arip) bertanggal 20 November 1939 di Marabahan dan salinan Ma'loemat National Borneo Conferentie tertulis H.M. Arip, bukan H.M. Arif.

Islam (CSI) OS Cokroaminoto dan Abi Kusno Cokrosoyoso, bertempat di gedung SI di jalan H. Hassan Basry sekarang.⁸²

Di Banjarmasin terdapat Gedung Club yakni di Seberang Masjid, dan di gedung inilah SI mendirikan sekolah Islam lima tahun yang diberi nama "*Hadhihil Al-Madrastul Wathoniah*". Mata pelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan agama dan sedikit pengetahuan umum. Guru-guru yang mengajar di sini adalah H. Mohammad Said (Kepala Sekolah), Said Idrus (Wakil Kepala Sekolah), dengan guru-guru pembantu Syekh Mohammad bin Amir, H. Makhmud, M. Ideham, M. Pasi, H. Anang Akhmad, H. Abdul Syukur dan H. Hamsyah.

Sekolah Islam yang sama tuanya dengan Sekolah Islam SI adalah *Arabische School* yang kemudian menjadi *Islamsche School* yang didirikan oleh orang-orang Arab, khususnya untuk anak-anak mereka. Salah seorang pemimpin sekolah ini adalah Saleh Bal'ala. Ia sangat dikenal waktu itu, karena selain suka bergaul dengan pemuka masyarakat bumiputera, ia juga anggota SI yang kemudian menjabat ketua Fathal Islam yakni suatu organisasi dakwah Islamiyah, dan juga ketua PKU yakni organisasi filial dari Muhammadiyah.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, pada tahun 1922 di saat SI dipimpin oleh Mohammad Horman, didirikanlah *Particuliere Hollands Inlandse School* atau HIS Swasta bertempat di Pasar Lama Banjarmasin dipimpin oleh Abdul Gais, dibantu oleh Mansyur Ali Hasan.⁸³

Di Marabahan, atas dorongan H.M. Arip telah berdiri pula HIS Swasta yang dikelola oleh Sarekat Islam dan di kemudian hari nantinya menjadi Perguruan Taman Siswa. Sedangkan di Kandangan, madrasah Sarekat Islam didirikan di Luklua yang kemudian menjadi Madrasah Islam Pandai.⁸⁴

82 Muderis Zaini dkk., *ibid.*, hlm. 38.

83 Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 31-33.

84 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 54.

c. Sekolah Musyawaratutthalibin

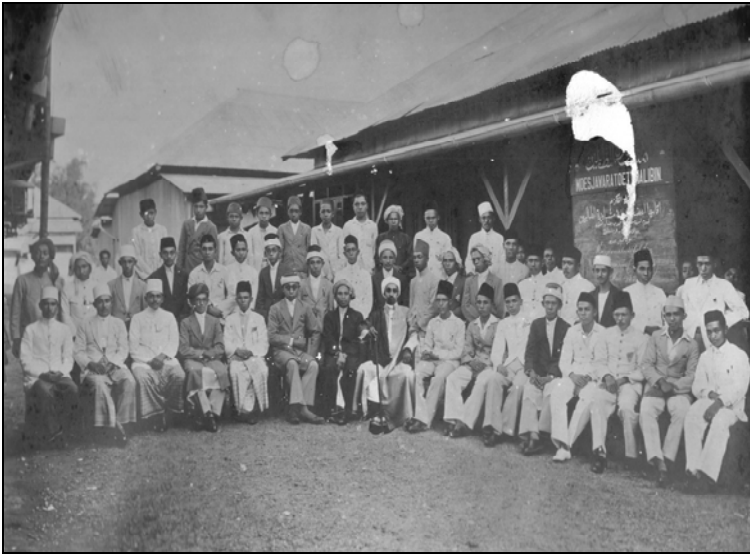
Organisasi Musyawaratutthalibin berdiri tanggal 12 Sya'ban 1349 H/2 Januari 1931 M di Banjarmasin.⁸⁵ Untuk melaksanakan ayat 4 pasal 3 Statuten Musyawaratutthalibin yang berbunyi: "*Mendirikan sekolah2 jang diberi pengadjaran Agama Islam dan ilmoe pengetahoean oemoem*", maka organisasi Musyawaratutthalibin mendirikan Madrasah Syafi'iyah di hampir semua cabang yang dikenal dengan sebutan Sekolah Musyawarah.⁸⁶

Bahkan di beberapa cabang, Musyawaratutthalibin memiliki gedung sekolah sendiri, antara lain: Normal Islam di Rantau, Sekolah Puteri di Kelua, Qismul Mudarrisin di Kandangan, Madrasah Diniyah di Sungai Tabukan dan Hambuku Hulu, Madrasah Syafi'iyah dan Sekolah Kuliyatul Mu'allimin di Samarinda, Hollands Indonesische Arabische School di Tembilahan, Sekolah Awaliyah dan Ibtidaiyah di Sapat, Madrasah Asy-Syafi'iyah Musyawaratutthalibin di Sungai Pandan Alabio.⁸⁷

85 M. Nur Maksum dkk., "Musyawaratutthalibin: Organisasi Islam Lokal Terbesar di Kalimantan Selatan Pada Masa Kebangkitan Nasional", Balai Penelitian IAIN Antasari, Banjarmasin, 1991. hlm. 4.

86 Mohammad Yusran, "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hlm. 48.

87 M. Nur Maksum dkk., *op.cit.*, hlm. 27-28.



Pengurus Musyawaratutthalibin saat pertemuan dengan Salim Jindan (duduk di tengah bersorban putih) ulama dari Hadramaut, Mei 1932 di jalan Pasar Lama Banjarmasin.
(Foto dok. Keluarga alm. Muhammad Zein)

Setelah kongresnya yang pertama tahun 1934 di Banjarmasin yang memutuskan mendirikan cabang dan sekolah di berbagai tempat, maka didirikanlah sekolah-sekolah Islam di cabang-cabang Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan dan Timur seperti Banjarmasin, Hulu Sungai, Berau, Bulungan, Tarakan hingga ke wilayah pesisir Timur Sumatera, terutama di daerah komunitas perantauan Banjar berada seperti Sapat, Kuala Tungkal, Enok, Tembilahan, Rengat, Parigiraya, Pulau Palas, dan bahkan sampai ke Pulau Bangka dan Belitung.⁸⁸

Sekolah yang terkenal adalah Normal Islam di jalan Keraton Rantau didirikan oleh tokoh-tokoh organisasi

88 M. Nur Maksum dkk., *op.cit.*, hlm. 27-28.

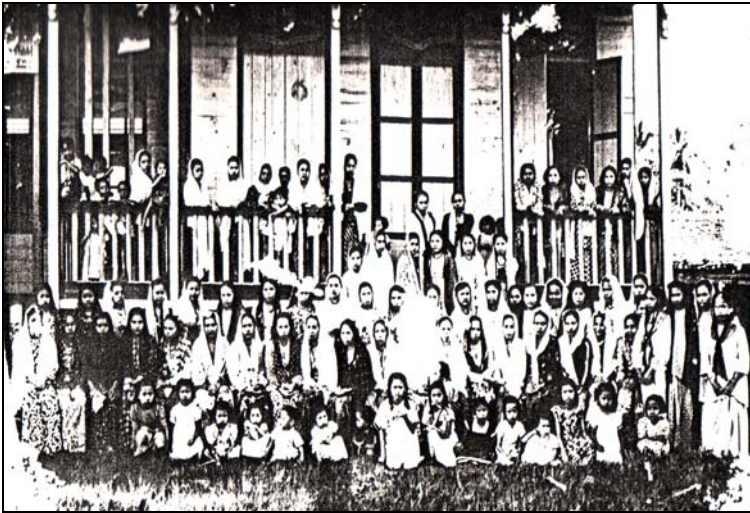
Musyawaratutthalibin pada tahun 1931. Sekolah yang tertua setingkat ibtidaiyah terdapat di Lumbu yang disebut Sekolah Arab tahun 1930, dan kemudian diambil alih pengelolaannya oleh Musyawaratutthalibin menjadi Madrasah Hidayah Islamiyah. Pada tanggal 25 Januari 1940 kedua sekolah itu diresmikan menjadi Sekolah Normal Islam Musyawaratutthalibin Rantau. Sekolah itu memiliki dua jenjang pendidikan, yakni Madrasah Ibtidaiyah lama pendidikan 4 tahun, dan Madrasah Tsanawiyah lama pendidikan 3 tahun.

Madrasah Normal Islam setingkat Tsanawiyah merupakan madrasah yang tertinggi di seluruh Kalimantan Selatan, diasuh oleh H. Mahyudin dan tokoh-tokoh agama lainnya di Rantau.⁸⁹ Sebagai pengajar, selain guru lokal juga didatangkan guru-guru dari terutama dari Gontor Ponorogo, seperti Maisyir Thaib, Bey Arifin⁹⁰ dan Khatib Syarbaini.⁹¹

89 A. Gazali Usman, *Sejarah Perjuangan Rakyat Tapin Periode Revolusi Fisik 1945-1949*, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Rantau, 1995, hlm. 44 – 45.

90 Dengan menumpang kapal *Slout van Dieman* Maisyir Thaib (19 tahun) dan Bey Arifin (22 tahun) berangkat dari Jawa ke Banjarmasin untuk kemudian terus ke Rantau untuk mengajar di Sekolah Normal Islam dengan gaji yang dijanjikan sebesar f. 25 dan bisa mendapatkan f.25 lagi jika mengajar lagi di malam hari, misalnya memberikan kursus bahasa Inggris. Meski sebagian muridnya sudah ulama, mereka yang berusia muda itu cukup cakap menunaikan tugasnya, lihat M. Nur Maksudkk., *op.cit.*, hlm. 46.

91 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 560.

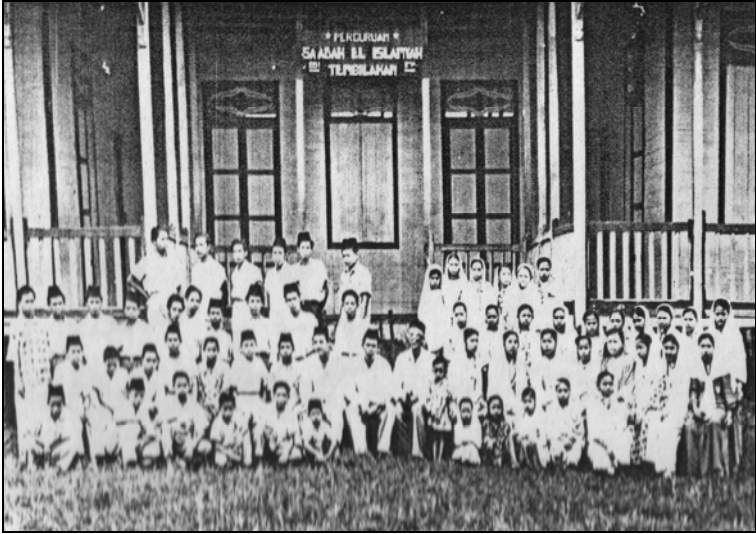


“Bermula di Banjarmasin, berkembang sampai ke Riau”
 Pengurus dan anggota Jam'iiyyatun Nisa Cabang Tembilahan,
 Riau, berfoto bersama di depan sekolah
 Musyawaratutthalibin Tembilahan.
 (Repro. M. Nur Maksum, dkk., 1991).

Di cabang Musyawaratutthalibin Samarinda terdapat sekolah Musyawarah yang terdiri dari tujuh kelas, yang dikepalai oleh H. Majedi Effendi dibantu oleh Parhan Hasan dari Banjarmasin. Di sekolah ini, pendidikan agama diajarkan dengan cara yang lebih modern. Jika sebelumnya guru agama mengajar dengan memakai sarung, maka H. Majedi Effendi mengajar dengan memakai celana panjang dan berdasi. Bahasa Arab sangat ditekankan waktu itu, akan tetapi bahasa Inggris dan Belanda juga harus dikuasai, sebagaimana pesan yang merupakan peribahasa H. Majedi Effendi yang disampaikan kepada murid-muridnya waktu itu, yaitu:

*Kalau kamu ingin menjadi ulama, kamu tidak usah
 sekolah terlalu tinggi; tetapi kalau kamu ingin*

*menguasai dunia, maka kamu perlu menguasai bahasa Belanda dan Inggris.*⁹²



“Pengurus Besar di Kalimantan Selatan, cabangnya ada di Riau” Mantan pengurus Musyawaratutthalibin Cabang Tembilahan, Riau, berfoto bersama murid perguruan Sa’adah el-Islamiyah (dahulu sekolah Musyawaratutthalibin). (Repro. M. Nur Maksum, dkk., 1991)

d. Sekolah Muhammadiyah

Perkembangan sekolah Muhammadiyah sejalan dengan perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Paham Muhammadiyah sudah masuk ke Kalimantan Selatan pada tahun 1920-an. Namun organisasi

92 M. Nur Maksum dkk., *op.cit.*, hlm. 49.

Muhammadiyah baru pertama kali berdiri di Alabio pada tahun 1925.⁹³

Usaha pertama dari Muhammadiyah cabang Alabio di bidang pendidikan adalah mendirikan sekolah Islam dengan nama *Standaard School* dengan mata pelajaran agama sebagai dasar dan ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, sekolah ini menjadi *Vervolgschool met den Qor'an*, dimana pelajaran agama menjadi dasar pendidikan.

Pada tahun 1928 di Alabio berdiri sekolah lanjutan yaitu *Wostha School* dengan lama pendidikan tiga tahun dan merupakan sekolah guru dari perguruan Muhammadiyah. Mereka yang lulus ditetapkan menjadi guru-guru di sekolah-sekolah cabang atau ranting Muhammadiyah lainnya.

Karena sekolah Muhammadiyah tidak meninggalkan pengetahuan umum, maka sekolah ini mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda, berupa bantuan tenaga guru yang dibesluitkan oleh Muhammadiyah namun gajinya dibayar melalui dana subsidi pemerintah.⁹⁴

Selain sekolah-sekolah tersebut terdapat pula sekolah lainnya yang didirikan Muhammadiyah, seperti SD Muhammadiyah Teluk Tiram (didirikan tahun 1929), SD Muhammadiyah Kelayan (1932), HIS Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1935 di jalan Kalimantan,⁹⁵ dan HIS Muhammadiyah di jalan Pasar Lama.

HIS Muhammadiyah di jalan Kalimantan⁹⁶ didirikan atas inisiatif H. Masykur dan kawan-kawan di atas tanah wakaf Abdul Galib seorang pedagang besar di Pasar Baru. Pada mulanya Abdul Galib ingin memasukkan anaknya bernama

93 M. Syahrani, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1914-1942)", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hlm. 17.

94 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 58-59.

95 M. Syahrani, *op.cit.*, hlm. 48.

96 Pada saat itu dikenal dengan nama jalan Militaire Weg, kemudian menjadi jalan Kalimantan, dan terakhir jalan S. Parman.

Saleh ke sekolah HIS yang dikelola Pemerintah Hindia Belanda, namun keinginan itu tidak terwujud, karena --- konon kabarnya--- ditolak oleh pihak sekolah dengan alasan Saleh bukan anak pegawai negeri.⁹⁷

HIS Pemerintah itu memang diperuntukkan untuk siswa bumiputera, akan tetapi tidak semua anak bumiputera dapat mengecap pendidikan di sekolah itu. Yang dapat diterima adalah para siswa yang orang tuanya berkategori A yakni kaum bangsawan, pegawai pemerintah berpangkat minimal Asisten Kiai, dan pengusaha kaya yang berpenghasilan bersih di atas 75 gulden sebulan, dan yang berkategori B yakni yang orang tuanya memperoleh pendidikan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan *Kweekschool* ke atas.

Boleh jadi Abdul Galib mampu menyekolahkan anaknya ke HIS Pemerintah, karena ia seorang pedagang besar dengan penghasilan per bulan mungkin lebih dari 75 gulden. Akan tetapi perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan terhadap bumiputera telah mendorongnya untuk mendirikan sekolah sendiri yang dapat dimasuki oleh segala lapisan masyarakat.

Akhirnya dengan dukungan tokoh Muhammadiyah di Banjarmasin seperti H. Masykur, H. Muhammad Yasin Amin, H. Ahmad Amin, H. Zamzam Jakfar, dan H. Husnan, didirikanlah HIS Muhammadiyah di atas tanah yang Abdul Galib wakafkan di jalan Kalimantan.⁹⁸

Pada mulanya Pemerintah Hindia Belanda menganggap HIS Muhammadiyah di jalan Kalimantan sebagai sekolah liar. Pemerintah mengatakan sekolah itu

97 Hasil wawancara dengan H. Anang Ahmad Nawier (88 tahun), Banjarmasin.

98 Menurut Anang Ahmad Nawier, sesudah selesai Perang Kemerdekaan, HIS Muhammadiyah yang kemudian menjadi Komplek Perguruan Muhammadiyah di jalan S. Parman direnovasi. Yang mempelopori renovasi itu adalah H. Muhammad Ghani seorang pedagang mas dengan tokonya bernama "Toko Banjar". Ia dikenal sebagai seorang yang amanah sehingga dipercaya untuk menjalankan pengumpulan dana dan penyimpanannya untuk keperluan renovasi.

tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam “*Wilde Schoolen Ordonnantie 1932*”. Tetapi nyatanya, meski dianggap sekolah liar, HIS Muhammadiyah di jalan Kalimantan dapat berkembang pesat seperti halnya sekolah Muhammadiyah lainnya.

Sesuai dengan cita-cita pembaharuan pemikiran, Muhammadiyah mempelopori organisasi pendidikan dan kurikulum yang teratur. Sistem pendidikan menanamkan kepada pengertian, bukan semata hapalan. Oleh karena itu, sumbangan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan cukup besar, khususnya dalam pendidikan Islam di Kalimantan Selatan.

e. Perguruan Taman Siswa

Perguruan Taman Siswa didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Pada waktu itu nama yang dipakai adalah *National Onderwijs Instituut Taman Siswa* (Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa).⁹⁹ Taman Siswa memiliki asas-asas yang menghendaki masuknya perwujudan kebudayaan Barat modern, yang kemudian diuji dan diambil apa yang dapat melengkapi kebudayaan Indonesia.¹⁰⁰ Karena Taman Siswa berusaha selalu bersatu dengan rakyat, maka dalam waktu yang singkat berdiri cabang-cabangnya di beberapa daerah di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Ambon.

Di Kalimantan Selatan, Taman Siswa mendapat dorongan dari H.M. Arip, tokoh Sarekat Islam Kalimantan Selatan. Mula-mula berdiri di Marabahan dan kemudian di Banjarmasin dan Barabai. Cikal bakal lahirnya Taman Siswa bermula dari *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) atau HIS Swasta pada tahun 1929 yang didirikan pemuda

99 Darsiti Soeratman, *op.cit.*, hlm. ix.

100 Abdurrachman Surjomihardjo, “Taman Siswa dan ‘Wilde Schoolen’”, dalam Colin Wild dan Peter Carey (penyunting), *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*, BBC London Seksi Indonesia dan PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 43.

Marabahan dan dikelola oleh Sarekat Islam. Mula-mula dipimpin dan diajar oleh Marjono (pegawai Borneo Post). Mengingat pesatnya perkembangan sekolah tersebut, Marjono mendatangkan teman-temannya yakni Sutomo dan Sunaryo anggota Sarikat Buruh di Surabaya untuk menjadi guru di PHIS.

Pusat kegiatan PHIS di Marabahan bertempat di “Rumah Bulat” bergabung dengan Sarekat Kalimantan (sebelum menjadi BINDO). Sekolah PHIS ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Marabahan, sehingga jumlah muridnya semakin banyak. Guru-guru PHIS menggembeleng semangat kebangsaan pemuda-pemuda Marabahan melalui pengajaran dan juga kepanduan yang waktu itu bernama *Borneo Padvinder Organisatie* (BPO).¹⁰¹

Setelah berlangsung enam bulan kegiatan PHIS mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Hindia Belanda. Marjono, Sutomo dan Sunaryo dicurigai sebagai anggota partai terlarang. Keterkaitan mereka dengan PARI (Partai Republik Indonesia)¹⁰² diketahui Belanda menyusul ditemukannya dokumen-dokumen PARI di Singapura. Di antara dokumen tersebut terdapat surat-surat Marjono, Sutomo dan Sunaryo dari Marabahan. Belanda mengambil tindakan tegas dengan menggrebek Rumah Bulat, dan menahan Marjono dan Sunaryo dan selanjutnya dibuang ke Boven Digul (Papua Barat).¹⁰³

101 Hasil wawancara dengan Imansyah, Marabahan.

102 PARI (Partai Republik Indonesia) didirikan oleh Tan Malaka, sesudah terjadinya perpecahan dalam tubuh PKI tahun 1927. Menurut Artum Artha, di Banjarmasin pernah berdiri PARI, namun tidak jelas siapa pendirinya. Tetapi ada yang mengatakan diasuh oleh H. Usyaransyah (Konsulat Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan), lihat Artum Artha, “Perjuangan Bangsa Indonesia Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia,” naskah ketikan, Banjarmasin, 1997, hlm. 5,

103 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mempunyai hak-hak luar biasa yang mencakup kekuasaan untuk *externing*, *internering*, dan *verbanning*. Marjono dan Sunaryo “dianggap berbahaya untuk keamanan umum” sehingga dibuang ke Boven Digul.

Atas anjuran Marjono sewaktu akan ditahan agar kegiatan PHIS tetap dilanjutkan dengan bantuan Taman Siswa, maka tokoh-tokoh Marabahan bersama Sutomo yang muncul kemudian berangkat ke Yogyakarta menemui tokoh-tokoh Perguruan Taman Siswa. Sebagai hasil hubungan itulah pada tahun 1931 Ki Hajar Dewantara mengirimkan guru-guru Taman Siswa yaitu M. Yusak, Sundoro dan Yusyadi.¹⁰⁴

Sejak PHIS dibantu pengelolaannya oleh ketiga guru tersebut, maka paada tanggal 1 Januari 1931 atas persetujuan bersama ditetapkan bahwa PHIS dijadikan Perguruan Taman Siswa cabang Marabahan dengan kegiatan bertempat di Rumah Bulat. Dari Marabahan, Taman Siswa berkembang di daerah lainnya seperti di Banjarmasin Kandangan, Barabai, Kelua dan Kuala Kapuas.

Sekolah Taman Siswa ini hanya menyelenggarakan pendidikan setingkat Taman Muda atau tingkat pendidikan kelas 4-6 untuk anak-anak berumur 10 s.d. 13 tahun. Meski demikian, orang dewasa juga dapat mengikuti pendidikan yang dikelola Perguruan Taman Siswa pada sore hari.

Tindakan yang dikenakan kepada Marjono dan Sunaryo disebut *internering* yakni hak Gubernur Jenderal untuk memaksa seseorang untuk bertempat tinggal di satu tempat tertentu yang ditunjuk dan dilarang untuk meninggalkan tempat tersebut.

104 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 63.



Perguruan Kebangsaan Taman Siswa
di Rumah Bulat (Rumah Joglo), Marabahan

Jumlah murid yang terdaftar dalam Perguruan Taman Siswa saat itu mencapai 200 orang. Selain menyelenggarakan kelas belajar, penanaman rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa juga dilakukan melalui *Borneo Padvinder Organisatie* yang kemudian berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia.¹⁰⁵

Pengelolaan Perguruan Taman Siswa di Marabahan dapat berlangsung berkat kesadaran masyarakat dan orang tua murid akan pentingnya pendidikan dan semangat kebangsaan.

Berkaitan dengan pesatnya perkembangan Perguruan Taman Siswa di Kalimantan Selatan, maka oleh Pemerintah

105 Hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.

Hindia Belanda dikeluarkan “larangan” kepada pegawai negeri untuk menyekolahkan anaknya di Taman Siswa. Bagi yang sudah terlanjur belajar di Taman Siswa, maka Belanda mengharuskan kepada pegawai negeri itu untuk mengeluarkan anaknya dari Taman Siswa dan memasukkannya ke dalam sekolah HIS.

Aksi “larangan” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu sebagai akibat membanjirnya murid memasuki perguruan Taman Siswa, termasuk anak-anak dari pegawai negeri, telah mengendurkan jumlah siswa yang memasuki Taman Siswa. Selain itu, Belanda juga menghembuskan isu-isu bahwa di dalam perguruan Taman Siswa ditanamkan pula ajaran paham agama Budha.

Untuk menghadapi fitnahan yang tidak fair itu dan sekaligus untuk mengangkat kembali pamor perguruan Taman Siswa, maka oleh Majelis Luhur Taman Siswa di Banjarmasin, yang diketuai oleh Hadhariyah M dan saat itu juga menjabat Komisaris Pengurus Besar Parindra daerah Kalimantan Selatan dan Timur, diundanglah Ki Hajar Dewantara dan isteri selaku tokoh utama Majelis Luhur Taman Siswa untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan. Kunjungan itu terjadi pada bulan Mei 1939 di Banjarmasin dan Barabai.¹⁰⁶

Kunjungan Ki Hajar Dewantara ke Kalimantan Selatan sangat memberikan manfaat, karena pamor Perguruan Taman Siswa kembali meningkat, bukan saja telah bersinar kembali, bahkan lebih mendapat simpati dari masyarakat luas.

106 Celakanya, Hadhariyah M selaku Pimpinan Panitia Penyambutan yang saat itu berada di Hulu Sungai untuk memimpin Konferensi Suryawirawan se Kalimantan Selatan di Barabai (9 April 1939), justru dicegat di Kandungan dan tidak boleh ikut menyambut kedatangan Ki Hajar Dewantara dan isteri, lihat Hadhariyah M, *op.cit.*, hlm.9.

f. Sekolah Rakyat Parindra

Cabang Partai Indonesia Raya (Parindra) berdiri pada tahun 1935 di bawah pimpinan Merah Johansyah sebagai Komisaris Pengurus Besar Parindra Daerah Kalimantan Selatan dan Timur.¹⁰⁷ Parindra sebagai partai rakyat bukan saja berusaha dalam perekonomian, tetapi juga dalam pendidikan. Hasil karya Parindra dalam pendidikan antara lain membentuk Sekolah atau Perguruan Rakyat Parindra di Banjarmasin, Barabai, Birayang, Amuntai, dan Kandangan.

Di Kandangan, tempat kedudukan Komisaris Daerah Parindra Kalimantan Selatan berada, organisasi Parindra mendirikan *Badan Pengawas Onderwijs Commissie* (BPOC) dan mendirikan Perguruan Medan Antara yang kemudian diganti menjadi Sekolah Medan Antara (SMA Parindra) di Kandangan. Selain itu berdiri pula Taman Antara di Negara dan Sekolah Rakyat (5 tahun) di Kandangan Kota, Karang Jawa dan Gambah.

Pentingnya pendidikan bagi Parindra tercermin dari pendapat Johannes Baker seorang guru "Taman Medan Antara" Parindra Kandangan pada saat peresmian berdirinya sekolah "Perguruan Rakyat Parindra" di Amuntai tanggal 1 Agustus 1935 bahwa : "perguruan adalah satu soal yang sangat penting dan satu alat yang utama. Anak-anak tidak dapat maju, kalau tidak dapat didikan".¹⁰⁸

107 Achmad Darmawie, "Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan", Banjarmasin, 1981, hlm. 7.

108 Soepardi, "Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perjuangan Dari: Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, di Kalimantan Selatan", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hlm. 20.



Sekolah Medan Antara Parindra Kandangan, pada saat pembukaan, 15 Juli 1937. Berdiri di belakang dari kanan ke kiri, deretan kelima, Artum Artha (tanda X). (Foto dok. keluarga Artum Artha).

Sekolah Perguruan Rakyat Parindra di Kandangan berdiri pada tahun 1937 di jalan Kubur Wih (kemudian di sebut jalan Merdeka). Guru-gurunya yakni Raden Imam Subekti (Kepala Sekolah), Johanes Baker (Pembantu) berasal Parindra Surabaya.

Mata pelajaran yang diajarkan adalah bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta pelajaran lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sebagai pemegang vak bahasa Belanda adalah Imam Subekti, sedangkan Johanes Baker memegang vak

bahasa Inggris yang setelah ditangkap Belanda diganti oleh Adi Martono, seorang guru dari Perguruan Taman Siswa.¹⁰⁹

Karena sekolah berkembang menjadi dua kelas, maka pengajarnya ditambah yakni Iberamsyah dan Rosita dan kemudian dibantu Abdul Sani, beberapa saat setelah Imam Subekti dan Adi Martono pulang ke Jawa.

Sekolah Parindra selalu mendapat tekanan dari Pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Jika seorang anak pegawai negeri memasuki sekolah Parindra, maka orang tuanya yang pegawai negeri tersebut, kalau tidak dipindahkan bisa pula diberhentikan dari pekerjaannya.¹¹⁰

Besarnya tekanan pemerintah kolonial itu bukan tanpa alasan, karena melalui sekolah Parindra para kaum pergerakan berupaya menanamkan perasaan kebangsaan dan membentuk kader, antara lain dengan mengajarkan Sejarah Kebangsaan Indonesia yang berlawanan dengan Sejarah Indonesia karangan Belanda. Di samping itu, setiap akan memulai pelajaran para murid dan guru terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu pula ketika akan pulang, walau redaksinya agak berbeda dengan yang sekarang, diantaranya Indonesia Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, tetapi ini cukup menyadarkan kader-kader yang dididik di sekolah tersebut.¹¹¹

Pada akhir tahun 1939 sekolah ini kemudian dilebur menjadi IHS (*Inheemse Hollandse School*). Sesudah peleburan tersebut maka pengertian tentang Sekolah Perguruan Parindra sudah hilang, dan kembali ke sekolah sejenis *Inlandse School* (Sekolah Gubernemen Kelas Dua). Kalau dahulu untuk memasuki sekolah Perguruan Rakyat Parindra harus tamat *Inlandse School* atau sederajat, maka kemudian sekolah ini setingkat dengan sekolah dasar.

Selain telah mendirikan Sekolah Perguruan Rakyat Parindra yang oleh masyarakat Kandangan lebih dikenal

109 Mara Aly, "Riwayat Perjuangan Mara Aly", naskah ketikan, Kandangan, 10 Januari 1987, hlm. 2.

110 Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 68.

111 Sjarifuddin, *loc.cit.*

dengan “Taman Medan Antara”, juga telah didirikan sekolah-sekolah sejenis *Volkschool* tiga tahun seperti di Karang Jawa, Gambah, Bekarung, dan Tinggiran.

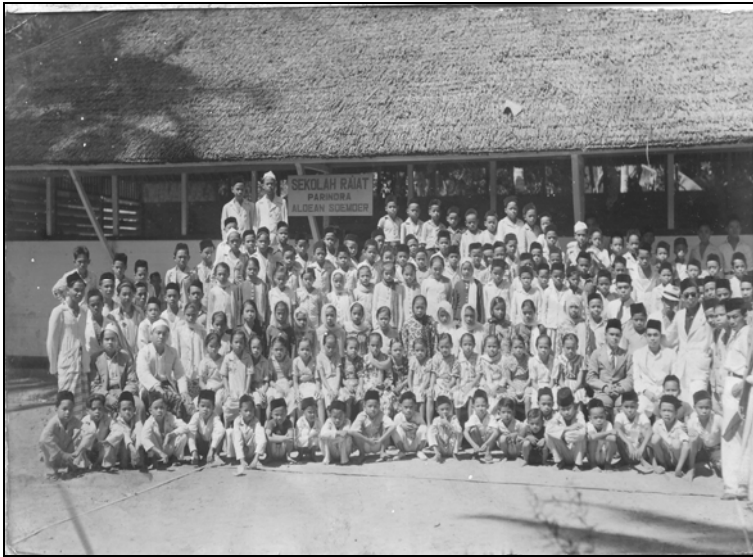
Sekolah-sekolah Parindra setingkat *Volkschool* tersebut juga terdapat di Banjarmasin, Barabai, Birayang, dan persiapan di Amuntai. Sedangkan sekolah Perguruan Rakyat yang setingkat dengan MULO hanya ada di Kandangan.¹¹²

Guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut dari anggota Parindra sendiri. Mereka digaji oleh Pengawas *Onderwijs Commissie* (POC) Parindra. Seorang guru sekolah pada *Volkschool* Parindra ini mendapat gaji f.7.50 dan bagi guru bantu diberi gaji f.5.00. Di antara pengajar yang merupakan alumni Taman Medan Antara adalah Artum Artha yang diangkat menjadi guru bantu pada Sekolah/Perguruan Rakyat Parindra di Kandangan.¹¹³

Di Barabai, usaha Parindra di bidang pendidikan mengalami kemajuan pesat dengan mendirikan sekolah-sekolah rakyat Parindra di Bulau, Ilung, Birayang, Rangas, Tapuk, Kabang, Aluan Sumur, dengan sejumlah guru seperti guru Hapip, H. Syukeri, H. Asmuni, Akis, M. Norman, Abdul Muis, Hamsah, Sabariah, dan Fatimah (isteri Hadhariyah M), dan beberapa guru bantu seperti Al Hamdi, dan lain-lain. Sekolah Parindra di Barabai pada umumnya menggunakan rumah penduduk sebagai tempat belajar yang menandakan bahwa masyarakat di pedesaan sudah memahami betul artinya gedung sekolah dan perlunya pendidikan.

112 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 64-66.

113 Artum Artha, “Mencapai Usia Lanjut 75 Tahun”, naskah ketikan, Banjarmasin, 1995, hlm. 1.



“Sekolah Ra’jat Parindra Aloeian Soemoer”, Barabai.
(Foto dok. H. Abdul Muis).

Akan tetapi, kemajuan itu tidak serta merta diperoleh dengan mudah. Seperti yang terjadi di desa Tapuk dan Kabang. Para pengurus dan guru-guru Parindra harus menghadapi hambatan-hambatan yang cukup pahit, ketika memperjuangkan sekolah Parindra di desa itu.

Sudah sejak lama orang-orang kampung Tapuk ingin desanya memiliki sekolah yang dikelola pemerintah. Mereka mengajukan permintaan kepada Tuan Asisten Kiai Birayang supaya di Tapuk didirikan sekolah dan sebagai tempatnya seorang warga berkenan meminjamkan rumahnya buat sementara. Akan tetapi permintaan itu tidak dikabulkan. Tuan Asisten Kiai meminta agar sekolah itu berstatus partikelir yang diurus oleh orang kampung sendiri dengan gurunya H. Asmuni bekas guru *Volkschool* di Limpasu, dan nantinya Tuan Asisten Kiai bersedia mengurus sekolah itu

sehingga bisa diakui oleh pemerintah. Karena sudah sekian lama belum juga diakui oleh pemerintah, maka mereka menyampaikan permintaan untuk menyerahkan sekolah itu kepada Pengawas *Onderwijs Commissie* (POC) Parindra cabang Birayang. Tanggal 1 September 1939 sekolah itu menjadi Sekolah Rakyat Parindra dengan gurunya H. Asmuni. Bersamaan dengan itu, di Kabang dibuka pula Sekolah Rakyat Parindra pada tanggal 4 September 1939. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih pengelolaan sekolah di Tapuk, yakni selain dikelola Asisten Kiai, juga dikelola POC Parindra. Pada hari Rabu, 6 September 1939 POC Cabang Parindra Birayang menerima surat dari Tuan Asisten Kiai Birayang bertanggal 6 September 1939 Nomor 2380/21 yang isinya berintikan bahwa sekolah rakyat di Tapuk tidak boleh dimulai. POC cabang Parindra Birayang menyikapinya bahwa surat tersebut tidak berarti menutup dan sekolah itu pada kenyataannya sudah berjalan beberapa hari lamanya. Karena sikap membangkang terhadap Tuan Asisten Kiai, maka para bestuur POC cabang Parindra Birayang (H. Busri dan Urija) disidang di *Magistraad* Barabai pada tanggal 20 September 1939 dipimpin langsung oleh Tuan Aspiran Kontrolir Barabai, dan memutuskan: H. Busri, Ketua POC, dihukum 20 hari atau denda f.20 karena meneruskan pembukaan sekolah rakyat di Tapuk dan Kabang. Guru sekolah di Tapuk, H. Asmuni dihukum 10 hari atau denda f.10, dan Abdul Muis guru di Kabang dikenai hukuman 5 hari atau denda f.10.¹¹⁴

114 Lihat Mohammad Nawawie Arief, "Sepak Terjang Haji Mohammad Nawawie Arief dalam Perjuangan", naskah ketikan, Banjarmasin, 1981, hlm. 15-17. Berkaitan dengan hal tersebut, Hadhariyah M selaku Komisaris Pengurus Besar Parindra dan juga wartawan memuat peristiwa ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap Busri dan kawan-kawannya itu di dalam surat kabar "Suara Kalimantan", akibatnya Busri kembali dipanggil oleh pemerintah dan ditahan selama 7 (tujuh) hari karena dipersalahkan sebagai penghinaan terhadap *magistraad*, lihat Busri "Riwayat Perjuangan H. Busri

3. Kepanduan

Kepanduan merupakan salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan anak-anak muda, misalnya *Borneo Padvinder Organisatie* (Organisasi Kepanduan Borneo), Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Wathon (Kepanduan Muhammadiyah), Ansor (Kepanduan Nahdlatul Ulama) Nasrul Umum (Kepanduan Musyawaratutthalibin), dan Surya Wirawan (Kepanduan Parindra).

Organisasi kepanduan yang tertua di Kalimantan Selatan adalah *Borneo Padvinder Organisatie* (BPO) seperti yang diselenggarakan oleh *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) atau HIS Swasta pada tahun 1929 di Marabahan di bawah pengelolaan Sarekat Islam.

Seiring dengan perkembangan pergerakan ke arah kebangsaan, maka BPO meluaskan ruang geraknya menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia, yakni pada saat Perguruan Taman Siswa berdiri di Marabahan. Selain menjadi murid Taman Siswa mereka juga tetap menjadi anggota Kepanduan Bangsa Indonesia. Di antara tokoh kepanduan di Marabahan adalah M. Ruslan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua PPM dan Sarekat Kalimantan di Marabahan.

Para anggota KBI saat itu mulai menggunakan seragam, yakni baju warna cokelat. Pada lehernya ada kain segitiga dan dasi berwarna merah-putih dan memakai peci cokelat, atau memakai topi rotan.

Tujuan KBI adalah untuk melatih mental pemuda-pemuda serta untuk menanamkan rasa kebangsaan guna mencapai kemerdekaan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan latihan-latihan dan menyebarkan lagu-lagu perjuangan, seperti lagu Indonesia Raya serta membentuk cabang dan ranting-ranting KBI di berbagai daerah.

bin H. Abdul Hamid", naskah ketikan, tanpa tempat, tanpa tahun.

Di Barabai, KBI cabang Barabai diketuai oleh Ali Baderun dan mempunyai ranting-ranting antara lain di desa Birayang, Rangas, Karatau. Pada tahun 1932 KBI cabang Barabai mengadakan kunjungan dan latihan kepanduan di Marabahan guna mempererat kesatuan dan persatuan dengan para pengurus dan anggota KBI di Marabahan.

Sekembalinya dari Marabahan, para anggota KBI semakin bersemangat berlatih. Mereka berkeliling kampung Batu Bini di Kandangan sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera Merah Putih. Pada saat itulah Ketua Regu KBI bernama Alibasah ditangkap oleh polisi PID dan ditahan selama 14 hari karena dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan para anggota KBI itu.

Peristiwa penangkapan itu tidak menghalangi para pengurus KBI untuk melakukan propaganda. Tahun 1933, KBI cabang Barabai mengadakan rapat umum di Gedung Bioskop Barabai yang bertujuan memberikan pengertian tentang kesadaran rakyat. Pada tahun itu pula diresmikan berdirinya KBI cabang Kandangan.¹¹⁵

115 Alibasah, "Riwayat Perjuangan H. Alibasah", naskah ketikan, Martapura, 12 Maret 1981.



Kepanduan Bangsa Indonesia di Marabahan.
Barisan paling depan, Imansyah.
(Foto dok. Imansyah).

Pemimpin KBI disebut sebagai *Hoofdleider* (Pemimpin Umum). Di Kandangan dipimpin oleh Sumartoyo didampingi wakilnya Bustami dan Muhammad Ramli. Mereka itulah pemimpin KBI di Kandangan. Sumartoyo adalah seorang *Werkbaas Verkeer en Waterstaatsdienst* (V en W) Onderafdeling Kandangan. Dia juga disebut (dirahasiakan) sebagai anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk daerah Kalimantan Selatan.



Pemuda Surya Wirawan cabang Banjarmasin tahun 1939.
(Foto dok. keluarga Achmad Darmawie).

Melalui KBI, para propagandis kebangsaan di Kandangan melakukan gemblengan kepada anak-anak muda agar mereka mengetahui dan memiliki hasrat sebagai manusia Indonesia yang bercita-cita mencapai Indonesia Mulia, Indonesia Raya, dan Indonesia Merdeka.

Selama mengikuti latihan KBI, anak-anak muda harus patuh pada sumpah Kepanduan seperti sumpah setia, sumpah bakti, setia janji, jujur, tunduk pada peraturan dan nasihat orang tua. Setia kepada tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Belajar baris-berbaris, ilmu kepanduan, dan sejarah tanah air.

Riwayat hidup orang-orang besar Tanah Air dan bangsa-bangsa di dunia pun dipelajari, dicatat, dan dihapalkan. Pahlawan-pahlawan perang yang mati dalam pertempuran melawan kompeni Belanda, karena dihukum gantung, karena disiksa dalam masa pengasingan,

atau akibat serangan penyakit, juga dilukiskan kejantannya.

Suatu ketika Sumartoyo memerintahkan supaya semua anggota KBI pergi keluar kota meninggalkan kota Kandangan. Alasannya karena Pemerintah Hindia Belanda, orang-orang Belanda, dan kaum ambtenaar-nya merayakan Hari Kebangkitan Kerajaan Belanda. Maka, pagi-pagi sekali tanggal 31 Agustus 1933 pasukan KBI meninggalkan kota Kandangan menuju desa Padang Batung (Amandit Timur) untuk melakukan acara perkemahan KBI.

Pada saat berkemah mereka mengumandangkan lagu-lagu perjuangan, seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars KBI, Matahari Mulai Bercahaya, dan lain-lain. Lagu Mars KBI benar-benar dapat menggerakkan jiwa anak-muda apalagi dewasa. Berikut bunyi lagu mars KBI.

KBI BERJUANG

KBI berjuang
Mencapai cita-cita
Tanah air yang mulia
Tumpah darah Indonesia Merdeka
Berjuang selalu
Indonesia bersatu
Hiduplah Indonesia,
Merdeka selama-lamanya.

Refr. 2 X)
Berjuang selalu
Indonesia bersatu
Indonesia merdeka
Untuk selama-lamanya

Bangkitlah KBI
Satukan barisannya,
Pemuda Indonesia
Kepanduan gagah perwira,
KBI bersatulah

Menuju cita-cita
Hidup merdeka
Kekal – Abadi – Bahagia¹¹⁶

E. Pengaruh Pergerakan Rakyat yang Tumbuh di Jawa

Tanah Jawa merupakan sentral pergerakan kebangsaan Indonesia. Di pulau ini berdiri partai-partai politik dan bawahannya (*onderbouw*), sebagai pandu perjuangannya.

Masuknya pengaruh pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa ke Kalimantan Selatan tidak hanya bersifat fisik berupa masuk dan tumbuhnya cabang organisasi pergerakan yang ada di Jawa ke daerah ini, melainkan juga dalam bentuk gagasan atau keinginan yang timbul untuk memajukan daerah karena mendengar kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di tanah Jawa.

Lancarnya hubungan kapal laut antara Banjarmasin dengan kota-kota di pantai utara Pulau Jawa, berdampak kepada lancarnya hubungan komunikasi dan informasi antara penduduk Kalimantan Selatan dengan Jawa. Termasuk dalam hal ini adalah masuknya informasi tentang aktivitas pergerakan di Jawa, sehingga timbul keinginan yang sama agar pergerakan rakyat juga tumbuh di Kalimantan Selatan.

Menurut sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, sudah lazim dipaparkan bahwa organisasi Budi Utomo,¹¹⁷

116 Artha, Artum, "Cita-cita...", hlm. 2 dan 41.

117 Penetapan Hari kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei secara nasional mengandung diskusi yang bersifat polemis, karena ada anggapan bahwa tujuan Budi Utomo hanya untuk mengangkat tarap hidup orang Jawa dan Madura daripada menjadikan kesatuan Indonesia. Akan tetapi berdasarkan kajian Akira Nagazumi, kebangkitan Budi Utomo bukan sekedar "bangunnya si molek Insulinde dari tidur yang lelap", melainkan juga berhubungan dengan nilai-nilai tetap pergerakan politik di Indonesia berikutnya, lihat Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989, hlm. v-xi.

organisasi kebangsaan “pertama” yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, yang kemudian disusul oleh gerakan Islam lainnya seperti Sarekat Islam yang kemudian melebar dan berkembang sampai di daerah Nusantara lainnya termasuk di Banjarmasin (1912). Akan tetapi, di Banjarmasin sebelumnya juga telah tumbuh cikal-bakal organisasi yang bersifat modern, namun masih bersifat lokal yakni organisasi Seri Budiman pada tahun 1901.

Amir Hasan Bondan salah seorang pendiri Seri Budiman, mengatakan SERI ialah kependekan dari: Serikat Rakyat Indonesia. Sedangkan Seri Budiman, maksudnya ialah hubungan kata dan kalimat: Wajah berseri orang-orang yang budiman. Disingkat menjadi dua kata Seri Budiman. Dikatakan bahwa orang “bubuhan Banjar” selalu berwatak dan berpikiran yang berseri-seri dan mempunyai akal budi pekerti yang baik; disebut budiman.¹¹⁸

Secara fisik, masuknya organisasi pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa ke Kalimantan Selatan melalui dua macam cara:

(1) Diterima langsung oleh pelopor pergerakan rakyat atau pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan dari tempat asal organisasi tersebut di Jawa, yang selanjutnya dibawa dan dikembangkan di daerah ini. Hal ini antara lain dapat dihubungkan dengan masuknya Sarekat Islam ke daerah ini yang dibawa oleh H.M. Arip, seorang pedagang yang pulang pergi Banjarmasin-Surabaya. Demikian juga masuknya PBI/Parindra yang dibawa oleh Merah Johansyah, seorang pegawai pamongpraja Hindia Belanda, yang menjadi tokoh pergerakan rakyat di daerah ini;

(2) Diterima melalui tokoh-tokoh pergerakan yang datang dari Jawa dan Sumatera ke daerah ini. Kelompok ini datang dari dua arus atau asal yaitu dari Jawa dan Sumatera. Arus kaum pergerakan yang datang dari Jawa berlangsung sejak tumbuh dan berkembangnya SI di daerah ini pada tahun 1912. Organisasi pergerakan yang masuk dari Jawa, sebagian besar adalah pergerakan yang bersifat sekuler

118 Artum Artha, “Cita-cita..., hlm. 4.

seperti PNI, PBI/Parindra, PNI Pendidikan dan Perguruan Taman Siswa yang bergerak di bidang pendidikan kebangsaan.¹¹⁹

Arus pergerakan dari Sumatera, datang ke daerah ini bersamaan dengan perkembangan Musyawaratutthalibin dan Parindra di Kalimantan Selatan.

Kaum pergerakan yang datang dari Jawa dan Sumatera, umumnya bekerja sebagai guru yang mengajar ilmu pengetahuan umum di sekolah-sekolah dan kemudian bergabung dengan para pelopor pergerakan rakyat di daerah ini. Di antara mereka, dapat disebutkan seperti M. Yusak, Sundoro, dan Yusyadi yang dikirim Ki Hajar Dewantara sebagai guru perguruan Taman Siswa di Marabahan. Dari Parindra, antara lain Raden Imam Subekti dan Johannes Baker berasal Parindra Surabaya.

Adakalanya ketika berada di Jawa, mereka juga sebagai pengurus inti dari organisasi pergerakan, seperti Maraja Sayuthi Lubis dari Centraal Sarekat Islam di Jawa yang datang ke Kalimantan Selatan untuk memperkuat Sarekat Islam di Kalimantan Selatan. Mereka bersama-sama berjuang dalam wadah pergerakan rakyat yang mereka bina bersama, baik berupa partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan.¹²⁰

F. Pengaruh Pers Politik Kebangsaan

Di Indonesia peranan pers terutama pers berbahasa Melayu/Indonesia sangat penting dalam pergerakan kebangsaan, karena pers itu dapat langsung mencapai penduduk bumiputera. Oleh karena itu, pers berbahasa Melayu seringkali dijadikan alat komunikasi politik oleh para elite Indonesia baru. Banyaknya kasus *persdelict* di masa Hindia Belanda, larangan terbit bagi brosur dan pers antara lain karena disadari bahayanya pengaruh tulisan dalam

119 Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 35-36.

120 Sjarifuddin, *ibid.*, hlm. 35-36 dan Pemda Tk.I Kalsel, *op.cit.*, hlm.37.

bahasa Melayu dalam pers itu segera dapat dipahami oleh penduduk bumiputera.¹²¹

Begitupula halnya dengan yang terjadi di Kalimantan Selatan, tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan juga dipengaruhi oleh perkembangan media cetak, terutama surat kabar. Pada mulanya Pemerintah Hindia Belanda sangat membatasi penyebaran surat kabar yang dikarang, dicetak dan diedarkan oleh bumiputera, sehingga banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui akan adanya berita-berita tentang pergerakan kebangsaan yang tumbuh di Jawa.

Di sekolah pemerintah, tidak ada satupun surat kabar atau majalah terbitan pribumi yang diizinkan masuk menjadi bahan bacaan. Bacaan yang tersedia di sekolah, hanyalah majalah terbitan Departemen Pendidikan dan Pengajaran, yakni majalah bulanan Panji Pustaka.

121 lihat Abdurrahman Surjomihardjo, "Sumpah Pemuda Di dalam Perkembangan Budaya Politik Indonesia 1900-1945, dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op.cit.*, hlm.293-294.



Leesgezelschap (Taman Bacaan) Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) berdiri 1 Maret 1929. Duduk di tengah M. Ruslan (Ketua PPM) diapit Umar Juned (sebelah kiri) dan Mawardi (sebelah kanan) di depan Rumah Bulat (Rumah Joglo), Marabahan.
(Foto dok. Mawardi).

Selain majalah Panji Pustaka yang ada dalam Taman Pustaka, Pemerintah Hindia Belanda melalui Balai Pustaka di Jakarta juga menerbitkan buku-buku bacaan untuk sekolah berbagai tingkatan dan juga untuk masyarakat umum. Pada umumnya buku-buku bacaan untuk murid-murid sekolah rendah itu bersifat cerita rakyat, hikayat, dongeng, pantun, syair dan pengalaman-pengalaman orang asing (Belanda, Inggris dan Amerika).

Dalam perkembangan selanjutnya, adanya pengawasan dan pembatasan dari pemerintah kolonial tidaklah memperlemah aktivitas para tokoh pers di

Kalimantan Selatan, karena pada diri mereka juga telah tumbuh keinginan untuk mencapai cita-cita kemuliaan bangsa dan kebahagiaan tanah air Indonesia.

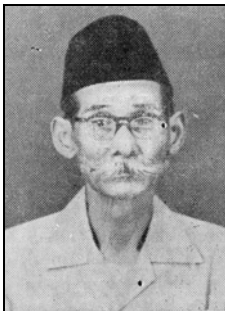
Pada umumnya pemimpin-pemimpin surat kabar, mingguan dan majalah saling punya pengertian bahwa mereka harus maju dan yakin untuk membela bangsa dan tanah airnya yang dicintai. Mereka siap maju ke medan perjuangan dengan caranya masing-masing. Sebagai insan pers mereka berjuang menyuarkan cita-cita mereka melalui melalui media cetak surat kabar maupun majalah yang terbit harian, mingguan dan bulanan.

Beberapa surat kabar atau majalah yang terbit atau beredar di Kalimantan Selatan, diantaranya adalah: *Soeara Kalimantan* (Banjarmasin), *Bintang Borneo* (Banjarmasin), *Majalah Malam Djoema'at* (Banjarmasin), *Soeara Hoeloe Soengai* (Kandangan), *Harian Oemoem* (Surabaya), *Tempo* (Surabaya), *PNI Soeloeh Indonesia* (Surabaya), *Bintang Timoe*, *Majalah Bulanan Taman Siswa* (Yogyakarta), dan *Soeara Persatoean Goeroe Indonesia* (Yogyakarta).

Meski mendapat pengawasan ketat dari pemerintah kolonial, para pemuda dapat memperoleh informasi tentang politik melalui Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) seperti yang dimiliki oleh organisasi Srie di Banjarmasin, maupun organisasi Persatuan Pemuda Marabahan (PPM).

Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) yang didirikan organisasi Persatuan Pemuda Marabahan dengan nama *Family Bond*, bertempat di Rumah Bulat bergabung dengan perkumpulan musik yang telah ada. Diadakannya taman bacaan berkaitan erat dengan keinginan tokoh masyarakat setempat agar kegiatan dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf. Sebagai bahan bacaan mereka berlangganan surat kabar dan majalah diantaranya *Hindia Baroe*, *Bintang Baroe*, *Bintang Islam*, dan *Kemajoean Hindia*.

Pada umumnya isi surat kabar dan majalah yang terbit di Kalimantan Selatan tidak berbeda jauh dengan pemberitaan yang terdapat dalam surat kabar atau majalah di Jawa, sama-sama menyebarkan paham kerakyatan (Kebangsaan Indonesia).



Amir Hasan Bondan

Amir Hasan Bondan¹²² dalam tulisannya di surat kabar Indonesia Merdeka edisi Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951, berjudul “Pers di Kalimantan” menceritakan sekilas perkembangan pergerakan tahun 1920-an dengan mengangkat kembali tulisannya yang pernah terbit dalam majalah *Malam Djoema’at* terbitan tanggal 24 November 1927 dengan judul “Perasaan Bandjar Totok”:

Saja ini seringkali berlajar pulang balik ke tanah Djawa berdagang barang makanan dan dan barang palen. Di segenap pasar dan desa banyak kenalan orang2 Djawa dan Madura dan saja kerap kali nonton orang gaderingan, politik buat kemadjuan bangsa. Di Djawa petjah kabar, tuan besar Djenderal sudah mengeluarkan perintah sama amtenar2 supaya djangan membesarkan diri. Pendeknja supaya orang2 Kantoran mau berbitjara pandjang sama orang Kampung, suka mengenal rakjat.....

Tempo saja pulang di Bandjarmasin, kenapa saja kebetulan ada membatja Koran Malam Djum’at.¹²³ Di dlm koran saja ada batja matjam2 karangan buah pikiran anak Bandjar. Di antara karangan2 jg sudah saja batja, jang menarik hati benar2 jaitu: I. Tuan besar Djenderal

122 Nama lengkapnya Amir Hasan Kiai Bondan. Mengikutsertakan nama ayahnya: Kiai Bondan. Ia dilahirkan di Marabahan pada tanggal 10 Februari 1882. Termasuk putera Banjar pertama yang memasuki sekolah *Europeese Lagere School* (ELS) tahun 1893, kemudian melanjutkan ke STOVIA namun tidak tamat.

123 Majalah “Malam Djoema’at” ketika dimuat kembali ke dalam surat kabar Indonesia Merdeka ditulis “Malam Djum’at”.

bermaksud supaja orang2 jg makan gadjih sama Kompeni dan bangsa Belanda supaja suka mengenal rakjat dan suka berbitjara sama tetuha2 kampung.....

(Tjotjok sadja kabar Djawa sama Borneo. Lamun begitu koran2 di Borneo tidak kalah lawan koran2 di Djawa. Sama2 hangat bunji kabarannja)

....

Selain berperan menginformasikan perkembangan politik, dan terutama perkembangan pergerakan kebangsaan di Jawa dan Sumatera, pers juga berperan penting menyuarakan ketimpangan antara kehidupan masyarakat di Jawa dengan Kalimantan, dan menggelorakan semangat untuk maju bergerak menuju kemajuan, seperti yang terdapat dalam tulisan Amir Hasan Bondan di majalah *Malam Djoema'at*, sebagai berikut:

Di Djawa di kampung banjak sekolah matjam2, laki2 perempuan kerotjosan bisa basa Belanda-Inggeris. Di rumah kuting-kutingan koran di tangan. Djadi dalam hati saja, kalu sama bersekolah, tida ada lainnja Djawa sama Bandjar.

Sekarang Borneo mau madju, tapi bagaimana kalau sekolah sedikit. Tiap tahun banjak anak Bandjar tidak bisa dapat tempat di sekolah2. Pasal ini, anak Bandjar jang nekat2 dan sekolah tinggi djangan berdiam diri sadja, sunji burinik. Saja liat di Djawa jg djadi pengurus, semua orang Djawa jang pintar2; rakjat berdiri di belakang si pintar. Mustahil di Bandjar tida ada org pintar jg suka beraksi buat memadjukan negeri.

Lamun anak Bandjar jang berdiploma kagum, siap lagi jg diharap2 buat ke muka. Orang kampung kebanyakan ada sadja hati mau turut madju, tetapi kepala kawan tida bergerak.

Adapun pasal meadakan sekolah perempuan, lamun orang besar tida lekas

*memulainja, kita kerdjakan sendiri. Orang kampung harus rami2 membantu uang derma dan jg pintar djadi pengurusnja. Dan lagi kalau les derma sudah didjalankan, diharap djuga saudagar2 Bandjar buka tangan, djangan engken mengeluarkan uang derma, sebab itu amal memadjukan bangsa sendiri kaum perempuan....*¹²⁴



Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat di Samarinda, dipelopori oleh A.M. Sangaji (duduk di tengah pakai peci) seorang tokoh pergerakan nasional kelahiran Maluku. (Repro. Kempen "Kalimantan").

124 Amir Hasan Bondan, "Perasaan Bandjar Totok", dalam majalah Malam Djoema'at, 24 November 1927, dimuat kembali dalam surat kabar Indonesia Merdeka, Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951, dengan judul "Pers Kalimantan".

Bab III

Pelopop Pergerakan Kebangsaan

Sebagaimana telah dipaparkan di muka, pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan itu tumbuh dan berkembang di kalangan bumiputera, sebagai bangsa jajahan yang termarginalkan karena adanya kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap mereka.

Latar belakang kehidupan atau profesi mereka sebelum maupun sesudah terjun dalam kancah pergerakan cukup beragam. Namun pada umumnya, mereka berasal dari golongan menengah dari masyarakat bumiputera, seperti elite agama, cendekiawan, dan pedagang.¹²⁵

Merekalah yang karena memiliki pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan hubungan dengan dunia luar, menjadikan mereka mempunyai kemampuan untuk “menangkap” adanya kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap kalangan pribumi dan memformulasikan cara menghadapinya melalui organisasi pergerakan.

Keberpihakan mereka terhadap perjuangan untuk mengangkat derajat kaum pribumi menjadikan mereka mempunyai dukungan massa yang besar dan kuat, baik dari kalangan pedagang, petani, nelayan, tukang dan kerajinan, serta buruh kecil. Bahkan mereka adakalanya juga mendapat dukungan dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Hal itu berbeda sekali dengan kelompok bumiputera yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah Hindia

125 Lihat Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 33.

Belanda.¹²⁶ Mereka itu, meski mempunyai latar belakang pendidikan, wawasan, atau mungkin juga pengalaman, peranan mereka tidak begitu besar dalam pergerakan kebangsaan, karena mereka mempunyai keterikatan terhadap “status pekerjaan”, adanya larangan,¹²⁷ loyalitas pada pimpinan, dan pengaruh dari fasilitas yang telah mereka terima dari pemerintah kolonial. Bahkan, seringkali terjadi, mereka juga turut berperan dalam menindas kaum pergerakan dan adakalanya lebih keras membese tindakannya dibanding Belanda totok. Sedangkan Kaum Bangsawan, status dan wibawa mereka telah menurun tajam di mata masyarakat sehingga tidak lagi menjadi panutan, pasca dihapuskannya Kerajaan Banjar pada abad ke-19 yang menyisakan gelarnya saja.

Turunnya wibawa kaum bangsawan tidak terlepas dari dampak modernisasi, seperti pembukaan sekolah-sekolah yang pada mulanya bertujuan untuk menyiapkan tenaga administratif kolonial. Penyeleksian pegawai-pegawai pada kantor-kantor *Nederlands Bestuur* tidak lagi berdasarkan keturunan, melainkan ditentukan oleh faktor pendidikan.¹²⁸

A. Elite Agama

Dalam pengertian umum, kata elite agama yang sering diterjemahkan ke dalam kata “ulama”, mempunyai arti sebagai orang-orang pintar, terkemuka, atau orang-orang

126 Jika seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) menulis artikel memakai nama samaran, berarti dia seorang anggota partai, sekurang-kurangnya simpatisan partai yang aktif.

127 Larangan dimaksud adalah *Muilkorf-Circulaire* (Sirkuler-Pemberangusan) yakni Surat Edaran Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertanggal 27 September 1919 yang berisi larangan bagi pegawai pemerintah untuk mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang dapat merongrong kekuasaan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan para pegawai pemerintah dalam pergerakan nasional dengan pelbagai sanksi antara lain dipindah ke tempat lain, diturunkan pangkatnya atau bahkan dipecat.

128 Anak Agung Gde Putra Agung, *op.cit.*, hlm. 4.

terpandang dari kalangan agama khususnya dikaitkan dengan agama Islam.¹²⁹

Ulama dalam komunitas Islam merupakan sebutan kepada seseorang atau kelompok yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan agama yang mumpuni yang melebihi guru-guru agama Islam lainnya. Di Kalimantan Selatan, pada masa pemerintahan Hindia Belanda seorang ulama disebut sebagai tuan guru atau guru agama, sedangkan yang dimaksud dengan “kiai”¹³⁰ di daerah ini bukanlah ulama agama Islam, melainkan gelar pangkat di masa Kerajaan Banjar yang dipakai Belanda sebagai gelar jabatan dalam struktur pemerintahannya.

Pada umumnya para tuan guru di Kalimantan Selatan mempunyai lembaga pendidikan tradisional yang dikenal sebagai “pengajian” yakni sistem pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilangsungkan di tempat tinggal tuan guru, tetapi kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar.

Pelajaran yang diberikan oleh para tuan guru dalam pengajian adalah ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Selain itu ada pula yang mempelajari bahasa Arab secara pasif, di samping pelajaran membaca Al-Qur'an dan Hadits.

129 Kata “ulama” berasal dari bahasa Arab yang sering diidentikkan sebagai dengan Islam. Meski pada kenyataannya kata “ulama” juga dipakai untuk menyebut para elite agama non Islam, namun seringkali istilah untuk menyebut elite agama non Islam adalah “tokoh agama” bukan “ulama”.

130 Di daerah lain, “Kiai, Kyai, atau Kiayi” merupakan sebutan yang paling banyak dipergunakan masyarakat untuk menyebut para elite agama Islam, meski penggunaan istilah Kiai di beberapa daerah berbeda-beda. Di Pulau Jawa, misalnya, sebutan kiai itu bukan hanya monopoli orang-orang yang mumpuni dalam agama Islam. Orang tua yang dianggap sakti, dukun, orang cebol, benda-benda yang dikeramatkan seperti keris, tombak, bahkan harimau yang dianggap keramat pun disebut kyai, lihat Mohammad Iskandar dkk., *Peranan Elite Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000, hlm. 10-11.

Kitab yang digunakan pada umumnya adalah kitab berbahasa Arab dan dibawa oleh tuan guru yang pernah belajar di Mekkah. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Kuning. Dalam perkembangannya digunakan pula kitab beraksara Arab berbahasa Banjar atau Melayu, sehingga disebut kitab berbahasa Arab Melayu, sebagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Pengajian yang umum berlangsung adalah dengan cara guru membacakan dan menguraikan isi kitab, sedangkan murid-muridnya memegang kitab yang sama dan diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.

Ada pula yang disebut “mengaji duduk” seperti yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari kepada anak cucunya, agar sampai kelak mewarisi kealiman bapaknya. Di samping itu, adapula pengajian *maahad* karena dilaksanakan pada hari ahad (minggu), atau *manyanyakan*, *manyalasa*, *maarba*, *mangamis*, *manjumahat*, dan *manyabtu* sesuai dengan nama hari pelaksanaan pengajian, yang mana murid hanya mendengarkan saja dan tidak menggunakan kitab, sedangkan guru menguraikan isi kitab yang dibacanya.¹³¹

Untuk menjadi ulama, ahli Qur'an, Hadits, dan sebagainya diperlukan beberapa guru yang waktu mengajinya memakan waktu puluhan tahun, bahkan kadang-kadang dilanjutkan di Mekkah. Mereka yang kembali, kemudian menjadi tuan guru yang memberikan pengajian di rumah atau di langgar-langgar.

Masuknya pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan dengan kebijakan di bidang pendidikan, telah melahirkan elite baru yang semakin memudahkan peranan elite tradisional. Tetapi elite baru ini tidak semuanya diterima oleh masyarakat.

Demikian pula dengan masuknya agama Kristen yang penyebarannya mendapat dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda, telah menimbulkan reaksi para ulama tentang adanya bahaya kristenisasi sehingga mereka berupaya

131 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 14.

menyempurnakan metode syiar agama dan pendidikan Islam di masyarakat.

Kristenisasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk melawan gerakan-gerakan Islam, dan gerakan Islam sendiri sangat mudah memicu perasaan anti Belanda.¹³² Ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah umum, para ulama menilainya sebagai suatu usaha untuk mengasingkan anak-anak mereka dari agama Islam dan kemudian menasranikannya. Akibat dari itu, di beberapa daerah timbul gagasan mendirikan sekolah agama bukan sekedar untuk menyaingi sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga untuk melawan Belanda melalui jalur pendidikan.

Oleh karena itulah, para elite agama mulai mendirikan sekolah-sekolah agama, antara lain Sekolah Islam Darussalam Martapura tahun 1914, *Arabische School* yang kemudian menjadi Ma'ahad Rasyidiyah Amuntai tahun 1930, dan Diniyah Islamiyah di Barabai tahun 1932.¹³³ Begitupula dengan sekolah-sekolah kaum pergerakan seperti Madrasah Persatuan Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Madrasah Musyawatutthalibin, dan Sekolah Muhammadiyah, umumnya disokong oleh para tuan guru, minimal oleh para guru agama Islam.

Sekolah-sekolah itu telah diatur sesuai metode pengajaran modern dengan menggunakan sistem klassikal. Alumni sekolah-sekolah ini banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin muda Islam, baik yang bergiat dalam pergerakan di bidang politik, sosial maupun keagamaan.

Dilihat dari jiwa perjuangannya, para pemimpin muda Islam itu dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu: (1) Elite agama yang berjiwa santri yang dihasilkan akibat diaktifikannya pendidikan klasik agama yang kemudian kebanyakan menjadi pelopor dan penggerak organisasi

132 J. Thomas Linblad, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*, Foris Publications, KITLV Leiden, 1998, hlm. 133.

133 Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 25.

pergerakan rakyat seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin. Kelompok inilah yang dahulu disebut sebagai kaum tua dan umumnya berhimpun dalam wadah organisasi Nahdlatul Ulama;

(2) Elite agama yang berjiwa agresif dan dinamis yang kemudian berjuang dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Kelompok ini yang menurut istilah di daerah ini pada saat itu disebut sebagai kaum muda.¹³⁴

B. Cendekiawan

Kaum cendekiawan¹³⁵ tumbuh sebagai akibat penerimaan penetrasi Barat secara terbuka dan aktif, baik dengan memasuki sekolah-sekolah pemerintah, atau yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah kaum pergerakan, yang bersifat sekuler maupun keagamaan.

Melalui pendidikan, mereka mengenal huruf latin, dan memiliki kebiasaan membaca seperti buku, koran atau majalah baik yang diperoleh melalui sekolah, atau Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*). Karena adanya pendidikan itulah, mereka mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih maju dibanding dengan kebanyakan masyarakat awam, sehingga lebih memiliki kesadaran akan rasa kebangsaan yang mereka tuangkan dalam berbagai bentuk, baik melalui tulisan, mengajar, maupun sebagai pengurus organisasi pergerakan.

Dari lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas, lahirlah kaum cendekiawan. Dilihat dari status sosial dan latar belakang pendidikannya, mereka itu terdiri dari tiga kelompok elite, yakni:

134 Istilah “kaum muda” dan “kaum tua” (kaum tuha) di Kalimantan Selatan, pertamakali muncul di Alabio pada saat terjadi perdebatan antara ulama pembaharu dengan ulama berpaham lama di *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* Amuntai tahun 1926, lihat Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Paham dalam Agama Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 51.

135 Istilah cendekiawan untuk menyebutkan golongan terpelajar, diantaranya dipergunakan oleh Savitri Prastiti Scherer, *op.cit.*

(1) Elite Tradisional, yakni para elite yang berasal dari keturunan pegawai Pemerintah Hindia Belanda utamanya para ambtenaar misalnya para Kiai, dan para elite yang berasal dari keturunan bangsawan Banjar (feodal) sehingga menempati kedudukan dalam pemerintahan Hindia Belanda;

(2) Elite Sekuler, yang merupakan hasil pendidikan Sekolah partikelir yang diasuh kaum pergerakan rakyat seperti Parindra dan Taman Siswa, ditambah hasil pendidikan di sekolah pemerintah yang turut serta dalam pergerakan kebangsaan, atau pegawai negeri yang dipecat karena melibatkan diri dalam pergerakan kebangsaan;

(3) Elite Religius, yakni elite yang dihasilkan oleh pendidikan yang berbasis keagamaan seperti pengajian di rumah para ulama, di langgar maupun mesjid, dan yang dihasilkan madrasah, atau sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah Persatuan Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Sekolah Muhammadiyah, dan Madrasah Musyawaratutthalibin.¹³⁶

Dari ketiga kelompok elite tersebut, para elite yang dinamakan elite sekuler dan religius memegang peranan penting dalam pergerakan kebangsaan dalam menghadapi Pemerintah Hindia Belanda.¹³⁷ Perjuangan kelompok ini diperkuat pula dengan kedatangan kaum terpelajar dari luar daerah, utamanya Jawa dan Sumatera yang membawa unsur pergerakan kebangsaan ke daerah ini, seperti: dr. Sumarno, dr. Susilo (adik dr. Sutomo), dr. Suranto, Mr. Rusbandi, dr. D.S. Diapari, Marjono, Sunaryo, Maraja Sayuthi Lubis, dan sebagainya.

C. Pedagang

Pedagang pelopor pergerakan umumnya adalah pedagang yang melakukan perdagangan ekspor dan impor,

136 Lihat Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 293-296.

137 Penulis berpendapat, bahwa elite sekuler maupun elite religius dapat dikatakan sebagai "elite nasional" karena sama-sama berperanan penting dalam pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

pedagang antar pulau (*interensuler*), dan pedagang antar kota di Kalimantan Selatan. Merekalah yang karena pekerjaannya memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan hubungan dengan dunia luar dan melihat kemajuan pergerakan di daerah lain, sehingga ketika kembali ke kampung halaman turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan di daerah ini.¹³⁸

Di antara pelopor pergerakan yang berprofesi pedagang antar pulau, diantaranya adalah H.M. Arip atau H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai) yang berdagang pulang pergi Banjarmasin - Surabaya. Ia adalah pembawa organisasi Sarekat Islam ke Kalimantan Selatan. Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya.

Atas saran *Vorzitter Central* Sarekat Islam, OS Cokroaminoto agar mendirikan cabang SI di Kalimantan, maka H.M. Arip bersama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, mereka mendirikan SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan.

Berdirinya organisasi Muhammadiyah di Alabio juga dipelopori seorang pedagang bernama H. Usman Amin yang ketika berada di Surabaya dan Yogyakarta sangat terkesan dengan perkembangan Muhammadiyah. Ketika pulang ke Alabio, H. Usman Amin mengusulkan kepada H. Japeri, seorang tokoh ulama yang berpandangan maju dan berpengaruh di Alabio untuk mendirikan Muhammadiyah, sehingga beberapa waktu kemudian Muhammadiyah berdiri di Alabio yang kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

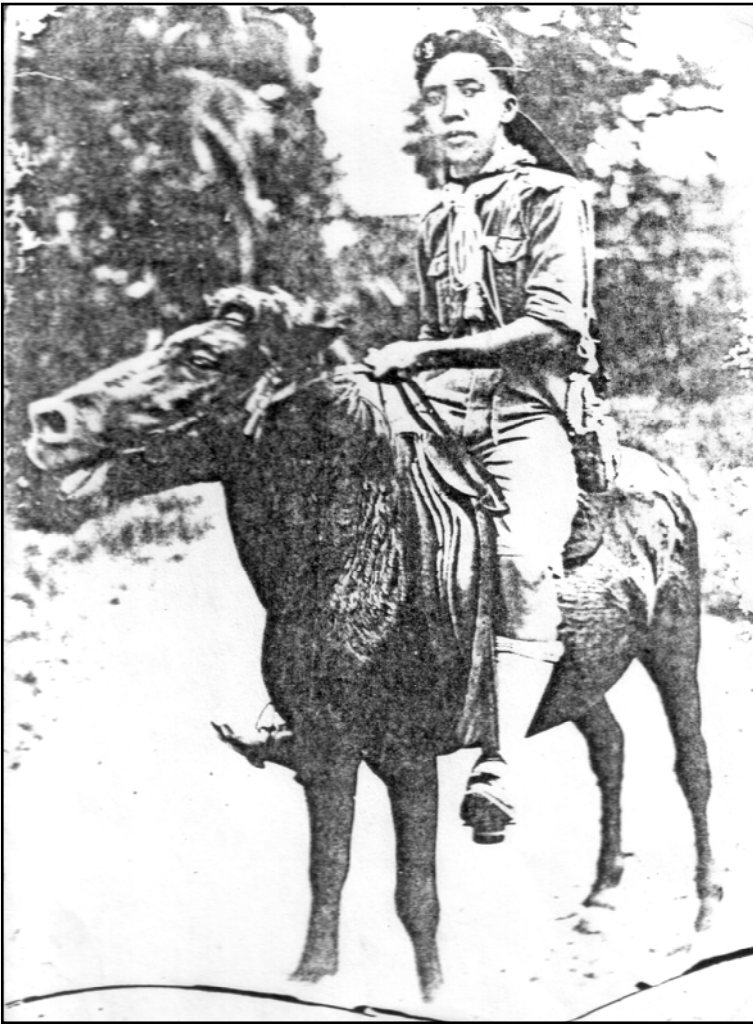
Para pedagang sangat berperan dalam menyebarkan kegiatan tokoh-tokoh organisasi pergerakan, sehingga organisasi yang sebelumnya hanya ada di Banjarmasin, berkembang dengan cepat ke daerah lainnya. Mereka adalah pedagang yang karena tuntutan profesinya, sudah tentu acapkali milir mudik pulang pergi

138 Sjarifuddin, *ibid.*, hlm. 33-34 dan Pemda Tk.I Kalsel, *op.cit.*, hlm. 36.

Banjar-Hulu Sungai. Sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam sebulan.

Mereka membeli getah basah, nyiur dan ikan kering atau apa saja yang patut dijadikan barang dagangan. Guna menghemat modalnya, mereka pun membawa barang dagangan pokok seperti gula putih, garam, bawang dan asam Jawa. Di lain pihak sebagai pedagang kain turut pula menjualbelikan kain batik, pulus, katon dan sebagainya.

Ada kalanya bentuk jual beli dilakukan secara tukar barang atau istilah dagang di Pahuluan ganti tukar (*barter*). Kain katon putih dibeli dengan padi, nyiur dibeli dengan kain, gula merah (enau) ditukar dengan gula putih, bawang merah ditukar dengan *keminting* (kemiri), atau minyak kelapa diganti dengan minyak tanah.



M. Ruslan dengan seragam Kepanduan Bangsa Indonesia, salah seorang tokoh pergerakan di Marabahan, pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Pemuda Marabahan (1929) dan Ketua Sarekat Kalimantan (1930)
(Foto dok. Hj. Rohanah)

Begitulah kaum pedagang Banjar - Hulu Sungai yang berlaku pada zamannya. Namun kalau jumlah keuangan tersedia mencukupi mereka juga melakukan jual beli secara tunai (uang kontan). Para pedagang itulah yang kemudian membisik-bisikkan bahwa di Banjarmasin ada pemimpin pergerakan. Mereka cuma bilang: "*bubuhan Orang Politik*".

Orang-orang yang tinggal di kota maupun para pedagang di Hulu Sungai yang lazim juga disebut Banua Lima dalam tahun 1907 telah mengenal nama perkumpulan orang banyak, yaitu Seri Budiman, Indra Buana dan Budi Sempurna, serta organisasi-organisasi yang tumbuh belakangan.

Mereka juga mengenal nama Babu (Housman Babu), Bondan (Amir Hasan Bondan), Horman (Mohammad Horman alias Ajun Horman, juga Anang Acil bin Kiai Kesuma Wiranegara (Anang Acil Kesuma Wiranegara). Belakangan terkenal nama-nama: H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai), M. Yusak (Muhammad Yusak), dan beberapa orang tokoh lainnya yang berasal dari tanah Jawa.

Bab IV

Perkembangan Organisasi Pergerakan

Sampai tahun 1942 di Kalimantan Selatan terdapat banyak organisasi pergerakan yang mempunyai karakteristik yang beragam; dalam bentuk perkumpulan, partai, maupun sekolah pergerakan.

Jika dilihat dari ruang lingkup atau daerah perjuangannya, ada organisasi yang bergerak dalam lingkup lokal, regional maupun lingkup nasional. Sedangkan jika dilihat dari tujuan yang akan dicapai dan dasar-dasar dari organisasi pergerakannya, maka dapat dikelompokkan ke dalam kelompok besar, yakni organisasi yang bergerak di bidang sosial, dan organisasi pergerakan yang bergerak di bidang politik.¹³⁹

Berbagai karakter, lingkup perjuangan, maupun tujuan organisasi yang ada di Kalimantan Selatan berkaitan erat dengan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan politik di Hindia Belanda. Semula pemerintah melarang perkumpulan dan rapat-rapat politik, namun kemudian mengeluarkan peraturan yang membolehkannya.¹⁴⁰

139 Lebih jauh tentang pengelompokan ini, lihat Pemda Tk.I Kalsel, *ibid.*, hlm. 38.

140 Dalam hal ini perlu disebut R.R. (*Regerings Reglement*) 111 Staatsblad 1885 No.2) yang berbunyi: "Perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat yang bersifat politik atau yang dapat mengancam ketenteraman umum dilarang di Hindia Belanda (Indonesia). Terhadap pelanggaran larangan ini akan diambil tindakan sesuai keadaan". Kemudian menurut Staatsblad 1915 No. 215 R.R. 111 dirubah menjadi 2 ayat yang bunyinya sebagai berikut: (1) Hak penduduk untuk mengadakan perkumpulan dan rapat-rapat diakui; (2) Pelaksanaan hak ini untuk kepentingan umum diatur dan

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Hindia Belanda melanggar peraturan yang dibuatnya, sebagaimana terlihat dari sikapnya yang sangat menekan dan menindas pergerakan di Indonesia.

Demikianlah, pada awal-awal pergerakan di Kalimantan Selatan pada umumnya organisasi yang ada lebih banyak bergerak di bidang sosial, kultural, berskala kedaerahan dan tradisional. Baru kemudian, secara lambat laun mengarah kepada politik dan hal ini bukan sekedar adanya aturan yang membolehkannya, melainkan juga didukung oleh kecenderungan nasionalisme Indonesia yang semakin kuat.

Dari berbagai organisasi pergerakan yang pernah ada di Kalimantan Selatan, terdapat organisasi yang berskala besar, tersebar luas dan mempunyai basis pendukung di berbagai pelosok daerah. Sebaliknya, terdapat pula organisasi yang berskala kecil atau bahkan baru berdiri kemudian bubar, sehingga tidak begitu diketahui siapa pengurus dan aktivitasnya, sehingga hanya dapat disinggung secara selintas.

Organisasi-organisasi itu, baik yang berskala besar maupun kecil, bergerak di bidang politik atau sosial, berlingkup lokal atau nasional, dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:

(1) Organisasi yang sejak awal tumbuh atau berasal dari daerah Kalimantan Selatan sendiri sebagai hasil inisiatif atau murni swadaya para tokoh pergerakan, meski boleh jadi inspirasi pembentukannya berasal dari daerah lain. Organisasi itu antara lain Seri Budiman, Persatuan Pemuda

dibatasi dengan peraturan-peraturan. Kemudian Staatsblad 1919 No. 27 jo 561 mengatur pelaksanaan hak untuk mendirikan perkumpulan dan mengadakan rapat-rapat politik. Pasal 1 berbunyi: (1) Untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan tidak diperlukan izin pemerintah; (2) Seseorang boleh menjadi anggota partai politik jika telah berumur 18 tahun. Pasal 5 berbunyi: "Untuk mengadakan rapat umum diperlukan izin Pemerintah", lihat Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op.cit.*, hlm. 14-15.

Marabahan, Sarekat Kalimantan, Barisan Indonesia (BINDO), Partai Ekonomi Kalimantan (PEK), dan bahkan diantaranya berkembang sampai ke luar daerah sebagai organisasi yang berlingkup nasional, yakni Musyawaratutthalibin;

(2) Organisasi yang berasal dari Pulau Jawa, yakni sebagai cabang dari induknya yang berpusat di Pulau Jawa sehingga berlingkup nasional seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PNI, dan Parindra.

A. Seri Budiman, Budi Sempurna, dan Indra Buana

Sebelum munculnya organisasi pergerakan yang teratur, sesungguhnya di Kalimantan Selatan telah tumbuh beberapa organisasi yang bersifat tradisional yakni berupa sinoman yang pernah berkembang pada masa Kerajaan Banjar. Sinoman berwujud dalam bentuk sinoman kematian, sinoman perkawinan, sinoman kesenian, sinoman kesusastaan, sinoman perayaan dan sebagainya.¹⁴¹

Kelompok-kelompok sinoman umumnya masih merupakan gerakan dalam ikatan bubuhan, atau kelompok masyarakat desa, terikat kepada adat kebiasaan, tradisi orang tua terdahulu atau tradisi keagamaan. Dalam hal ini yang berperan adalah *tetuha* masyarakat dan pemuka agama yang disebut dengan sebutan tuan guru, mualim, ustadz, atau kepala-kepala bubuhan.

Sinoman itu umumnya tidak mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan tidak mempunyai program kerja yang nyata secara tertulis dan terperinci. Landasan kerja sinoman adalah keagamaan, khususnya agama Islam, bersifat kekeluargaan dan tolong menolong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ditujukan untuk menambah kesejahteraannya. Keanggotaannya terdapat dalam lingkungan desa masing-masing.¹⁴² Dengan demikian, bentuk perhimpunan seperti sinoman atau bubuhan itu merupakan gerakan yang masih bersifat tradisional, dan belum dapat dikatakan sebagai embrio dari

141 Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hlm. 81.

142 Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hlm. 23.

proses zaman pergerakan nasional di daerah Kalimantan Selatan.

Tanda-tanda permulaan pertumbuhan pergerakan nasional di daerah ini baru dimulai dengan lahirnya sebuah perkumpulan yang bernama *Seri Budiman* di Banjarmasin pada tahun 1901 yang didirikan atas inisiatif Amir Hasan Bondan. Anggota-anggotanya berasal dari golongan pangrehpraja dan golongan pedagang dari berbagai suku bangsa yang bertempat tinggal di bumi Banjar yaitu golongan masyarakat bumiputera yang telah mendapatkan pengaruh kebudayaan atau pendidikan secara Barat.

Sesuai dengan penonjolan watak sosialnya daripada watak politisnya, maka perkumpulan *Seri Budiman* bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya, mempropagandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian.¹⁴³

Dalam aktivitasnya, organisasi ini berupaya membela kaum lemah, memberantas buta huruf dan beramal sedekah kepada orang banyak. Di bidang pengajaran, organisasi ini menganjurkan belajar menulis dan membaca huruf Latin dan huruf Arab-Melayu. Terhadap kaum lemah, organisasi ini memberikan pertolongan terhadap kaum tani yang memerlukan modal usaha-tani; bersawah-ladang dan berkebun.

Seri Budiman hanya menerima uang sebagai tanda anggota sebanyak sepuluh sen, yang dicantumkan pada *Kartu Tanda Anggota Setia "Seri Budiman" Tunai Sepuluh Sen*. Tidak ada tanggungan bayar iuran bulanan. Tiap malam Kamis diadakan pelajaran (kursus) ilmu pengetahuan khususnya ilmu baca tulis. Tempat Balai *Seri Budiman* di Sungai Mesa, Banjarmasin.

Seiring dengan peningkatan jumlah dan kesadaran akan kewajiban anggota, maka secara berangsur *Seri Budiman* bertambah maju. Taman Pustaka pun diadakan untuk menampung minat membaca yang semakin

143 Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hlm. 83.

meningkat. Mata pelajaran kursus ditambah, ada ilmu sosial masyarakat, agama Islam, juga tentang pertanian.

Walaupun perkumpulan ini lebih nampak sifat sosialnya daripada aspek politiknya, namun organisasi ini dapat dipandang sebagai organisasi perintis di Kalimantan Selatan yang membuka jalan bagi timbulnya organisasi modern di kemudian hari. Organisasi Seri Budiman dibentuk dengan memakai cara dan metode modern seperti memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan tertentu yang hendak dicapai serta kelengkapan organisasi seperti kesekretariatan dan taman bacaan.¹⁴⁴

Perkumpulan Seri Budimanlah yang mula-mula sebagai pelopor mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan.

Perkumpulan ini tidak dapat hidup lama, karena pada tahun 1903 dibubarkan secara resmi yang disebabkan antara lain anggota-anggotanya yang penting dan yang menjadi motor pendorong organisasi pindah tempat tugas, berhubung dengan jabatannya maupun usaha perdagangannya. Yang pegawai negeri dipindahkan keluar Banjarmasin misalnya ke Tanah Grogot-Pasir, atau keluar pulau Kalimantan seperti ke Padang dan Manado. Demikianlah, organisasi Seri Budiman akhirnya bubar, karena kian kurangnya tokoh-tokoh penggeraknya.

Demikianlah, usia Seri Budiman memang tidak begitu lama, akan tetapi kiprah dan keberadaannya menjadi sumber inspirasi, ditiru, dan terus dikembangkan oleh perkumpulan-perkumpulan yang lahir kemudian.

Setahun kemudian setelah bubarnya Seri Budiman, maka pada tahun 1904 timbul pula organisasi lain yang mempunyai tujuan dan anggota yang sama dengan perkumpulan yang mendahuluinya. Perkumpulan tersebut

144 Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hlm. 25 menyebut Seri Budiman sebagai "Sinoman Gaya Baru" atau sinoman yang dipermodern sebagai dampak dari pengaruh Barat waktu itu.

diberi nama *Budi Sempurna* dengan pendirinya adalah Kiai Muhammad Zamzam. Setelah dua tahun perkumpulan ini berjalan, atas persetujuan pengurus dan anggota-anggotanya perkumpulan ini berganti nama menjadi *Indra Buana* dengan tujuan, keanggotaan dan struktur organisasi yang sama dengan perkumpulan-perkumpulan sebelumnya.

Perubahan nama ini ternyata tidak banyak memberikan manfaat terhadap kelangsungan organisasi karena selain timbulnya perselisihan-perselisihan di antara anggota-anggotanya, juga karena tekanan pemerintah kolonial terhadap pemuka Budi sempurna yang berstatus sebagai “pangrehpraja”.

Para pegawai pemerintah yang tidak mau dipindahkan (mutasi) harus diberhentikan dari jabatannya dan dicabut haknya sebagai pegawai negeri. Yang dipindahkan keluar Kalimantan harus berjanji “tidak akan mendirikan atau turut sesuatu organisasi ditempat pekerjaannya barunya.”

Pegawai negeri berstatus guru juga sering mengalami mutasi. Mutasi itu merupakan salah satu strategi Pemerintah Hindia Belanda agar para guru tidak melakukan aktivitas dalam pergerakan secara mendalam di tempat ia mengajar. Akan tetapi, mutasi itu juga berdampak positif terhadap perluasan benih-benih kebangsaan di berbagai tempat dimana guru itu mengajar.¹⁴⁵

Amir Hasan Bondan menyebut *Indra Buana* terkena “penyakit jemu” dan perselisihan, sehingga pada akhirnya pada tahun 1907 *Indra Buana* dibubarkan secara resmi oleh pengurusnya.

Perkumpulan sosial ini sepertinya meniru perkumpulan orang Belanda (*Sociteit de Kapel*), yang

145 Guru yang mengalami beberapa kali mutasi diantaranya adalah Mohammad Arief seorang guru sekolah rakyat asal Pajukungan, Barabai. Mula-mula ia bertugas di Barabai sekitar tahun 1899, kemudian dipindahkan ke Samarinda tahun 1904, terus ke Negara 1909, ke Tanjung 1914, dan kembali ke Barabai tahun 1919, pindah lagi ke Kandangan 1924 dan terakhir selama 7 tahun di Sampit, hingga pensiun dan kembali ke Barabai, lihat Mohammad Nawawie Arief, *op.cit.*, hlm. 3.

membedakannya adalah selain digerakkan oleh golongan bumiputera yang terpelajar juga adanya perasaan dan pertimbangan zaman bahwa pendidikan (Barat) itu penting sekali sebagai indikator dalam perubahan zaman, dan untuk mempropagandakannya diperlukan adanya perkumpulan yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta membentuk taman bacaan.

Pendirian Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) antara lain juga dilakukan pada tahun 1923 oleh segolongan muda terpelajar dalam sebuah organisasi bernama *Srie*. Pendirinya dr. Rusma, Gusti Citra, Kumala Ajaib, Amir Hasan Kiai Bondan, Mas Abi dan Abdullah. Taman Bacaan yang dibentuk bukan hanya memberikan sekedar untuk bersilaturahmi kepada anggota-anggotanya tetapi juga sebagai *Studie club* untuk bersama mempelajari politik dan tipu muslihat penjajahan Belanda.

Dalam majalah mingguan *Malam Djoema'at* yang dipimpin oleh Amir Hasan Bondan dan Saleh Bal'ala, para anggota *Srie* mengadakan rubrik tulisan tersendiri. Haluan dan isi tulisan mereka mula-mulanya bertemakan keagamaan, lambat laun isinya mengarah kepada kebangsaan. Perkumpulan *Srie* hanya bisa bertahan selama empat tahun. Ketika para pimpinannya sebagian besar tidak lagi bertempat tinggal di Banjarmasin, karena pindah tugas jabatan atau karena kegiatan usaha perdagangannya, maka *Srie* akhirnya bubar.¹⁴⁶

Satu gejala seperti yang nampak di Pulau Jawa dengan *yong-yongnya* maka di Kalimantan Selatan timbul pula perhimpunan-perhimpunan yang bersifat lokal diantaranya *Persatuan Pemuda Marabahan*, *Persatuan Putera Barabai* dengan pendirinya H. Hasan Basri, *Persatuan Sopir Barabai*, dan *Persatuan Putera Borneo*.¹⁴⁷

146 Lihat Amir Hasan Bondan, *op.cit.*, hlm. 84.

147 Depdikbud, *op.cit.*, hlm. 73.

B. Persatuan Pemuda Marabahan dan Sarekat Kalimantan

Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) dibentuk pada tanggal 1 Maret 1929.¹⁴⁸ dengan ketuanya M. Ruslan, dibantu oleh Suriadi sebagai sekretaris I dan Mawardi sebagai sekretaris II dengan pelindungnya H.M. Arip.¹⁴⁹ bermarkas di sebuah rumah Joglo yang disebut masyarakat setempat dengan nama Rumah Bulat,¹⁵⁰ yakni sebuah rumah bertipe Joglo di jalan Panglima Wangkang, Marabahan sekarang.¹⁵¹

Pada mulanya para pemuda menjadikan Rumah Bulat sebagai tempat perkumpulan musik untuk menampung bakat seni pemuda Marabahan, namun seringkali para pemuda berkumpul di Rumah Bulat ditambah dengan pengaruh berita-berita munculnya perkumpulan-perkumpulan kepemudaan di Banjarmasin dan aktivitas pergerakan di Jawa, mendorong mereka mendirikan sebuah wadah kegiatan berbentuk organisasi Persatuan Pemuda Marabahan.

Dalam organisasi PPM mereka mendirikan Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) dengan nama *Family Bond*

148 Kepastian tanggal dan tahun dibentuknya PPM ini dapat dilihat dalam foto yang memuat tulisan “Leesgezelschap Persatoean Pemoeda Marabahan PPM 1 Maret 1929” dan foto satu tahun berdirinya sebagaimana ditulis pemilik foto sekaligus pelaku sejarah, Mawardi, di dalam figura dengan tulisan “Een jarig bestaan PPM Persatoean Pemoeda Marabahan 1 Maret 1930”. *Een jarig bestaan* diartikan “satu tahun berdiri”.

149 Soepardi, *op.cit.*, hlm. 5 dan hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.

150 Tidak begitu jelas mengapa disebut “Rumah Bulat”. Konon karena setiap musyawarah yang dilakukan di rumah Joglo itu hasilnya selalu “bulat “ (mufakat). Versi lain karena dibandingkan dengan rumah di sekitarnya, rumah Joglo itu lebih berbentuk “bulat” (bundar).

151 Bangunan Rumah Bulat terletak pada 02°58'.53” Lintang Selatan, 114°46'.17” Bujur Timur.

bertempat di Rumah Bulat bergabung dengan perkumpulan musik yang telah ada.



Een jarig bestaan (setahun berdiri) Persatuan Pemuda Marabahan 1 Maret 1930. Duduk di tengah, Mawardi diapit Badarudin (sebelah kiri) dan M. Ruslan (sebelah kanan, berdiri) di depan Rumah Joglo (Rumah Bulat) Marabahan. (Foto dok. Mawardi).

Diadakannya taman bacaan berkaitan erat dengan keinginan tokoh masyarakat setempat agar kegiatan dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf. Sebagai bahan bacaan mereka berlangganan surat kabar dan majalah yang umumnya berbahasa Melayu¹⁵² diantaranya

152 Guru besar Universitas Leiden, A. Teeuw menyatakan bahwa bahasa Melayu mempunyai peranan penting sebagai bahasa penghubung bagi pergerakan nasional. Bahasa itu telah

Hindia Baroe, Bintang Baroe, Bintang Islam, dan Kemajoean Hindia. Biaya berlangganan dipungut dari iuran para anggota, meskipun demikian anggota masyarakat yang bukan anggota taman bacaan juga diperkenankan membaca surat kabar atau majalah yang ada.¹⁵³

Dari surat kabar dan majalah tersebut, para pemuda Marabahan dapat mengikuti berita dan membaca tulisan yang mempropagandakan cita-cita kebangsaan yang saat itu telah tumbuh di Jawa maupun ditempat lainnya. Selain itu datangnya tokoh-tokoh pergerakan dari Jawa juga turut mewarnai tumbuhnya benih-benih kebangsaan dan semangat pergerakan di daerah ini.

Pada tahun 1930 Persatuan Pemuda Marabahan memperluas tujuan dan ruang geraknya dengan mensponsori berdirinya Sarekat Kalimantan dengan Pedoman Besarnya H.M. Arip.¹⁵⁴ Perubahan nama menjadi Sarekat Kalimantan antara lain dalam rangka memenuhi syarat untuk menjadi anggota Indonesia Muda yang dibentuk setelah Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.¹⁵⁵

Susunan pengurus Sarekat Kalimantan terdiri dari M. Ruslan (Ketua), A. Gani (Wakil Ketua), A. Sunhaji (Penulis I), Sabran (Penulis II), Tambi (Bendahara I), Matran (Bendahara II), dan H. Basirun, Sabran B, Muhiddin serta Imbran (Pembantu-pembantu) dengan Ketua Pedoman Besarnya adalah H.M. Arip. Dalam anggaran dasarnya disebutkan, Sarekat Kalimantan bertujuan ke arah keekonomian dan kesosialan.¹⁵⁶

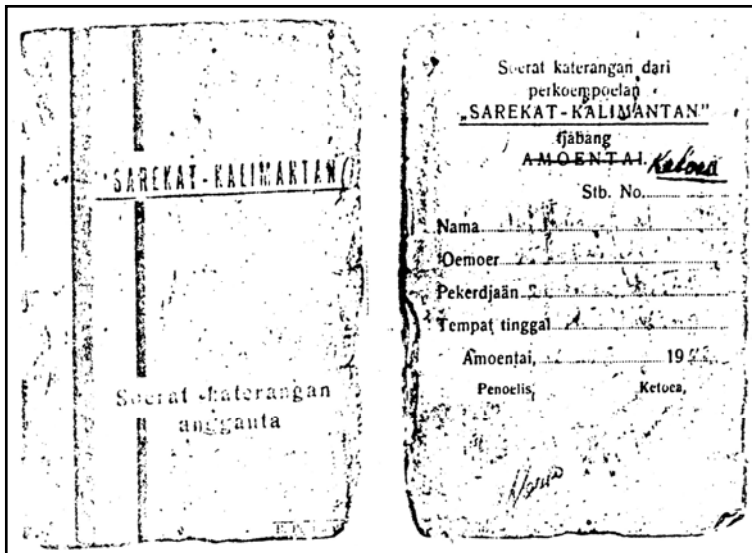
diperlengkap untuk peranan itu terutama oleh surat kabar-surat kabar Melayu yang mulai berkembang sejak tahun 1900, lihat A. Teeuw, *Sastra Baru Indonesia*, Nusa Indah, Ende-Flores, 1980, hlm. 22.

153 Hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.

154 Amir Hasan Bondan, *op.cit.*, hlm. 85.

155 Menurut Achmad Darmawie, pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, pemuda Borneo dari Kalimantan Selatan diwakili oleh Masri, lihat Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm.4.

156 Hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.



Surat Keterangan Anggota Sarekat Kalimantan
(Repro. M. Idwar Saleh, dkk, 1978/1979)

Setelah terbentuknya cabang-cabang Sarekat Kalimantan di daerah lainnya di Kalimantan, maka Sarekat Kalimantan melangsungkan kongresnya yang pertama pada tahun 1930 di Bakumpai (Marabahan). Kongres ini dilaksanakan di Rumah Bulat selama tiga hari diantaranya diikuti oleh perwakilan Sarekat Kalimantan cabang Barabai, Amuntai, Kandangan, dan Banjarmasin. Berita kegiatan kongres dikirim Mawardi anggota Sarekat Kalimantan Marabahan ke surat kabar Bintang Borneo yang terbit di Banjarmasin.

C. Barisan Indonesia dan Bond Indonesische Chauffeur

Sejalan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan yang terjadi, terutama setelah berlangsungnya

Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, beberapa organisasi yang bersifat lokal dan berwatak kedaerahan di Kalimantan Selatan mulai mengembangkan diri ke arah kebangsaan.

Sarekat Kalimantan adalah salah satu organisasi yang menyikapi kecenderungan arah pergerakan itu. Pada kongresnya yang ke-2 pada tahun 1931 di Barabai, para peserta kongres menyatakan kebulatan tekad untuk menjadikan Sarekat Kalimantan berasaskan kebangsaan dan merubah organisasi menjadi sebuah partai politik dengan nama Barisan Indonesia (BINDO) dengan Pedoman Besarnya H.M. Arip.¹⁵⁷

Pusat Pedoman Besar yang semula berada di Marabahan dipindah ke Banjarmasin. Kata “Indonesia” di sini menunjukkan adanya sifat kenasionalan, dan hal ini sejalan dengan sikap politiknya yang non-kooperatif, sehingga menjadi incaran kecurigaan pemerintah.

Organisasi ini mempunyai kartu anggota berwarna merah putih sebagai simbol bendera kebangsaan, dan di dalam kartu itu disebutkan bahwa Barisan Indonesia bermaksud hendak turut:

- a) Mendukung dan menjunjung derajat Bangsa dan Tanah Air Indonesia;
- b) Mempelajari tentang kepolitikan di antara anggota-anggota yang telah insyaf tentang asas dan tujuan BINDO.

Disebutkan pula, bahwa maksud itu dicapai dengan cara:

- a) Membangkitkan keinsyafan dan memperkuat perasaan persatuan di antara segala putera dan puteri Indonesia;

157 Barisan Indonesia (BINDO) merupakan organisasi lokal pertama yang berasaskan kebangsaan dan *non-cooperatif* yang dibentuk atas inisiatif para putera daerah Kalimantan Selatan.

- b) Memberantas analphabetisme (picak¹⁵⁸ mata huruf), menyiar-nyiarkan hal nasional Onderwijs dan membangunkan fonds-fonds (*Studie-partij-congres-enz*);
- c) Memajukan hal pertanian, koperasi, dan segala usaha yang sah.¹⁵⁹

Dalam tahun 1932 Kongres BINDO yang direncanakan berlangsung di Banjarmasin mengalami kegagalan, karena organisasi ini dituduh sebagai *onderbouw* Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan) lantaran ada sebagian anggotanya juga anggota PNI Pendidikan.

Baru kemudian pada tanggal 27 s.d. 29 April 1934 dilaksanakanlah Kongres BINDO I di Banjarmasin diikuti oleh para utusan dari Hulu Sungai dan daerah Barito. Meski dilarang oleh polisi PID Belanda, mereka berani melanggar larangan itu dengan memasang atau mengibarkan bendera merah putih, di dalam maupun di luar gedung kongres.

158 Picak artinya buta atau tidak melihat. Picak mata huruf artinya buta huruf.

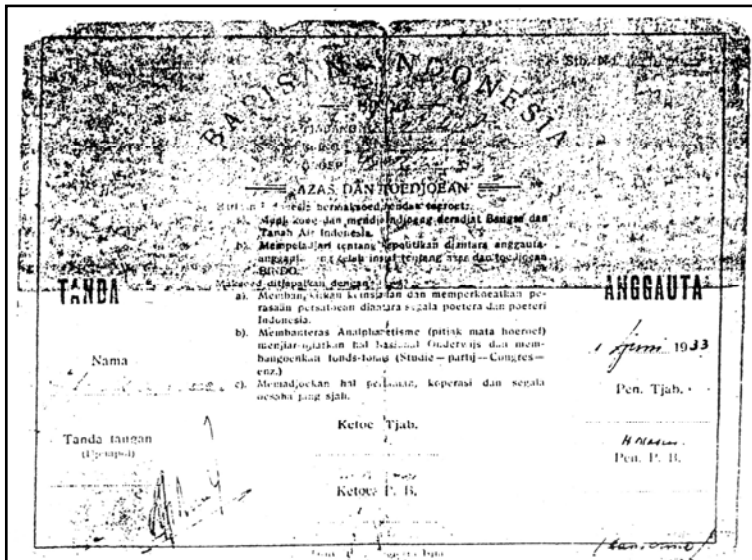
159 Dikutip dari Asas dan Tujuan BINDO yang terdapat dalam kartu Tanda Anggota Barisan Indonesia, dengan penyesuaian ejaan lama ke ejaan baru.



Peserta Kongres I BINDO di Banjarmasin dengan bendera Merah Putih yang dikibarkan. Tampak diantaranya M. Yakub Amin (5), M. Asyari (1), dan G. Nurdin (3) diabadikan pada saat perpisahan dengan utusan Hulu Sungai dan Barito pada tanggal 30 April 1934 .
(Foto dok. A. Surya Alamsyah).

Sejak kongres Sarekat Kalimantan di Barabai yang menghasilkan BINDO, hampir semua pengurus pedoman besar dan cabang BINDO selalu berada di bawah pengawasan polisi PID Belanda. Sebagai dampak dari kuatnya tekanan Pemerintah Hindia Belanda, dan lemahnya pengkaderan maka lambat laun aktivitas BINDO mengalami kemunduran.¹⁶⁰

160 Soepardi, *op.cit.*, hlm.6.

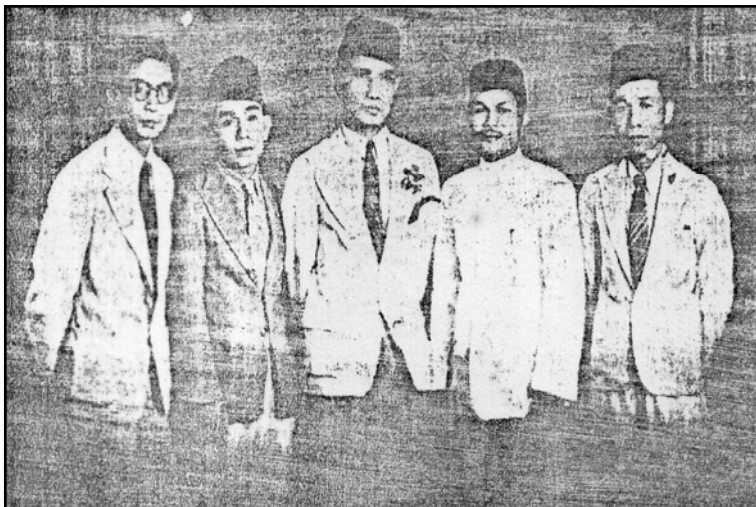


Tanda Anggota Barisan Indonesia (BINDO) dengan warna kartu merah di bagian atas dan putih di bagian bawah, sebagai simbol bendera kebangsaan Indonesia (Repro, M. Idwar Saleh, dkk, 1978/1979).

Di Hulu Sungai, sebagian masyarakat sudah menyadari pentingnya persatuan, seperti dengan mendirikan Persatuan Putera Barabai yang dipelopori Hasan Basri, Persatuan Sopir Barabai, Kesatuan Tenaga Pemotong Karet dipimpin oleh Gaun (Banua Binjai) dan Guru Hamdi (Kampung Qadhi).

Persatuan Sopir Barabai ini merupakan cikal bakal bagi organisasi kaum sopir di Kalimantan Selatan, karena merekalah yang pada tahun 1934 mendirikan cabang *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC) di Barabai dipimpin oleh Ali

Baderun, M. Salman, dan Arafiah.¹⁶¹ Para sopir itu mempunyai route perjalanan yang ada kalanya tidak menentu, terkadang Barabai-Banjarmasin pulang pergi, bisa pula Barabai-Alabio atau Barabai-Tanjung lewat Kelua, dan sebagainya.

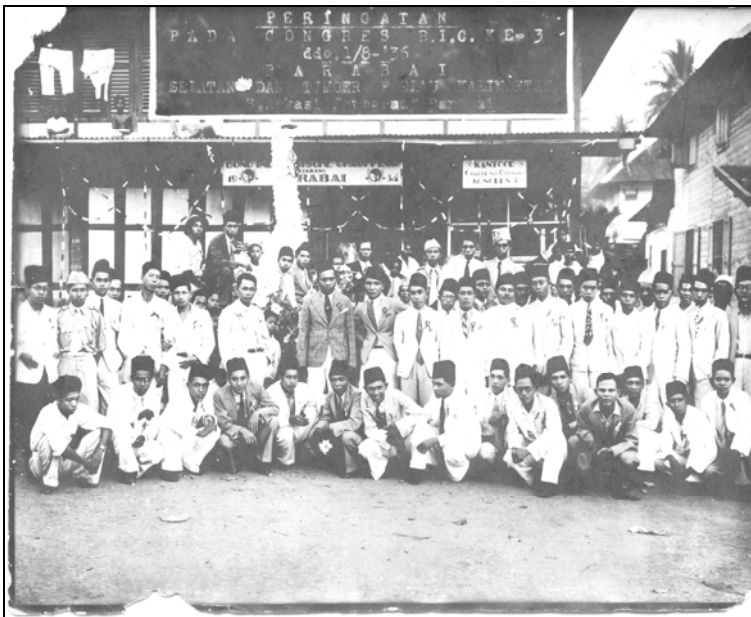


Pengurus *Bond Indonesische Chauffeur* di Banjarmasin.
Di tengah, Achmad Zakaria Ketua Umum, didampingi
Abdussamad Sekretaris Umum, Usuf Bendahara, M. Husin
dan Abubakar s Pembantu Umum.
(Foto dok. keluarga Achmad Darmawie).

¹⁶¹ Lihat Mohammad Nawawie Arief, *op.cit*, hlm.5. Pada foto Peringatan Congres BIC ke-3 di Barabai 1 Agustus 1936, terdapat papan nama bertulisan "Bond Indonesische Chaoppeur (*Chauffeur*, pen) Tjabang Barabai 1934" yang menunjukkan tahun dibentuknya BIC di Barabai.

BIC di Kalimantan Selatan mempunyai cabang di beberapa daerah seperti BIC Cabang Haruai yang dipimpin oleh Inang Bahdie Ketua, Anang Basunie wakil Ketua, Hamidhan Juhri Sekretaris, Mohammad Taher Bendahara, dan Achmad Pembantu.

Setelah berjalan beberapa saat lamanya, kedudukan Pengurus Besar BIC di Kalimantan Selatan dipusatkan di Banjarmasin dengan Ketua Umum dijabat oleh Ketua Umum Achmad Zakaria, Abdussamad Sekretaris Umum, Usuf Bendahara, M. Husin dan Abubakar sebagai Pembantu Umum.



“Peringatan Congres B.I.C ke-3 ado. 1/8- ‘36 Barabai ,
Selatan dan Timoer Poelau Kalimantan” bertempat di kantor
“Bond Indonesische Chaoppeur (*Chauffeur*, pen.) Tjabang
Barabai 1934”

(Foto dok. H. Abdul Muis).

Dalam rangka untuk menyuarakan kepentingan para sopir atau kepentingan rakyat pada umumnya, maka organisasi BIC juga mempunyai media cetak dengan nama *Suara Bond Indonesische Chauffeur* yang dikendalikan oleh Achmad Zakaria bersama dengan H. Husein Razak, seorang tokoh Parindra dan juga pembina ROEPELIN (Rukun Pelayaran Indonesia) yang memasok barang dagangan dari Jawa ke Banjarmasin.

Pada tanggal 1 Maret 1936 seluruh cabang organisasi BIC yang berada di daerah Selatan dan Timur pulau Kalimantan mengadakan Kongres BIC ke-3 di Barabai, selain memilih pengurus baru, kongres juga mengeluarkan beberapa keputusan diantaranya menggabungkan organisasi BIC dengan organisasi sopir lainnya yang pada saat itu berkembang luas di berbagai daerah lainnya, terutama di Jawa yang pengurus besarnya berkedudukan di Malang.¹⁶²

Di akhir tahun 1939 BIC seluruh Indonesia mengadakan Kongres I di Malang, Jawa Timur yang diikuti pula oleh utusan BIC dari Kalimantan Selatan. Kongres itu dihadiri oleh Mr. Tajuddin Noor, penasihat BIC seorang putera Kalimantan yang bertempat tinggal di Lawang Jawa Timur. Kesempatan pertemuan dengan Mr. Tajuddin Noor digunakan untuk bertukar pikiran tentang perkembangan pergerakan di Jawa dan di Pulau Kalimantan.

Kongres BIC dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh pemuda pelajar. Setelah melakukan serangkaian rapat, akhirnya Kongres BIC I mengeluarkan beberapa keputusan, seperti bendera organisasi BIC berwarna Merah, Putih, dan Hijau dengan tanda bundaran di tengah sebagai simbol BIC; lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan menyatakan

162 Aam Niu, "Perjoangan Tempoe Doeloe: Sopir Taksi Diinstruksikan Pakai Piyama", dalam *Banjarmasin Post*, 7 Desember 1978.

satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan satu negara Indonesia.¹⁶³

Persatuan Putera Borneo dibentuk pada tahun 1929 di Banjarmasin dengan promotornya Abdul Kadir. Lahirnya Persatuan Putera Borneo mendapat respons yang positif dari rakyat terutama golongan terpelajarnya karena tujuannya di bidang ekonomi dan sosial yang didasarkan kepada kebangsaan Indonesia.

Persatuan Putera Borneo sebenarnya telah berdiri lama di Surabaya di bawah pimpinan Abdul Kadir. Maksud promotornya dengan membentuk Persatuan Putera Borneo di Banjarmasin agar dapat melakukan kontak langsung dengan Persatuan Putera Borneo di Surabaya.¹⁶⁴

D. Partai Ekonomi Kalimantan

Partai Ekonomi Kalimantan atau lebih populer dengan singkatannya PEK berdiri pada tahun 1932 di Banjarmasin, dipelopori oleh Anang Acil Kesuma Wiranegara. Partai ini mempunyai cabang di Pleihari¹⁶⁵ dan di Hulu Sungai, dengan kedudukan Pengurus Cabang di Kandangan.¹⁶⁶

163 Hamidhan, *op.cit.*, tanpa halaman. Tidak diketahui secara pasti apakah bendera organisasi BIC hasil keputusan Kongres BIC di Malang, sama atau berbeda bentuknya dengan bendera organisasi BIC sebagaimana terlihat pada foto Kongres BIC ke-3 se wilayah Selatan dan Timur pulau Kalimantan, yakni berupa berupa bundaran yang dibagi tiga dengan warna merah dengan huruf B, putih dengan huruf I, dan hijau dengan huruf C, diapit tangkai padi di kiri dan kanan.

164 Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hlm. 85.

165 Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 61.

166 Artum Artha, "Cita-cita...", hlm.6.



Anang Acil Kesuma
Wiranegara

Organisasi ini bertujuan membela rakyat kecil dari kesukaran-kesukaran ekonomi, yang dalam praktiknya hanya dapat mengumumkan peraturan *erakan* dan memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah semestinya dibebaskan. Mereka melakukan pembelaan berdasarkan Undang-Undang Hindia-Belanda sendiri.

Sudah barang tentu pihak kaki tangan Belanda “harus curiga”, sebab PEK dengan tujuannya itu dapat mengorganisir beberapa puluh bahkan ratusan penduduk di Hulu Sungai. PEK dapat mengusahakan pendaftaran orang bebas pajak baik terhadap penduduk yang usianya lebih 50 tahun maupun terhadap anak dewasa yang usianya kurang 18 tahun atau lebih, terutama karena belum kawin (tidak berkeluarga). Pajak-pajak yang patut dibebaskan seperti: pajak kepala, pajak sawah (tanah yang kurang subur), ladang gunung (tidak terpelihara baik).

Sebelum ada PEK, banyak penduduk yang terperas ekonominya karena harus membayar pajak, misalnya:

1. Tiap 1 orang petani yang punya 1 bidang sawah dan 1 bidang ladang dalam setahun harus bayar pajak sawah-ladanganya, walaupun hasilnya sangat kurang. Sawah dikenakan wajib pungut sebesar “tujuh puluh lima sen” (f 0,75), dan pajak ladang wajib bayar “lima puluh sen” (f. 0,50).
2. Tiap 1 orang tua lanjut usia 50 s.d. 55 tahun harus bayar wajib pajak kepala per tahun “lima puluh

sen” (f. 0,50). Tiap 1 orang dewasa (kawin/belum) umur 18 tahun ke atas harus bayar wajib pajak seperti tersebut di atas. Meski umur muda akan tetapi jika akan melaksanakan perkawinan, dia wajib kena pungut pajak kepala. Dalam sebuah rumah, satu keluarga sedarah-sedaging mereka wajib kena pajak yang sama, padahal seharusnya salah seorang antar keluarga itu dibebaskan.¹⁶⁷

Dalam tahun 1936-1937, PEK banyak melakukan pembelaan, antara lain dilaksanakan oleh Artum Artha dan kawan-kawan. Hasilnya puluhan bapak-bapak kaum tani terhindar dari penderitan pajaknya dan sejumlah persawahan-perladangan juga dapat dibebaskan pungutan wajib pajak yang telah lama menjadi beban bagi para petani itu pada zamannya.

Nama PEK dan pemimpin-pemimpinnya populer di kalangan penduduk Hulu Sungai, karena pembelaannya secara jujur, tanpa dipungut bayaran. Namun kaum tani secara jujur pula berbuat atas nama hati nuraninya datang menemui pembelanya dan memberikan sekadar jasa, baik berupa duit maupun berupa benda, padi atau dengan berasnya.¹⁶⁸

Untuk menyuarakan perjuangan organisasinya, PEK menerbitkan Soeara Rakyat Kalimantan (SORAK) langsung dipelopori oleh Anang Acil Kesuma Wiranegara. Pada perkembangannya, SORAK dihentikan penerbitannya, dan sebagai gantinya terbit Soeara Kalimantan dipimpin oleh A.A. Hamidhan.¹⁶⁹

Pada tanggal 15 Oktober 1938, dr. A.K. Gani dari Gerindo Jakarta waktu kunjungannya ke Kalimantan Selatan, berkesempatan datang ke Paringin untuk meresmikan berdirinya Gerindo Cabang Paringin. Akan tetapi, karena Pemerintah Hindia Belanda melarang berdirinya Gerindo di

167 Artum Artha, *loc.cit.*

168 Artum Artha, *ibid.*, hlm. 7.

169 Hasil wawancara dengan Artum Artha, Banjarmasin.

Paringin, maka A.K. Gani diberikan kehormatan untuk meresmikan berdirinya PEK Cabang Paringin yang diketuai oleh Ismail. Seusai peresmian PEK, oleh pembawa acara Anang Abdul Sani, dr. A.K. Gani diminta berpidato. Pada awal pidatonya tenang saja, kemudian berangsur keras dan tajam lalu melontarkan kritik terhadap penjajah Belanda. Berbicara dengan gaya seorang aktor yang memukau, karena ia memang pameran utama dalam film “Asmara Murni”, katanya untuk biaya kuliah mencapai gelar dokter. Pada akhir pidato ia bersajak, memuja keindahan alam Indonesia yang kaya raya. Dalam sajak ia beberapa kali menyelipkan kata merdeka dan mendapat tepuk tangan riuh dan gegap gempita dari yang hadir. Terpengaruh oleh gaya A.K. Gani berpidato dan membawakan sajaknya, polisi PID terbungkam, terpana, tidak sempat menegur, sampai pembicara turun dari podium¹⁷⁰

PEK berakhir karena selain timbulnya semangat persatuan nasional yang mengakibatkan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak relevan lagi, juga karena tidak adanya kader partai yang mampu meneruskan jalannya organisasi, tidak lama setelah pelopornya yaitu Anang Acil Kesuma Wiranegara meninggal dunia.¹⁷¹

E. Sarekat Islam

Sarekat Islam disingkat SI,¹⁷² berdiri di Banjarmasin pada tahun 1912 sebagai cabang dari induknya di Pulau

170 Sebagaimana dituturkan H. Achmad Syahman yang menyaksikan peristiwa itu kepada Aam Niu, lihat Aam Niu, “Balangan, Perlu Sentuhan Pembangunan, Pemerintah Belanda Gempar“, dalam *Harmonis* No. 408/1989, hlm. 18; Aam Niu, “Kata Merdeka 51 Tahun lalu di Paringin“, dalam *Gawi Manuntung*, minggu kedua Juni 1989.

171 Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 61-62.

172 Pada mulanya bernama SDI yang didirikan H. Samanhudi di Solo tahun 1911. Berdasarkan akte notaris tanggal 10 September 1912, SDI berubah menjadi SI. Menurut W. Poespoprodjo, *Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926 Terbentuknya Suatu Pola*, CV. Dewadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 42,

Jawa. Dibawa ke Kalimantan Selatan oleh H. M. Arip (H. Matarip atau H. Muhammad Arip Bakumpai) seorang pedagang kelahiran Bakumpai (Marabahan) yang pulang pergi Banjarmasin – Surabaya.¹⁷³ Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Atas saran ketua SI OS Cokroaminoto aktivitas pergerakannya pindah ke Banjarmasin sebagai Komisaris SI untuk daerah Kalimantan Selatan. Bersama-sama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, maka berdirilah SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan.

Selain faktor kedekatan dalam aspek geografi dan ekonomi dengan Pulau Jawa, maka aspek agama juga sangat mendukung berkembangnya SI di Kalimantan Selatan. Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah penganut Agama Islam yang sangat tertarik dengan cita-cita dan perjuangan SI. Sebagaimana ditinjau dari anggaran dasarnya yakni mengembangkan jiwa berdagang; memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran; memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat derajat bumiputera; menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, maka aktivitas SI benar-benar mampu mengambil hati rakyat banyak yang beragama Islam, mulai dari golongan tani, buruh, pedagang, sampai kepada golongan intelektual dengan berbagai kepentingan.

Meski SI telah didirikan, tidak mudah bagi pegurusnya untuk merealisasikan program kerjanya. Karena pengakuan berbadan hukum (*rechtspersoon*) oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai SI lokal baru diberikan pada tanggal 30 September 1914 melalui Beslit (*Besluit*) Gubernur Jenderal

perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi ke dalam empat phase yakni periode 1912-1916 sebagai masa pembentukan, periode 1916-1921 masa jaya, 1921-1927 masa konsolidasi, 1927-1942 masa mempertahankan eksistensi. Pada hakikatnya SI lahir guna menghadapi persaingan dagang melawan pedagang-pedagang Cina.

173 Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 22.

Hindia Belanda Nomor 33 kepada SI cabang Banjarmasin. Sejak itu, mulailah Sarekat Islam dapat bergerak lebih leluasa dalam mengambil langkah-langkah perjuangan di bidang perekonomian, sosial dan pendidikan dan keagamaan.¹⁷⁴

Berbeda dengan perjuangan di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan yang relatif berhasil, maka perjuangan SI di bidang perekonomian di awal-awal pergerakannya kurang menunjukkan hasil yang berarti. Setelah didirikan pada tahun 1912 SI telah mendirikan Sarekat Dagang dan Sarekat Pelayaran sebagai upaya untuk memperlancar transportasi sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan Selatan, namun agaknya usaha-usaha itu tidak mampu melawan monopoli perdagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina yang telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, di samping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi.

Kegagalan SI di bidang ekonomi membawa pengaruh buruk terhadap organisasi, dimana pengurusnya tidak lagi mempunyai kekompakan kerja dan dengan sendirinya inisiatif organisasi sangat menurun, sehingga tahun 1920 organisasi SI Banjarmasin nyaris beku tanpa kegiatan.

Kedatangan OS Cokroaminoto ke Banjarmasin tahun 1919 kemungkinan sekali erat hubungannya dengan kemunduran SI di daerah ini. Dimana setelah itu, pengurus Centraal Sarekat Islam (CSI) mengirim seorang propagandis muda yang terpelajar, cakap, berani dan dinamis bernama Maraja Sayuthi Lubis. Dalam melaksanakan tugasnya di daerah ini, Sayuthi Lubis telah memahami bahwa satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan SI dari kehancuran adalah dengan melakukan reorganisasi diantaranya mengganti pengurus lama dengan pengurus baru. Maka dibantu oleh Mohammad Horman ---kelahiran Marabahan---, Maraja Sayuthi Lubis pada tahun 1922 berhasil menyusun pengurus baru SI Banjarmasin.

174 Sjamsuddin, *ibid.*, hlm. 25.

Sebagai bagian dari reorganisasi, maka dibentuklah beberapa departemen seperti Departemen Perburuhan, Pertanian, Urusan Nelayan, dan sebagainya. SI juga menerbitkan surat kabar dengan nama "Keadaan Zaman" yang dicetak sendiri di Banjarmasin maupun "Borneo Bergerak" yang dicetak di Surabaya.

Antara tahun 1922 sampai 1930 usaha SI di bidang ekonomi semakin meningkat dan diperluas bukan hanya untuk kepentingan anggota tetapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat yang banyak menanggung beban penjajahan. Ini erat kaitannya dengan cita-cita nasionalisme.

Upaya SI itu terlihat ketika mengeluarkan Mosi Kongres sebagai hasil Kongres SI di Banjarmasin pada tanggal 14 s.d. 16 April 1923 di gedung Cahaya Tatas. Sarekat Islam melalui Maraja Sayuthi Lubis selaku (W.G) Voorzitter Congres SI Banjarmasin, memberi kuasa kepada Housman Baboe, Presiden Perserikatan Dayak atau Pakat Dayak yang turut diundang dalam kongres untuk menyampaikan mosi tersebut kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Majelis *Volksraad* di Buitenzorg, Bogor, untuk menyampaikan segala keberatan-keberatan dan permohonan rakyat Borneo.



Bestuur (Pengurus) Sarekat Islam Cabang Banjarmasin tahun 1920. Berdiri dari kanan ke kiri, Mohammad Horman (urutan ke-2), Saleh Bal'ala (urutan ke-4), dan duduk di kursi Maraja Sayuthi Lubis.

(Foto dok. H. Anang Ahmad Nawier)

Melalui mosi kongres, SI menuntut perlakuan yang sama sebagaimana diberikan Pemerintah Hindia Belanda terhadap golongan Eropa, Timur Asing. Tuntutan itu antara lain meliputi :

- a. Menuntut pemerintah supaya tidak membedakan dalam memperbaiki jalanan maupun jembatan antara kampung orang Eropa dengan kampung Bumiputera, sebab selama ini yang mendapat perbaikan hanyalah jalanan kampung-kampung orang Eropa saja;
- b. Menuntut pemerintah supaya memberikan perlakuan yang sama terhadap macam hukuman

atau status terhukum dari penganjur-penganjur pergerakan rakyat, dengan macam hukuman dan status terhukum yang dikenakan kepada kaum bangsawan atau kepada bangsa-bangsa Eropa lainnya;

- c. Menuntut pemerintah supaya guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum dibebaskan dari kewajiban menjalankan *Ordonnantie Heeren Dienst* yang menyangkut erakan atau kerja rodi, seperti kebebasan yang diberikan kepada guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending.¹⁷⁵

Dengan mosi kongres, SI berusaha memperbaiki ekonomi rakyat dengan melawan adanya “*economische uitbuiting*” (pengurasan ekonomi) antara lain dalam bentuk pungutan pajak yang besarnya tidak sebanding dengan penghasilan rakyat. Taksiran pajak dikenakan berlapis-lapis dan dipungut antara lain oleh Gemeenteraad Bandjermasin, oleh *Desaraad* di bagian Afdeling Hulu Sungai serta pajak-pajak yang dipungut oleh Kas Negeri di pasar. Dalam urusan “*economische uitbuiting*” itu, tuntutan SI berkaitan dengan perubahan sistem pajak, seperti:

- a. *Inkomstenbelasting* (pajak penghasilan): dalam hal ini SI meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan atau meringankan pungutan 30% Opcenten yang terasa berat bagi rakyat, juga terhadap 10% Opcenten Gemeenteraad. Selain itu juga memperjuangkan adanya “*Lid Commissie Aanslag*” yang dipilih dari orang-orang kampung yang lebih mengetahui perikehidupan di kampung, sehingga besarnya pajak dapat ditentukan sesuai dengan kemampuan rakyat.
- b. *Bea Invoerrecht* (bea impor) dan *Slachtbelasting* (pajak jagal/penyembelihan): SI mengharap

175 Sjamsuddin, *ibid.*, hlm 67.

kepada pemerintah agar *Bea Invoerrecht* 8 % dari tanaman rotan dihapuskan karena tanaman ini sudah dikenakan pajak pendapatan. SI juga menuntut dikembalikannya uang *slachtbelasting* yang telah dipungut pemerintah secara tidak sah. Permohonan ini terutama datang dari Tanah Dayak dan Kuala Kapuas.

- c. *Landrente*: untuk hal ini SI memperjuangkan agar ladang-ladang yang memberi hasil saja yang dipungut pajaknya, sedang ladang yang rusak atau tidak memberi hasil tidak usah dipungut pajaknya.
- d. Pungutan uang yang dibawa pergi haji. SI menyampaikan aspirasi rakyat Hulu Sungai yang menentang adanya pungutan sebesar 2% dari uang yang dibawa pergi haji. Pungutan itu dianggap tidak sah, sebab tidak jelas digolongkan ke dalam pajak apa.¹⁷⁶

Selain itu, SI Marabahan melalui kongres mengharapkan bantuan pemerintah untuk ikut serta memajukan pertanian rakyat, sedangkan rakyat Muara Teweh dan Dusun Tengah merasa keberatan dengan dibukanya tambang batu bara di daerah itu oleh perusahaan asing, karena dikuatirkan mematikan usaha pertambangan rakyat, di samping pembukaan tambang tersebut akan merusak tanaman rakyat.

Dalam bidang pendidikan sikap SI jelas sekali yakni memajukan pengajaran untuk meningkatkan derajat bumiputera. Selain mendirikan sekolah agama, SI juga mendirikan sekolah swasta yakni *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) atau HIS Swasta diantaranya di Pasar Lama Banjarmasin dan di Marabahan yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Taman Siswa. SI juga memperjuangkan kepada pemerintah agar mendirikan sekolah-sekolah bagi anak perempuan dan kepada sekolah-sekolah Islam agar diberikan subsidi.

176 Sjamsuddin, *ibid.*, hlm. 63-64. Lebih detail, lihat isi salinan naskah Motie Kongres pada Lampiran 1.

Keberhasilan perjuangan SI di berbagai bidang menjadikan SI semakin berkembang. Ditambah oleh faktor bahwa SI adalah organisasi berdasarkan agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Kalimantan Selatan, maka organisasi ini dapat dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Melalui peranan ulama dan guru-guru agama yang merupakan pemimpin informal dan memahami suasana kebatinan masyarakat saat itu, tidaklah sulit untuk menarik massa untuk berpartisipasi dalam perjuangan SI.

Untuk menghimpun potensi SI lokal dan organisasi-organisasi di luar SI lainnya maka pada tanggal 17 Februari 1924 para pimpinan SI dan utusan-utusan lokal-lokal SI di *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo* memutuskan mendirikan subkomite untuk pembentukan NBC atau National Borneo Conferentie yang mereka artikan sebagai “tempat permusyawaratan persatuan bangsa kita rakyat Borneo” untuk menunjang kemajuan Borneo.¹⁷⁷

Mereka menetapkan pelaksanaan NBC pada tanggal 30-31 Maret 1924 di Banjarmasin, dan seterusnya dilaksanakan di kota-kota seperti Samarinda, Kandangan, atau lain-lain tempat di pulau Borneo dengan peserta semua wakil-wakil SI lokal yang ada di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo serta wakil-wakil Perserikatan Dayak, karena saat itu hanya ada dua golongan pergerakan yang dianggap mewakili rakyat Borneo.

Aktivitas SI yang sangat menonjol mengakibatkan SI memiliki cabang-cabang hampir di seluruh kota di Kalimantan Selatan, antara lain Martapura, Pleihari, Kotabaru, Kandangan, Rantau, Margasari, Negara, Amuntai, Marabahan, dan Barabai.

Di Barabai, SI berdiri pada tahun 1921 dengan ketuanya yang pertama Gusti Muhammad Arif dan Sekretarisnya Habib Alwy. Pada waktu peresmiannya di Barabai langsung dihadiri oleh pendiri Centraal Sarekat

177 Lebih jauh lihat isi naskah Ma'loemat National Borneo Conferentie pada Lampiran 2.

Islam (CSI) OS Cokroaminoto dan Abi Kusno Cokrosoyoso, bertempat di gedung SI di jalan H. Hassan Basry sekarang.¹⁷⁸

Di beberapa kota yang ada cabang SI-nya terdapat gedung yang biasanya juga digunakan untuk sekolah atau madrasah yang diorganisir oleh Sarekat Islam. Masyarakat menyebutnya “kalap” (*club*)¹⁷⁹ yang menunjukkan besarnya dukungan rakyat pada masa itu.¹⁸⁰

Yang tak kalah pentingnya adalah upaya SI memobilisasi potensi kaum perempuan dengan jalan membentuk perserikatan Dunia Isteri pada tahun 1923 di Banjarmasin diketuai oleh Masiah. Pembentukan SI Dunia Isteri ini mendapat sokongan dari CSI di Jawa yang sebelumnya juga membentuk Sarekat Islam Wanodya Utomo, diketuai oleh R. Ayu Cokroaminoto, beralamat di Kedungjati, Surabaya.¹⁸¹

SI Dunia Isteri dapat dipandang sebagai organisasi kewanitaan yang tertua di Kalimantan Selatan. Meski bukan sebagai sebuah organisasi yang berdiri sendiri. SI Dunia Isteri turut menyokong pergerakan kaum perempuan, khususnya bagi para isteri yang suaminya menjadi tokoh dan anggota organisasi SI.

Sebagai organisasi massa yang berinduk di Jawa, berbagai perubahan yang terjadi pada SI Pusat seperti Pemogokan kaum buruh dan kereta api di Surabaya yang melibatkan anggota-anggota SI sedikit banyak turut mempengaruhi Sarekat Islam di Kalimantan Selatan.¹⁸²

178 Muderis Zaini dkk., *op.cit.*, hlm. 1998.

179 Gedung (*club*) SI di Sungai Mesa pernah dipakai sebagai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah. Sebelumnya sebagai sekolah Madrasatul Islamiyah Al Wathaniyah.

180 Depdikbud, *op.cit.*, hlm.70.

181 Lihat Surat R. Ayu Cokroaminoto, Presiden SI Wanodya Utomo di Kedungjati kepada Masiah, Pimpinan Perserikatan Dunia Isteri di Banjarmasin, bertanggal Kedungjati 23 April 1923, dalam Sjamsuddin, *op.cit.*, lampiran.

182 Lihat Surat OS Cokroaminoto, Vorzitter Central Sarekat Islam kepada Mohammad Horman, Presiden Perhimpunan Sarekat

Namun ketika terjadi pergulatan antara pendukung paham Islam dan pendukung paham Marxis sebagai alternatif dalam perjuangan, ternyata golongan kiri yang dipengaruhi sosialis/marxisme (SI Merah) yang dimotori Sarekat Rakyat tidak memperolehnya di Kalimantan Selatan.

Meskipun dari anggaran dasarnya SI tidak berisikan politik, tetapi dari seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat bahwa SI selalu dengan gigih berjuang menegakkan kebenaran, keadilan melawan penindasan dan segala macam diskriminasi dari pihak-pihak *ambtenar-ambtenar* bumiputera dan Eropa. Apalagi dasar, tujuan dan ide-ide yang dibawa SI Islam sesuai dengan keyakinan dan hati nurani rakyat yang dijajah. Semboyan mereka “berani karena benar, takut karena salah” selalu didengungkan oleh para anggotanya.¹⁸³

Melihat kegiatan-kegiatan dan besarnya pengaruh SI di kalangan masyarakat menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda menaruh kecurigaan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan SI. Selain melarang kehadiran OS Cokroaminoto dan H. Agus Salim dalam *National Borneo Conferentie* juga melakukan penangkapan terhadap H. Hasan Basuni seorang eksponen penting dari SI cabang Amuntai karena didakwa melakukan aksi-aksi politik, sehingga terpaksa meringkuk delapan setengah bulan dalam penjara Amuntai. Kejadian semacam ini yang juga dialami oleh SI cabang lainnya di Kalimantan Selatan, menyebabkan kegiatan SI mengalami kemunduran.

Selain itu, kemunduran SI di bidang politik lebih disebabkan oleh ketidakmampuannya bersaing dengan organisasi-organisasi yang baru muncul yang secara progresif dan tegas memperjuangkan cita-cita politiknya. Diantaranya sebagai akibat dari pengaruh masuk dan berkembangnya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan yang turut berkiprah dalam

Islam di Banjarmasin bertanggal Kedungjati 18 Mei 1923, dalam Sjamsuddin, *ibid.*, lampiran.

183 Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hlm. 83.

bidang politik, di samping banyaknya anggota-anggota SI yang merangkap jabatan dengan organisasi lain bahkan keluar dari keanggotaan SI dan menjadi pendukung organisasi-organisasi muda yang lebih maju.¹⁸⁴

F. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah gerakan pembaharuan Islam dan gerakan pembaharuan kalangan nasionalis di Indonesia. Sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah mencerminkan sebuah hasrat untuk mengikuti jejak kemajuan Eropa dalam bentuk ekspresi yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.¹⁸⁵

Dari segi bahasa Muhammadiyah berarti umat pengikut Nabi Muhammad, nabi pembawa risalah terakhir. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebenarnya.¹⁸⁶ Organisasi ini tidak bergerak di lapangan politik, tetapi di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dinamakan Muhammadiyah “agar anggota-anggotanya merasa bangga dengan agamanya dan tidak perlu merasa malu sebagai orang Islam yang taat dengan tuntunan Nabinya.”¹⁸⁷

Untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah melakukan cara-cara dengan mendirikan, memelihara, menyokong sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam, mendirikan, dan memelihara masjid, langgar, dan sebagainya.¹⁸⁸

184 M. Idwar Saleh dkk., *op.cit.*, hlm. 42.

185 Cyril Blasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 284.

186 *Ensiklopedi Indonesia*, 4 Kom- Ozo, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1983, hlm. 2306.

187 M. Syahrani, *op.cit.*, hlm. 2; Syarkawi Ruslan, “Perkembangan Reformisme Islam di Kalimantan Selatan serta Pengaruhnya Dalam Lapangan Agama, Sosial, dan Pendidikan dari Tahun 1914-1942”, Skripsi Sarjana Muda Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1975, hlm. 46.

188 Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *op.cit.*, hlm. 26.

Susunan organisasi ini terdiri dari Pimpinan Pusat, Wilayah, Cabang dan Ranting. Kegiatannya meliputi 11 bidang, masing-masing berupa sebuah majelis yakni Majelis Tarjih, Majelis Hikmah, Majelis Aisyiyah, Majelis Hizbul Wathon,¹⁸⁹ Majelis Pengajaran, Majelis Taman Pustaka, Majelis Tabligh, Majelis PKU (Pembina Kesejahteraan Ummat), Majelis Pemuda, Majelis Ekonomi dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.¹⁹⁰

Muhammadiyah pertamakali didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923). Sebagai organisasi pembaharuan Islam, sejak pertama kali didirikan Muhammadiyah lebih condong kepada paham pembaharuan yang dibawa Syekh Muhammad Abduh maupun Sayid Jamaluddin al Afghani yang saat itu berkembang luas di Mesir. Gerakan pembaharuan yang dikibarkan kedua tokoh ini, diilhami oleh pandangan pembaharuan sebelumnya yakni pemikiran Ibnu Taymiah (1263-1328) dan Paham Wahabbi yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787).

Ide Ibnu Taimiyah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah diterima dan dipraktikkan Muhammad bin Abdul Wahab secara keras dengan titik berat pada pemurnian akidah dan mulai disebarluaskan pada tahun 1760. Pengikut paham ini dikenal dengan nama golongan Muwahiddin atau pendukung tauhid. Namun nama yang lebih terkenal kemudian berasal dari penentangannya dan bersifat ejekan, yaitu Kaum Wahabbi.

Diilhami oleh *Wahabbisme*, Syekh Muhammad Abduh menyusun pemikiran yang lebih luas, yakni selain kembali menghidupkan roh dan semangat kemurnian beragama juga mengumandangkan pula Persatuan Islam (*Pan Islamisme*) untuk menghadapi imperialisme. Pola pemikiran yang dikemukakan antara lain: untuk menghadapi penetrasi Barat

189 Hizbul Wathan merupakan Kepanduan Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1918. Hizbul Wathan berarti: Pencinta Tanah Air.

190 *Ensiklopedi Indonesia*, 4 Kom- Ozo, *loc.cit*.

ini umat Islam harus dibangkitkan kekuatannya. Kekuatan akan terwujud apabila umat Islam kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam yang murni yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dan ulama-ulama Salaf.¹⁹¹

Salah seorang pengikut dan murid Abduh yang kelak pergi ke Indonesia adalah Ahmad Surkati yang mendirikan *Al Irsyad* pada tahun 1914 di Jakarta. Ahmad Surkati inilah yang banyak memberikan inspirasi kepada K.H. Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah.

Dimana pertama kali Muhammadiyah tumbuh di Kalimantan Selatan belum dapat diketahui dengan jelas. Bila bertolak dari masuknya paham pembaharuan, maka proses ini telah berkembang sejak 1914 di Banjarmasin dengan didirikannya sekolah bernama *Arabische School* sebagai tempat penanaman paham pembaharuan oleh perkumpulan orang-orang Arab yang dipelopori oleh Muhammad bin Thalib, Syekh Ali Baraisy dan Umar bin Saif, berlokasi di Kampung Bugis.¹⁹²

Sekolah ini merupakan sekolah yang pertama kali menggunakan bangku-bangku belajar dengan lama belajar enam tahun. Para guru terdiri dari orang-orang Arab yang didatangkan dari Mesir dipimpin oleh Syekh Iberahim Al Mulla, seorang murid dan pengikut Muhammad Abduh. Lambat laun guru-guru sekolah itu, digantikan oleh guru-guru yang merupakan alumni sekolah itu sendiri. Guru-guru yang pernah mengajar pada sekolah tersebut antara lain seperti Sayid Ahmad Al Habsyi, Sayid Idrus Al Masykur, H. Ahmad Amin, Saleh Bal'ala, Abdullah Thaiyib, Maraja Sayuti Lubis, Zamzam Aidit, Awadh Yamani, Khudri Thaiyib.¹⁹³

Melalui *Arabische School* inilah gerakan pembaharuan pemikiran Islam, yang dimulai dengan paham Abduh, masuk ke daerah ini. Masyarakat luas mulai mengenal paham ini, setelah ia tidak berdiri pada saat pembacaan "asrakal" dalam perayaan Maulid Nabi.

191 Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hlm. 20-27.

192 Syarkawi Ruslan, *ibid.*, hlm. 65 dan M. Syahrani, *op.cit.*, hlm. 11.

193 M. Syahrani, *op.cit.*, hlm. 11.

Sesudah Iberahim Al Mulla kembali ke Mesir, pimpinan sekolah ini dipegang berganti-ganti oleh: Syekh Mahmud dari Madinah, dan Saleh Bal'ala. Pada waktu Saleh Bal'ala inilah nama *Arabische School* diganti namanya menjadi *Islamsche School*.¹⁹⁴ Peranan *Islamsche School* sebagai peletak pertama pembaharuan Islam di daerah ini, karena alumninya kemudian menjadi ulama dan pemimpin Muhammadiyah. Atau kalau tidak menjadi anggota Muhammadiyah, sekurang-kurangnya menjadi ulama yang berpikiran maju, diantaranya Makmur Ideris, Muzennah Assegaf, Zamzam Aidid, Zamzam Jakfar dan H.M. Hanafie Gobit.¹⁹⁵

Sesudah *Islamsche School*, pada tahun 1916 didirikan lagi *Al Madrasatul Arabiah al Walaniah* di Seberang Masjid, dan *Diniyah School* di Sungai Kindaung pada tahun 1921 yang dipimpin oleh H. Muhammad Yasin Amin. Sekolah-sekolah ini merupakan tempat persemaian pembaharuan Islam dan kebanyakan lulusannya menjadi simpatisan atau langsung menjadi anggota organisasi Muhammadiyah.¹⁹⁶

Pada tahun 1921 tiba di Banjarmasin Syekh Ahmad Surkati bersama-sama dengan utusan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Al Aticy. Mereka menjadi pendorong pengikut pembaharuan di Banjarmasin seperti Muhammad bin Thalib, H. Ahmad Amin (Alumni Al Irsyad), H. Masykur, dan H. Muhammad Yasin Amin. Bahkan H. Ahmad Amin dan H. Masykur akhirnya mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah ke kantor pusat di Yogyakarta.

194 Pada perkembangan selanjutnya, *Islamche School* menjadi sekolah Madrasah *Al-Asriyyah*.

195 Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hlm.67.

196 M. Syahrhan, *op.cit.*, hlm. 12.



H. Japeri bin H.
Umar, Ketua
Muhammadiyah
Cabang Alabio



Lambang
Organisasi
Muhammadiyah



Zamzam Aidit,
Consul *Hoofd*
Bestuur (Ketua
M.P.M.) Daerah
Kalimantan (1932-
1936), wafat 8
Muhar-ram 1359/17
Februari 1940 di
Malang



H. Abdul Karim
Corong, Consul
Hoofd Bestuur (1936-
1940) wafat 9 Rabiul
Awwal 1359 (17
April 1940)



H.M. Hasan
Corong Consul
Hoofd Bestuur
Daerah Kalselteng
dan Tim (1940-
1957). Wafat 12
Ramadhan 1376/12
April 1957 di
Martapura



Hj. Bulkis
Ketua Cabang
Aisyiah
Muhammadiyah
di Banjarmasin

(Foto dok. H. Anang Ahmad Nawier)

Pendorong pembaharuan di Banjarmasin bertambah ketika Maraja Sayuthi Lubis, utusan Centraal Sarekat Islam (CSI) datang ke Banjarmasin pada tahun 1921 yang dengan semangat dan keberaniannya terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pengikut paham Abduh. Akibatnya jumlah tokoh pembaharuan semakin besar diantaranya H. Abdul Karim Corong, bahkan Mohammad Horman, Presiden SI cenderung kepada paham pembaharuan ini.

Meskipun paham Muhammadiyah telah masuk ke Banjarmasin sekitar tahun 1920, namun untuk tegaknya organisasi Muhammadiyah di kota ini perlu waktu beberapa tahun lagi. Memang di samping kemampuan pemimpin-pemimpinnya, juga diperlukan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Akibat kondisi masyarakatnya dan kurangnya kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Muhammadiyah lebih dahulu berdiri Alabio dan Kuala Kapuas, baru kemudian Banjarmasin.

Di Alabio, organisasi Muhammadiyah berdiri berkat peranan seorang pedagang bernama H. Usman Amin yang ketika berada di Surabaya dan Yogyakarta sangat terkesan dengan perkembangan Muhammadiyah. Ketika pulang ke Alabio, ia kemudian mengusulkan kepada H. Japeri bin H. Umar, seorang tokoh ulama yang berpandangan maju dan berpengaruh di Teluk Betung, Alabio untuk mendirikan Muhammadiyah.

Usulan H. Usman Amin diterima baik, dan tidak lama setelah H. Japeri datang berkunjung ke Yogyakarta untuk keperluan memasukkan anaknya ke *HIS met de Qur'an* dan menyatakan diri sebagai anggota Muhammadiyah di sana, maka tahun 1925¹⁹⁷ didirikanlah cabang Muhammadiyah Alabio sebagai ketuanya H. Japeri, dibantu anggota pengurus lainnya, antara lain H. Hanafiah, H. Basthami, H.

197 Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hlm. 92. Jika dalam Syarkawi Ruslan tahun kelahiran Muhammadiyah Cabang Alabio adalah 1925, maka M. Syahrani menyebutnya tahun 1927, lihat M. Syahrani, *op.cit.*, hlm. 18.

Mansur, H. Saman, H. Asmail, dan H. Saifuddin Birhasani. Mereka mendirikan sekolah Muhammadiyah di Teluk Betung pada tahun 1926 dengan mendatangkan gurunya Ridwan Hajir beserta isteri dari Yogyakarta dan As'ad al Kalali seorang ulama keturunan Arab dari Aceh.

Tahun 1929 Muhammadiyah Alabio mengadakan Konferensi I yang dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah: A.R. Sutan Mansyur. Selesai konferensi, ia juga mengunjungi Muhammadiyah Kuala Kapuas dan Banjarmasin. Kepribadian A.R. Sutan Mansyur, sikap dan kemantapan ilmu serta cara berbicara yang menggugah hati, sangat memikat para ulama dan orang-orang Muhammadiyah, sehingga dengan kedatangannya menyebabkan semakin mengakarnya paham Muhammadiyah di tempat-tempat yang ia kunjungi.

Seperti halnya di daerah-daerah lain, berdirinya Muhammadiyah di Alabio tentulah menggemparkan masyarakat di Hulu Sungai. Tuduhan Wahabbi bahkan tuduhan paham yang sesat mulai dilontarkan orang. Rasa kebencian itu semua karena salah pengertian belaka. Banyak penderitaan yang dialami oleh pelopor dan anggota Muhammadiyah, karena memasuki organisasi ini merupakan pengorbanan yang besar sekali pada waktu itu, karena bisa saja bercerai dengan isteri, berpisah sanak keluarga dan malah berpisah dengan masyarakat kampung.¹⁹⁸

Untuk daerah Martapura ajaran pembaharuan ini disampaikan oleh H. Muhammad Yusuf. Sewaktu belajar di Mekkah, ia tinggal di Jabal Qubis, sehingga masyarakat menyebutnya Ustadz H. Yusuf Jabal. Fatwa-fatwanya seirama dengan dengan paham-paham pembaharuan yang kemudian selaras dengan Muhammadiyah. H. Yusuf Jabal tidak mendirikan organisasi apa-apa, kecuali ajaran pembaharuan ini mungkin didapatkannya dari hasil penelaahan kitab-kitab yang ia miliki yang berasal dari tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah.¹⁹⁹

198 M. Syahrani, *ibid.*, hlm. 28.

199 M. Idwar Saleh dkk., *op.cit.*, hlm. 43.

Muhammadiyah kemudian dapat berdiri pada tahun 1932 di Martapura berkat peranan H.M. Hasan Corong, seorang *Ajunct Jaksa* bersama dengan dua orang tokoh Arab, Abdullah bin Saif dan Ali Mubarak.²⁰⁰ Berdirinya Muhammadiyah cabang Martapura ini menimbulkan reaksi yang hebat dari masyarakat Martapura sebagai dampak dari pemahaman yang keliru tentang paham Wahabbi yang mereka pandang sebagai pegangan Muhammadiyah.

Meski secara organisatoris telah berdiri, pengurus pusat Muhammadiyah tidak begitu saja dengan mudahnya mengakui cabangnya yang baru berdiri, kecuali ada amal usaha nyata. Berdasarkan surat ketetapan, Muhammadiyah cabang Alabio baru mendapat pengakuan dari pengurus besar berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 253 tanggal 5 Maret 1930. Sedangkan Muhammadiyah cabang Kuala Kapuas meski berdiri setelah Alabio, ternyata mendapat surat penetapan lebih dahulu yakni Surat Ketetapan Nomor 128 bertanggal 1 Juli 1928, dan Surat Ketetapan Muhammadiyah Banjarmasin Nomor 254 bertanggal 5 Maret 1930.²⁰¹ Bermula dari Alabio inilah kemudian Muhammadiyah menyebar ke daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Sungai Tabukan, Jarang Kuantan, Hambuku Hulu, Kuala, Haruai,²⁰² Haruyan, Kandangan, Rantau dan Barabai.²⁰³

Di Barabai, Muhammadiyah pertama kali berdiri di desa Pauh pada tahun 1931 dengan disponsori oleh H. Karim, dan kawan-kawan yang sebelumnya telah mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di Alabio. Kemudian berdiri pula Muhammadiyah cabang Haruyan dengan promotornya langsung ditangani oleh Bey Arifin

200 Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hlm. 84.

201 M. Syahrani, *ibid.*, hlm. 17-18.

202 Di Haruai, Muhammadiyah berdiri pada tahun 1931 diketuai oleh Amir Hasan, Hamidhan Juhri sebagai Sekretaris, A. Wahab Bendahara, dan Durahman Pembantu, lihat Hamidhan, *op.cit.*, tanpa halaman.

203 Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hlm. 94.

dengan para mubaligh yang terus menerus melakukan tugasnya berdakwah di daerah-daerah.

Seperti halnya SI, Muhammadiyah adalah organisasi yang berdasarkan Islam, hanya saja tujuan terpenting dari Muhammadiyah ialah memurnikan paham-paham agama Islam yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dengan semboyan yang terkenal “kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits”. Karena tujuan memurnikan itulah yang menyebabkan Muhammadiyah pada mulanya mendapat tantangan hebat di kalangan penduduk, meski kemudian akhirnya mendapatkan posisi penting di daerah ini karena kesungguhan para penganjurnya terutama berkat peranan eksponen intelektual muda Muhammadiyah yang dengan metode-metode dakwah tertentu telah berhasil menarik masyarakat Islam di kampung-kampung untuk menjadi pengikutnya.

Satu hal yang cukup menggembirakan bagi Muhammadiyah ialah mereka diperbolehkan melebarkan sayapnya ke segenap daerah karena pihak Pemerintah Hindia Belanda menganggap organisasi ini non-politik, kooperatif, dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban pemerintahan.

Berkat prestasi yang dicapai Muhammadiyah di daerah ini, maka Kongres ke-23 di Yogyakarta tanggal 19-25 Juli 1934 telah menetapkan bahwa Kongres ke-24 akan dilaksanakan di Banjarmasin.

Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 22 Juli 1935 dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta, dari seluruh perwakilan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Hasil penting dari kongres ini terutama terutama ditujukan kepada tuntutan cara memperbaiki perkawinan yakni menganjurkan agar merendahkan mas kawin, menyederhanakan walimah perkawinan, dan supaya mendirikan Badan Penolong Perbaikan di setiap cabang dan ranting. Kongres juga memutuskan perlunya perbaikan perjalanan haji, dengan mempropagandakan membeli atau menyewa kapal buat naik

haji, sehingga tidak terus tergantung kepada maskapai Eropa yang tarif ongkosnya sangat tinggi.²⁰⁴

Kehadiran organisasi Muhammadiyah memberikan pengaruh dalam lapangan pendidikan, keagamaan, maupun sosial. Selain dalam lapangan pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka dalam lapangan keagamaan, sumbangan yang positif yang diberikan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan adalah gerakan pemurnian ajaran Islam dari TBC (Tahyul, Bid'ah dan Churafat) dalam segala bentuk baik menyangkut aqidah maupun syariah.

Muhammadiyah melakukan penelitian terhadap soal-soal ibadah. Segala amal perbuatan yang dipandang ibadah oleh masyarakat diteliti dan dicari sumber hukum dan dasarnya, mengingat pada saat itu dalam masyarakat Islam di daerah ini terdapat beberapa perbuatan yang dianggap ibadah, seperti pembacaan syair maulid, manakib Syekh Abdul Kadir Jailani dan sebagainya.

Muhammadiyah juga memelopori khotbah Jumat berbahasa Melayu, menterjemahkan Al-Qur'an, menyalin ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam ejaan latin, serta menerbitkan buku-buku pelajaran agama beraksara latin. Selain itu, dilaksanakan pula sembahyang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang dan menganjurkan kaum wanitanya untuk ikut ke tanah lapang, dan melaksanakan takbiran sebagai upaya peningkatan syiar Islam.

Dalam lapangan sosial Muhammadiyah sangat menekankan amal-amal saleh, tidak hanya menyangkut kewajiban seperti sholat, puasa dan haji, tetapi juga ibadah sosial seperti mengintensifkan fungsi zakat, pendirian Panti Asuhan Anak Yatim seperti yang didirikan di Alabio pada tanggal 1 Mei 1938 yang diketuai oleh H. Usman Amin.

Lahirnya gerakan Muhammadiyah di bidang sosial, di sisi lain juga didorong oleh kegiatan misi dan zending Kristen yang mendirikan rumah sakit dan poliklinik Kristen di tengah orang-orang Islam. Oleh karena itu, pada tahun 1933 bertepatan pada hari Jumat oleh PKU Muhammadiyah

204 M. Syahrhan, *op.cit.*, hlm. 33.

didirikanlah sebuah poliklinik di Banjarmasin dengan pelopornya Saleh Bal'ala, Ali Jagau, dan Bakri dengan dr. Sosodoro Jatikusomo sebagai dokternya²⁰⁵ Poliklinik menempati sebuah bangunan rumah milik seorang Cina di jalan Emma Straat²⁰⁶ yang disewa Muhammadiyah.²⁰⁷

G. Nahdlatul Ulama

Lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama²⁰⁸ tidak terlepas dari adanya perselisihan antara kaum tua dan kaum muda, dimana kaum yang disebut terakhir merupakan kaum pembaharuan pemurnian ajaran Islam yang berhimpun dalam organisasi Muhammadiyah. Perselisihan antara kaum muda dengan kaum tua diantaranya adalah menyangkut soal tahyul, khurafat dan beberapa praktik peribadatan yang dianggap Muhammadiyah sebagai bi'dah yaitu sesuatu yang menurut hukum Islam tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits atau merupakan embel-embel tak berdasar.

Perbedaan pemahaman atau masalah khilafiyah terutama menyangkut *furu* antar umat Islam semakin meluas karena masing-masing didukung oleh dakwah-dakwah kaum muda yang dijawab dengan dakwah pula oleh kaum tua. Situasi ini tidak mendukung ke arah pertumbuhan dan persatuan umat muslim yang kuat, bahkan dimanfaatkan penjajah Belanda untuk menggoyahkan kedudukan organisasi-organisasi Islam dan mengokohkan penjajahan.

205 M. Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hlm.16.

206 Sekarang jalan Pangeran Samudera, tepatnya di sebuah bangunan dengan tanah yang sekarang ditempati bangunan Modern Optical sebagai halamannya.

207 Hasil wawancara dengan H. Anang Ahmad Nawier (88 tahun) yang ketika itu sempat memanfaatkan jasa poliklinik tersebut sebagai tempat berkhitan dan ditangani langsung oleh dr. Sosodoro Djatikusomo

208 Yang dimaksud Nahdlatul Ulama di sini adalah Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah (Perhimpunan/Perkumpulan) yang keberadaannya sampai 1951. Setelah Muktamar Nahdlatul Ulama XIX di Palembang tahun 1952 status Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah berubah menjadi Partai Politik.

Oleh karena itulah, disamping sebagai reaksi terhadap Muhammadiyah, maka kelahiran Nahdlatul Ulama juga dapat dipandang sebagai reaksi terhadap kemerosotan di dunia Islam akibat penjajahan.

Untuk mempertahankan kebenaran ajaran *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah* yang menurut pendapat sebagian ulama difitnah dalam dakwah oleh kaum muda, maka pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H didirikanlah Nahdlatul Ulama di Surabaya dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah*, memelihara hubungan dengan para ulama dan pengikut keempat mazhab (Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hambali) dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Secara harfiah Nahdlatul Ulama berarti “kebangkitan para ulama” yang kemudian berkembang menjadi suatu perkumpulan umat Islam yang bermazhab Syafi'i dan beribadah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh aliran tersebut.²⁰⁹ Susunan organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari dua badan: Syuriyyah dan Tanfidziyyah. Susunan organisasi terdiri dari Pengurus Besar, Majelis Konsul Wilayah (sekarang Pengurus Wilayah), Cabang, Majelis Wakil Cabang dan Ranting. Sampai akhir pemerintahan kolonial, Nahdlatul Ulama tidak mencampuri politik.

Dalam perkembangannya, Nahdlatul Ulama diidentikkan dengan organisasi kaum tua, karena melalui organisasi ini, selain bergerak memajukan pendidikan dan memakmurkan masjid, mereka juga tetap mempertahankan kegiatan *Lailatul Ijtima*²¹⁰ dan *Tahlilan*.

209 M. Nur Maksum, “Gerakan Islam Modern di Kalimantan Selatan (1900-1942), Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 1998, hlm. 73.

210 *Lailatul Ijtima* adalah malam berkumpul dan beramal. Dahulu sering dilaksanakan pada malam tanggal 13, 14, 15 dengan

Delapan bulan setelah berdirinya Nahdlatul Ulama, maka diadakan Mukhtar Nahdlatul Ulama I di Surabaya (14-16 Rabiul Awwal 1345 H./21-23 September 1926 M). Mukhtar diikuti 216 orang utusan dari berbagai daerah di Indonesia yang di dalamnya terdapat tidak kurang dari 170 alim ulama, termasuk H. Abdul Qadir Hasan²¹¹ dari Martapura.

Selesai mengikuti Mukhtar Nahdlatul Ulama I di Surabaya, H. Abdul Qadir Hasan dititipi pesan oleh gurunya yang juga Rois Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di tempat kelahirannya di Martapura sebagai suatu strategi untuk menjaga kelestarian paham *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah*, yang pada saat mukhtar menjadi salah satu keputusan yang penting.

Setelah kembali ke Kalimantan Selatan, maka H. Abdul Qadir Hasan bersama-sama dengan Habib Alwi Al Kaf, Habib Hamid Hasria (keduanya dari Banjarmasin)²¹² dan lainnya

cara membaca amalan tertentu, berdoa bersama, dan menghadihkan pahalanya, khususnya kepada arwah keluarga yang baru meninggal dunia atau arwah kaum muslimin pada umumnya.

211 H. Abdul Qadir Hasan, tuan guru kelahiran kampung Tunggulirang Martapura Kalimantan Selatan (1891-1978). Ia dikenal pula dengan panggilan "Guru Tuha". Belajar ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pimpinan Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Salafiyah Bangkalan Madura pimpinan K.H. Kholil, *Madrasah Ash-Sholatiyah* Mekkah Saudi Arabia, selain di kampung halamannya sendiri. Di Martapura, belajar agama dengan beberapa tuan guru, seperti: H. Abdurrahman (Haji Adu) dan H. Kasyful Anwar, muassis Madrasah Darussalam Martapura (sekarang Pondok Pesantren Darussalam), lihat Ahdi Makmur dkk., *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan*, Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2006, hlm. 12-13.

212 Catatan K.H. Birhasani, Banjarmasin.

mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Martapura pada tahun 1927.²¹³

Nahdlatul Ulama di Martapura mendapat dukungan dari pimpinan Madrasah Darussalam, H. Kasyful Anwar. Selain dipinjami tempat sementara untuk berkantor, murid madrasah tersebut juga menjadi basis pendukung utama massa Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Madrasah yang semula dibangun oleh Sarekat Islam pada tahun 1914 dengan nama "*Madrasatul 'Imad Fie Ta'lilil Aulad "Darussalam"*" yang kemudian terkenal hanya dengan sebutan "*Darussalam*", berubah menjadi pondok pesantren binaan Nahdlatul Ulama.

Selain itu, masyarakat Martapura yang fanatik agama dan menjunjung kedudukan ulama tradisional segera mengikutinya, dan dari sinilah Nahdlatul Ulama berkembang dengan basis utama di daerah-daerah pedesaan.

Pada masa berikutnya, Nahdlatul Ulama Martapura berkembang cukup pesat berkat dukungan tokoh-tokoh ulama yang mengajar di pesantren Darussalam Martapura khususnya alumni pesantren-pesantren di Jawa Timur. Mengingat pengaruh ulama yang cukup besar dalam masyarakat, maka dalam waktu yang singkat Nahdlatul Ulama tersebar luas di Martapura, bahkan cabangnya berdiri pada tahun 1931 di Banjarmasin dengan tokoh-tokohnya antara lain Said Ali Al Kaf, H. Akhmad Nawawi dan H. Hasyim.²¹⁴

Ada beberapa faktor pendukung mengapa kehadiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Martapura mendapat sambutan yang cukup hangat pada waktu itu. Pertama, paham *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah* sudah berurat berkar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Kedua, pendirinya adalah tokoh agama/ulama setempat yang cukup dikenal khususnya di Martapura. Ketiga, adanya dukungan dari para ulama.

213 M. Idwar Saleh dkk., *op.cit.*, hlm. 44 menyebut tahun kelahirannya Nahdlatul Ulama di Martapura tahun 1927, sedangkan Ahdi Makmur dkk., *op.cit.*, hlm. 12 menyebut tahun 1928.

214 Depdikbud, *op.cit.*, hlm. 74.

Karena ketiga faktor inilah, Nahdlatul Ulama bisa diterima oleh masyarakat dan berkembang dengan cepat di Martapura.²¹⁵

Pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Martapura kemudian disusul dengan berdirinya konsul²¹⁶ dan beberapa cabang Nahdlatul Ulama wilayah Kalimantan. Konsul Nahdlatul Ulama wilayah Kalimantan yang pertama berdiri di Barabai pada tahun 1933 dipimpin H. Sulaiman Kurdi dengan staf Tuan Guru Husin Arab dan Tuan Guru Hasan Arab (dua bersaudara), dan Marali sebagai sekretaris.²¹⁷ Konsul ini berkantor di rumah Sulaiman Kurdi, di samping Pasar Barabai (sekarang jalan Lorong NU). Dalam perkembangannya, pada tahun 1952 yakni setelah Muktamar Nahdlatul Ulama XIX di Palembang, status Konsul Nahdlatul Ulama di Barabai ditiadakan dan hanya dijadikan cabang, dan seterusnya kedudukan konsul dipindahkan ke Banjarmasin menjadi Majelis Konsul Partai Nahdlatul Ulama Wilayah Kalimantan Selatan.

Selain di kota Barabai, cabang Nahdlatul Ulama berdiri di Haruyan (Labuan Amas Selatan) dan Limbar (Batang Alai Selatan). Nahdlatul Ulama masuk ke Haruyan sekitar tahun 1934 bersamaan dengan dibukanya madrasah Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu gurunya didatangkan dari Pulau Jawa. Sebelum kedatangan tentara pendudukan

215 Ahdi Makmur dkk., *op.cit.*, hlm. 16.

216 Konsul adalah nama perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat yang ada di daerah yang strukturnya terdiri dari ketua/pimpinan dengan beberapa orang staf. Setelah Muktamar Nahdlatul Ulama XIX di Palembang pada bulan April 1952, Konsul berubah menjadi Majelis Konsul yang dalam susunan pengurusnya terdapat bagian-bagian. Perubahan Konsul menjadi Majelis Konsul berkaitan dengan perubahan status organisasi yang semula perserikatan keagamaan (Jam'iyah Nahdlatul Ulama) menjadi partai politik Nahdlatul Ulama

217 Hasil wawancara dengan K.H. Birhasani, Banjarmasin.

Jepang tahun 1942, jumlah anggota Nahdlatul Ulama Cabang Barabai mencapai 3.000-an orang.²¹⁸

Cabang Nahdlatul Ulama berikutnya yang berdiri setelah itu adalah Nahdlatul Ulama Cabang Negara (1935-an) yang mana pada tahun 1939 pernah menjadi tuan rumah Konferensi Daerah yang dihadiri Konsul, Cabang, dan Ranting Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan dan Timur, serta dihadiri Pengurus Besar (*Hoofd Bestuur*) Nahdlatul Ulama.

Diperkirakan cabang Negara berdiri lebih awal dibanding Nahdlatul Ulama Cabang Kandangan (berdiri pada tahun 1936 dan berbasis di desa Bamban), karena Negara adalah salah satu tempat “pengajian” agama yang tertua di Kalimantan Selatan selain Martapura, disamping kemudahan transportasi sungai yang dominan kala itu dari Martapura ke Negara.

Jam’iyyah Nahdlatul Ulama semakin berkembang pesat di Kalimantan Selatan, setelah terselenggaranya Mukhtar Nahdlatul Ulama XI di Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 1936. Mukhtar yang mengambil tempat di sebuah rumah bertingkat dua, persis di samping Langgar Al Hinduwan di tepian sungai Martapura, selain dibuka langsung oleh pimpinan *Hoofd Bestuur* Nahdlatul Ulama (K.H. Wahab Hasbullah) juga dihadiri oleh utusan-utusan Nahdlatul Ulama dari luar Kalimantan.

Mukhtar itu menghasilkan beberapa keputusan diantaranya yang terpenting adalah penyampaian Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda yang berisi penolakan dan permintaan pembatalan peraturan Kawin Bercatat (*Houwelijke Ordonnantie*). Pada tahun 1937, Nahdlatul Ulama, bersama Muhammadiyah, Musyawaratutthalibin, dan organisasi lainnya Musyawaratutthalibin bersama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya kembali mengeluarkan mosi menentang diberlakukannya peraturan Kawin Bercatat itu.

218 Ahdi Makmur dkk., *op.cit.*, hlm. 16.

Cabang Nahdlatul Ulama yang berdiri pasca Muktamar Nahlatul Ulama di Banjarmasin adalah Cabang Nahdlatul Ulama di Kelua, Alabio, dan Ampah.

Cabang Nahlatul Ulama di Alabio merupakan cabang yang ke 102 di Indonesia, lahir saat perbedaan paham keagamaan menjadi konflik fisik antara kaum tua dan kaum muda di Desa Sungai Tabukan, Alabio yang saat itu menjadi basis utama Muhammadiyah di Kalimantan Selatan.

Melihat perkembangan di masyarakat, atas saran anak muda bernama H. Birhasani didirikanlah cabang Nahdlatul Ulama di Alabio dengan maksud untuk bisa menjadi anutan bagi warga (anggotanya) dan mengayomi mereka atas permasalahan yang berkembang di masyarakat. Pembentukan cabang itu disahkan dengan Surat Keputusan tertanggal 11 Maret 1939 M/19 Muharram 1358 H.²¹⁹

Seperti halnya organisasi lainnya yang mempunyai organisasi kepemudaan, maka Nahlatul Ulama juga mempunyai organisasi kepemudaan bernama Ansor Nahdlatul Ulama (A.N.O). Organisasi kepemudaan itu sangat besar perannya dalam mempererat hubungan dengan organisasi pemuda lainnya. Seperti halnya di Alabio, pertentangan antara kaum tua dan kaum muda dapat dikurangi melalui kerjasama pemuda Nahdlatul Ulama (Ansor) dengan pemuda Muhammadiyah (Hizbul Wathon).²²⁰

Pesatnya perkembangan Nahdlatul Ulama juga ditandai dengan semakin bertambahnya para anggota. Dalam kurun waktu sekitar 14 tahun atau sampai awal kedatangan tentara pendudukan Jepang di Indonesia (1942), jumlah anggotanya mencapai 2.000 orang. Hal ini diketahui berdasarkan laporan utusan Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan di Banjarmasin (1953). Akan tetapi, selama pendudukan Jepang, Jam'iyah Nahdlatul Ulama Cabang

219 Lihat Ahdi Makmur dkk., *ibid.*, hlm. 20-21.

220 Keterangan K.H. Birhasani yang pernah menjabat sebagai Komisaris Ansor Alabio, sejak dibentuknya kepengurusannya tahun 1939.

Martapura mengalami kemunduran, karena larangan dan sikap represifnya terhadap tokoh pergerakan kebangsaan.

Setelah Nahdlatul Ulama berdiri, maka perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan umat Islam bukan hanya antara kaum tua dengan kaum muda, tetapi juga antara organisasi ikutannya yakni Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Pada beberapa kasus, perbedaan pendapat itu telah menimbulkan perselisihan dalam keluarga, tidak bertegur sapa, perceraian, dan bahkan pertumpahan darah.

Hubungan Nahdlatul Ulama dengan organisasi lainnya bervariasi di beberapa cabang. Hubungan dengan Musyawaratutthalibin umumnya lebih baik dibanding dengan Muhammadiyah, karena faktor tujuan Musyawaratutthalibin yang menghendaki persatuan umat, disamping bolehnya keanggotaan rangkap yang membolehkan pengurus atau anggota Musyarawatutthalibin menjadi anggota Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Parindra, dan organisasi lainnya.

Pada umumnya pertentangan fisik antara anggota Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah pada persoalan khilafiyah banyak terjadi pada anggota yang dikategorikan buta huruf, awam, atau dangkal pemahamannya tentang ilmu agama Islam. Berbeda halnya dengan para ulama kedua organisasi, yang meski berbeda paham atau berdebat, mereka mampu menahan diri dan bahkan berusaha merajut kembali semangat persaudaraan umat yang terpecah belah. Sebagai contoh, H. Muhammad Yasin Amin, seorang ulama Muhammadiyah di Banjarmasin sering menghadiri pertemuan atau menyampaikan tablig yang diikuti warga Nahdlatul Ulama. Ketika diminta memimpin doa bersama, ia dengan senang hati memenuhinya.²²¹

Sesuai dengan cita-cita yang diembannya maka Nahdlatul Ulama bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Walaupun bukan suatu organisasi yang berdasarkan politik, namun Nahdlatul Ulama menjalankan sikap *non-cooperatif* terhadap setiap bantuan maupun ajakan Pemerintah Hindia

221 Hasil wawancara dengan K.H. Birhasani, Banjarmasin.

Belanda untuk membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah maupun untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Bahkan melalui melalui sekolah atau madrasah yang diasuh oleh ulama Nahdlatul Ulama ditanamkan rasa cinta tanah air dan kebencian terhadap penjajah Belanda.

Terhadap Pemerintah Hindia Belanda, Nahdlatul Ulama mengeluarkan mosi yang isinya agar bea pemotongan hewan buat aqiqah dan qurban dibebaskan. Selain itu, melalui Konferensi Umat Islam I wilayah Selatan dan Timur Kalimantan tanggal 24 s.d. 27 Juni 1938 di Kandangan, Nahdlatul Ulama bersama dengan Musyawaratutthalibin, Muhammadiyah, Assiratal Mustaqim, dan lain-lainnya mengeluarkan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar isi buku, gambar, majalah, dan pidato yang berisi penghinaan terhadap Islam dilarang penyiarannya dan pengarangnya diadili atau dihukum.²²²

Penentangan terhadap Pemerintah Hindia Belanda juga terjadi manakala Pemerintah melakukan kebijakan memobilisasi pemuda untuk memenuhi tambahan tenaga militer, dan melatih milisi-milisi²²³ dalam menghadapi tentara Jepang (sekutu Jerman di Asia) menyusul diumumkannya negara dalam keadaan bahaya dan perang setelah jatuhnya Kerajaan Belanda ke tangan Jerman tanggal 10 Mei 1940. Penentangan itu dilakukan pengurus Konsul Nahdlatul Ulama dengan cara menyurati pengurus cabang dan ranting untuk bersama-sama menolak mobilisasi pemuda untuk dijadikan anggota milisi itu.²²⁴

222 Lihat isi Motie Conferentie Oemat Islam ke I dari Selatan dan Timoer poelaoe Kalimantan 24/25-26-27 Juni 1938 di Kandangan, pada Lampiran 9.

223 Milisi dimaksud antara lain *Landswacht*, *Stadswacht*, *Jeugd Oefen Corps* (JOC), *Algemene Vernielings Corps* (AVC), *Lucht Beschermings Dienst* (LBD), dan *Vrijwillingers Oefen Corps* (VOC).

224 Hasil wawancara dengan K.H. Birhasani, Banjarmasin.

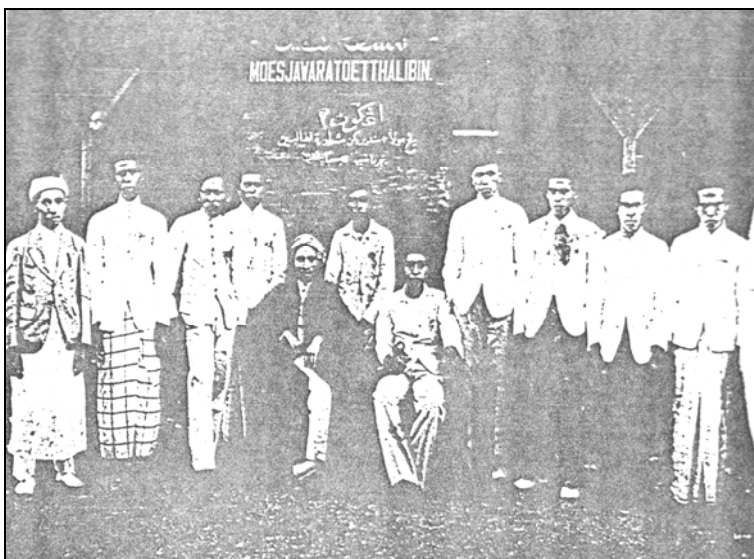
H. Musyawaratutthalibin

Musyawaratutthalibin merupakan organisasi Islam lokal yang pertama kalinya dibentuk di Banjarmasin oleh putera daerah di Kalimantan Selatan dan berkembang ke luar daerah terutama di daerah komunitas etnis Banjar seperti di Samarinda, Samuda, dan di daerah pesisir timur Sumatera, seperti Sapat, Kuala Tungkal, dan Tembilahan.²²⁵

Terbentuknya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan, berkaitan erat dengan perkembangan organisasi Islam yang mendahuluinya, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Cabang Sarekat Islam di Kalimantan Selatan yang berdiri tahun 1912, dengan cepat mendapat dukungan dari masyarakat karena kemampuannya memikat dan menampung aspirasi masyarakat daerah ini. Namun pada sisi lain, Sarekat Islam memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga sejak tahun 1930-an organisasi ini tidak dapat menghindarkan diri dari kemerosotannya. Masa jayanya telah lenyap digantikan oleh masa suram. Satu persatu pendukungnya melepaskan diri dari keanggotaan Sarekat Islam untuk kemudian masuk menjadi anggota partai atau organisasi berbasis Islam lainnya yang baru datang di daerah ini seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

225 M. Nur Maksum dkk., *op.cit.*, hlm. 8 menyebut Musyawaratutthalibin sebagai organisasi Islam lokal terbesar pada masa kebangkitan nasional di Kalimantan Selatan. Dikatakan lokal karena pertama kali didirikan oleh putera daerah di Kalimantan Selatan, dan dikatakan terbesar karena mempunyai anggota dan cabang yang sangat banyak sampai ke daerah lainnya terutama di daerah komunitas Banjar berada seperti Kaltim, Kalteng, Riau, Jambi, dan Bangka-Belitung.



Para tokoh pendiri Musyawaratutthalibin di Banjarmasin.

Duduk sebelah kiri pakai jubah hitam adalah H. Majedi Effendi. Berdiri dari kanan ke kiri H. Ridwan Syahrani (urutan ke-4), di tengah (urutan ke-5) H. Hanafie Gobit.
(Repro. M. Nur Maksum, dkk., 1991).

Pada mulanya anggota Sarekat Islam merangkap menjadi anggota organisasi lain, sementara Sarekat Islam sendiri tidak berdaya untuk mencegah keanggotaan rangkap atau menegakkan disiplin partai, sehingga banyak anggotanya yang akhirnya meninggalkan organisasi atau menghentikan kegiatannya. Hal ini diperparah lagi dengan sikap Sarekat Islam yang bekerjasama dengan Muhammadiyah dan di pihak lain mendukung Nahdlatul Ulama. Dan ironisnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terjadi persaingan sangat ketat dan menjurus kepada saling menghujat dalam berebut pengaruh untuk menarik simpati masyarakat.



Pengurus organisasi Musyawaratutthalibin di Banjarmasin, Mei 1932. Duduk dari kanan ke kiri H. Ridwan Syahrani, Muhammad Zein, Salim Jindan (tamu/ulama dari Hadramaut, deretan ke-5), Busra Kasim (deretan ke-7), Saleh Ghani (deretan ke-8). Berdiri dari kanan, H. Anwar Hasan (deretan ke-10) di depan gedung Musyawaratutthalibin, Jalan Pasar Lama Banjarmasin.

(Foto dok. keluarga Muhammad Zein)

Sementara itu, pada bagian lain tidak sedikit anggota Sarekat Islam yang bersimpati kepada Nahdlatul Ulama dan berusaha menjauhkan Sarekat Islam dari pengaruh Muhammadiyah, dan yang bersimpati kepada Muhammadiyah berusaha menjauhkan Sarekat Islam dari pengaruh Nahdlatul Ulama.

Pertentangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah disebut juga pertentangan antara kaum tua dan kaum muda. Pada dasarnya pertentangan itu muncul

oleh persoalan-persoalan perbedaan pendapat mengenai “furu” agama Islam. Perbedaan pendapat ini sangat besar pengaruhnya di masyarakat, sebagai contoh dalam masalah kematian yaitu persoalan “talkin”, kedua kelompok ini mempunyai pendapat yang berbeda dan menimbulkan pertentangan sehingga tidak jarang sampai menimbulkan pertumpahan darah dan bahkan berakibat pula putusnya hubungan silaturahmi dalam keluarga dan ukhuwah Islamiyah.

Pertentangan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah atau antara kaum tua dengan kaum muda yang nota bene adalah umat Islam, sangat berdampak luas di masyarakat sehingga umat Islam menjadi terpecah belah.

Seharusnya Sarekat Islam sebagai organisasi tertua dan terbesar dapat melakukan suatu tindakan untuk memecahkan persoalan tetapi tidak mampu melakukannya. Dalam ketidakberdayaan Sarekat Islam memimpin umat, ironinya di masyarakat muncul dan beredar aliran keagamaan yang menyebut dirinya “Ahmadiyah” suatu aliran yang sangat berbeda dengan tradisi keagamaan daerah ini yang beraliran (mazhab) Syafi’iyah.

Ketika umat Islam daerah ini mencapai akumulasi kebingungan, maka pada momen itulah muncul pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam independen untuk menemukan solusi agar umat tidak terperangkap lebih lama lagi dalam perpecahan. Salah satu solusinya adalah mereka sepakat untuk memunculkan suatu organisasi baru dengan tujuan mempersatukan umat Islam. Organisasi itu bernama Musyawaratutthalibin, berdiri berdiri di Banjarmasin pada tanggal 12 Sya,ban 1349 H atau bertepatan dengan 2 Januari 1931.²²⁶ Tokoh-tokoh pendirinya antara lain adalah H. Ridwan Syahrani, H. Majedi Effendi, H. Amin, H. Ali Baderun, H. Busera Kasim, H. Busera, Abdul Halim, Muhammad Zamzam, M. Anwar, Ahmad Abdul Hamid, H. Ahmad Kusasi, dan H. Hanafie Gobit dan mendapat dukungan dari para alim

226 Lihat Statuten (Anggaran Dasar) pasal 1 Musyawaratutthalibin dalam M. Nur Maksum, *op.cit.*, hlm. 89 (Lampiran 1).

ulama, guru-guru agama, penuntut-penuntut ilmu di Banjarmasin.

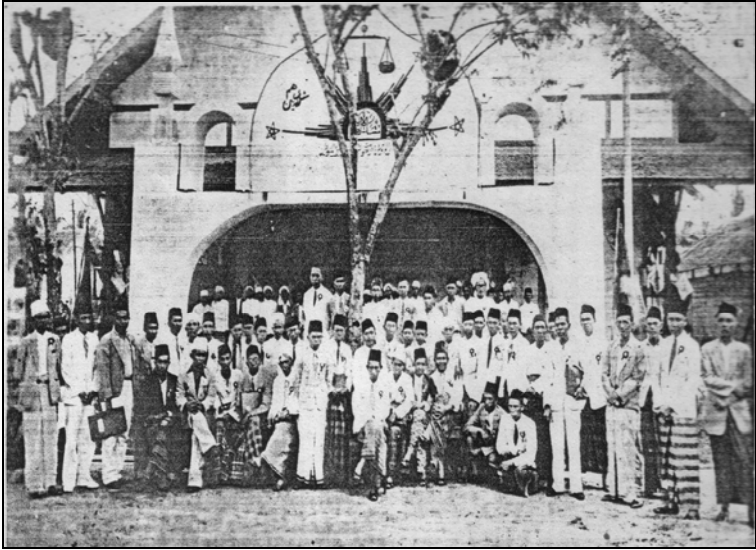
Secara harfiah, Musyawaratutthalibin berarti “organisasi para pelajar atau kaum terpelajar yang menginginkan adanya permusyawaratan”. Keinginan itu lahir karena meluasnya percekocokan dalam masyarakat, terutama menyangkut soal-soal agama.²²⁷

Organisasi ini berpaham keagamaan yang berdasarkan Islam, dengan tujuannya sebagaimana tercantum dalam statutenya (Anggaran Dasar) pasal 2 yang berbunyi:

1. Bekerja untuk membangunkan persatuan Islam terutama guru-guru, ulama-ulama, dan penuntut-penuntut ilmu khususnya dan kaum muslimin umumnya.
2. Memajukan dan menggembirakan cara hidup dengan mengamalkan segala perintah Islam.²²⁸

227 Mohammad Yusran, *op.cit.*

228 Statuten dan Huishoudelijk Reglement Moesjawaratoetthalibin dalam M. Nur Maksum, *op.cit.*, hlm. 89 (Lampiran 1).



Kongres Musyawaratutthalin ke-4 di Balikpapan, tanggal 7
s.d. 12 Mei 1938.

(Repro. M. Nur Maksum dkk., 1991).

Seperti kata H. Ridwan Syahrani pada saat pembentukan organisasi ini bahwa dibentuknya Musyawaratutthalibin ini adalah untuk membentengi paham *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah* dengan mewujudkan dan menggembirakan cara hidup dan kehidupan dengan mengamalkan segala perintah Allah yang sudah umum dikerjakan oleh umat Islam di Indonesia dengan mazhab Imam Syafi'i berdasar Al-Qur'an, Hadits, Idjma dan Qiasy.²²⁹

Karena organisasi ini bermaksud membangun persatuan Islam jelaslah adanya keinginan akan kerukunan dalam beragama oleh masyarakat, maka mulai dari golongan

229 Moh. Yusran, *op.cit.*, hlm. 18-19.

pemuda dan pelajar beramai-ramai memasuki Musyawaratutthalibin.

Kedudukan *Hoofd Bestuur* (Pengurus Besar) Musyawaratutthalibin berada di jalan Ulin/Pasar Lama Banjarmasin²³⁰ dan pada tahun 1936 dipindahkan ke kota Kandangan sebagai salah satu hasil keputusan Kongres ke-2 di Kandangan, 31 Mei s.d. 3 Juni 1936.²³¹

Dalam perkembangannya organisasi ini mempunyai cabang yang sangat banyak di Kalimantan Selatan dan Timur seperti cabang-cabang Banjarmasin, Kuin, Kandangan, Barabai, Amuntai, Kelua, Samarinda, Balikpapan, Sanga-Sanga Dalam, Kotabaru, Samuda, Senakin, Alabio, bahkan sampai ke pesisir Sumatera seperti Tembilahan, Enok, Sapat, dan Kuala Tungkal.

Sampai tahun 1942, organisasi ini memiliki cabang sebanyak 20 buah di Kalimantan (Kalimantan Selatan 11 cabang, Kalimantan Tengah 2 cabang, Kalimantan Timur 7 cabang), dan 10 cabang di Sumatera dengan jumlah anggota diperkirakan sebanyak 7.170 orang.²³²

Untuk memilih kepengurusan baru, terutama Pengurus Besar (*Hoofd Bestuur*), maka organisasi ini mengadakan kongres, yang dalam perjalanan sejarahnya telah melaksanakannya sebanyak enam kali, yaitu: Kongres I tahun 1934 di Banjarmasin, Kongres II tahun 1936 di Kandangan, Kongres III tahun 1937 di Amuntai dan Kongres IV tahun 1938 di Balikpapan, Kongres V tahun 1939 di Kandangan, Kongres VI di Tembilahan tahun 1941.²³³

Kongres pertama berlangsung di Banjarmasin pada bulan Juni 1934 dan telah berhasil memilih Pengurus Besarnya, sebagai berikut:

230 Sekarang dinamakan jalan Perintis Kemerdekaan, di bekas lokasi kini berdiri Masjid Al Musyarrafah.

231 M. Nur Maksum dkk., *op.cit.*, hlm. 32.

232 M. Nur Maksum dkk., *ibid.*, hlm. 82.

233 M. Nur Maksum dkk., *ibid.*, hlm. 29-30.

Vorzitter	: Ridwan Syahrani
Vice Voorzitter	: Ardi
Alg. Secreetaris	: M. Amir
Secreetaris	: M. Anwar
Penning Mister	: H. Amin
Commisarissen	: - Busra
	- Abdurrahman Audah
	- Ahmad Pemurus

Kongres pertama itu juga memutuskan untuk mendirikan cabang-cabang Musyawaratutthalibin di seluruh Kalimantan dan kalau mungkin seluruh Indonesia, membangun sekolah-sekolah Madrasah Syafi'iyah, terutama di tempat-tempat yang belum ada sekolah Islam.²³⁴

Hasil Kongres ke-4 di Balikpapan, selain memperbaharui pengurus baru juga berhasil memantapkan struktur organisasi yang terdiri dari: Pengurus Besar yang membawahi Pengurus Harian dan Pengurus Bagian (Departemen) yang terdiri dari badan-badan yakni Badan Majelis Syar'iy, Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan, Badan Propaganda, Badan Komisi Mengumpul Rancangan-Rancangan Aturan Nasrul Umum, Badan Pengurus *Stapel drukkerij*, Badan Pendirian Drukkerij M.Th (Musyawaratutthalibin), Badan Pers Commissie dan Badan Perpustakaan.²³⁵

234 M. Nur Maksum dkk., *ibid.*, hlm. 30.

235 Moh. Yusran, *op.cit.*, hlm. 38-40.



TANDA ANGGOTA
"MOESJAWARATOETTHALIBIN"

Tjabang A. A. O. E. N. T. A. I

Stb. No. 6.5.9

Stb. No. 2/8-5C.B.

Diberikan pada tanggal 3 SJAWAL 1353
(9 JANUARI 1935) kepada nama
Abdoelhamid bin Hoi. A. Samad.
oemoer kl. 17 tahun, beroemah di p. Karias.

At nama Centraal Bestuur
"MOESJAWARATOETTHALIBIN"
Voorzitter,
Tanda tangan
dari anggota pemegang
ini tanda

[Handwritten signature]

Alg. Secretaris,

[Handwritten signature]

KOEFISIENSI PENDEK DARI STATUTEN VAN H. R.
"MOESJAWARATOETTHALIBIN"

- Pasal 2. Bekerdjia oentoek mem... persatuan ISLAM.
Pasal 3. Mendoendjeng tinggi keraky... Al Hadisoessjarif, Idjema' Oelama dan Q... Qoeranoelkarim.
Pasal 4. Jang botch mendjadi anggota ini perhimpunan hanjalah orang
jang beragama Islam tidak memandang bangsa apa djoeapoen.
Soepa... dapat mendjadi anggota tjoeke... dengan mene-
rangki... kepada Bestuur.
Pasal 5. Seseorang berhent mendjadi anggota
a. Meninggal dunia.
b. ...
c. Dikeloearkan oleh poets... sadering menoeroet
Pasal 3. H. R. Entrée (denda) koerangnja f 0.50.
Contributie seboe... idem f 0.05.

Dengan das... dan mengamatkan perintah Allah
kita bekerdjia seteroesnja, baharoeljah Oemat Islam mendjadi moella dan
sampoerna.

S. POETRA SJAWA

Tanda anggota Musyawaratutthalibin.
(Repro dok. M. Nur Maksum dkk., 1991).

Melalui badan-badan itu, selain bergerak dalam bidang keagamaan juga bergerak di bidang sosial antara lain dengan mengadakan kursus-kursus kerajinan, pemberantasan buta huruf. Bagian terkenal dari organisasi ini adalah Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan yang program kerjanya menggiatkan berdirinya sekolah-sekolah.

Di bidang sosial mereka juga melaksanakan kursus-kursus buta huruf, kerajinan tangan, dan mengumpulkan biaya pendidikan bagi anak yang cerdas yang kesulitan biaya, bahkan mengadakan percetakan dan menerbitkan surat kabar yakni “Suara M.Th atau Suara Musyawarah” meski tidak lama umurnya.

Musyawaratutthalibin bukanlah sebuah organisasi politik, namun dalam hal yang menyangkut keagamaan yang berkaitan dengan Pemerintah Hindia Belanda, organisasi ini cukup kritis memperjuangkan kepentingan umat Islam. Misalnya pada tahun 1937 Musyawaratutthalibin bersama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya mengeluarkan mosi menentang diberlakukannya peraturan Kawin Bercatat (*Houwelijke Ordonnantie*) karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam.²³⁶

Musyawaratutthalibin juga mengeluarkan mosi tahun 1938 sebagai hasil dari Kongresnya yang ke-4 di Balikpapan yang isinya agar bea pemotongan hewan buat aqiqah dan qurban dibebaskan dan orang yang melakukan penghinaan terhadap agama Islam supaya dihukum tanpa padang bulu. Mosi itu disampaikan kepada pemerintah, *Kantor voor Moehammadensch Zaken*,²³⁷ *Volksraad*, dan Pers Indonesia.²³⁸

236 M. Nur Maksum dkk., *op.cit.*, hlm. 84-85.

237 Adakalanya orang Barat, termasuk kaum orientalis Belanda, menyebut Islam dengan nama Mohammedanism (sebagaimana judul buku karya H.A.R. Gibb) atau Mohammedan. Peristilahan itu yang bukan saja tidak tepat, akan tetapi secara prinsipil salah, lihat Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, PT. Al Maarif, Bandung, 1977, hlm. 55.

238 Lihat isi Motie Congres Moesjawaratoetthalibin ke IV, pada Lampiran 8.

Kemudian melalui Konferensi Umat Islam I wilayah Selatan dan Timur Kalimantan tanggal 24 s.d. 27 Juni 1938 di Kandangan, Musyawaratutthalibin bersama utusan lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Assiratal Mustaqim, dan lain-lainnya mengeluarkan mosi kepada pemerintah agar isi buku, gambar, majalah, dan pidato yang berisi penghinaan terhadap Islam dilarang penyiarannya dan pengarangnya dihukum.²³⁹

Di bidang pendidikan, perjuangan Musyawaratutthalibin terlihat dari adanya “Sekolah Musyawarah” yang didirikan di hampir semua cabang organisasi ini. Di samping itu, organisasi ini juga mendirikan sekolah agama yang lain seperti “*Qismul-Mudarisien*” di Kandangan dan “Normal Islam” di Rantau.²⁴⁰

Untuk memobilisasi tenaga dalam perjuangannya di kalangan wanita, Musyawaratutthalibin pada tahun 1935 mendirikan Jam’iyyatun Nisa yang dipelopori oleh nyonya Rahmah Bahrani dan Aluh Kaderi.²⁴¹ Untuk pemuda atau kepanduan didirikan Nasrul Umum pada 9 Oktober 1937 yang dipelopori oleh A. Jabbar, H.M. Syukeri dan Syamsi Rais.²⁴²

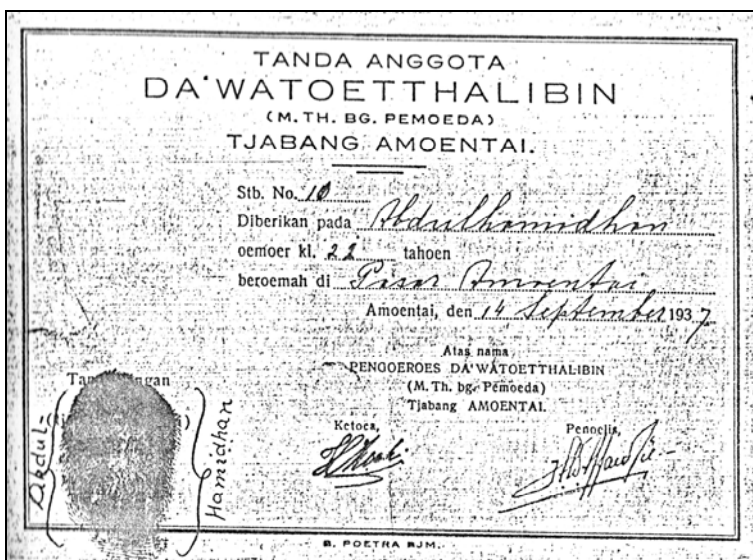
Melalui sekolah-sekolah Safi’iyah, Kepanduan Nasrul Umum, Da’watutthalibin, dan Jam’iyyatun Nisa mereka melakukan dakwah dalam rangka menjunjung tinggi Al-Qur’an, Hadits, Idjma, dan Qiasy serta menolak keras serangan *ahlul bid’ah waddhalalah* baik di tempat terbuka, di masjid maupun langgar. Usahanya di bidang agama ditemui pula pada pembentukan kader-kadernya di setiap sekolah “musyawarah” yang terdapat pada setiap cabang-cabangnya di daerah.

239 Lihat kembali isi Motie Conferentie Oemat Islam ke I dari Selatan dan Timoer poelaoe Kalimantan 24/25-26-27 Juni 1938 di Kandangan, pada Lampiran 9.

240 Moh. Yusran, *op.cit.*, hlm. 51.

241 Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 60.

242 Moh. Yusran, *op.cit.*, hlm. 43.



Tanda anggota Da'watutthalibin.
(Repro dok. M. Nur Maksum, dkk., 1991)

Selain itu, Musyawaratutthalibin berhasil menyatukan dua perguruan yakni “Persatuan Perguruan Islam di Birayang” dengan “Sekolah Musyawarah”, sehingga kerjasama itu dapat meningkatkan mutu kerja guru-guru dan murid di samping hubungan organisasi ini dengan perhimpunan lainnya menjadi lebih erat.

Dalam strategi perjuangannya, Musyawaratutthalibin mempunyai beberapa ciri khas, antara lain kooperatif, moderat, modern, dan pembaharu. Misalnya dalam hal keagamaan musyawaratutthalibin lebih cocok dengan kaum tua, tetapi dalam penampilan di bidang umum lainnya, penampilannya terkesan bercorak modern.²⁴³

243 M. Nur Maksum dkk., *op.cit.*, hlm. 83.

Dalam hal keanggotaan, Musyawaratutthalibin membolehkan anggotanya memiliki keanggotaan rangkap. Karena kebijakan inilah maka jumlah anggota organisasi ini berkembang pesat, karena banyak anggota Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang berhimpun dalam organisasi Musyawaratutthalibin, di samping ketertarikan mereka terhadap tujuan organisasi ini yang ingin mempersatukan umat Islam.

Meski demikian, upaya Musyawaratutthalibin untuk menjembatani hubungan kelompok kaum tua dengan kaum muda tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara umum hubungannya dengan organisasi Islam lainnya cukup baik, akan tetapi hubungan itu bervariasi di setiap cabang.

Setidaknya, hal itu terlihat dari hubungannya dengan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Misalnya hubungan Muhammadiyah di Kandangan, Barabai, Rantau, Kelua, Sapat, dan Tembilahan dinilai oleh Pengurus Besar cukup baik. Akan tetapi hubungan dengan Muhammadiyah cabang Alabio kurang begitu baik, dan sebaliknya hubungan dengan Nahdlatul Ulama baik sekali. Di cabang Sanga-Sanga Dalam, terjadi persaingan keras antara Musyawaratutthalibin dengan Nahdlatul Ulama. Di Amuntai bahkan terjadi perkelahian yang menimbulkan korban jiwa antara pengikut Musyawaratutthalibin dengan pendukung Siratal Mustaqim.²⁴⁴

Mengingat bahwa setiap pertentangan di kalangan umat dan organisasi Islam itu sangat merugikan, maka pada Kongres ke-2 di Kandangan telah diputuskan bahwa taktik perjuangan organisasi diarahkan perhatiannya mencari jalan tengah dengan cara tidak meladeni perdebatan-perdebatan, khususnya dengan Muhammadiyah, tetapi berusaha mencari titik temu dalam memajukan umat Islam dan menjalin kerjasama. Hal ini telah dibuktikan oleh pimpinan teras Musyawaratutthalibin yang menghadirkan Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) seorang tokoh Muhammadiyah

244 M. Nur Maksum dkk., *loc. cit.*

untuk berbicara pada tablig akbar yang dilaksanakan oleh bagian dakwahnya, Da'watutthalibin.²⁴⁵

Meski jumlah cabang dan anggotanya terus bertambah, Musyawaratutthalibin juga menghadapi permasalahan intern, seperti kurangnya perhatian anggota terhadap perkembangan organisasi berupa setoran keuangan yang tidak lancar, kurangnya kesadaran anggota terhadap kewajibannya, adanya anggota yang mudah diadu domba, bersifat munafik, terpengaruh pangkat atau kekuasaan, terbengkalainya pekerjaan karena pengurusnya ikut bergerak ke organisasi lain yang bersifat politik, dan kurangnya kader pemimpin yang cakap untuk mengelola cabang.

Musyawaratutthalibin cabang Banjarmasin yang semula adalah pusat pengurus besar, ternyata mengalami kemunduran setelah kedudukan pengurus besarnya dipindahkan ke Kandangan. Cabang Banjarmasin keadaannya menjadi lemah dan kegiatannya hanya berupa tablig-tablig saja.²⁴⁶

Musyawaratutthalibin adalah organisasi non-politik. Meski demikian, banyak pengurus atau anggotanya yang memiliki keanggotaan rangkap dan bergerak dalam organisasi pergerakan politik seperti Parindra, di samping sebagai anggota Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Banyaknya keanggotaan rangkap itu tentu saja telah berimbas kepada kemerosotan organisasi, karena pekerjaan di organisasi induk menjadi terbengkalai. Oleh karena itu, pengurus besar akhirnya mengeluarkan kebijakan “disiplin partai” yang dikenakan kepada anggota Musyawaratutthalibin yang mempunyai keanggotaan rangkap. Mereka harus memilih, apakah tetap berada di Musyawaratutthalibin ataukah di organisasi lain. Adanya kebijakan “disiplin partai”, di satu sisi memang dapat

245 M. Nur Maksum dkk., *ibid.*, hlm. 31

246 Notulen Kongres Musyawaratutthalibin ke empat di Balikpapan, 7 Desember 1938, dalam M. Nur Maksum, “Gerakan Islam Modern ..., (lampiran).

mengembalikan sebagian pengurusnya untuk aktif kembali di organisasi Musyawaratutthalibin, namun sebaliknya banyak pula pengurusnya yang memilih organisasi lainnya. Musyawaratutthalibin menjadi lesu darah karena kehilangan pemimpin yang cakap. Keanggotaan rangkap yang semula menguntungkan dan membesarkan Musyawaratutthalibin, kini berubah menjadi faktor yang mengerdilkan organisasi itu.

I. Partai Nasional Indonesia dan PNI Pendidikan

Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk pertamakalinya dibentuk oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung.²⁴⁷ Pada mulanya bernama “Perserikatan Nasional Indonesia” yang non-kooperatif, dan baru kemudian pada bulan Mei 1928 diubah menjadi “Partai Nasional Indonesia”.²⁴⁸ Kemajuan-kemajuan setelah kongresnya yang pertama di Surabaya pada bulan Mei 1928 berupa propaganda, aksi massa, dan cara kerja yang teratur mengakibatkan organisasi ini menyebar luas hingga ke daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa, bahkan ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Melihat pesatnya perkembangan PNI di kalangan rakyat, maka tidaklah heran jika putera-putera Kalimantan di Surabaya yang telah mendirikan Persatuan Putera Borneo (PPB) di bawah pimpinan Abdul Kadir ada yang tertarik kepada PNI. Dan besar kemungkinan Partai Nasional Indonesia di Kalimantan Selatan pada awalnya dapat tumbuh dan berkembang berkat dukungan pemuda-pemuda yang tergabung dalam Persatuan Putera Borneo sehingga atas

247 Menurut L.M. Sitorus, waktu pertama kali dibentuk namanya adalah “Perserikatan Nasional Indonesia”. Baru kemudian pada Kongres I di Surabaya pada tanggal 27-30 Mei 1928 diputuskan untuk mengganti perkataan “perserikatan” menjadi “partai”, sehingga perkumpulan ini selanjutnya disebut “Partai Nasional Indonesia” disingkat PNI, lihat L.M. Sitorus, *op.cit.*, hlm. 41.

248 *Almanak Indonesia 1950*, Pustaka Djaja, Bandung, 1950, hlm.4.

dasar tuduhan terlibat pengaruh PNI Soekarno, maka Persatuan Putera Borneo dibubarkan pada tahun 1929.²⁴⁹

Meski kelangsungan Persatuan Pemuda Borneo tidak bertahan lama, namun atas usaha-usaha pemuda Persatuan Pemuda Borneo, maka cabang PNI dapat dibentuk pada tahun 1929 dengan ketuanya Nunci Malyani dibantu Sekretaris Khuderi Thaib dan Pembantu Umum Kiai Luis Kamis²⁵⁰ dan merupakan cabang dari pusatnya di Jawa. Sesuai anggaran dasarnya, tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan azas “percaya pada diri sendiri”. Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri serta tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda (non-kooperatif).

Beberapa hari setelah Partai Nasional Indonesia cabang Banjarmasin terbentuk, mulailah diadakan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan-pertemuan, sehingga PNI berkembang ke daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan, namun tidak sesubur perkembangan PNI di daerah lain seperti di Jawa dan Sumatera. Penyebabnya masyarakat merasa takut dengan tekanan-tekanan Pemerintah Hindia Belanda terhadap anggota PNI, di samping kepercayaan masyarakat yang begitu tebal terhadap agamanya, sehingga PNI yang bersifat nasionalis dan bersikap netral terhadap agama menjadi kurang mendapatkan perhatian masyarakat di daerah ini.

Seperti halnya di Jawa, Pemerintah Hindia Belanda yang semakin hari kian bertambah cemas terhadap perkembangan dan propaganda PNI di Kalimantan Selatan mulai menunjukkan tangan besinya. Menyusul penggeledahan dan penangkapan tokoh-tokoh PNI di Jawa, maka pada akhir Desember 1929 terjadi pula penggeledahan markas PNI cabang Banjarmasin yang

249 Lihat Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hlm. 85 dan M. Idwar Saleh dkk., *op.cit.*, hlm.46.

250 Soepardi, *op.cit.*, hlm. 10-11.

mengakibatkan matinya perjuangan organisasi ini di Banjarmasin.

Penangkapan atas tokoh-tokoh PNI terutama Ir. Soekarno²⁵¹ yang merupakan jiwa penggerak PNI ternyata memberi pukulan yang sangat keras terhadap PNI. Pada Kongres Luar Biasa II di Jakarta, diambillah keputusan untuk membubarkan PNI karena keadaan memaksa. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan di kalangan pendukungnya, yang masing-masing pihak mendirikan Partai Indonesia (Partindo) oleh Mr. Sartono cs, dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.²⁵²

Partai baru ini mempunyai tujuan dan aksi perjuangan yang hampir sama dengan PNI, hanya namanya diubah. Seperti simbol tetap sama yaitu kalau PNI-Baru merah putih dengan kepala banteng, sedangkan Partindo merah putih dengan banteng hitam.

Tiga tahun setelah peristiwa penggeledahan PNI cabang Banjarmasin, maka pada tahun 1932 atas inisiatif M. Yusak dibentuklah PNI Baru yakni Pendidikan Nasional Indonesia di Marabahan. Perkumpulan ini lebih dikenal masyarakat dengan nama PNI Pendidikan²⁵³ dengan pimpinannya Musyaffa (Ketua); dibantu oleh Sunhaji (Penulis); seorang bendaharawan, M. Yusak (Pembantu Umum); dan H. M. Arip (Pelindung).²⁵⁴

Partai ini berdiri atas asas menolong diri sendiri dan bersikap *non-cooperatif* dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan itu, PNI Pendidikan menggunakan Perguruan Taman Siswa dan

251 Soekarno ditangkap dan diadili di Bandung bersama tokoh PNI lainnya seperti Gatot Mangkupraja, Maskun dan Supriyadinata. Pasal KUHP yang dikenakan kepada mereka adalah Pasal 153 bis dan ter dan Pasal 171 bis. Pasal 171 bis berbunyi: Barang siapa dengan sengaja karena menyiarkan kabar bohong menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat dapat dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum f.300,00"

252 L.M. Sitorus, *op.cit.*, hlm. 45-48.

253 Soepardi, *op.cit.*, hlm. 25.

254 Soepardi, *ibid.*, hlm. 18.

Kepanduan Bangsa Indonesia sebagai wadah pelaksanaannya untuk menanamkan rasa kebangsaan dan membebaskan mereka dari perasaan takut dan kebodohan.

PNI Pendidikan merekrut murid-murid Perguruan Taman Siswa yang dianggap mampu dan dewasa dalam kegiatan "*Debating-Club*" yang diasuh oleh M. Yusak dengan jumlah anggotanya maksimum 40 orang. Dari kegiatan itulah diharapkan lahir kader yang sanggup menyebarkan cita-cita PNI Pendidikan.

PNI Pendidikan juga menganjurkan agar lagu Indonesia Raya selalu dikumandangkan, dan di setiap perhelatan perkawinan atau perayaan hari besar Islam dianjurkan pula untuk memasang warna merah putih, meski hanya dalam bentuk hiasan.

Supaya cita-cita politik PNI Pendidikan tersebar luas, maka organisasi ini melakukan kontak dan bekerjasama dengan organisasi yang sudah ada diantaranya dengan Barisan Indonesia (BINDO) yang sebelumnya telah berkembang di Marabahan. Sehingga sebagian pengurus BINDO juga sebagai pengurus PNI Pendidikan.

Keberhasilan usaha PNI Pendidikan dalam meningkatkan kecerdasan rakyat yang masih terbelakang melalui pendidikan dan pengajaran, berakibat organisasi ini dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat, sedangkan Partindo tidak demikian. Kegiatan Partindo hampir tidak terdengar di daerah ini, seandainya pernah ada, besar kemungkinan hanya bersifat perorangan.²⁵⁵

Sebagaimana halnya dengan Partai Nasional Indonesia, maka kegiatan PNI Pendidikan di Marabahan juga mendapat tekanan dari pemerintah kolonial, apalagi setelah ranting persiapan Banjarmasin terbentuk lengkap dengan pengurusnya. Adapun susunan pengurus PNI Pendidikan Banjarmasin adalah: Jumadi (Ketua); Subagio (Wakil Ketua); Sutomo (Sekretaris I); Sudibyo (Sekretaris II); Ny. Subagio

255 Soepardi, *ibid.*, hlm. 14.

(Bendahara); dan dibantu oleh Pembantu Umum: Hasian Harahap, Suwito dan Sumarno.²⁵⁶

Perkembangan PNI Pendidikan akhirnya juga tidak dapat berlangsung lama karena tindakan keras Pemerintah Hindia Belanda yang melemahkan pergerakan kebangsaan yang bersikap non-kooperatif, seperti dalam bentuk pengawasan ketat, ancaman, bahkan pengusiran dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang disegani. Demikianlah, akibat tangan besi yang dilakukan pemerintah, maka organisasi PNI Pendidikan akhirnya tidak dapat bergerak leluasa lagi.

J. PBI dan Parindra

Pada waktu Pendidikan Nasional Indonesia dalam keadaan tidak dapat bergerak lagi setelah terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokohnya seperti M. Haidar dan Hasian Harahap, maka pada tahun 1935 berdirilah Cabang Partai Indonesia Raya (Parindra) di bawah pimpinan Merah Johansyah.²⁵⁷

Sebelum masuk ke Kalimantan Selatan, Parindra didirikan oleh dr. Sutomo dan kawan-kawan pada tahun 1935 di Surabaya²⁵⁸ dan merupakan fusi dari partai-partai politik, antara lain: Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI),²⁵⁹ Sumateranen Bond. Dalam Parindralah golongan cerdik-cendekiawan priyayi Jawa yang diwakili PBI dan golongan birokratis konservatif priyayi Jawa yang diwakili feodal Budi Utomo dapat digabungkan dengan serasi ke dalam satu barisan dan mampu bekerja bersama secara politik.²⁶⁰ Parindra merupakan partai politik yang

256 Soepardi, *ibid.*, hlm. 28.

257 Soepardi, *ibid.*, hlm. 20.

258 L.M. Sitorus, *op.cit.*, hlm. 51.

259 PBI atau Partai Bangsa Indonesia didirikan oleh dr. Sutomo, lahir dari gabungan antara "Studie Club Surabaya" dengan "Studie Club Madura" pada tanggal 16 Oktober 1930, lihat L.M. Sitorus, *ibid.*, hlm. 52.

260 Savitri Prastiti Scherer, *op.cit.*, hlm. 222.

berdasarkan nasionalisme *Indonesia Raya* dan bertujuan *Indonesia Mulia dan Sempurna*.



Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) cabang Kandangan.
(Foto dok. Yurliani Johansyah)

Di Kalimantan Selatan, pada mulanya Parindra bernama Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Organisasi PBI dibentuk pada tahun 1930, dipelopori oleh Merah Johansyah dan Masri dengan jumlah anggota tidak lebih dari lima belas orang.²⁶¹ Mereka bergerak secara sembunyi-sembunyi karena khawatir ditangkap polisi kolonial Belanda atau PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*). Polisi PID memang selalu mengawasi aktivitas anggota PBI, memperingatkan dan memberikan sanksi kepada mereka yang ketahuan menyebarkan organisasi dan tujuan PBI.

261 Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm. 4.

Pada tanggal 14 Mei 1932, PBI Banjarmasin dengan pengurusnya Merah Johansyah (ketua) dan Masri (wakil ketua) diakui sebagai cabang oleh Pengurus Besar.²⁶² Dari Banjarmasin, PBI berkembang ke daerah lainnya sehingga mempunyai cabang-cabang seperti di Kandangan, Barabai, Alabio, dan Amuntai. Organisasi PBI digerakkan oleh kaum intelek, terutama guru-guru.

Di samping itu, dibentuk pula Surya Wirawan sebagai organisasi kepemudaan dan kepanduan dari PBI. Surya Wirawan cabang Banjarmasin diketuai oleh A. Ibrahim dengan wakil ketua Achmad Darmawie sekaligus sebagai sekretaris. Para pemuda Surya Wirawan, selain diberikan latihan kepanduan, juga diberikan kursus kepemimpinan, disiplin partai, kebangsaan, dan patriotisme berdasarkan asas kepertaian PBI yakni Kebenaran, Keadilan, Kesucian, Kecintaan, dan Pengorbanan.²⁶³ Ketika terjadi fusi pembentukan Parindra pada tahun 1935, maka dengan sendirinya organisasi Surya Wirawan menjadi organisasi yang dikelola oleh Parindra.

Tatkala PBI berdiri di Kandangan pada tahun 1933, seorang tuan guru di Kandangan, yakni H. Muhammad Hapip, telah meminjamkan sebuah rumah di jalan Mesjid untuk kegiatan PBI dan untuk Perguruan Rakyat. Tidak hanya itu, anaknya, menantu, dan bahkan cucu-cucunya juga berada dalam lingkungan dan menyokong kegiatan PBI ini, baik sebagai pengurus, anggota, pembantu, maupun murid sekolah.

262 Achmad Darmawie, *loc.cit.*

263 Achmad Darmawie, *ibid.*, hlm. 5.



Pembukaan Taman Pustaka dan Gedung Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) Cabang Kandangan tahun 1934.
(Foto dok. keluarga Achmad Darmawie).

Di tempat itulah acapkali terdengar: "Hidup PBI". Mereka juga memasang papan nama di muka rumah tersebut: Persatuan Bangsa Indonesia (P.B.I) Cabang Kandangan. Di bawahnya tampak papan nama: Perguruan Rakyat Parindra Kandangan.²⁶⁴

Setelah kejadian Pemberontakan awak Kapal Tujuh (*Zeven Provinciën*) tersiar di Banjarmasin, suasana politik menjadi agak keruh, karena Belanda mencurigai PBI akan mengadakan aksi demonstrasi. Pihak kolonial Belanda memang merahasiakan pemberontakan itu, akan tetapi itu

264 Artum Artha, "Cita-cita...", hlm. 18.

peristiwa itu sudah diketahui dan mendapat simpati umum.²⁶⁵

Di Alabio, para anggota PBI aktif mempropagandakan paham kebangsaan yang menjadi asas PBI kepada masyarakat. Diantaranya adalah Zafry Zamzam yang ketika bertugas di Alabio menuangkan tulisannya di majalah yang ia pimpin yakni Majalah Bingkisan berisi kritikan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Karena kegiatan politiknya di PBI dan tulisan-tulisannya itulah, maka Zafry Zamzam pernah dipanggil Asisten Kiai di Alabio dan kemudian dipanggil Kontrolir di Amuntai untuk diminta pertanggungjawaban atas kegiatannya yang bersifat politik di PBI.²⁶⁶

Pada tahun 1934, PBI juga berkembang di Barabai dengan nama PBI cabang Barabai, diketuai oleh H. Ali Baderun, didampingi H. Kaderi wakil ketua, A. Azis Mansyur Sekretaris, dan Zakaria bendahara. Mereka melakukan kursus atau propaganda partai ke kampung-kampung sekali seminggu, mengadakan sekolah buta huruf untuk orang tua, mendirikan rukun kematian, mendirikan sekolah swasta untuk anak-anak, menjalankan les derma kepada para anggota untuk kepentingan partai, dan propaganda lainnya secara tidak langsung seperti pada acara perkawinan, selamatan, dan lain-lain.²⁶⁷

Setelah berfusi PBI dengan Budi Utomo dan organisasi lainnya menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935, maka perkembangan politik di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Dalam gerakannya di Kalimantan Selatan, Parindra berkembang ke berbagai kota seperti Kuala Kapuas,²⁶⁸ Sampit, Kandangan,²⁶⁹ Barabai, Amuntai,

265 Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm. 5.

266 Abdullah Karim dkk., *Empat Ulama Pembina IAIN Antasari*, Pusat Pengkajian Islam Kalimantan IAIN Antasari, Banjarmasin, 2004, hlm. 62.

267 Alibasah, "Riwayat Perjuangan H. Alibasah", naskah ketikan, Martapura, 12 Maret 1981.

268 Di Kuala Kapuas, cabang Parindra dibentuk pada tanggal 23 Juli 1939 oleh Komisaris Pengurus Besar Parindra Hadhariyah M di gedung HBS kampung Hampatung Kuala Kapuas, dipimpin oleh

Haruai, Pagatan, dan Kotabaru, bahkan sampai ke daerah Kalimantan Timur (Samarinda dan Sangkulirang). Perkembangan yang pesat, menjadikan organisasi Parindra satu-satunya partai politik terbesar yang ada saat itu di Kalimantan Selatan.

Di Barabai, cabang Parindra berdiri pada tahun 1936.²⁷⁰ Pengurus pertama diketuai oleh H. Ali Baderun dan bermarkas di Gedung Parindra berukuran 15 x 20 meter yang berlokasi di Bulau, yang sekarang menjadi jalan Sarigading, Barabai. Pembangunannya dilakukan secara gotong royong dengan menjalankan les derma di masyarakat dan dengan cara memungut iuran kepada anggota.²⁷¹

Parindra berusaha memperbaiki penghidupan rakyat dengan memberikan pertolongan dan pimpinan yang nyata, dengan mendirikan badan-badan koperasi, rukun tani, bank rakyat, pelayaran dan perdagangan. Mereka juga mengadakan diskusi atau kursus-kursus seperti kursus administrasi, kepemimpinan, dan kursus pidato. Karena usahanya itulah, maka jumlah anggotanya cepat bertambah dengan cabang-cabang dan ranting-ranting baru yang bermunculan di desa-desa seperti Kotabaru, Alabio, dan Kapar Kias Birayang, Hantakan,²⁷² dan Karatau.²⁷³ Untuk

W. Sandan sebagai ketua dan A. Rasyid sebagai penulis/sekretaris, lihat Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm. 7; Mohammad Nawawie Arif, *op.cit.*, hlm. 14.

269 Di Kandungan, Parindra berdiri pada tahun 1935. Pimpinan pertama adalah Muhammad Abdul Husein (Kepala Sekolah HIS). Pimpinan kedua Muhammad Hanafiah (Wakil Kepala Sekolah HIS). Setelah keduanya dipindahkan ke Jawa dan Madura, pelanjutnya adalah Ahmad Barmawi, H. Muhammad Syukeri dan H. Muhammad Syamsi Rais.

270 Muderis Zaini dkk., *op.cit.*, hlm. 41.

271 Abdul Manap Uhuk, "Riwayat Perintis Kemerdekaan," naskah ketikan, Barabai, 1981, hlm. 8.

272 Kampung Hantakan yang jauhnya sekitar 9 km dari Barabai, di sini dibentuk pengurus ranting/seksi Parinda Hantakan pada tanggal 1 Juni 1939. Pembentukan pengurus dihadiri sekitar

kepentingan pendidikan, organisasi ini membentuk Perguruan Rakyat Parindra di Kandangan, Banjarmasin, Barabai, Birayang, dan Amuntai.²⁷⁴

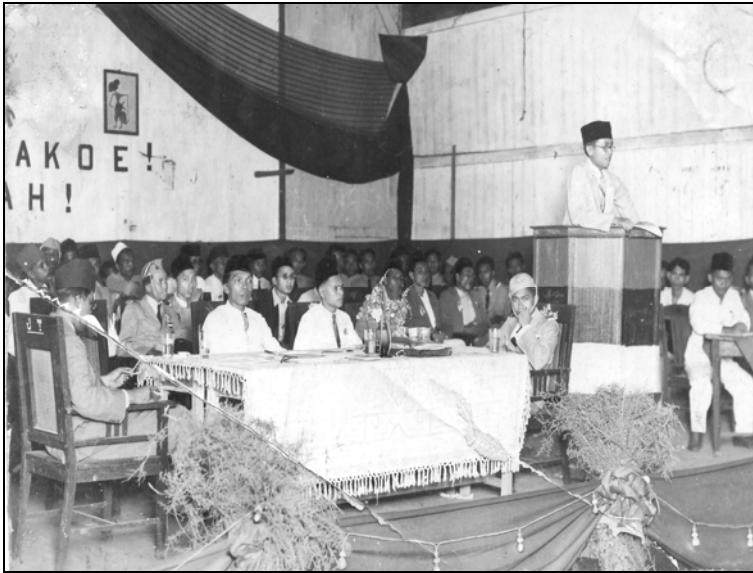
Di Barabai, Parindra pernah mengadakan rapat terbuka (*openbare*) di los Getah, pasar Barabai. Pada saat itulah tampil seorang wanita dari Kandangan bernama Siti Syahrijat memberanikan diri berpidato di depan khalayak ramai. Ia menjadi salah seorang wanita yang tidak kenal takut berpidato dengan lantang di muka umum pada masa penjajahan. Isi pidatonya bertujuan membangun semangat kaum perempuan, membangkitkan kegairahan dan menyadarkan kaum ibu serta mengajak mereka agar tidak hanya bekerja di dapur yang semata-mata memasak dan memelihara anak di rumah, akan tetapi perempuan juga harus bangkit dan mengikuti jejak langkah kaum pria di dalam menentukan langkah nasib bangsa di kemudian hari, sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang perempuan.²⁷⁵

500 orang Parindrist dari segenap pelosok seperti dari Birayang, Pantai Hambawang, Aluan Sumur, Pelajau, dan Mahang. Di sini dilaksanakan rapat terbuka (*openbare vergadering*) dengan penyampaian pidato yang berapi-api, lihat Mohammad Nawawie Arif, *op.cit.*, hlm. 12.

273 Di desa Karatau, Ranting Parindra diketuai oleh Alibasah. Sebelum menjadi Parindra merupakan ranting dari PBI. Pada tahun 1937, Alibasah ditangkap oleh PID dan ditahan selama 21 hari karena mengadakan rapat tertutup di Karatau dan tidak ada izin dari PID, lihat Alibasah, *op.cit.*, tanpa halaman.

274 Tentang Sekolah Parindra, baca sebelumnya "Sekolah Kaum Pergerakan".

275 Abdul Manap Uhuk, *op.cit.*, hlm. 9.



Suasana rapat dalam rangka pembentukan pengurus
Parindra cabang Barabai, tahun 1939.
(Foto dok. H. Abdul Muis).

Perjuangan Parindra dalam menghadapi politik Pemerintah Hindia Belanda meliputi berbagai bidang, dimana ada kemungkinan dan kesempatan. Di bidang politik, Parindra berusaha duduk dalam keanggotaan Raad-Raad yang ada seperti *Volksraad* di pusat, *Provinciale Raad* yang di daerah menjadi *Banjar Raad*, *Gementeraad*, dan *raad-raad* lokal lainnya.²⁷⁶

²⁷⁶ Parindra tidak secara prinsipil menganut asas politik *non-coo* atau *co*, sehingga sepak terjangnya keluar tampak seperti *cooperator* dan kadang-kadang seperti *non-cooperator*. Parindra tidak menolak duduk dalam dewan-dewan dari kota sampai “*volksraad*”, tetapi bila perlu atau jika usulnya tidak diterima ia meninggalkan dewan-dewan tersebut dan

Duduknya anggota Parindra dalam Banjar Raad, mempunyai tujuan tertentu, seperti: (1) Untuk menyampaikan suara rakyat secara legal; (2) Memberikan saran agar dalam mengatur pemerintahan banyak memberikan keuntungan kepada rakyat; (3) Mencoba melakukan oposisi secara sehat; (4) Memperlihatkan kepada Pemerintah Hindia Belanda bahwa bangsa Indonesia sanggup memerintah.²⁷⁷

Anggota Parindra yang duduk sebagai anggota Raad-Raad itu, digunakan untuk dua tujuan:

1. Kepada Pemerintah Hindia Belanda menyampaikan apa yang menjadi tuntutan Parindra.
2. Kepada rakyat tokoh-tokoh inilah yang menjelaskan tentang sikap dan sepak terjang pemerintahan Hindia Belanda, seperti melalui rapat-rapat partai, atau kursus-kursus. Dengan demikian, selain mematangkan cara berpolitik kepada anggotanya, maka makin banyak anggota Parindra memahami dan mengerti masalah-masalah politik.²⁷⁸

Dalam rangka untuk memperluas perkembangan partai terutama Parindra cabang Banjarmasin sekaligus untuk mempertebal semangat nasionalisme dan patriotisme para anggota partai, maka diundanglah para pemimpin pusat/Pengurus Besar Parindra ke Kalimantan Selatan, yakni Mohammad Husni Thamrin, R. Sukarjo Wiryopranoto, R. Sunyoto.²⁷⁹

Selain di Banjarmasin, Mohammad Husni Thamrin yang juga seorang anggota *Volksraad* berkunjung pula ke

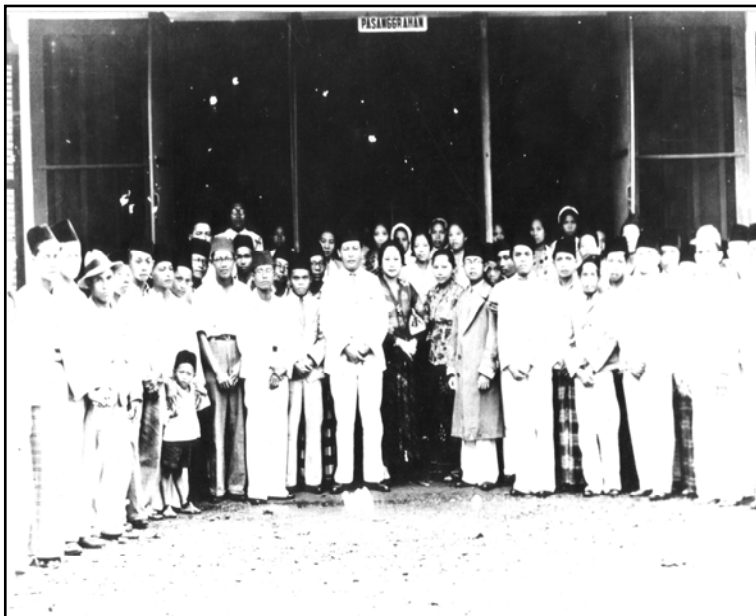
menjalankan apa yang disebut dengan *incidentele* atau *utilistische non-cooperatie* selama waktu yang ditentukan oleh partai, lihat L.M. Sitorus, *op.cit.*, hlm. 52.

277 Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

278 Sjarifuddin, *loc.cit.*

279 Hadhariyah M., *op.cit.*, hlm. 8; Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm. 6.

Hulu Sungai (Kandangan,²⁸⁰ Barabai, Amuntai) untuk melakukan pertemuan dan rapat-rapat umum.



Pada tahun 1938, Mohammad Husni Thamrin dan Sukarjo Wiryopranoto dari Pengurus Besar Parindra dan juga anggota *Volksraad* berkunjung ke Kandangan. Tampak saat mereka berada di Pasanggrahan Kandangan.
(Foto dok. keluarga Achmad Darmawie).

Di Barabai, Mohammad Husni Thamrin berkesempatan melakukan pelantikan Ranting Parindra Birayang menjadi Cabang Parindra Birayang yang dilakukannya pada bulan Oktober 1937.

280 Lihat foto Mohammad Husni Thamrin beserta para pengurus dan anggota Parindra saat berada di Pasanggrahan Kandangan.

Parindra Cabang Birayang ini cukup aktif melaksanakan program perjuangan seperti mengadakan kursus dan mendirikan sekolah seperti sekolah *Neutralschool* di Birayang yang guru-gurunya antara lain H.M. Arip, Sunaryo, dan M.Y.H.W. Puloakan yang maksudnya juga untuk memperkuat susunan pimpinan kepengurusan Parindra Cabang Birayang.²⁸¹

Di lain-lain waktu, berkunjung pula para anggota Pengurus Besar Parindra yang juga Pemimpin Surya Wirawan Pusat di Surabaya ke Kalimantan Selatan seperti Sukarjo Wiryopranoto²⁸² dan R. Sunyoto yang secara rutin berkunjung ke Banjarmasin.²⁸³

Sejak kedatangan Mohammad Husni Thamrin, tindakan pemerintah kolonial terhadap pergerakan politik Parindra menjadi lebih longgar, karena segala yang bersifat pertemuan atau rapat tidak lagi dipersulit atau dilarang dengan beberapa catatan, hanya yang bersifat rapat umum harus ada izin dari polisi PID, 2 x 24 jam sebelum dilaksanakan.²⁸⁴

281 Busri "Riwayat Perjuangan H. Busri bin H. Abdul Hamid", naskah ketikan, tanpa tempat, tanpa tahun.

282 Pada tahun 1939 Parindra cabang Amuntai mengadakan rapat umum menyambut kedatangan Sukarjo Wiryopranoto selaku Pengurus Besar Parindra dari Surabaya, bertempat di gedung Musyawaratutthalibin Amuntai yang dihadiri oleh Cabang dan Ranting-ranting Parindra, serta undangan. Rapat umum dipimpin oleh Mr. Rusbandi. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh pemuda Surya Wirawan, diadakan sambutan-sambutan oleh Hadharyah M dari Cabang Parindra Banjarmasin, Sukarjo Wiryopranoto dari Pengurus Besar Parindra, dan A. Hamidhan dari Cabang Parindra Amuntai, lihat Hamidhan "Riwayat Hidup/Riwayat Perjuangan Hamidhan-Juhri", naskah ketikan, Haruai, 28 Februari 1981.

283 Hadharyah M, *op.cit.*, hlm. 8.

284 Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm. 6.



Rukun Keputrian Parindra di Banjarmasin. Duduk di tengah-tengah Gusti Noorsehan Johansyah didampingi pengurus Keputrian, dengan latar belakang foto ibu Kartini; pelopor pergerakan emansipasi kaum perempuan
(Foto dok. Yurliani Johansyah).

Nama Parindra demikian populer waktu itu. Di Banjarmasin pada tahun 1939, anggotanya telah mencapai jumlah 10.000 yakni dengan masuknya anggota; Abdullah asal Kuala Kapuas. Para anggotanya terhimpun pula dalam beberapa organisasi bawahannya dan kegiatan seperti Rukun Tani, Koperasi, Rukun Pelayaran Indonesia (ROPELIN), Lumbung Padi,²⁸⁵ Keputrian,²⁸⁶ Kemanduan

285 Lumbung Padi adalah sejenis koperasi yang dibentuk untuk menunjang ketahanan pangan. Dibentuk oleh pengurus Parindra, misalnya di jalan Ulin Gambut yang dipimpin oleh I.R. Lobu, A. Murad, dan Makmur. Mereka mengajak para petani untuk

Surya Wirawan, maupun Perguruan Rakyat Parindra itu sendiri. Koperasi yang dimiliki Parindra bertujuan untuk meringankan beban rakyat, seperti: koperasi simpan pinjam murni, koperasi pangan, koperasi perkakas sepeda, dan koperasi tukang jahit.

Mengenai ROEPELIN, usaha pelayaran ini cukup berkembang sehingga maskapai pelayaran Belanda yaitu KPM merasa cemas dan dirugikan. Mereka menghadapi ROEPELIN dengan memberikan bonus kepada pedagang yang memuat barang dagangan pada kapal KPM.

ROEPELIN juga seringkali membantu orang-orang pergerakan yang melarikan diri ke Pulau Jawa dan yang masuk kembali ke Pulau Kalimantan dengan membawa bahan-bahan untuk perjuangan rakyat dengan memakai perahu *Lete-Lete* (Perahu Suku Madura), dan juga perahu *Penes* dari Pagatan, Mendawai, Samuda, dan Kuala Pembuang.²⁸⁷

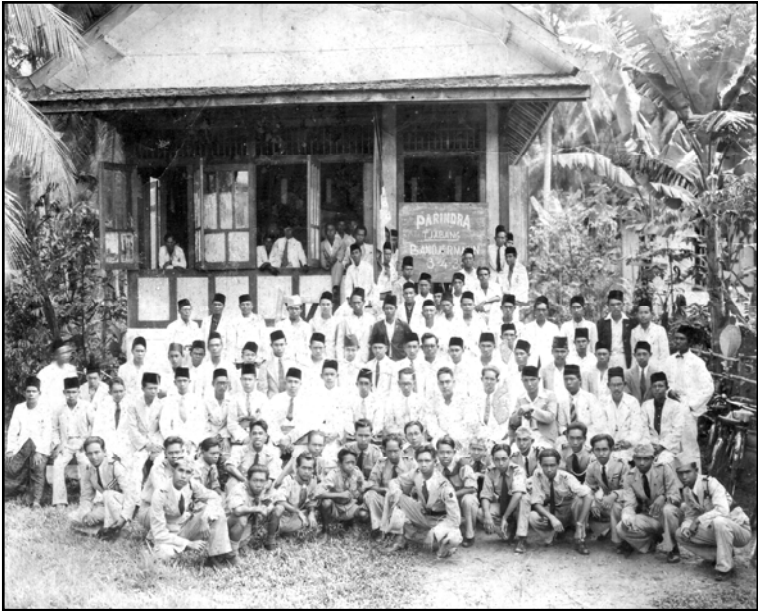
Pengurus ROEPELIN merupakan orang yang sangat mengetahui seluk beluk pelayaran, seperti I.R. Lobu, pimpinan ROEPELIN di Banjarmasin, ia seorang ambtenaar dari Bea dan Cukai (*Douane*) Banjarmasin yang berkantor pusat di Surabaya yang dipimpin oleh Nazamudin Daeng

bergabung dan bergiat untuk mencapai tujuan organisasi, lihat Mohammad Ali Badrun, "Riwayat Singkat Perjuangan Mohammad Ali Badrun bin Usman" (1), naskah ketikan, tanpa tempat, tanpa tahun.

286 Menurut Artum Artha, Rukun Puteri dipimpin langsung oleh ibu-ibu Parindra. Mereka tidak termasuk kelas intelektual, bahkan ada diantaranya tidak punya ijazah Sekolah Rakyat, namun mereka cakap memimpin organisasi politik dan pandai berdebat. Seperti ibu Hj. Saniah yang turut hadir dalam Kongres Parindra di Bandung. Ketika dipersilakan naik mimbar (podium), orang merasa heran dan terbelalak matanya, karena melihat kecakapannya dalam bicara dan berdebat.

287 Mohammad Ali Badrun, "Riwayat Perjuangan Singkat Muhammad Ali Badrun bin Usman"(2), naskah ketikan, Banjarmasin, 1 Nopember 1985.

Malewa yang juga menjabat Komisaris Pengurus Besar Parindra.



Pengurus dan anggota Parindra Cabang Banjarmasin dan Pemuda Surya Wirawan, saat berpotret bersama di Gedung Parindra jalan Ulin/jalan Pasar Lama No. 100 ²⁸⁸(sekarang jalan Perintis Kemerdekaan) Banjarmasin, 3 April 1938. Duduk di deretan ke-10 dari kiri ke kanan, Hadhariyah M, Ketua Cabang.
(Foto dok. keluarga Achmad Darmawie/Yurliani Johansyah).

²⁸⁸ Di bekas lokasi tanah dan Gedung Parindra Jalan Pasar Lama No. 100 kini berdiri bangunan ruku Toko Sahabat dan UD Yusuf Jaya.

Akibat besarnya dukungan masyarakat terhadap ROEPELIN, maka pengurusnya kerap kali berurusan dengan pihak polisi Belanda seperti berupa penggeledahan, penahanan dengan bermacam-macam tuduhan disertai todongan senjata api, berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan maskapai KPM yang merupakan milik Pemerintah Hindia Belanda.²⁸⁹

Berlainan dengan organisasi sebelumnya, Parindra melaksanakan prinsip kooperatif terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Karena prinsip itulah, maka wakil-wakilnya dapat duduk dalam dewan Provinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota. Akan tetapi, aparat pemerintah kemudian merasa cemas setelah melihat aktivitas Parindra yang cenderung melawan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda selalu menempatkan orang atau polisi PID di setiap rapat partai, baik rapat terbuka maupun rapat tertutup. Tidak jarang PID ini mencari-cari alasan atau perkara untuk membubarkan rapat Parindra, dan menawarkan bantuan berupa uang kepada pengurus Parindra agar mau memberikan laporan atau rahasia kepertaian.

Mara Aly, seorang anggota Parindra atau guru Sekolah Parindra di Kandangan, menceritakan:

*Pernah beberapa kali PID datang ke rumah saya membujuk dan menawarkan bantuan f.30 setiap bulan dan bisa naik menjadi f.75 setiap bulannya asalkan saya mau memberikan laporan-laporan kepertaian urusan dalam. Setiap kali tawaran itu, setiap kali pula saya tolak meskipun pada waktu itu gaji saya hanya f.5 sebulan menjadi guru sekolah swasta dengan tanggungan 1 orang isteri, 3 orang anak, 1 orang tua serta 1 orang saudara yang cacat.*²⁹⁰

289 Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm. 8-9.

290 Mara Aly, "Riwayat Perjuangan Mara Aly", naskah ketikan, Kandangan, 10 Januari 1987, hlm. 3.

**„PARTAI INDONESIA RAJA
(PARINDRA)**



Tanda (kwitantie) pembayaran „Uang pangkal” (entree) sebesar
(Dua setengah rupiah) serta „Tanda Anggota”

Tjabang Barabai

Stb. No. 318 **A**

Diberikan pada : H. Ali Baderun

Umur l. k. 30 tahun.

Djabatan Pengurus Besar

Berumah di Barabai, Kalimantan Selatan

Tanda tangan atau tjap djempol
pemegang ini tanda

Ain Pengurus Besar „PARINDRA”
 Penulis, Ketua,

19 30

Tanda pembayaran uang pangkal
dan tanda anggota dari Pengurus Besar Parindra
(Foto dok. keluarga Achmad Darmawie).

Seperti rapat Parindra tahun 1939. Rapat ini dibubarkan dan pembicaranya yakni H. Ali Baderun, Ketua Parindra cabang Barabai ditangkap. Oleh Landraad (pengadilan) Kandangan yang bersidang di Barabai, H. Ali Baderun dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, meski sudah berupaya mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak hanya itu, jabatan H. Ali Baderun dalam pemerintahan sipil dicabut dan sesudah itu ia diberhentikan sama sekali sebagai pegawai negeri sipil.²⁹¹

Belanda juga melihat bahwa aktivitas Merah Johansyah selaku Komisaris Pengurus Besar Parindra dalam mendirikan cabang-cabang Parindra di Kalimantan Selatan akan

²⁹¹ Catatan Artum Artha tentang “Permohonan Calon Perintis Kemerdekaan yang Ditolak”. H. Ali Baderun bersama H.M. Amir, H. Morhan, dan Abdul Hamidhan dari Amuntai pernah mengajukan permohonan untuk diakui sebagai Perintis Kemerdekaan, namun ditolak.

membahayakan kedudukan pemerintahannya. Oleh karena itu pada tahun 1937 pemerintah kolonial memaksa Merah Johansyah dan keluarga untuk pindah ke Surabaya. Akan tetapi, di Surabaya Merah Johansyah tetap aktif di Parindra, bahkan isterinya yakni Gusti Noorsehan Johansyah juga menjadi pengurus ranting Keputrian Parindra di Surabaya. Aktivitasnya di Surabaya itu berlangsung sampai 1939, saat mana ia diizinkan kembali pulang ke Banjarmasin oleh Pemerintah Hindia Belanda. Meski kondisi kesehatannya memburuk,²⁹² Merah Johansyah tetap beraktivitas di daerah ini sampai ia meninggal karena sakit di Kandangan pada tanggal 8 April 1942.²⁹³

Surya Wirawan merupakan organisasi kepemudaan terpenting yang dikelola Parindra. Melalui Surya Wirawan dibentuk kader-kader muda yang suatu saat akan menjadi *Parindrist* guna memajukan organisasi Parindra.

Dalam rangka menyambut Kongres Parindra ke-3 di Banjarmasin, maka Surya Wirawan turut mempersiapkan diri untuk terlibat dalam kongres tersebut dengan terlebih dahulu mengadakan Konferensi Surya Wirawan ke-3 se Kalimantan Selatan di Barabai tanggal 9 April 1939. Konferensi itu dipimpin langsung oleh Hadharyah M, Komisaris Pengurus Besar Parindra daerah Kalimantan Selatan dan Timur.

Konferensi berlangsung lancar meski mendapat pengawasan ketat dari PID. Pada saat Konferensi berlangsung, tersiar kabar bahwa Ki Hajar Dewantara, tokoh Pimpinan Umum Majelis Luhur Taman Siswa segera tiba di

292 Ketika kesehatan Merah Johansyah kian menurun dan sakitnya bertambah berat, maka oleh Pengurus Besar Parindra di Surabaya, ditunjuklah Hadharyah M sebagai Pejabat Komisaris Pengurus Besar Parindra Daerah Kalimantan Selatan dan Timur di samping kedudukannya sebagai Ketua Parindra cabang Banjarmasin.

293 Yustan Aziddin, "Data Tokoh dan Kegiatannya, Inventarisasi Tokoh Sejarah dan Sosial Budaya Daerah Kalimantan Selatan", Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1986/1987, hlm. 6.

Banjarmasin. Hadhariyah M yang saat itu ingin segera kembali ke Banjarmasin untuk menjemput Ki Hajar Dewantara, dihalangi dan dicegat PID di Kandangan.²⁹⁴

Sesuai agenda, Kongres Parindra ke-3 akan dilaksanakan pada tanggal tanggal 10-12 Mei 1940 bertempat di di Gedung Bioskop Eldorado, Pasar Lama Banjarmasin. Kongres ini dihadiri cabang-cabang Parindra di Kalimantan Selatan seperti dari Kandangan, Barabai, Amuntai, Kelua, Tanjung, Kuala Kapuas, Kotabaru, dan lain-lain. Sebelum puncak acara (kongres) dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan rapat umum yang dilaksanakan pada malam hari di gedung bioskop Eldorado. Selain dihadiri anggota Parindra, Surya Wirawan, rapat umum itu juga dihadiri oleh polisi PID, Wedana, dan Komisaris Polisi untuk Kalimantan, di samping banyaknya pengunjung sehingga penuh sesak sampai meluap ke luar gedung.

Pada saat rapat umum itulah berlangsung terjadilah kericuhan, karena utusan Parindra cabang Amuntai dengan beraninya mengibarkan bendera merah putih meski berdampingan dengan bendera Belanda pada saat arak-arakan. Begitupula A. Zakaria, salah seorang tokoh Parindra Banjarmasin, dengan bersemangat berbicara mengobarkan semangat kemerdekaan itu. Komisaris Polisi van Burer dari PID akhir bertindak tegas dengan membubarkan rapat tersebut.

Tentang peristiwa tersebut, Achmad Darmawie²⁹⁵ yang turut hadir dalam rapat umum di gedung Eldorado, menceritakan sebagai berikut:

Sebagaimana biasa rapat dibuka oleh ketua panitia sdr. A. Zakaria. Sesudah pembicara mengucapkan terima kasih dan sebagainya seperti biasa, maka di antara kalimat yang diucapkan oleh sdr. Zakaria itu, antara lain berbunyi: ".....bagaimana juapun air itu

294 Hadhariyah M, *op.cit.*, hlm. 8

295 Achmad Darmawie, *op.cit.*, hlm. 9.

dibendung suatu ketika bendungan itu akan hancur lebur.....". Stop, stop,stop!....tiba-tiba Komisaris Polisi van Burer berteriak sambil mengangkat tangannya dengan berdiri, sdr. Zakaria berhenti berpidato. Menurut kebiasaan oleh si pembicara seharusnya terlebih dahulu diserahkan rapat itu kepada yang akan meneruskannya, tapi dengan semangat berteriak: stop turun! Maka Zakaria turun dari podium. Dan atas perintah komisaris rapat dibubarkan dan semua hadirin supaya meninggalkan gedung Eldorado. Di sekeliling gedung telah diblokir oleh polisi dengan lengkap alat senjata senapan.....

Setelah kejadian itulah, maka Zakaria dan sekalian pengurus Parindra yang ada dalam kepanitiaan kongres ditahan polisi PID, ditanyai tentang apa maksud pembicara tersebut. Pihak Belanda menyatakan bahwa pembicaraan Ketua Panitia Kongres Parindra saat berpidato di podium dianggap telah melanggar peraturan *Wetboek van Strafrecht Nederlandsche Indie*.²⁹⁶ Oleh Pemerintah Hindia Belanda A. Zakaria dipersonanongratkan di Kalimantan Selatan dan akhirnya dipindahkan ke Malang.

296 Artum Artha, "Cita-cita..., hlm. 1-2.



Anggota Parindra dan pemuda Surya Wirawan berfoto bersama di depan Markas Parindra Cabang Barabai.

Tampak papan hitam bertulisan “Hari Peringatan Almarhoem R.A. Kartini, Barabai 23-4-’39”.

Paling kanan pakai jas hitam, M. Ramli Dagul.

(Foto dok. H. Abdul Muis).

Para utusan Parindra dari Kandangan juga mengalami nasib yang sama, karena setelah mereka pulang kembali di Kandangan mereka ditangkap oleh pemerintah kolonial dan dimasukkan ke penjara selama enam bulan, karena dituduh selama di Banjarmasin telah mengadakan rapat gelap di dalam kamar Hotel Simpang Banjarmasin.²⁹⁷

Adakalanya tekanan terhadap anggota Parindra justru datang dari seorang pribumi pejabat tinggi pemerintah.

297 Bijuri, “Ringkasan Riwayat Perjuangan Bijuri bin H. Saleh”, naskah ketikan, Kandangan, 9 Nopember 1980.

Memang, seringkali ada bangsa pribumi (Indonesia) yang *Ambtenaar Binnenlands Bestuur*²⁹⁸ lebih keras membenci tindakannya, apalagi jika dia Inspektur Polisi, Resersi Klas I/II atau dia punya pangkat/jabatan Komis Kepala (*Hoofd Commies*), betapa congkaknya, sungguh berani mengejek bangsanya sendiri. Seperti yang diceritakan oleh Artum Artha, seorang anggota Parindra, bahwa sekitar sekitar tahun 1932 dan tahun 1938, ia pernah mengalami dan merasakan cubit-ceraan:

"He, Tum. Kalau mau merdeka, bikin dulu benang katon. Pandai jahit dengan jarum. Pandaikah membuat jarum sebilah dalam setahun?". *"Nah, ayo, coba-coba merdeka"*.²⁹⁹

Sekitar tahun 1938, Artum Artha juga pernah mendapatkan cercaan dari seorang pejabat yang sangat dikenal di Kalimantan Selatan, yakni Merah Nadalsyah seorang Kiai Kepala (*Districthoofd*) Kandangan Kota.³⁰⁰ Kepada Artum, Kiai Kepala itu berkata:

"Heh, Tum. Kau serdadunya Parindra. Kapan Parindra merdeka, pabila (kapan, pen) ada pabrik jarum dan kain kaki drill. Sampai kiamat Belanda tidak menyuruh merdeka. Pikirkan: Lekas pulang: Laporkan kepada Guru-Guru politik".³⁰¹

Tindakan keras juga dikenakan terhadap tokoh Parindra cabang Kandangan, H. Ahmad Barmawi Thaib, lantaran sering menulis artikel yang bersifat politik melalui mingguan Pembangunan Semangat. Ia dituduh persdelict³⁰² dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Landraad Kandangan. Upaya Mr. Rusbandi, yakni Komisaris Daerah

298 Pemerintahan Dalam Negeri yang khusus diisi oleh orang-orang Bumiputera.

299 Artum Artha, "Cita-cita....", hlm. 14.

300 Meski Kiai Kepala itu pro Belanda, puteranya yakni Merah Johansyah justru seorang tokoh pergerakan karena menjabat sebagai Komisaris Pengurus Besar Parindra Daerah Kalimantan Selatan dan Timur.

301 Artum Artha, "Cita-cita....", hlm. 15.

302 Tulisan yang dianggap menentang atau menghasut terhadap pemerintah, hingga dapat dituntut hukuman di pengadilan.

Parindra Kalimantan Selatan yang sekaligus sebagai pembela tidak berhasil meyakinkan hakim kolonial, sehingga H. Ahmad Barmawi dikirim ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat.

Parindra cabang Amuntai juga mendapat cobaan hebat setelah para pimpinannya ditangkap dan dipenjarakan karena mereka membuat mosi menentang peraturan *Heeren Dienst* (erakan, rodi atau kerja paksa) atas penduduk lelaki berusia 45 tahun ke atas. Peristiwa itu bermula dari adanya rapat umum Rukun Tani dan Rukun Kampung, organisasi rakyat di bawah Parindra untuk menolak pengenaan pajak *Heeren Dienst* dan juga memperjuangkan agar peraturan yang sangat memberatkan rakyat itu dicabut keseluruhannya yang ditanggapi Belanda dengan melakukan penangkapan terhadap berpuluh-puluh anggota Parindra. Ketika itulah, Panitia Pertahanan Rakyat Amuntai yang dibentuk Parindra dipimpin oleh H. Amir dan Edwar Sandan melancarkan demonstrasi yang diikuti ribuan orang ke kantor Kontrolir menuntut pembebasan rekan mereka. Peristiwa yang terjadi tanggal 22 Juni 1939 itu dianggap Pemerintah Hindia Belanda sebagai usaha untuk memberontak.³⁰³

Karena peristiwa demonstrasi itulah, maka pimpinan Parindra seperti H. Amir, Edwar Sandan, H. Morhan, H. Seman, dan Abdulhamidhan diseret ke pengadilan dengan tangan dirantai. H. Morhan ditangkap di Surabaya kemudian dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, dan bersama Abdulhamidhan yang divonis 1 tahun dikerjapaksakan di Penjara Ampah (Kalimantan Tengah), sedangkan H. Amir dan Edwar Sandan³⁰⁴ masing-masing dikenakan penjara 2 tahun

303 Aam Niu, "Perjoangan Tempoe Doeloe, Kepala Sekolah Vervolgshool Merokok Dengan Kelaras", dalam *Banjarmasin Post*, 8 Desember 1978.

304 Edwar Sandan kelahiran Kalimantan Tengah, sehari-harinya ia kepala sekolah *Vervolgschool* satu-satunya yang ada di Amuntai dan Tabalong kala itu, merupakan tokoh pergerakan yang cukup disegani Belanda. Sebagian besar gajinya habis untuk kepentingan perjuangan, dan hanya sebagian kecil untuk keluarga. Karena itu tak mengherankan, kalau ia merokok

dan dikirim ke penjara Sukamiskin, Jawa Barat. Para tertuduh dalam persidangan dibela oleh Mr. Ishak, Mr. Rusbandi, dan Mr. Tajuddin Noor. Namun pembelaan itu, sia-sia belaka.

Nasib serupa juga dialami oleh Ketua Cabang Parindra Banjarmasin Hadharyah M,³⁰⁵ ia telah menjadi korban delik bicara dalam suatu rapat umum Parindra di Barabai dengan tuntutan melanggar pasal 151 bis dari *Wetboek van Strafrecht* Pemerintah Hindia Belanda. Judul pembicaraan Hadharyah adalah karena menghimbau “Burung Dalam Sangkar Mas” dan membahas bahwa belanja hidup seekor anjing yang ditangkap dan dikurung oleh polisi Belanda di Surabaya karena tanpa *penning* adalah sebesar f. 50 sehari yang kelak harus dibayar oleh sang punya anjing itu. Sedangkan belanja

dengan mempergunakan daun pisang kering (*kelaras/keraras*) buat menggulung tembakaunya, dan terkadang dengan pipa. Ketika mendengar Edwar Sandan akan dikirim ke penjara Sukamiskin, isterinya yang mengandung tua menyusul ke Banjarmasin menumpang kapal sungai. Setelah kembali ke rumahnya di Tangga Ulin, isterinya itu meninggal dunia setelah melahirkan anaknya. Karena penderitaan hidup yang tak tertahankan tanpa memiliki kedua orang tua, maka puteri sulungnya menderita sakit jiwa sehingga tidak dapat meneruskan merawat adik-adiknya yang masih kecil itu. Sementara itu, diberitakan pula Edwar Sandan meninggal dunia dalam masa menjalani hukumannya di Penjara Sukamiskin, Jawa Barat, lihat Aam Niu, “Kisah-kisah Perjuangan Heroik: Edwar Sandan Meninggal di Penjara Sukamiskin”, dalam *Dinamika Berita*, 24 November 1984.

- 305 Menurut Keputusan Rapat Parindra Banjarmasin pada tanggal 3-4 Januari 1940 Susunan Pengurus Parindra Cabang Banjarmasin adalah: Ketua Hadharyah M, Wakil Ketua Rz.M.A. Husein, Penulis I H. Achmad Darmawie, Penulis/Bendahara A. Kusumadiputra, Pembantu-pembantu Mr. Rusbandi, A. Zakaria, A. Murat, A. Makkawie, A. Burhan, Syachril, Bachrinoor, M.A. Alus, H.M. Zainuddin, H.M. Hanafiah, Arpi, M. Salman, dan Makmur Hasan, dengan alamat Sekretariat jalan Pasar Lama No. 100 Banjarmasin, lihat lampiran berita SOEARA PARINDRA dalam Achmad Darmawi, *op.cit.* ; Mohammad Nawawie Arif, *op.cit.*, hlm. 19.

hidup seorang rakyat Indonesia, cukup sebenggol atau 2,5 sen sehari. Bayangkan kata Hadhariyah M, betapa ambruk martabat hidup dan betapa miskinnya rakyat Indonesia di Hindia Belanda. Di tanah airnya sendiri. Karena ucapannya itu, maka ditangkaplah Hadhariyah M dan diganjar hukuman penjara selama 3 bulan dan membayar denda f. 100.³⁰⁶



Komite dan Subkomite Kongres Parindra ke-3 di Banjarmasin ketika rapatnya tanggal 4/5 Februari 1940. Duduk di kursi, searah jarum jam: Hadhariyah M Penulis II, Dokter R. Sosodoro Jatikusumo Wakil Ketua, Merah Johansyah Ketua, Sumarno Bendahara, Mr. Rusbandi Penulis I. (Soeara Parindra, Maret/November? 1940. Foto dok. Yurliani Johansyah)

306 Hadhariyah M, *op.cit.*, hlm. 9.

Selain itu, pada saat Hadhariyah M mau berangkat ke Surabaya untuk menghadiri Konferensi Besar Parindra di Surabaya, maka pada tanggal 17 Juni 1941 dalam kesibukan persiapan keberangkatan, ia ditangkap dan didakwa melanggar pasal-pasal 156, 157, dan 193 bis/ter *Wetboek van Straafrecht* (KUHP).

Pelanggaran itu terjadi, karena Hadhariyah M telah menulis sebuah roman politik yang berjudul *SUASANA KALIMANTAN* dan diterbitkan di Medan dengan judul "*Tersungkur Di Bawah Kaki Ibu*". Tulisan itu dianggap pemerintah bertendensi politik dan melakukan *persdelict* sehingga penulisnya bersama penanggung jawabnya, diajukan ke pengadilan Banjarmasin. Dalam sidang pengadilan (*Landraad*) pada bulan November 1941, hakim kolonial menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Hadhariyah M dan 1,5 tahun penjara kepada Matu Mona.³⁰⁷ Tepatnya pada tanggal 1 Februari 1942 Hadhariyah M menjalani

307 KUHP pada masa pemerintahan Kolonial Belanda memiliki beberapa pasal "karet" karena mempunyai konotasi arti dari perkataan-perkataan yang dipergunakan tidak mengandung makna pasti tetapi bersifat elastis sehingga dapat diterapkan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh penguasa guna mengatasi pelbagai kasus yang merugikan atau mengancam sistem kolonial. Pasal-pasal dimaksud diantaranya: Pasal 153 bis; Pasal 153 ter; Pasal 161 bis; dan Pasal 171 bis. Pasal 153 bis berbunyi: "Barang siapa dengan perkataan, tulisan atau gambar melahirkan pikirannya yang biarpun secara menyindir atau samar-samar, memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum Rp 300,00". Perkataan-perkataan yang bersifat karet, yaitu 'menyindir', 'samar-samar' dan 'mengganggu keamanan umum'. Pasal 153 bis sifat karetnya sama dengan isi pasal 153 ter yang berbunyi: "Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti dimaksud dalam pasal 153 bis dapat dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum Rp 300,00". Pasal 153 ter, seringkali khusus ditujukan pada para

kehidupan penjara, setelah upaya naik bandingnya ditolak oleh *Raad van Justitie* di Surabaya.³⁰⁸

Adapula semacam rintangan walaupun nampak kecil, akan tetapi sangat menghalangi dan merugikan kegiatan Parindra. Rintangan itu disebut orang Parindra dengan istilah “Spionase Konyol” yang dikenakan kepada Kepala Kampung atau salah seorang tokoh pemuka masyarakat yang dapat dipengaruhi pemerintah menjadi spion (mata-mata) untuk memata-matai gerak-gerik Parindra.

Spion yang tak tahu apa-apa, karena kadangkala orangnya buta huruf, sering mengintip rapat rapat atau kursus-kursus Parindra. Hal-hal yang didengar samar-samar, dilaporkan kepada tuannya. Seorang pembicara dalam rapat Parindra yang berucap, “perkumpulan kita bukan perkumpulan pemberontakan”, didengar oleh spion konyol dari balik dinding hanya kata “berontak” saja dan terus dilaporkan.

Atas dasar laporan itu, maka besoknya si pembicara sudah berhadapan dengan polisi atau Kepala Pemerintahan Setempat (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*) seperti Kiai atau Asisten Kiai. Peristiwa semacam itu, karena sering terjadi sangat mengganggu langkah-langkah Parindra untuk bergerak maju, karena adanya informasi yang sesat menyebabkan pemerintah telah menaruh curiga bahkan menghalangi kegiatan Parindra.³⁰⁹

penanggungjawab media massa (termasuk redaktur) yang tidak menyebutkan nama penulis atau samaran.

308 Berdasarkan informasi yang diterima Hadhariyah M dari seorang kerabatnya yang bekerja dalam *Geheime Dienst* Pemerintah Hindia Belanda, bahwa Penguasa Tinggi Pemerintah di Banjarmasin menilai Hadhariyah M sebagai seorang “*Hollander Hater*” (Pembenci Belanda) dalam tulisan politiknya, lihat Hadhariyah M, *ibid.*, hlm. 6 dan 10.

309 Lihat M. Idwar Saleh dkk., *op.cit.*, hlm.109-112.

K. Gerindo dan GAPI

Partai kebangsaan lainnya adalah Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Partai ini dibentuk oleh mantan anggota Partindo, seperti Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Sartono, dr. A.K. Gani, dan lain-lain pada bulan April 1937.³¹⁰ Tujuan Gerindo sama dengan Partindo, hanya saja taktik perjuangannya disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga Gerindo melepaskan asas *non-cooperatif* dan menjalankan asas kooperatif.

Di Kalimantan Selatan, Gerindo disponsori oleh H. Busri dan M. Nawawi yang pada tanggal 12 September 1937 berhasil membentuk Pengurus Persiapan Gerindo cabang Birayang dan Barabai. Panitia pengurus persiapan itu dibentuk pada tanggal 12 September 1937 dengan susunan sebagai berikut: H. Busri (Ketua); M. Nawawi (Sekretaris I); Sasra (Sekretaris II); M. Nawawi (Bendahara); H. Abdul Manap Uhuk (Pembantu Umum). Sedang bagian pemudanya antara lain Ismail Kaderi dan Syahrani.

Setelah melakukan persiapan dan pengiriman utusan yakni H. Busri ke Jakarta untuk meminta restu dan kesediaan dr. A.K. Gani³¹¹ datang ke Kalimantan Selatan, maka pada tahun 1938 dr. A.K. Gani datang ke Birayang untuk menghadiri pembentukan Gerindo Cabang Birayang. Dalam rapat terbuka untuk mensahkan Gerindo Cabang Birayang, dr. A.K. Gani menjelaskan anggaran dasar dan sikap Gerindo yang melaksanakan prinsip kooperatif dengan Pemerintah Hindia Belanda.³¹²

Seperti halnya organisasi lainnya, Gerindo berupaya menanamkan kesadaran berbangsa dengan menyelenggarakan pendidikan maupun pengajaran

310 L.M. Sitorus, *op.cit.*, hlm. 53.

311 Sebelumnya dr. A.K. Gani selaku salah seorang pengurus Gerindo Pusat pernah datang ke Banjarmasin, Barabai, Birayang, dan Paringin, untuk berkampanye dan meresmikan pembentukan Cabang Gerindo.

312 Lebih jauh lihat Soepardi, *op.cit.*, hlm. 21-23; Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hlm. 66 dan Depdikbud, *op.cit.*, hlm. 76-77.

sebagai kunci untuk mencapai kemerdekaan. Untuk kepentingan itulah, Gerindo mendirikan sekolah buta huruf dan Sekolah Gerindo, di samping Taman Bacaan dan Taman Pemuda.³¹³

Selaras dengan kecenderungan menguatnya rasa persatuan di kalangan pemuda pasca Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menuntut adanya kesatuan tenaga untuk mencapai cita-cita kebangsaan, maka telah terjadi kesepakatan tentang perlunya fusi kekuatan organisasi politik di seluruh Hindia Belanda. Untuk melaksanakan fusi itu, maka bergabunglah beberapa organisasi politik di Kalimantan Selatan seperti PNI Pendidikan, Gerindo, Parindra, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII),³¹⁴ Partai Islam Indonesia (PII),³¹⁵ Musyawaratutthalibin, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dan beberapa organisasi lainnya ke dalam Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia (GAPI).

GAPI sebagai penjelmaan gerakan kesatuan, didasarkan atas hak menentukan nasib sendiri, kesatuan nasional, demokrasi dan kesatuan aksi. Semboيannya adalah “Indonesia Berparlemen”, suatu tujuan yang menghendaki kerjasama erat antara Belanda dengan Indonesia.³¹⁶

Dengan adanya fusi kekuatan organisasi politik, maka terjadilah keanggotaan rangkap karena selain anggota GAPI,

313 Lihat Muderis Zaini dkk., *op.cit.*, hlm. 43.

314 Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) berdiri pada tahun 1930 sebagai nama baru dari Sarekat Islam Hindia Timur (1927) hasil dari perpecahan Partai Sarekat Islam, lihat L.M. Sitorus, *op.cit.*, hlm. 19.

315 Partai Islam Indonesia (PII) berasal dari Jawa dengan tokohnya antara lain Wali Al Fatah, R.M. Wiwoho Purbohadidjojo, Faried Ma'ruf, A.K. Muzakir, Mr. Kasmal, dan K.H. M. Mansyur berdiri pada tahun 1938, dan masuk ke Kalimantan Selatan pada tahun 1939. Di Kandangan, pembentukan cabang PII dipelopori oleh Zafry Zamzam dan kawan-kawan dan disahkan berdirinya oleh Pengurus Besar PII Wali Al Fatah yang langsung datang dari Jakarta.

316 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 90.

sebagian dari anggota Parindra, PSII, maupun PII pada umumnya juga menjadi anggota Musyawaratutthalibin, di samping anggota Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam pelaksanaannya, fusi kekuatan organisasi politik ke dalam GAPI bukannya tanpa persoalan, karena adanya anggota dari organisasi tertentu yang belum memahami pentingnya fusi dan menentang kerjasamanya dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Seperti yang terjadi pada PSII, perpecahan terjadi pada organisasi itu. Soal pokok yang menjadi pertentangan adalah sikap terhadap pemerintah kolonial dan masalah apakah PSII harus atau tidak harus bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Perbedaan pendapat itu diperhebat oleh rasa dendam pribadi dalam kepemimpinan dan perebutan untuk menguasai PSII sesudah H. Oemar Said Cokroaminoto meninggal dunia pada 1934.

Meski di organisasi induk PSII terjadi perpecahan, di di Kalimantan Selatan, pengurus PSII berupaya memberi penerangan-penerangan kepada anggotanya tentang pentingnya fusi itu sebagai salah satu jalan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Pada bulan Desember 1939, GAPI Hulu Sungai yang berpusat di Kandangan mengadakan rapat umum terbuka, bertempat di gedung Musyawaratutthalibin.

Panitia rapat umum GAPI menyampaikan acara: "GAPI Menuntut Indonesia Berparlemen". Di papan tulis yang didirikan di muka pintu gerbang berhias bunga padi dan pancar sinar matahari ditulis dengan huruf besar: "MOMENT ACTIE GAPI MENUNTUT INDONESIA BERPARLEMEN".



Markas Sekretariat Indonesia Berparlemen di Kotabaru, Pulau Laut. Tampak Bendera Belanda Merah Putih Biru dan foto Ratu Belanda. Duduk di tengah pakai tongkat adalah H. Muhammad Zaini, Ketua PSII di Kotabaru.
(Foto dok. keluarga Achmad Darmawie).

Rapat umum terbuka yang dihadiri oleh Asisten Residen, Kontrolir, Kiai Kepala, Kepala PID Banjarmasin (M. Mansyur) dan beberapa orang pembantunya, serta diawasi ketat oleh polisi itu, menghadirkan beberapa pembicara, yakni pembicara pertama, A.B. Thaiyib dengan judul: *"Sekitar Openduur Politik GAPI Menuntut Indonesia Berparlemen, bukan Militie Dienst"*. Pembicara kedua, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) sebagai utusan GAPI

Jakarta: *"Umat Islam di Tengah-tengah Politik Pemerintah Hindia Belanda"*.³¹⁷

Sebagaimana lazimnya sebuah rapat umum terbuka, di sana juga terjadi silang pendapat. Meski demikian, beragam pendapat dan organisasi dalam GAPI, tidaklah menjadi penghalang untuk bermufakat, karena setiap anggota lebih mengutamakan kepentingan bersama. Tidak hanya itu, para anggota partai yang tergabung dalam GAPI juga saling menunjang dan mampu menghadapi permasalahan bersama untuk diselaraskan dengan strategi perjuangannya, yakni menuntut Indonesia Berparlemen, mencapai Indonesia Mulia, Indonesia Merdeka.

317 Artum Artha, "Cita-cita ...", hlm. 45.

Bab V

Penutup

Pemerintah Hindia Belanda dengan segala kebijakannya di Kalimantan Selatan, telah menimbulkan perubahan yang signifikan di segala bidang. Pengaruh dari kebijakan itu, baik yang bersifat positif maupun negatif, semuanya berperan dalam pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, di antara faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang menjadi sebab utama tumbuhnya kesadaran kebangsaan Indonesia di Kalimantan Selatan, dan juga umumnya di daerah-daerah lainnya di Indonesia saat itu, adalah berasal dari situasi dan kondisi masyarakat sendiri sebagai dampak dari penjajahan.

Kondisi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan pada masa penjajahan umumnya memprihatinkan sebagai akibat penindasan dan perlakuan yang diskriminatif dari Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana tercermin dari adanya kebijakan yang menempatkan golongan pribumi dalam status terendah dalam kewarganegaraan Hindia Belanda. Karena status itulah maka pemerintah maupun golongan kewarganegaraan yang ada di atas golongan pribumi yakni golongan Eropa dan Timur Asing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dan “istimewa” sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menindas golongan pribumi.

Selain itu, untuk kepentingannya di bidang perekonomian dan perdagangan, Belanda menciptakan pemerintahan modern dengan segala perangkatnya, serta membuka diri terhadap masuknya modal swasta. Sejak itulah muncul sistem ekonomi modern yang pada satu sisi rakyat mengenal mata uang sebagai alat pembayaran,

namun di sisi lain menjadikan beban rakyat menjadi bertambah berat, karena melalui sistem itu justru memudahkan pengurusan ekonomi, seperti pemungutan pajak yang berlapis-lapis kepada masyarakat pribumi.

Sistem penyewaan tanah dan praktik kerja paksa (*rodi*) atau *erakan* juga memperberat kehidupan masyarakat di pedesaan. Kehidupan semakin merosot sehingga terjadi kemiskinan. Praktik pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial melalui perantara pamongpraja bumiputera dalam pemungutan pajak, *erakan*, dan penyelewengan lainnya, telah menjadikan rakyat merasa terhina sebagai bangsa jajahan, dan hal itu turut mendorong tumbuhnya kesadaran akan rasa harga diri masyarakat pribumi untuk bebas dari penjajahan.

Penetrasi kebudayaan Barat yang sangat kuat pengaruhnya terhadap tumbuhnya pergerakan kebangsaan di daerah ini adalah penetrasi di bidang pendidikan berupa pengajaran secara Barat. Akan tetapi pengajaran secara Barat itu juga menimbulkan dorongan kepada kalangan bumiputera untuk mendirikan sekolah swasta (*partikelir*) dalam berbagai bentuk. Sekolah-sekolah itu umumnya dikelola oleh kaum pergerakan baik yang bercorak sekuler maupun keagamaan yang berorientasi kepada kebangsaan.

Sekolah pemerintah maupun sekolah partikelir milik bumiputera umumnya melahirkan kaum cendekiawan, baik yang dikategorikan sebagai “elite tradisional yakni cendekiawan yang berasal dari keturunan pegawai pemerintah atau keturunan bangsawan, maupun yang dikategorikan sebagai “elite nasional” (elite sekuler maupun elite religius) yakni para lulusan sekolah partikelir atau sekolah agama yang berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsanya.

Para elite nasional itulah yang karena keluasan wawasan, pengalaman, dan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa, berjuang menuntut perbaikan-perbaikan. Mereka berpendapat bahwa perjuangan akan lebih efisien jika menurut contoh-contoh Barat. Mereka tidak lagi mengadakan perlawanan bersenjata seperti yang pernah

dilakukan oleh penguasa tradisional pada masa atau abad sebelumnya, melainkan berjuang melalui organisasi pergerakan.

Lancarnya hubungan kapal laut antara Banjarmasin dengan kota-kota di pantai utara Pulau Jawa, berdampak kepada lancarnya hubungan komunikasi dan informasi antara penduduk Kalimantan Selatan dengan Jawa. Berkat adanya pengalaman, pengetahuan dan hubungan dengan dunia luar dan melihat kemajuan pergerakan di daerah lain, baik secara langsung maupun melalui pemberitaan pers, maka para pedagang yang kembali ke kampung halaman turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Adakalanya pula mereka membawa paham pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa dan mendirikan cabang organisasi di Kalimantan Selatan.

Para pedagang juga sangat berperan dalam menyebarkan kegiatan tokoh-tokoh pergerakan, sehingga organisasi yang sebelumnya hanya ada di Banjarmasin, dengan cepat berkembang ke daerah lainnya. Mereka adalah pedagang yang karena tuntutan profesinya, sudah tentu acapkali milir mudik pulang pergi Banjar-Hulu Sungai.

Tokoh-tokoh pergerakan yang berasal dari Jawa dan Sumatera, dan bahkan dari Maluku dan Nusa Tenggara turut mempengaruhi pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Pada umumnya tokoh pergerakan dari luar Kalimantan Selatan itu bekerja sebagai guru yang mengajar ilmu pengetahuan umum di sekolah-sekolah dan kemudian bergabung dengan para pelopor pergerakan rakyat di daerah ini

Mereka berjuang memajukan kaum bumiputera melalui jalur pendidikan dan pengajaran, seperti mendirikan sekolah dan taman bacaan. Para lulusan sekolah kaum pergerakan itu selain mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih maju dibanding dengan masyarakat awam, juga lebih memiliki kesadaran akan rasa kebangsaan.

Melalui organisasi yang teratur ---minimal mempunyai susunan pengurus dan memiliki anggota--- mereka berjuang dalam berbagai cara atau bentuk dengan intensitas yang beragam pula; baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keagamaan, bersifat *cooperatif* maupun *non-cooperatif* dengan Pemerintah Hindia Belanda. Pendek kata, sebuah organisasi yang bersifat dan berlingkup lokal sekalipun, misalnya berupa kursus, jika dimaksudkan untuk memberantas buta huruf atau bermaksud untuk mengangkat derajat bumiputera maka bisa saja aktivitasnya itu digolongkan sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan.

Organisasi Seri Budiman (1901) dapat dikatakan sebagai organisasi lokal tertua dan berbeda dengan organisasi sebelumnya yang bersifat *sinoman*. Meski pada mulanya bersifat lokal dan menonjolkan watak sosial, Seri Budiman merupakan *embrio* terhadap tumbuhnya organisasi dan kebiasaan yang bersifat modern yang berkembang di kemudian hari.

Pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh kebangkitan Islam dalam segala manifestasinya. Dapat dikatakan Islam dan nasionalisme di Kalimantan Selatan merupakan satu kesatuan erat yang saling mengisi. Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan nasional di daerah ini, oleh karena itu berbagai aliran atau organisasi-organisasi yang bernafaskan Islam dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang karena banyaknya pengikut atau anggotanya.

Besarnya pengaruh agama Islam pada awal pergerakan membuktikan bahwa elite agama merupakan salah satu pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan pada dekade pertama abad ke-20 pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan dimulai dengan nasionalisme Islam. Pada mulanya corak keislaman terlihat pada kegiatan *sinoman-sinoman* yang bernafaskan Islam, namun pada perkembangan selanjutnya tercermin pada organisasi yang mengarah kepada kebangsaan seperti

Sarekat Islam, Barisan Indonesia (Bindo), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Musyawaratutthalibin.

Meski demikian, beberapa organisasi-organisasi yang berwatak kebangsaan yang umumnya berasal dan/atau cabang dari induknya di Jawa seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru/PNI Pendidikan), Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Perguruan Taman Siswa juga mendapat simpati dari masyarakat Kalimantan Selatan. Bahkan diantaranya ada yang mempunyai basis massa pendukung yang sangat banyak seperti Parindra sehingga sangat menonjol perjuangannya di Kalimantan Selatan

Di samping itu, peranan organisasi-organisasi lokal atau yang bukan merupakan cabang dari organisasi yang berpusat di Jawa, seperti Sarekat Kalimantan, Barisan Indonesia, Partai Ekonomi Kalimantan, dan Musyawaratutthalibin juga turut mewarnai pergerakan kebangsaan di daerah ini. Bahkan Barisan Indonesia (Bindo) dan Musyawaratutthalibin menempati keistimewaan tersendiri dalam panggung sejarah pergerakan di Kalimantan Selatan. Bindo merupakan organisasi lokal yang pertama berasaskan kebangsaan, non-kooperatif, dan berani mengangkat simbol Merah Putih sebagai bendera kebangsaan. Sedangkan Musyawaratutthalibin, merupakan organisasi Islam lokal terbesar di Kalimantan Selatan, karena selain mempunyai beberapa cabang di Kalimantan, juga melebar ke luar pulau Kalimantan, terutama di daerah komunitas Banjar perantauan seperti Sapat, Tembilahan dan daerah lain di pesisir timur Sumatera.

Kaum perempuan di Kalimantan Selatan juga turut aktif dalam organisasi pergerakan, akan tetapi organisasi mereka pada umumnya merupakan bagian atau berinduk pada organisasi lain yang mana suami mereka menjadi menjadi aktivis di organisasi itu. Tercatat diantaranya yang tertua adalah Perserikatan Dunia Isteri dipimpin oleh Ny. Masiah (Sarekat Islam), Jam'iyatun Nisa (Musyawaratut-thalibin),

Aisiyyah (Muhammadiyah), Rukun Keputrian Parindra, dan lain-lain.

Dapat dikatakan, organisasi pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan mempunyai karakteristik yang beragam seperti berupa perkumpulan, partai, maupun sekolah pergerakan dengan watak Islam sebagai pendorong utama di awal-awal pertumbuhannya dan seterusnya berkembang ke arah kebangsaan. Dilihat dari asal kelahirannya, maka terdapat organisasi pergerakan yang pembentukannya bermula di Kalimantan Selatan dan ada yang merupakan cabang dari induknya di Pulau Jawa.

Jika dilihat dari lingkup perjuangannya, terdapat organisasi-organisasi yang bergerak dalam lingkup lokal, regional (Kalimantan), maupun lingkup nasional. Sedangkan jika dilihat dari tujuan dan asasnya, terdapat organisasi yang bergerak bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan, serta organisasi pergerakan yang bergerak di bidang politik atau kebangsaan.

Daftar Sumber

A. Buku dan Majalah

Agung, Anak Agung Gde Putra. 2001. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Almanak Indonesia 1950. Bandung: Pustaka Djaja.

Amanwinata, Rukmana dkk. 1985. *Kamus Istilah Tata Negara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.

Antemas, Anggraini. 1971. *Orang-orang Terkemuka Dalam Sejarah Kalimantan*. Banjarmasin: B.P. Anggraini Features-Percetakan Karya.

Antemas, Anggraini. 1988. *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan*. Amuntai: Mega Sapura.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1998. *Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1940*. Jakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1996. *Inventaris Arsip Borneo*. Jakarta.

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta.
- Artha, Artum. 1975. *Album Pembangunan Kalimantan*. Banjarmasin: Yayasan Pendidikan Seni Budiman.
- Basuni, Ahmad. 1950. "Mengenal Perdjuaan Ummat Islam di Kalimantan, Menuju Kesatuan Tenaga Islam di Dalam RIS", dalam *Almanak Indonesia 1950*. Bandung: Pustaka Djaja.
- Blasse, Cyril. 1999. *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. 1953. *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Banjarmasin: Fadjar.
- Dekker, I. Nyoman. 1971. *Sejarah Indonesia Baru 1900-1945 (Pergerakan Nasional)*. Malang: Lembaga Penerbit IKIP Malang.
- Depdikbud. 1977/1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 1977. *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digul*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Data Perintis Kemerdekaan Seluruh Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Keuangan.

- Dirman. 1958. *Perundang-Undangan Agraria Di Seluruh Indonesia*. Djakarta: J.B. Wolter.
- Gafuri, Ahmad. 1984. *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949*. Kandangan: Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Ganie, Tajuddin Noor. 1995. *Sejarah Lokal Kesusastraan Indonesia di Kalimantan Selatan 1930-1995*. Banjarmasin: Pusat Pengkajian Masalah Sastra Kalimantan Selatan.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hardjosatoto, Suhartoyo. 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Suatu Analisa Ilmiah*. Yogyakarta: Liberty.
- Ichtiar Baru-Van Hoeve. 1983. *Ensiklopedi Indonesia*. 4 Kom-Ozo. Jakarta.
- Iskandar, Mohammad dkk. 2000. *Peranan Elite Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Depdiknas.
- Kansil, C.S.T. dan Julianto. 1984. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Karim, Abdullah dkk. 2004. *Empat Ulama Pembina IAIN Antasari*. Banjarmasin: Pusat Pengkajian Islam Kalimantan IAIN Antasari.
- Kartodirdjo, Sartono dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat, ed. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lindblad, J. Thomas. 1988. *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*. Leiden: Foris Publications, KITLV.
- Makmur, Ahdi dkk. 2006. *Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari.
- Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Nawawi, Ramli dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.
- Nawawi, Ramli ed. 1992. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Pemda Tk.I Kalsel. 1990. *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*. Banjarmasin.

- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespoprodjo, W. 1984. *Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926 Terbentuknya Suatu Pola*. Bandung: CV. Dewadja Karya.
- Razak, Nasrudin. 1977. *Dienul Islam*. Bandung: PT. Al Maarif.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 1986. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Paham Dalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Saleh, M. Idwar. 1981/1982. *Banjarmasih*. Banjarbaru: Museum Negeri Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan.
- Saleh, M. Idwar dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Saleh, M. Idwar dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselaran dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sitorus, L.M. 1951. *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakjat N.V.
- Sjarifuddin, dkk. 1989-1990. *Pola Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Inventarisasi

dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Depdikbud, Banjarmasin.

Soeratman, Darsiti. 1985. *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sophian, Manai. "Nasionalisme dan Sumpah Pemuda", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surjomihardjo, Abdurrahman. "Sumpah Pemuda Di dalam Perkembangan Budaya Politik Indonesia 1900-1945", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Surjomihardjo, Abdurrahman. "Taman Siswa dan 'Wilde Schoolen'", dalam Colin Wild dan Peter Carey (penyunting). 1986. *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: BBC London Seksi Indonesia dan PT. Gramedia.

Sunario. "Arti Sumpah Pemuda, Nasional dan Internasional", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Teeuw, A. 1980. *Sastra Baru Indonesia*. Ende-Flores: Nusa Indah.

Usman, A. Gazali. 1995. *Sejarah Perjuangan Rakyat Tapin Periode Revolusi Fisik 1945-1949*. Rantau: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin.

Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Zaini, Muderis dkk. 1988. *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai Tengah*. Barabai: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 DHC Angkatan 45 Tingkat II HST.

B. Skripsi dan Laporan Penelitian

Aziddin, Yustan. 1986/1987. "Data Tokoh dan Kegiatannya, Inventarisasi Tokoh Sejarah dan Sosial Budaya Daerah Kalimantan Selatan". Banjarmasin: Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan.

Koroh, Alex A. dkk. 1994. "Mengenal Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912–1942". Banjarmasin: Laporan Penelitian FKIP Unlam.

Koroh, Alex A. 1988. "Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Kalimantan Selatan (1901 – 1956): Tinjauan Aspek Struktural Serta Semangat Yang Dibawakannya". Banjarmasin: Laporan Penelitian FKIP Unlam.

Maksum, M. Nur dkk. 1991. "Musyawaratutthalibin: Organisasi Islam Lokal Terbesar di Kalimantan Selatan Pada Masa Kebangkitan Nasional". Banjarmasin: Balai Penelitian IAIN Antasari.

Maksum, M. Nur. 1998. "Gerakan Islam Modern di Kalimantan Selatan (1900-1942)". Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari.

Ruslan, Syarkawi. 1975. "Perkembangan Reformasi Islam di Kalimantan Selatan Serta Pengaruhnya Dalam

Lapangan Agama, Sosial dan Pendidikan Dari Tahun 1914 Sampai 1942". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

Sjamsuddin. 1970. "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

Sjarifuddin. 1974. "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

Soepardi. 1972. "Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perjuangan Dari: Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, di Kalimantan Selatan". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

Syahrhan, H.M. 1972. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1914-1942)". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

Yusran, Mohammad. 1972. "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

C. Memoar, Surat Kabar, dan Manuskrip lainnya

Alibasah. 1981. "Riwayat Perjuangan H. Alibasah". Martapura: naskah ketikan.

Aly, Mara. 1987. "Riwayat Perjuangan Mara Aly". Kandangan: naskah ketikan.

- Arief, Mohammad Nawawie. 1981. "Sepak Terjang Haji Mohammad Nawawie Arief Dalam Perjuangan". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Artha, Artum. 1997. "Perjuangan Bangsa Indonesia Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Artha, Artum. 1984. "Cita-Cita Mencapai Indonesia Mulia Merdeka dan Berdaulat". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Artha, Artum. 1995. "Mencapai Usia Lanjut 75 Tahun". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Badrun, Mohammad Ali. tt. "Riwayat Singkat Perjuangan Mohammad Ali Badrun bin Usman". tt: naskah ketikan.
- Badrun, Mohammad Ali. 1985. "Riwayat Perjuangan Singkat Muhammad Ali Badrun bin Usman". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Bijuri. 1980. "Ringkasan Riwayat Perjuangan Bijuri bin H. Saleh". Kandangan: naskah ketikan.
- Busri. tt. "Riwayat Perjuangan H. Busri bin H. Abdul Hamid". tt: naskah ketikan.
- Darmawie, Achmad. 1981. "Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Duraup, Aban. 1983. "Riwayat Singkat Perjuangan Aban Duraup Dalam Rangka Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan". Ulin-Banjarbaru: naskah ketikan.

- Hadhariyah M. 1981. "Periode-periode Perjuangan di Indonesia yang Saya Alami". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Hamidhan. 1981. "Riwayat Hidup/Riwayat Perjuangan Hamidhan-Juhri". Haruai: naskah ketikan.
- Ideham, M. Suriansyah. tt. "Sistem Pendidikan di Zaman Hindia Belanda". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Latjung, Andi. 1981. "Riwayat Ringkas Perjuangan Andi Latjung". Kandangan: naskah ketikan.
- Ma'loemat National Borneo Conferentie, Bandjermasin, 17 Februari, 1924.
- Niu, Aam. "Balangan, Perlu Sentuhan Pembangunan, Pemerintah Belanda Gempar", dalam *Harmonis* No. 408/1989.
- Niu, Aam. "Perjoangan Tempoe Doeloe: Sopir Taksi Diinstruksikan Pakai Piyama", dalam *Banjarmasin Post*, 7 Desember 1978.
- Niu, Aam. "Perjoangan Tempoe Doeloe, Kepala Sekolah Vervolgschool Merokok Dengan Kelaras", dalam *Banjarmasin Post*, 8 Desember 1978.
- Niu, Aam. "Kisah-kisah Perjuangan Heroik, Edwar Sandan Meninggal di Penjara Sukamiskin", dalam *Dinamika Berita*, 24 November 1984.
- Niu, Aam. "Kata Merdeka 51 Tahun lalu di Paringin", dalam *Gawi Manuntung*, Minggu kedua Juni 1989.
- "Perasaan Bandjar Totok", dalam majalah *Malam Djoema'at*, 24 November 1927, dimuat kembali dalam surat kabar *Indonesia Merdeka*, Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28

April 1951, dengan judul “Pers di Kalimantan” oleh Amir Hasan Bondan.

Soeara Parindra, Edisi Maret/November (?) 1940.

Harian Indonesia Merdeka, Senin 30 April 1951.

Surat menyurat antara OS Cokroaminoto selaku Voorzitter C.S.I dan PSI di Surabaya dengan Mohammad Horman, Presiden Perhimpunan Sarekat Islam di Banjarmasin; Motie Congres Sarekat Islam, National Borneo Conferentie-Ma’loemat (fotokopi naskah asli dan salinan), dan lain-lain.

Lampiran 1

MOTIE CONGRES.

Keberatan2 dan permohonan raijat pendodook Borneo Selatan dan Timoor, dengan perantaraan Congres S.I. di Bandjermasin tl. 14/15 tanggal 15 dan 15/16 April 1923 telah menerima brik dan mengambil keputusan serta memilih Rouman Baboe President Persatuan Bajak, diototok mengadakan Audentie oantok menjampirkan segala keberatan2 dan permohonan raijat Borneo seperti berikut :

GEMEENTE RAAD.

1. Moehon Gemeente Raad Bandjermasin ditindakkan, terhadap set teodjoenja fihek goeloengen pendodook Kota Bandjermasin dari bangsa Eropa, Tionghoa, Arab dan Boemipoetara sendiri.
2. Moehon dike Gemeente Raad ta' dapat ditindakkan, moehon soepja pangsamtan ongkost diperhatikn soenggoeh2.
3. Moehon soepja pemoengootan jang tidak lajak, dihapooskan dan lain2 poengootan disoosootkan oemamnja : 10% opzootan soedng Gouvernament memoengoot 30% dari padjak inkomsten. Poengootan diloonr pandjooran diloonr orf Passor dan lain2, jang tidak lajak, poengootan wang pompa pada km - pong2 jang diroeh pompa ta' dapat menjampirkan koewdjibannja apabiln perloo minta dihapooskan.
4. Poengootan oerang panning soeda, permajie mandiri roemah, godang, toko ans. padjak harta benda dalam roemah, wang poengootan Passor dan ll. moehon disoosootkan.
5. Moehon soepja tidak perbedann perbrikn djalan dan djon batin diantar Knapong Eropa dan anak Boeni, seperti sok rang boerapa djalan dan jang roemah di Knapong Boemipoetara beloon diperbrikn dan soedih lain ditinggaln roemah bogi too, berbahaja bagi perdjalanann orang dan anak2 jang pergi kosokolah.
6. Moehon soepja diindakkan Raad Commissie. Smantara, oon - toek menantookan berapa % katantoon poengootan, dan jang lajak dihapooskan, terdiri dari soerang entoe lid pada fihek goeloengen bangsa jang berpendodook di Bandjermasin di kapalai oleh Voorzitter Gemeente .Lid Raad Commissie itoe hndaknja dipilih oleh masing2 bangsanja sendiri.
7. Moehon soepja anak negari dapat koloonann memilih sendiri Lid Gemeente Raad jang terdiri dari bangsanja, tertim - bang kobanjkan pendodook dan bangsa dengan kobanjkan lid ni Gemeente.
8. Moehon soepja Voorzitter Gemeente, soerapa boleh terpi - lih dari fihek Durger, sehingga karcn itoe pangwassen an da difihak pamerintah.
9. Moehon Opamban Vagadesing loewar bijan dari Gemeente, pan doodook diocandangkan dan dengan tempo jang lampoo, serta Vsigandering di oemacnkan markai bahasa Melajoe.

RAAD DESA.

Keberatan dari Adeling Oeloe Soengai dari Undarndooling : Kundangn, Rantau, Tamajoeng, tentang poengootan Raad Desa, dike tnk dapat dihapooskan, moehon soepja dihapooskan ateor an jaitoe :

1. Poengootan f.1.- (satoe roepijah) timp2 natjan koranjan posta kawin, karcn permajie posta kawin soedih dipoengod djoega f.0,50 ; dari wang panghoeloe (Nikah) f.2,65 (doon-roepijah anna poeloch lima sent) djoega dibajar.
2. Poengootan nambak at. pasing mortjon f.0,25, waktoc bera nnt, karcn berrnntk dibajar djoega f.0,25.
3. Poengootan nambantai oewann f.1.- karcn fihek Gouvernament soedih memoengoot djoega dari f.3.- nak f.6.-

4. poengootan

4. Poengootan membongkar dan memperbaiki rumah karena permis-
sio sendiri, rumah sudah dibayar djoeng terdahulu.
5. Poengootan pekerjaan kamatin karena orang report anti
sudah dibayar djoeng.
6. Poengootan pekerjaan Macloed Nabi s.n.w. karena mau -
Agram Islam.
7. Poengootan 1% dari djoewal-beli rumah, sawah, atau kebun.
8. Poengootan 1% dari djoemlah modal pendirian rumah, tjokoop
dengan pembayarannya permisio sendiri dari rumah itoo.

PADJAK PENTJAHARIAN (INKOMSTEN BELASTING).

Onderafdeeling Koewala Kapoens, Afdeeling Bandjermasin Afdeol -
ling Doesoanledan Boentok dan moera Pawa :

1. Mengharap toeroemnja taksiwa padjak pentjaharian tahun :
1923 terhadap kasoesahan pentjaharian hidoep ra'jat.
2. Mengharap hapoesan atau knontongan 30% opachtan, bertam-
bah kabratan poola 10% opachtan Gemoento Raad, fihak knom
randah (knom koeli) jang amat sangat menderita kabratan pa
djoeknja.
3. Memohon waktoe analog dindatkan tiap2 krampong Lid Commissio
analog jang terpilih oleh orang krampong sendiri, tatoeha
(Pangatoeha) dikrampong jang tahoe kondan hidoep didalam -
krampong, meskipun di Onderafdeeling Koewala Kapoens sudah
dindatkan dengan ketetapan besluit pemerintah Karesidanan
Lid Commissio tiap District, tetapi ketika dilakoeakan an -
alogrtoe voorzitter Commissio analog tidak andahkan itoe,
hingga Commissio tidak toeroet hadir dan District Krahjan,
sekadar kepala District sahaja jang melakoeakan analog son
diri dengan kepala krampong.
4. Lapisan taksiwa padjak itoe, sebahagian besar sudah ber -
sosesoon2 dipoengoot, oempannja Gemoento Raad di Bandjermasin
Desa Raad dibahagian Afdeeling Oeloe Soengni, dan poe -
ngootan Negeri Kas di Pasar2.

BEA INVOERRECHTEN :

5. Afdeeling Koewala Kapoens moohon bea Invoerrechtan 8% dari
transan roten Anak Negeri dibebaskan, saroepa dengan transan
Rubber. Karena transan roten ini sudah kena padjak pan-
dapatn.

SLACHTBELASTING :

6. Afdeeling Koewala Kapoens dnern Transh Dajak, moohon koeow
watan Stantblad tunggal tentang kobebasan Slachtbelasting,
dan moohon soepnja wang slachtbelasting jang beberapa bee -
lan baxialoe dipoengoot tidak dengan sjah itoe dikembalikan.
7. Afdeeling Oeloe Soengni moohon bea pembatalan lemboe dan kag
ban tetap sebahaji bijasa f.3,- seekor bertambah kabratan,
Raad Desa moengoot djoeng f.1,- (satoe roepiah).

PEMAKAI PLAKZEGEL (POSS-ZEGEL).

8. Pembatalnkan Anak Negeri Afdeeling Oeloe Soengni marnan ka
bratan tentang pandjoewalan getah Rubber marnan di Bandjer-
masin, mesti memakai plakzegel f.1,- tiap f.1000,- bertam-
bah kabratan ini waktoe djoewal beli di Pasar2. Afdeeling
Oeloe Soengni sudah dipoengoot djoeng dan bermula poe -
ngootan diambil oantook padjak pentjaharian, mandjadi ber -
sosesoon2 3 kali poengootan dalam satoe matjra hasil itoe.

KABRATAN POENGOOTAN LAUDERITE.

1. Afdeeling Oeloe Soengni moohon indang jang berhasil sdja 4
dipoengoot pooloehannya dan jang roean binnas moohon dibeb-
askan d/p padjak pooloehannya lauderite.

2. Moohon soepnja....

2. Mochon soepnja ditetapken poengooten 6% soeperti bijnen dne hoeloo.
3. Solnin dari jang terseboot Onderafdeeling Renten tambah kg braten dari perboewoten toekang taksier, pendapten 300 gantung ditaksier lebih sahingga 500 - 700 gantung; ditaksier tidak berhadapan dengan jang poenje lading dan Bon dan taksieran tidak diernihken.

POENGOOTAN WANG JANG TIDAK KETAHORAN MASOJK DEMAHAT
DAN POENGOOTAN JANG SEKINANGA TIDAK SUK :

1. Kndangn Afdeeling Oeloe Soengni, Kapaln District poengoot 2% dari wang contant jang dibawa pergi haji, tidak diknai kwitantio, poengooten itoo, djoega tidak dikasih 2% ini solnin dari pdjnk pontjnharian jang mesti dibayar djoega pn dn pembakri, Afdeeling Oeloe Soengni bariboo orang dan bo-boropa rntoes riboo wang timp2 tahoon boewat pergi haji.
2. Kapaln Pamarintah Afdeeling Doosoonledon, Onderafdeeling Po-rook Tjnhoo, baru2 ini mengndaken poengooten tjookni 10% dari sogala djonis matjen peroesanhan hoeten mitalnja matjen2 gotah, matjen2 dmar, mamboeroo binatang, monoeni le-bnh, poengooten kajo hoeten, timp2 soepoker f.0,25, kajo f.0,03.
3. Lnin dari itoo toewen Oezaghebbor di Boentok, memberi ta-hoo bahwa nanti pada tanggal 15 Juni 1923 akan di djalmken rampasan hak orang jang ada mamponjai tanah (tetapan oo-tan) ditamah rentjnh oontok poroesanhan ikni, dilalang di moek orang banjak, maka pendapten lntail lalang itoo 50% dirnapn dn 50% kmbali pada jang mamponjai hak.

WANG NEGERI KAS .

Kabrnten pondoddoek Onderafdeeling Renten tentang hal goroo - bng serta sapi panarik :

1. Solnin dari gorobag dn sapi panarik diknaken pdjnk inkometanbelasting moenti membajer lagi.
 2. Timp tahoon wang Lotter f.0,30.
 3. Sabn minggu masoek pnsor f.0,25.
 4. Barang djoewaln moenten gorobag 1%.
- Onderafdeeling Koewaln Kpoons moehon soepnja dindaken led on Onderafdeeling Koewaln Kpoons dari Doempootora jang terpilih oleh rajnt, toeroet bormoesjnwant hal Begrooten Negeri Kas.

HEERENDIENST :

Bersatoedjoe dengan Ordonentio Heerendienst, soerapa jang ko perloenn pamtai eraken dalam tahoon2 itoo maka haroesaln di-tomtoot pada kowndjibn rajnt.

Pemoeohon Afdeeling Bandiermanin, toboean eraken setahoon

f.6,-. Kabrnten pambalin eraken tidak baroesabh dn bertam-bnh lagi roepn2 pambajnen pada Gemoento Ann.

Onderafdeeling Renten, toboean eraken setiap tahoon f.6,-.Ka-brnten boerapa tahoon, tambah doon hari toeroen dn gorobag serta sapi pmoenda dipken lagi 2 hari ngnt hntoe, tidak dapt bnjnen.

Onderafdeeling Kaloen (Tandjoeng) toboean eraken setahoon f.

6,-. Onderafdeeling Kndangn toboean eraken setahoon f.6,-
ontongkn boeroengn djalmkn soedih toeroen doeloe f.15,- so
karrng f.6,50 entoe kiloator.

Onderafdeeling Martapoorn, toboean eraken antoe tahoon f.6,-

Onderafdeeling Moern Towe, toboean eraken antoe tahoon f.5,-

Onderafdeeling.....

Onderafdeeling Koewala Kapoera, moohon ditotapkan f.4,- sama seperti tahun 1921, 1922. Karena pekerjaan tidak bertambah, sekolar pekerjaan hanya sahaja memelihara antara dengan sebuahh Bageranachine, dan moohon soepnja wang tambahan orokan f.0,40 boewat lampanghoof di tjabaot, karena pembokel soodoh dapat f.0,75 (wang tigtali) dan dapat djoega Collecteloon an dari pembajaran orokan dan Collecteloon dari pembajaran pi djnk. District Kahjara Ilir moohon wang f.1,50 pembajaran wang djoeng ditjabaot, karena tidak wadjib dipoengoot, lantaran Ka la District dan p.t. Controleur soodoh dapat roeknaton. Moohon djoega antara (Kanal), Kalampun dan Serapat (Kanal) dipoengoot tjookol ootook kas Hegeri pada sipa djoega jang lewat, soepnja dapatlah mengontangkan pembollan Hearendionst, pemeliharaan antara dan memodahkan oeroesan Hegeri. Moohon djoega soepnja wang orokan jang dooloe dipakai memboli Motor "Acronut" dan wang orokan jang dikasih pada kas Bandjag masin ditotapkan kasbri pada kas Hegeri Koewala Kapoera. Moohon djoega soepnja wang kooli transport tahun 1928 mandat jang soodoh didapat mandantnja dari Departement Financien soepnja soera dibayar pada kooli transport jang baroe tahun. Onderafdeeling Boentok moohon wang djoembatan f.0,50 ditjabaot jang dipoengoot djoega oleh Kepala Kampang f.1,-soering. Moohon orokan bekajoeh pembakri atawah ganti wang f.2,50 soering ditjabaot, karena kajat soodoh diwadjabkan bajar Hearendionst f.6,92. Wang djoega f.1,- dan pembokel soodoh dapat wang f.0,75 dan 8. Collecteloon wang padjak. Moohon soepnja kooli transport bekajoeh padooka Soewin Gezaghobber dan Kiri ditjabaot, karena tidak dapat bajaran, dan Am tararen ini masing2 soodoh dapat roeknaton, tabahan peola tobosan orokan tahunna dipoengoot djoega. Moohon di District Deseon Barut, tidak dipoengoot wang Doering tahun f.0,50, karena Deang bolon diadatkan dan tidak pernah diadatkan dihoeloenja. Sarekat Islam Koewala Kapoera dan Bandjermasin moohon soepnja Goeroe2 Agama dan Goeroe2 di Sekolah Islam, Chatib, Bilal, Kacem, dibebaskan dari toentoetan Hearendionst, saroeapa kobogan dan Goeroe2 Agama Kristen, Panjehar Inajil, Kepala Djomant dan Goeroe2 Particulier Zondingschool.

ONDERWIJS :

Pakta Djink Koewala Kapoera, menoeoret soerat p.t. Directeure Onderwijs nd. :
Moohon soera diroegerahkan sekolah Hol. Ind. School di Koewala Kapoera ibukota jang toerottan di Tanah Djink, pondodook nali Borneo. Bangsa Djink balika bagai haroka bolon ada sokolah H.I.S. Sarekat Islam Koewala Kapoera moohon soepnja diadatkan sekolah Gouvernement Klas. II di desa2 jang rami dan banjak anak2.
Moohon djoega soepnja Sekolah Islam diberi Subsidio. Sarekat Islam Maru Bahari moohon subsidio, ootook membikin saru-soera dan Masjid2.
Sarekat Islam Anontai, moohon soepnja soera diadatkan pada tempat-tempat jang rami Sekolah Istri dengan memakai Goeroe2 fihak Istri djoega jang berdiplom.

PENDAPATAN CONGRES :

Soesongsoehja amat kesoerangan Sekolah H.I.S. di Karosidaman Borneo Selatan jang loewas ini. dan Sekolah H.I.S. jang ada di Bandjermasin dan Sangarong (Samrinda), tidaklah montjoekoopi Borneo sekarang broes dan bardahaga kepada pangdjaran2 sokolah diadatkan kodengaran atapnja pondodook hal ichwal ko-koerangan Onderwijs H.I.S.
Demikian pendidikan fihak Istri di Borneo ini sekalipon tidak diperhatikan.

KESIMPULAN.....

KESUBHATAN :

Ranjat Koewala Apoono Onderafdeeling Beneden Dajak dan Onderafdeeling Marabahan mochon soepnja didadekan entoe Doctor Hindoe bentampat di Benajormasin, oentoek pergi seboelon sokali ko Koewala Apoono, Mandamoi, Marabahan dan Martapoera pada hari jang ditotapkan, memerikaen orang jang sakit dan istri2 jang hamil hampir beranak serta obat2 jang seperlaoenja bisa tersedia dibeli pada Kantor obat masing2 Kepala Pemerintah daerah. Permoohonan ini berhooboen dengan kososohanu jang beloe segala orang jang sakit, dan sakit pajeh, serta ponja - kit monolek, beloe beberapa hari mesti pergi ko Benajormasin barobot djengen memekni ongkoat besar. Beroi orang mlek nawa penghidoean sederhana tidaklah meroka mampoe datang, so binggo tinggal menanggroe sakit sabaaja dalam rumahnja. Ranjat Onderafdeeling Kota Waringin, mochon diadnkan spciaal Doctor di sana, karena kedodoeken tempat djeroeh dari B'masin.

LANDJOUR :

S.I. Marabahan mochon soepnja dimadjoeken portamen di Borneo, dengan mengadakan pemeriksaan tanah jang baroona, diperlakoe kan tiap tahun sokali oleh orang pandai (lingineur). Sei Bondon dan Marabahan soedah beberapa poeloeh tahun portamen sering mengeloewarkan padi benjak, dan diadjoen diadkan daerah, tetapi atoean jang mameerna tentang portamen ini boloea taratoer, sakoer monoeot tjaraenja orang tani jang tidak terpelodjer.

Ranjat Moerae Tera Onderafdeeling Borneo Tengah, merna ko - bentan tentang peramitean orang2 asing maboeko tanah tambang concessie Arang Batoo di daerah Borneo Tengah, disebabkan tempat2 jang diadnkan orang asing itoe, apabila diadnkan, roe anklah peroeahan hidoep ranjat, maboeko tambang arang sendiri dan maboekanu temenan lain2 (berladang berkebun rubber dan li. oesaha mamatoeng krjoe jang baroona).

Ranjat kga. tjaraenja Onderafdeeling Martapoera mochon mnggali intan f.l. - seboelon tidak teritoeng masek poengoean - mnggali pada waktu nentjoetji batoo jang diperoleh itoe. Penggalan Rantjah Berang jang dipogang oleh t.H. Christoffel jaitoe Rantjah Berang I, II, III dan IV, manakala soedah dja - toeh dijuvencensienja, hendaklah dipoolangkan kapada ehk ranjat disebabkan dari masa dahoeloenja disitoe ranjat bekerdja berat mentjari nafkalmja.

DABRAH LAMENUTAHAN :

S.I. Marabahan sembahkan permoohonan pendodoek kaupong Sei Se laiden kaupong Kridan daerah Onderafdeeling Rantan, kodoen kaupong itoe berdekatan sokali dengan tempat kedodoeken Hooz van Plantsoeljk Bestuur Marabahan. Oentoek monodahkan oeroeg dan Bestuur dan Kopelition, serta tidak membaratkan ongkoat dan hilangnya tempo bekerdja fihak ranjat, meroka mochon soepnja doon kaupong itoe terpadah masek daerah Onderafdeeling Marabahan.

PERMOHOHAN DAKTARAH :

Ranjat District Margasari Onderafdeeling Bentan mochon sabnag - len dari pemboengkoan garam dibeli dari pekerdjaan ranjat Margasari, seperti pernah telah kadjadien dahoelo. Kandjeng Gouvernment mambeli Bakool (pemboengkoan garam) di Margasari. Karena pekerdjaan ini jang mendjadi pekot taratoer bagi panti - harden hidoep ranjat Margasari.

Permoohonan ranjat Margasari soepnja Annamoe2 djalanen tidak lagi disarehkan pada bangas nalog (Tiong-Hoa), karena wang pa -

holian

bolien hoerendienst jang dipanggot dari ranjat itoe oontok
 pekerdjam djalanen publick. Sokirinja di djatohkan kembali
 kapada asal negeri asalnya, tjokooplah kesenangan bagi or-
 rang Tionghoe mendjajeni djalanen jang dikardjaken oleh anak
 negeri. Afdoeling landbouw djoewapoen di djoewal Annam pada
 orang China. Pembiliran djembelan dan kacang di Kowale Apog
 na demikian djoewapoen belnja.
 Permohonan R. S. Harbunan, toentoean hoerommen bagi pengun-
 djoran ranjat hoerommen dengan toentoean kacang bang-
 saan atau bawahan dengan orang hoerommen bangsan Maropah.
 Permohonan R. S. Harbunan :
 Hoerommen djalanen dan djembelan jang readek dioganap
 kemping harbunan diperbaiki denganwong hoerendienst dan mo-
 hon soepaja djalanen ke Mangsari Tite jang teroea kalampong
 Sei Selai dan Seliden diperbaiki kembali; amat bergeceha bagi
 publick orang dagang dan pengi beraweh.

PADA K. TOWAN :

Ranjat Underfiedling Marbopoe dan Underfiedling Bantou,
 kembang hai pengi readek, kacang jang djembelan, karena roo-
 maha jang dilata ketjil ini kempoen besar dan begoe2 tidak
 dapat anggoen semnja, karena sipangewa tidak ada.

Salinan Motie National Borneo Congres
 di Bandjarmasin, tanggal 14 s.d. 16 April 1923.
 (Sumber: Sjamsuddin "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan
 Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942",
 Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam,
 Banjarmasin, 1970).

N A T I O N A L B O R N E O C O N F E R E N T I E
M A ' L O E M A T .

Salam dan bahagian 1
Apabila memperhatikannya dengan seonggoch2 segala kejadian
an pada beberapa tahun yang noher2 ini, terkandunglah kita De
nia pergerakan ra'jat ditengah Hindia Netherland sangat lama
dan tambah hari tambah poola ala pergerakan kita ra'jat dja
dijahan ber-potjnh2an, hingga ter-banjng2 so-akna2 berkobar di
antara potjnhan partij kita sama kita itoa pemoesoehan jng
berarti menabab kolaborasi atas masing2 partij dalam pimpinan
pergerakan ra'jat kita.

Karena itoa pasti kiranya seseorang jani kita jng ber-
prasann moesin, tjinta bngan dan tjinta tmah ajer senanti
na tergoada dalam diri masing2 kita seotoc portnjans
"Apakah djadnja kita ra'jat djika hal tersoeot beri akoe to
roes-monoreoe ? Djawapn tida lain, hnjn, roesak kita, roesoech
kita, lonjap kita dari pete Doenia kemoesieran."

Meskipun pergerakan kita ra'jat Doemo downen ini ti-
dak kodjadin senanti tersoeot tetapi pada masa jng noher
ini terbanjng2 djoega alam jng boleh menggoedjngkan pi -
kirn kita, sehingga inilah terbit daja oepnja fihk kita S.I
Bandjarnasin dan Perseroekatan Dnjak, bemoesjnwant mmoent
pandjangan sekiranya tidak ketocolarn bnhja jng mant sangt
dinas diri masing2 partij kita Doemo. Daja oepnja tersoeot
dapatlah dengan langoeng pada hari minggu tt. 17 Februari-
1924, Combinatie vergadering kepala2 groep dan S.I. Bandjarn
sin serta oetoesan loerd2 S.I. di Res. Z.O. Afdeeling van Bo
noe. Soedah mmoetoeskan pendirian Sub Comite oetock pandir
rin National Borneo Conferentie (tempat pemoesjnwantn per
oetoesan persann bngan kita ra'jat Borneo).

Dipoetoeskan mandjndi Voorloopig Bestuur Comite Toem2
Housman Baboe Voorzitter.
Hndji Mohamad Azip Vice Voorzitter.
Mohamad Herman lo. Secretaris.
Dardjnd 2o. Secretaris.
M. Abdoelkarim Coningmeester.
Loei Knnis Adviseur.
H.M. Jassin Adviseur.
Haejin Gimmarsia Elvorv. Voorzitter.
M. Amin Comissaris President S.I. Koonle Kapoes.
H.M. Hamid " " " " Korbahlan.
M. Darang " " " " Moera Towel.
Goeoep " " " " Margenari.
H.M. Saman " " " " Kendingan.
H.M. Noor " " " " Enloen.
H.M. Sabrie " " " " Samarinda.
Daarng Sawndl Oetoesan S.I. Doetock (Doemoen Baget).
F. Goeoeng Oetoesan S.I. Doemoen Timur.
H. Hassen President S.I. Kota Daroe.

Comite H.B.C. telah menetapkan pendirian H.B.C. berlie
koe dan bemoesjnwant terboeka oemoen moanki tempo doea ma-
lam lannja jani i

a. Hari Minggu tanggal 29 - 30 Maart 1924 dari dja
8 hingga dja 12 Combinatie Vergadering Bestuur dan segala -
partij perseroekatan Doempooten bartoempat di Club Tjnhjntas
b. Hari Minggu tanggal 30 Maart 1924 dari dja 9 hing
ga dja 1 siang Openbare Vergadering menetapkan Bestuur dan
pembekaan H.B.C. dan lina2 jng dirasa perloe bartoempat di-
gedong Tjnhjn Tatas.

c. Hari Senin.....

o. Malam Senin tanggal 30/31 Maret 1924 dari djum 6 hing-
ga 11 Openbaar Vergadering: monition dan monitionnieren sekalis-
m voorstel2 jang dipersorah dan dibooke oomoom oleh masing2 g
partij perhimpunan dan dari sinja djoeponen bortempat digodon
Tjinhja Tinta.

Hari Senin tt.31 Maret 1924 dari djum 9 hingga djum 1 -
siang Openbaar Vergadering berhooboen dengan pembittjaraan
voorstel2 serta bermoesjawarat monetipken kopotooan2 dan di-
booke oomoom.

Selain isi program dan Organisatie H.B.C. ini boleh da-
obah dan ditambah apa jang dirasa perlu oleh permoesjawaraten
bersama.

MAKSOD.

H.B.C. beraksoed monjadi tempat permoesjawaraten dari
sekaliin ra'jat Borneo berdoedook dikota Bandjermasin dalam ka-
residennan sobeloh Selatan dan Timoor poolou Borneo. Jang akan
mengadiken permoesjawaraten boer (Conferentie) saban tahun, di-
mana akan berhadir sekaliin ra'jat dan pemimpin perkoempoelan
ra'jat djandjahan dalam kapoolnan Borneo. Begitoe djoean akan 4
di-torima pembittjara dalam Conferentie sekaliin mareka jang mo
monjotoedjoei dan hendak monoadjeng komadjoen Borneo dan ra'
jat dengan djalan jang patoot.

PROGRAM.

Jang akan dibittjareken dan dihoctiaken :

1. Soepaja tiap orang ra'jat Borneo terbangoen nafsoenja akan
montjintai bongan dan tanah airnja, tjita2 mana mambawa bagd
kita ra'jat montjintai kamardikan Hindia bersaman2 dengan
djalan jang patoot.
2. Soepaja tiap2 orang ra'jat Borneo inajaf dan mongetahoei ap-
pa-apa jang berloek atoe bongan dan tanah airnja dan apa2
jang soedeh dan jang akan tamjadi oleh peredaren zaman.
3. Soepaja tiap ra'jat Borneo mongetahoei dan monooliken kopg
da sekaliin bongan sendiri, jang telah benjak barboet dja-
sa dan kobadjiken kepada tanah airnja ditzaman dehoeloe dan
dan ditzaman ini (diperingat).
4. Soepaja tiap2 ra'jat Borneo monooliken kepada sekaliin per-
bantuan2, baik beroepa bunda, baik beroepa atoeoran dari
bongan sendiri ditzaman dehoeloe dan sekarang ditzaman mone-
tjoeliken igana.
5. Soepaja tiap2 ra'jat Borneo berhoctie dan bekerdja oentoek
montjapai kamadjoen dan ketinggian oenaruk bongan dan ta-
nah airnja kita Borneo dalam hal Onderwijze, penghoeloen, po-
litiek, kesopanan, dan kamardikan bongan Borneo.
6. Berhoctie bersaman2 dengan djalan perantoon monoadjeng na-
tas National Indische Congres jang akan diadiken kalak di
Soerabaja.

ORGANISATIE.

- a. Sebagaimana tersoeboet diatas maka Conferentie itoe akan di-
dilakoean saban tahun, pertama kali diadjoeken dalam kota
Bandjermasin pada tanggal2 tab. dan lain kali dijkilau perlu
akan diadiken dilain tempat dalam poolou Borneo ini oompan-
nja di Samarinda, Kendungan atau lain tempat.
Sekoerangnja apat poolou hari, sobeloan Conferentie han-
dalah anggoewota H.B.C. mengibarkan oirauling dan program
kopada sekaliin Bestuur perkoempoelan ra'jat di Borneo, dan
mengiinken oondengan kopada sekaliin jang monjotoe-
djoei kamadjoen ra'jat Borneo, soepaja mareka apat baroe-
djine dan bermoesikat lebih dehoeloe dengan anggoewota per-
koempoelanjan ra'jat ditzamanja apa2 jang akan diadjoeg-
ken dalam Conferentie tadi.

b. Dengan djalan.....

b. Dengan alasan jang patot dan tida maroosak kotertiban oomom, Conferentie akan mempertahankan segala apa jang dikira maroosak, membahagi kormann hidoop rajjat Borneo. Binja Conferentie itoe hanja terdapat dari deran goeloeng an perhimpunan di Borneo sarta soedoes dan toern2 jang soedi menjotoedjoel maked kani ini. Oleh sebab jang teras boot diatas ini kami berhasas soepaja sokalian Bestuur dan perkoempoelan rajjat di Zuidoe en Oosterschooling van Borneo dan sokalian maroka jang menjotoedjoel komandjoem rajjat Borneo soedi poela mengambil tahoe dan soedilah kirangnja datang menhadiri Conferentie:

"NATIONAL BORNEO CONFERENCE",
pada tanggal 30t/m31 Maret 1924 dikota Brndjermasin, jang tersoboot diatas.

Brndjermasin, 17 Februari 1924.

Wassalam dan bahagia,
Voorloopig Sub Comité
National Borneo Conferentie

Voorzitter Hoesman Baboe,
Vice Voorzitter H.M. Arip
Secretaris M. Hoernan.

Salinan Ma'loemat National Borneo Conferentie, tanggal 17 Februari 1924. (Sumber: Sjamsuddin "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1970).

Lampiran 3

MOTIE

CONGRES MOESJAWARATOETTHALIBIN KE IV

(Jang terlangsoeng di Balikpapan dari 7 sampai 12 Mei 1938)

Setelah memperhatikan kedjadian2 jang sangat bertentangan dengan Hoekoem Agama Islam dan amat meloekai perasaan kaoem Moeslimin Oemoemnja oempama:

1e. Pemotongan binatang2 boeat 'AQIQAHA dan QOERBAN dikenalkan poengoetan bea oleh Pemerintah.

2e. Kerap kali terdjadi penghinaan terhadap agama Islam.

Maka Congres ini menimbang dengan seksama dan memoetoeskan dengan secara boelat, memohon dengan hormat dan sangat kepada pemerintah Agoeng agar sopeja:

1e. Bea pemotongan binatang boeat Aqiqah dan Qoerban itoe soepaya dibebaskan.

2e. Oerang jang menghina agama Islam itoe, soepaja ditoentoet dan dihoekoem oleh pemerintah dengan tidak pandang memandang.

3e. Akan meminta, menjampaikan permintaan ini kepada: 1. Pemerintah. 2. Kantor voor Moehammadensch Zaken. 3. Wakil kita di Volksraad dan 4. Pers Indonesia.

Atas nama Congres Moesjawaratoethalibin
ke IV di Balikpapan.

Ketoea

Penoelis

ttd

ttd

Mohammad Arsjad

Ahmad Abbas

Tjatatatan: Motie ini ditanda tangani oleh wakil2 dari:

1. Alabio

2. Sanga2

3. Samarinda

4. Kalua

5. Tembilan

6. Amoentai

7. Balikpapan

8. Sapat

9. Kadangah

10. Barabai

Salinan Motie Congres Moesjawaratoethalibin IV.
(Sumber: M.Nur Maksum, dkk. "Musyawaratutthalibin:
Organisasi Islam Lokal Terbesar di Kalimantan Selatan Pada
Masa Kebangkitan Nasional", Balai Penelitian IAIN Antasari,
Banjarmasin, 1991)

Lampiran 4

M O T I E

Conferentie Oemat Islam jang ke I dari Selatan dan Timoer poelae Kalimantan tanggal 24/25 - 26 - 27 Juni 1938 di Kandangan dan dihadiri oleh segenap oetoesan dari berbagai tempat jaitoe : dari golongan Moesjawaratthalibin, Moehammadijah, Assiratal Moestaqin, Nahdatoel Oelama, dll.

Memperhatian

Bahwa timboelnja beberapa penghinaan terhadap Islam baik jang beroepa boekoe ataoe jang beroepa gambar, ataoe jang beroepa soerat2 kabar ataoe jang beroepa pidato seperti boekoe Toen en NU, Landen en Volken, Madjalah Bangoen.

Menimbang

Bahwa penoelisan2 itoe adalah amay menjakitikan hati dan menoesoek perasaan oemat islam rata2.

Bahwa pemerintah dinegeri ini jang berahaloean netral dalam agama senantiasa bersedia akan melindoengi kesoetjian sesoeatoe agama ra'jatnja dengan djalan menjingkirkan segala boekoe2, madajalah2 dan lain2 jang menjinggoeng kesoetjian sesoeatoe agama.

Memoetoeskan

a. Memohon kepada pemerintah soepaja bokeoe2 jang menghina agama islam teroetama boekoe Toen en NU dan jang lainnja soepaja dilarang penjiarannja dan dibeslag.

b. Soepaja sipengarang dari boekoe2 jang menghina Islam itoe ditoentoet oleh pemerintah dan didjalankan hoekoeman atasnja.

c. Mengadjak akan oemat Islam seloeroehnja soepaja siap dan bersedia senantias a oentoek mempertahankan kesoetjian agamanja dengan djalan protes dan segala djalan jang moengkin.

d. Menjampaikan motie ini kepada pemerintah, kepada anggota2 Volksraad jang berhoeboeng rapat dengan soal ini dan menjiaarkannja dengan perantaraan pers seloeroeh Indonesia.

Atas Nama Conferentie Oemat Islam
ke I daerah Selatan dan Timoer
Kalimantan di Kandangan.

Penoelis

Ketoea

Salinan Motie Conferentie Oemat Islam I
(Sumber: M.Nur Maksum, dkk. "Musyawaratutthalibin:
Organisasi Islam Lokal Terbesar di Kalimantan Selatan Pada
Masa Kebangkitan Nasional", Balai Penelitian IAIN Antasari,
Banjarmasin, 1991)

Biodata Penulis



Drs. H. Wajidi, M.Pd., lahir 15 Januari 1969 di Bulayak namun tercatat di Pagat Hulu Sungai Tengah, tempat ia dibesarkan. Pendidikan SDN Batu Benawa, SMPN Pagat, SMAN Barabai, S1 Pendidikan Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin, 1992 dan S2 Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2017 dengan tesis berjudul: Nasionalisme dan Revolusi Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1950. Mulai mengabdikan sebagai ASN TMT 1 Maret 1993 di Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2001 mutasi kerja ke Balitbangda Provinsi Kalsel, dan tahun 2003 menjadi peneliti sampai sekarang.

Mempublikasikan tulisan, antara lain di: Jurnal Amerta Puslit Arkeologi Nasional, Jurnal Jnana Budaya BPNB Bali-NTB-NTT, Jurnal Kebudayaan Puslitjakdikbud, Patanjala BPNB Bandung, Jurnal Patrawidya BPNB Yogyakarta, Jurnal penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional BPNB Bali-NTB-NTT, Jurnal kebijakan Pembangunan Balitbangda Provinsi Kalsel, Majalah Ilmiah Komunika LIPI, dan surat kabar Banjarmasin Post, Kalimantan Post, Radar Banjarmasin, Barito Post, Mata Banua, Serambi Ummah, Dinamika Berita, Buletin Bandar-masih, buletin Masa Depan, majalah Kebudayaan.

Menulis beberapa buku: *Peranan Pendidikan Islam Dalam Pergerakan Kebangsaan Di Kalimantan Selatan (Fasilitasi Penulisan Sejarah Direktorat Sejarah Ditjen Kebudayaan Kemdikbud, 2017)*, *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik (Pustaka Banua, 2007; diterbitkan kembali oleh Penerbit Ombak tahun 2015 dengan judul: Revolusi Kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945-1949)*, *Nasionalisme Indonesia di*

Kalimantan Selatan 1901-1942 (Pustaka Banua, 2007), Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950 (Debut Press, 2008), Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Sebuah Catatan Ringan (Debut Press, 2008), Artum Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan (Debut Press, 2008), Akulturasi Budaya Banjar di Banua Halat (Pustaka Book Publisher, 2012), Gerakan Tengkorak Putih Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950 (Pustaka Book Publisher, 2012).

Ia juga anggota tim penulis/editor buku: Sejarah Banjar (Balitbangda Kalsel, 2003, Ombak 2020), Urang Banjar dan Kebudayaannya (Balitbangda Kalsel, 2005, Ombak 2015), Model Arsitektur Keraton Banjar di Teluk Selong Ulu, Martapura (Pustaka Book Publisher, 2011), Model Arsitektur Keraton Banjar, Pendekatan Model Berdasar Kajian Historis dan Arkeologis (Pustaka Book Publisher, 2011), Muatan Lokal Kebudayaan Banjar (Disbudparpora Kalsel, 2011), Upacara Daur Hidup Masyarakat Suku Banjar di Kalimantan Selatan (STAIN Pontianak Press-BPNB, 2012), salah seorang penulis artikel buku bunga rampai: Merawat Adat, Memaknai Sejarah, Perkembangan dan Peradaban Adat Tradisi Banjar (UPT Taman Budaya-Pustaka Banua, 2013), dan bersama Hendraswati dan Zulfa Jamalie telah menulis dan menerbitkan buku: Peranan Qadhi Abdusshamad Dalam Penyebaran Islam Pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala (BPNB Pontianak, 2014), Ketua Tim Penulis Buku: Sejarah Gerakan Kepemudaan Di Kalimantan Selatan (Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalsel, 2018), Tim Penulis Buku Terima Kasih Untukmu Pahlawan Biografi 4 Pahlawan Nasional dari Kalimantan Selatan (Arti Bumi Intaran bekerjasama dengan DHD 45 Provinsi Kalsel, 2019), Anggota Tim Penyusun Buku Pangeran Hidayatullah Perjuangan Mangkubumi Kesultanan Banjarmasin (Arti Bumi Intaran bekerjasama dengan Balitbangda Provinsi Kalsel, 2020).

Pengalaman ilmiah, antara lain pemakalah (nara-sumber): “Seminar Nasional Kepahlawanan Abdoel Moeis Hassan” 2019 di Samarinda, Presenter In International Conference On Education Of Language, Literature And Arts In

Digital Era, Banjarmasin, 2018, Lawatan Sejarah Daerah di Kalimantan Selatan dari tahun 2011 s.d. 2019 di Banjarmasin, Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas) VIII di Kalimantan Selatan tahun 2010 di Banjarmasin, Presenter In International Seminar On Building Education Based And Nationalism Values Oktober 8th Banjarmasin, Seminar Bahasa dan Lokakarya Lembaga Adat se Indonesia di Jakarta tahun 2014 dan 2015.

Menerima sejumlah penghargaan, diantaranya: (1) Pemenang II LKTI Bidang Pendidikan Tingkat Universitas Lambung Mangkurat (dalam tim, 1991); (2) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Senimania Republika, penyelenggara Harian Republika Jakarta tahun 1994, judul tulisan: "*Format Kesenian Masyarakat Baru Indonesia: Industri Kesenian Muta-khir Berwawasan Budaya Bangsa*"; (3) Pemenang II LKT Tingkat Nasional Dwidawasarsa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari ibu Tien Soeharto 1995, judul tulisan: "*TMII: Industri Pariwisata Berwawasan Budaya Bangsa*"; (4) Pemenang I LKT Peringatan Hari AIDS Internasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2000, judul tulisan: "*Katakan Tidak Kepada AIDS*"; (5) Pemenang II Lomba Penulisan Artikel Tingkat Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 2003, judul tulisan: "*Pelayanan Prima, Harapan Publik*"; (6) Pemenang I Lomba Penulisan Jurnalistik Tingkat Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dari Mendiknas dan trophy langsung dari Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hari Anak Nasional 2005, judul tulisan: "*Pendidikan Anak Usia Dini, Pondasi Bagi Masa Depan Anak*"; (7) Pemenang III Lomba Penulisan Kebencanaan Tingkat Nasional kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mapiptek) BPPT, 2009, judul tulisan: "*Mengapa Kabut Asap Terus Terjadi?*". Menerima Piagam Penghargaan Anugerah Budaya dari Gubernur Kalimantan Selatan 2013, dan Anugerah Astaprana Bidang Sejarah Banjar dari Sultan Banjar 2014. Saran atau informasi dapat disampaikan melalui pos-el: wajidi.amberi@gmail.com.

Nasionalisme *Indonesia*

**DI KALIMANTAN SELATAN
1901-1942**

Di Djawa di kampung banjak sekolah matjam2, laki2 perempuan kerotjosan bisa basa Belanda-Inggeris. Di rumah kuting-kutingan koran di tangan. Djadi dalam hati saja, kalu sama bersekolah, tida ada lainnja Djawa sama Bandjar.

Sekarang Borneo mau madju, tapi bagaimana kalau sekolah sedikit. Tiap tahun banjak anak Bandjar tidak bisa dapat tempat di sekolah2. Pasal ini, anak Bandjar jang nekat2 dan sekolah tinggi djangan berdiam diri sadja, sunji burinik. Saja liat di Djawa jg djadi pengurus, semua orang Djawa jang pintar2; rakjat berdiri di belakang si pintar. Mustahil di Bandjar tida ada org pintar jg suka beraksi buat memadjukan negeri.

Lamun anak Bandjar jang berdiploma kagum, siapa lagi jg diharap2 buat ke muka. Orang kampung kebanyakan ada sadja hati mau turut madju, tetapi kepala kawan tida bergerak.

Adapun pasal meadakan sekolah perempuan, lamun orang besar tida lekas memulainja, kita kerdjakan sendiri. Orang kampung harus rami2 membantu uang derma dan jg pintar djadi pengurusnja. Dan lagi kalau les derma sudah didjalankan, diharap djuga saudagar2 Bandjar buka tangan, djangan engken mengeluarkan uang derma, sebab itu amal memadjukan bangsa sendiri kaum perempuan....

Amir Hasan Bondan, “Perasaan Bandjar Totok”, dalam majalah Malam Djoema'at, 24 November 1927, dimuat kembali dalam surat kabar Indonesia Merdeka, Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951, dengan judul “Pers Kalimantan”.



**GRAHA
CENDEKIA**

Diterbitkan Atas Kerjasama:
Dewan Harian Cabang Badan Penerus Pembudayaan Keuangan 45 (DHC 45)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Graha Cendekia

ISBN 978-602-1285-00-8



9 786021 285008